

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kendal, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki keunikan tersendiri sebagai wilayah yang menggabungkan pesona alam, budaya, dan sejarah. Secara geografis, Kendal membentang dari pegunungan hingga pesisir pantai Laut Jawa, memberikan potensi keindahan alam yang beragam. Kawasan seperti Pantai Sendang Sikucing, Curug Sewu, dan Agrowisata Ngebruk menjadi destinasi andalan. Selain itu, Kendal dikenal dengan kerajinan lokal seperti anyaman bambu dan batik khas yang memperlihatkan identitas budaya yang kuat.

Kabupaten Kendal memiliki potensi sektor unggulan sangat menjanjikan, terutama di sektor agribisnis dan industri. Pertanian padi, hortikultura, dan perikanan berkembang pesat di wilayah ini berkat dukungan alam dan sistem irigasi yang memadai. Di sektor industri, Kendal memiliki Kawasan Industri Kendal (KIK), sebuah kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Singapura, yang berkontribusi besar dalam meningkatkan investasi dan lapangan kerja. Dengan letak strategis yang dekat dengan Kota Semarang dan akses tol Trans Jawa, Kendal memiliki peluang besar untuk menjadi pusat perdagangan dan logistik yang kompetitif di Jawa Tengah.

Dari segi karakteristik, masyarakat Kendal terkenal dengan keramahan dan semangat gotong royong yang kuat. Nilai-nilai tradisional ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai kegiatan sosial. Kendal juga dikenal sebagai daerah dengan keberagaman agama dan suku, yang hidup berdampingan secara harmonis. Kehidupan masyarakatnya yang dinamis, ditambah dengan visi pembangunan yang berorientasi pada inovasi, menjadikan Kabupaten Kendal sebagai daerah yang tidak hanya mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga terus berkembang untuk menghadapi tantangan modern.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kendal difokuskan pada optimalisasi sektor unggulan, yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Sektor industri pengolahan akan ditingkatkan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, menarik investasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sektor pertanian akan didorong

melalui modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, dan pengembangan produk olahan. Sementara itu, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan meningkatkan infrastruktur, promosi, dan pengembangan destinasi wisata berbasis potensi alam dan budaya. Sinergi antar sektor ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal. Dengan perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dengan perencanaan yang baik dan tepat akan menjadi pedoman dalam mengatur strategi pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan dan kemajuan daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah Provinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai pasal 70 Bupati menetapkan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dilantik. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Kendal harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Kendal periode 2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD tahap ke 1 (pertama), yang mana RPJMD ini merupakan tahap awal dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dengan dilantiknya Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M sebagai Bupati dan H. Benny Karnadi S. Ag sebagai wakil Bupati, pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2025 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal periode 2025-2029 akan segera menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal sangat krusial karena dokumen ini akan menjadi landasan utama bagi arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen ini akan memuat strategi, kebijakan, dan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi daerah, dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Dengan adanya RPJMD yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kendal dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu *Teknokratik*, *Partisipatif*, *Politis*, *Atas-bawah dan bawah-atas*, *Holistik-tematik*, *Integratif*, *Spasial*. Kemudian dalam pelaksanaan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 memiliki beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir dan (6) penetapan. Dengan proses dan tahapan penyusunan RPJMD maka peran dan konsolidasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat penting dalam menyejahterakan masyarakat Kabupaten Kendal. RPJMD berfungsi sebagai panduan strategis yang mengarahkan pembangunan daerah selama lima tahun, memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dengan konsolidasi yang baik, RPJMD memastikan bahwa semua sektor pembangunan terintegrasi dan saling mendukung, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal secara menyeluruh.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun

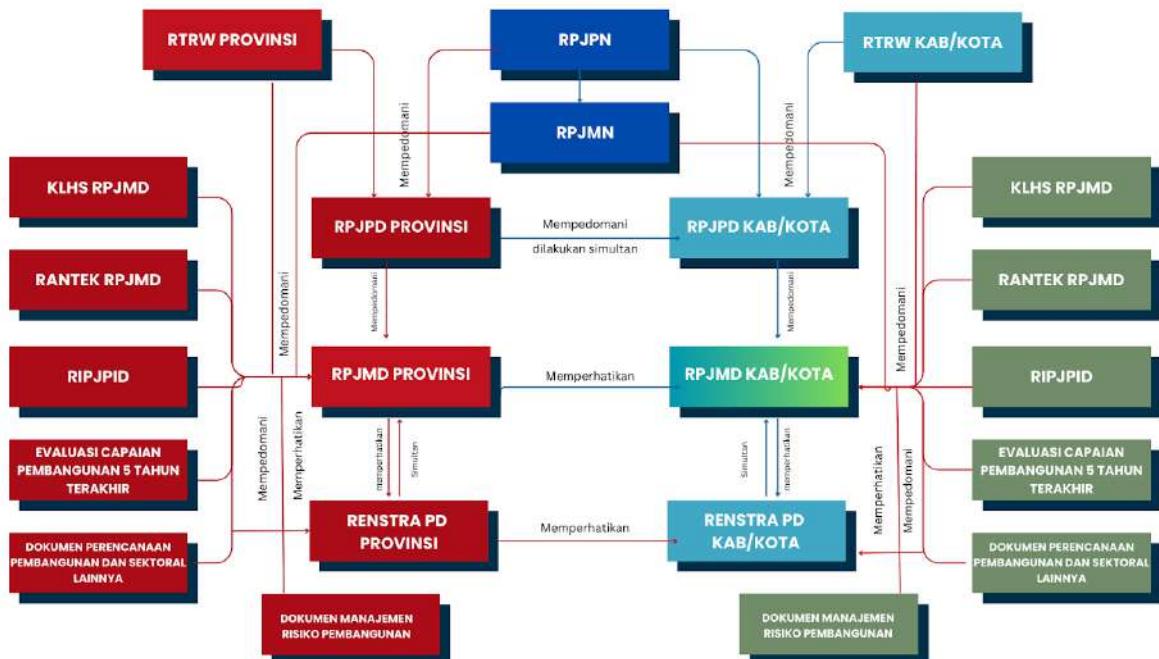
2011-2031;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lain pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Sinergitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar I.1.
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Berdasarkan gambar diatas:

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terletak pada keselarasan tujuan pembangunan nasional dan daerah. RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan di tingkat kabupaten berfungsi untuk mengakomodasi prioritas nasional dalam RPJMN, yang kemudian diimplementasikan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik dan kebutuhan masyarakat Kendal. Dalam RPJMN 2025-2029, fokus pada penguatan ekonomi berbasis wilayah, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan dapat diintegrasikan dalam program-program unggulan Kendal, seperti pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK), digitalisasi layanan publik, dan pengelolaan lingkungan pesisir yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Kendal juga menjadi alat untuk menerjemahkan agenda prioritas nasional ke dalam aksi lokal yang lebih kontekstual. Misalnya, jika RPJMN memprioritaskan pengurangan ketimpangan antarwilayah, Kendal dapat menyelaraskan melalui strategi pengembangan infrastruktur jalan penghubung desa-kota, pemerataan akses pendidikan, dan pemberdayaan UMKM di daerah pedesaan. Keselarasan ini memastikan bahwa program-program pembangunan di Kabupaten Kendal tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga mendukung pencapaian target nasional, menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah bentuk keterpaduan antara perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi yang saling mendukung dan memperkuat. RPJMD Kabupaten Kendal mengacu pada kebijakan dan prioritas yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah. Misalnya, jika RPJMD Jawa Tengah menekankan pada pengembangan infrastruktur transportasi yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa Tengah, Kabupaten Kendal dapat merencanakan pembangunan jalan dan akses transportasi yang mendukung konektivitas antarkabupaten serta mendukung program pengembangan kawasan industri di wilayahnya.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Kendal juga berperan sebagai implementasi lokal dari strategi yang lebih besar yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini, pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal menjadi prioritas yang sejalan dengan RPJMD provinsi. Sinergi antara RPJMD Kabupaten Kendal dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di kedua tingkat pemerintahan. Dengan adanya keselarasan ini, pembangunan di Kabupaten Kendal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi pembangunan provinsi secara keseluruhan.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 sangat penting dalam menciptakan kesinambungan dan arah pembangunan yang jelas bagi daerah ini. RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang berfungsi sebagai pedoman strategis untuk pembangunan Kabupaten Kendal selama 20 tahun ke depan, sementara RPJMD adalah penjabaran dari tujuan jangka panjang tersebut dalam rentang waktu lima tahun. RPJMD Tahun 2025-2029 akan merumuskan langkah-langkah konkret dan prioritas pembangunan yang mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar dalam RPJPD, seperti penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Dalam kaitannya, RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 harus sejalan dengan visi dan misi jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang. Dengan adanya keselarasan ini, RPJMD tidak hanya berfungsi untuk mencapainya dalam lima tahun, tetapi juga sebagai pijakan bagi pembangunan berkelanjutan yang akan diwujudkan dalam periode lebih panjang sesuai RPJPD.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 terletak pada keselarasan antara program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dengan kebijakan pengaturan penggunaan ruang yang tercantum dalam RTRW. RTRW adalah pedoman dalam mengatur tata ruang wilayah untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan, baik itu sektor infrastruktur, perumahan, perindustrian, maupun pertanian. RPJMD Kabupaten Kendal, yang merencanakan prioritas pembangunan selama lima tahun, harus memperhatikan arahan dan pembagian ruang yang telah digariskan dalam RTRW agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan lahan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Selain itu, RTRW juga berperan penting dalam memfasilitasi pencapaian tujuan RPJMD dengan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Dalam RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik harus mengacu pada zonasi yang ada dalam RTRW, untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tidak merusak ekosistem atau melanggar ketentuan peruntukan ruang. Jika RPJMD mencanangkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi atau pariwisata, maka kebijakan tata ruang dalam RTRW akan memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak mengganggu kawasan konservasi atau daerah yang memiliki nilai ekologis tinggi. Dengan demikian, hubungan antara RPJMD dan RTRW menciptakan keselarasan antara rencana pembangunan dan pengelolaan ruang wilayah yang berkelanjutan.

e. Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana RPJMD berfungsi sebagai payung hukum dan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun, sementara Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD dalam konteks tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah harus selaras dan konsisten dengan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga setiap perangkat daerah dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Kendal. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah menjadi instrumen penting dalam mengimplementasikan RPJMD dan memastikan bahwa setiap program pembangunan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terukur.

f. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di Kabupaten Kendal memiliki keterkaitan yang erat. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Sementara itu, RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD berisi program, kegiatan, lokasi, pagu indikatif, dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun berjalan. Dengan demikian, RKPD memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah setiap tahunnya tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga tujuan pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara efektif dan efisien

g. RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-RPJMD Kabupaten Kendal memiliki keterkaitan yang erat. KLHS-RPJMD merupakan instrumen penting yang memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. KLHS-RPJMD mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program dalam RPJMD, serta memberikan rekomendasi untuk mitigasi dan pengelolaan risiko lingkungan. Dengan demikian, KLHS-RPJMD membantu memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Kendal tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup.

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen strategis yang menjabarkan visi, misi, serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Dokumen ini bertujuan untuk mewujudkan arah pembangunan daerah yang terencana, terintegrasi, dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, serta selaras dengan rencana pembangunan tingkat provinsi dan nasional.

b. Tujuan

- 1) Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah RPJMD menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam strategi dan program pembangunan yang terukur.
- 2) Koordinasi dan Integrasi Pembangunan: RPJMD berfungsi sebagai alat koordinasi dan integrasi antar sektor pembangunan, memastikan bahwa semua program dan kegiatan saling mendukung.
- 3) Perencanaan Pembangunan yang Terarah: RPJMD memberikan arah dan panduan yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun.
- 4) Pengalokasian Sumber Daya yang Efektif: RPJMD membantu dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

- 5) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Tujuan akhir dari penyusunan RPJMD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan.
- 6) Keberlanjutan Pembangunan: RPJMD menjadi alat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- 7) Akuntabilitas dan Transparansi: RPJMD meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, karena memuat target dan indikator kinerja yang jelas.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi Kabupaten Kendal sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya adalah (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah. Bab ini juga memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah dalam mendukung pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Serta, menyajikan permasalahan serta isu pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kendal.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasaran. Serta, diuraikan strategi yang dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif. Serta, penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan pedoman transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Selain itu, diberikan panduan pelaksanaan RPJMD 2025-2029 agar tetap konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab Gambaran Umum Daerah merupakan bagian yang menyajikan tinjauan awal terhadap kondisi Kabupaten Kendal sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Dalam lima tahun terakhir, dinamika pembangunan di Kabupaten Kendal mencerminkan berbagai capaian maupun tantangan dalam aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Gambaran keuangan daerah selama periode tersebut juga menunjukkan kemampuan fiskal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan guna mendukung prioritas pembangunan. Di sisi lain, proyeksi kapasitas keuangan lima tahun ke depan menjadi penting untuk mengukur ruang fiskal dalam membiayai program strategis daerah secara berkelanjutan. Seiring dengan itu, berbagai permasalahan dan isu seperti kesenjangan pelayanan dasar, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta tantangan perubahan lingkungan dan sosial menjadi perhatian penting yang harus ditangani secara terpadu dan adaptif.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

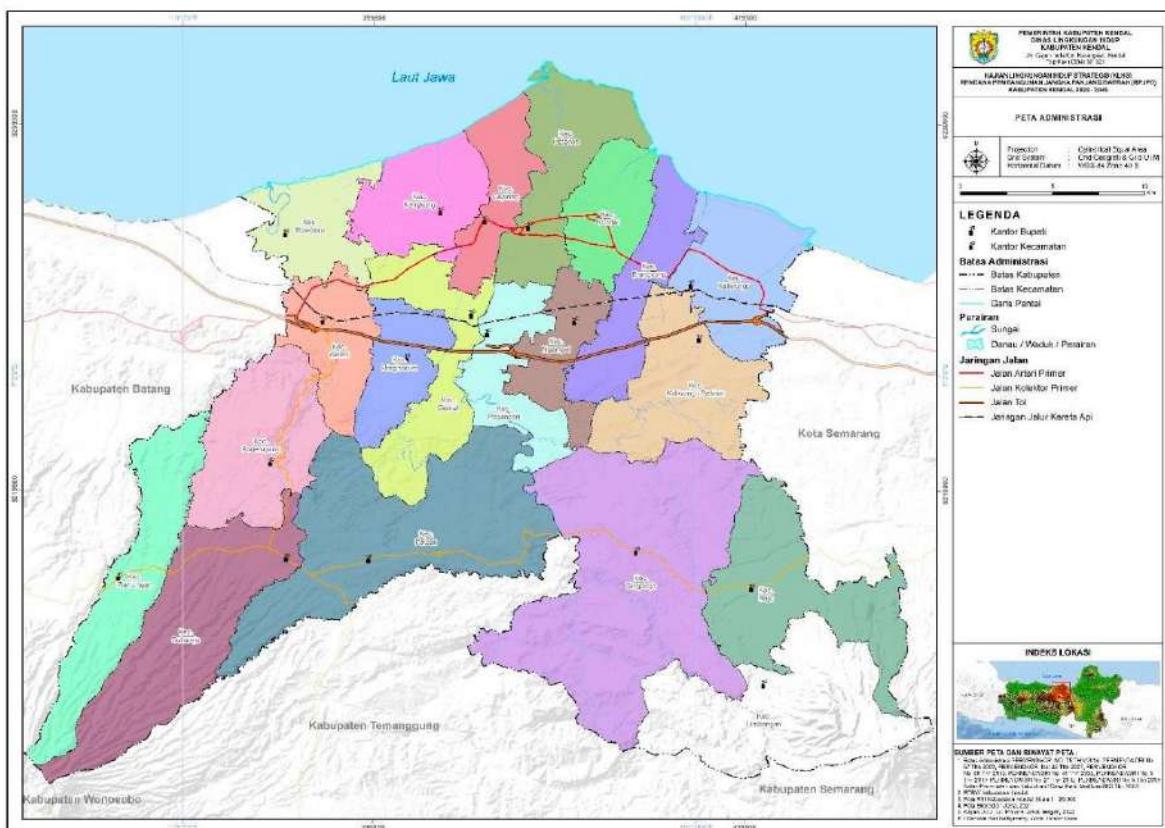
a. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar 1.005,86 Km². Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Wonosobo.

Jumlah kecamatan di Kabupaten Kendal sebanyak 20 (dua puluh) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 286 (dua ratus delapan puluh enam) yang terdiri 266 desa dan 20 kelurahan. Terdiri dari 1.164 dusun, 1.508 RW dan 6.590 RT. Adapun peta administrasi Kabupaten Kendal dapat terlihat sebagai berikut.

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Kendal



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kendal

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal terletak pada posisi geografis $109^{\circ}40'$ - $110^{\circ}18'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}32'$ - $7^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Kendal berada pada jalur penghubung Pulau Jawa bagian utara (PANTURA) sehingga posisinya menjadi sangat strategis. Selain itu juga Kabupaten Kendal letaknya berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah.

3. Topografi

Wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua bagian berupa (1) dataran rendah yaitu kawasan dataran rendah dan wilayah pesisir dan (2) daerah dataran perbukitan (kawasan pegunungan). Bagian utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–10-meter dpl, meliputi 12 kecamatan yaitu:

Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Kabupaten Kendal juga mempunyai pantai sepanjang 41,0 km², terbentang di 25 kelurahan/Desa. Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi/ pegunungan yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10–2.579 meter dpl, meliputi 8 kecamatan yaitu: Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo, dan Kaliwungu Selatan.

4. Geologi

Kondisi Geologi Kabupaten Kendal berdasarkan struktur geologinya terdiri atas dataran aluvial, perbukitan bergelombang, perbukitan berrelief sedang, plato dan tubuh gunung api.

- Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara meliputi wilayah Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, sebagian Kaliwungu, Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon dan Ngampel merupakan dataran aluvial dengan kemiringan antara 3-5 persen.
- Wilayah Kabupaten Kendal bagian tengah yang meliputi wilayah Kecamatan Pageruyung, Weleri, Ringinarum, dan Kaliwungu merupakan wilayah perbukitan bergelombang dengan kemiringan antara 3-10 persen, dan didominasi batu pasir, breksi, tufa, dan aliran lava.
- Wilayah Kabupaten Kendal bagian tengah yang meliputi Kecamatan Patean dan Singorojo merupakan daerah berrelief sedang dengan kemiringan 15-30 persen.
- Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan yang meliputi sebagian kecamatan Plantungan, Sukorejo, Patean, Limbangan, dan Boja merupakan plato dengan kemiringan lebih dari 30 persen.
- Wilayah selatan lain yang meliputi Kecamatan Limbangan merupakan tubuh gunung api dengan kemiringan 15-30 persen didominasi lava andesit basal dan bongkah vulkanik lahar.
- Wilayah selatan lain yang meliputi sebagian wilayah Limbangan dan Singorojo merupakan daerah perbukitan berrelief kasar dengan kemiringan antara 30-70 persen.

5. Hidrologi

Suplai air tanah maupun air tawar seluruhnya datang dari hujan yang berasal dari penguapan air laut, yang merupakan bagian dari proses siklus hidrologi. Hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah, sebagian menjadi air tanah yang mengisi aquifer (formasi tanah yang mengandung dan menghantarkan air tanah dan sebagian besar mengalir di permukaan sebagai run off, dalam kenyataannya siklus hidrologi ini sangat rumit meskipun pada dasarnya hidrologi adalah bagian dari ilmu bumi).

Namun kenyataannya hidrologi harus berhubungan dengan atmosfer sebagai medium yang meneruskan air ke muka bumi maupun dari muka bumi. Kabupaten Kendal memiliki sekitar 20 mata air dengan debit yang beranekaragam. Mata air yang ada tersebut pada umumnya terletak di Kecamatan Sukorejo, Plantungan, Singorojo, Limbangan, dan Patean.

Kabupaten Kendal termasuk dalam wilayah Sub DAS Bodri, Sub DAS Besar Pemali-Comal-Jratun-Seluna. Sungai-sungai yang mengalir sebagian besar hulunya masih di lingkup Kabupaten Kendal yaitu bagian tengah dan selatan. Secara umum, bagian tengah dan selatan Kabupaten Kendal merupakan daerah resapan air hujan yang diharapkan dapat mengisi akuifer yang berguna sebagai sumber air. Wilayah daerah Aliran Sungai Kabupaten Kendal itu sendiri dilalui oleh 10 sungai, antara lain kali Aji/slembang, kali waridin, kali glodog, kali blorong, kali kendal, kali buntu, kali bodri, kali blukar, kali bulanan/pening, dan kali kuto yang sebagian besar digunakan untuk sistem irigasi teknis persawahan dan Perkebunan.

6. Klimatologi

Kondisi klimatologi Kabupaten Kendal sepanjang tahun 2023, mengalami curah hujan terbesar di Bulan Desember yang tercatat 297,70 mm, sementara hari hujan terbanyak terjadi di Bulan Februari sebanyak 25 hari. Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Kendal termasuk dalam kategori menengah. Curah hujan berubah secara drastis secara langsung dapat mengakibatkan penjenuhan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Tanah yang lama kering kemudian diguyur hujan menerus, sehingga rentan mengalami pergerakan tanah atau longsor.

Suhu minimum di Kabupaten Kendal sepanjang tahun 2023 terjadi pada bulan Januari ($21,00^{\circ}\text{C}$) dan suhu maksimum terjadi pada Bulan Oktober ($38,80^{\circ}\text{C}$). Rata-rata suhu udara pada tahun 2023 sekitar $27,60\text{-}31,80^{\circ}\text{C}$. Kelembaban minimum terjadi di bulan Oktober, (27,00%) dan kelembaban maksimum terjadi di bulan Agustus (99,0%). Rata-rata kelembaban di Kabupaten Kendal sepanjang tahun 2023 sekitar 61,50% - 83,90%.

b. Pengembangan Wilayah

Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 memiliki arah pengembangan sebagai berikut:

a. Rencana Struktur Ruang

a. Sistem perkotaan

Perwujudan sistem perkotaan meliputi:

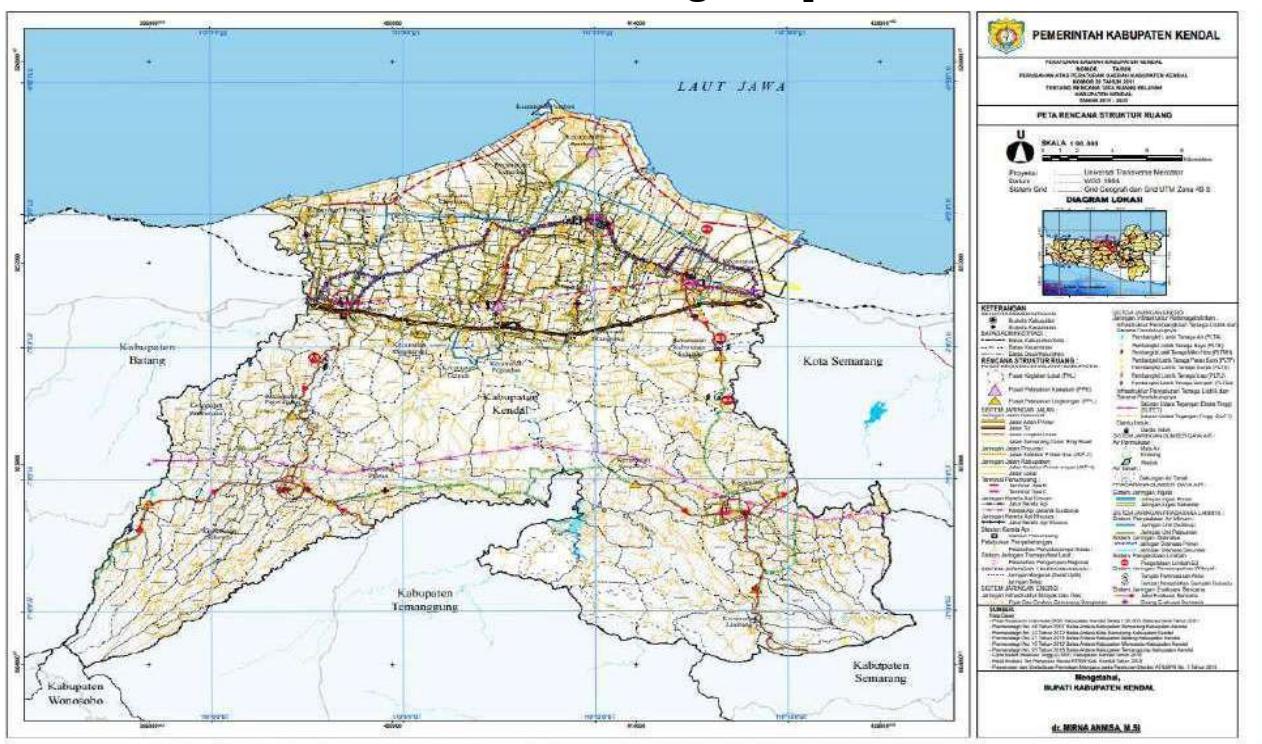
- a) Penetapan hierarki pusat pelayanan;
- b) Pengembangan sistem pusat pelayanan;
- c) Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.

b. Sistem jaringan prasarana

Perwujudan sistem jaringan prasarana meliputi :

- d) Perwujudan sistem jaringan transportasi;
- e) Perwujudan sistem jaringan energi;
- f) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- g) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- h) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya

Gambar II.2
Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Kendal



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031

b. Rencana Pola Ruang

a. Kawasan peruntukan lindung;

Kawasan peruntukan lindung terdiri atas :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas :

- a) Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.706 (seribu tujuh ratus enam) hektar meliputi :
 - (1) sebagian Kecamatan Limbangan;
 - (2) sebagian Kecamatan Boja;
 - (3) sebagian Kecamatan Plantungan;
 - (4) sebagian Kecamatan Sukorejo

- b) Kawasan resapan air meliputi :

- (1) sebagian Kecamatan Limbangan;
 - (2) sebagian Kecamatan Boja;
 - (3) sebagian Kecamatan Singorojo;
 - (4) sebagian Kecamatan Patean;
 - (5) sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - (6) sebagian Kecamatan Plantungan;
 - (7) sebagian Kecamatan Pageruyung.

2. Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

- a) Kawasan sempadan pantai dengan luas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar meliputi :
 - (1) Kecamatan Rowosari;

- (2) Kecamatan Kangkung;
 - (3) Kecamatan Cepiring;
 - (4) Kecamatan Patebon;
 - (5) Kecamatan Kendal;
 - (6) Kecamatan Brangsong;
 - (7) Kecamatan Kaliwungu.
- b) Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 835 (delapan ratus tiga puluh lima) hektar meliputi:
- (1) Kecamatan Kendal;
 - (2) Kecamatan Weleri;
 - (3) Kecamatan Kaliwungu;
 - (4) Kecamatan Boja;
 - (5) Kecamatan Sukorejo;
 - (6) Kecamatan Pegandon;
 - (7) Kecamatan Cepiring;
 - (8) Kecamatan Patebon;
 - (9) Kecamatan Gemuh;
 - (10) Kecamatan Rowosari;
 - (11) Kecamatan Kangkung;
 - (12) Kecamatan Pageruyung
 - (13) Kecamatan Patean;
 - (14) Kecamatan Singorojo;
 - (15) Kecamatan Limbangan;
 - (16) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (17) Kecamatan Ringinarum;
 - (18) Kecamatan Ngampel;
 - (19) Kecamatan Brangsong;
 - (20) Kecamatan Plantungan
- c) Kawasan sekitar danau/ waduk/ embung dengan luas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Singorojo;
- d) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan termasuk di dalamnya hutan kota berfungsi untuk menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, mikrolimat, ekosistem, dan habitat fauna dengan luas kurang lebih 1.608 (seribu enam ratus delapan) hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan perkotaan.
- e) Kawasan sempadan rel kereta api dengan luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar meliputi:
- (1) Kecamatan Weleri;
 - (2) Kecamatan Ringinarum;
 - (3) Kecamatan Gemuh;
 - (4) Kecamatan Pegandon;
 - (5) Kecamatan Ngampel;
 - (6) Kecamatan Brangsong;
 - (7) Kecamatan Kaliwungu.
3. Kawasan konservasi;
- Kawasan konservasi berupa kawasan cagar alam Pagerwunung Darupono dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan.

4. Kawasan cagar budaya; Kawasan cagar budaya meliputi :
 - a) Situs seloarjuno berada di Kecamatan Limbangan
 - b) Tugu Gerbang Kabupaten Lama berada di Kecamatan Kaliwungu;
 - c) Tugu Gerbang Pasarean Berada di Kecamatan Kendal;
 - d) Candi Gunung Gentong berada di Kecamatan Limbangan.
5. Kawasan lindung geologi;
Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:
 - a) Kawasan imbuhan air berada di Cekungan Air Tanah (CAT) Kendal, Cekungan Air Tanah (CAT) Semarang – Demak, Cekungan Air Tanah (CAT) Subah dan Cekungan Air Tanah (CAT) Sumowono, yang meliputi:
 - (1) sebagian Kecamatan Weleri;
 - (2) sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - (3) sebagian Kecamatan Gemuh;
 - (4) sebagian Kecamatan Pegandon;
 - (5) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (6) sebagian Kecamatan Singorojo.
 - b) Kawasan sempadan mata air ditetapkan selebar 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air.
6. Kawasan rawan bencana;
Kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir meliputi:
 - (1) sebagian Kecamatan Brangsong;
 - (2) sebagian Kecamatan Cepiring;
 - (3) sebagian Kecamatan Gemuh;
 - (4) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - (5) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (6) sebagian Kecamatan Kangkung;
 - (7) sebagian Kecamatan Kendal;
 - (8) sebagian Kecamatan Ngampel;
 - (9) sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - (10) sebagian Kecamatan Patean;
 - (11) sebagian Kecamatan Patebon
 - (12) sebagian Kecamatan Pegandon;
 - (13) sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - (14) sebagian Kecamatan Rowosari;
 - (15) sebagian Kecamatan Boja; dan
 - (16) sebagian Kecamatan Weleri.
 - b) kawasan rawan bencana banjir bandang meliputi :
 - (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
 - (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
 - (3) sebagian Kecamatan Cepiring;
 - (4) sebagian Kecamatan Patebon;
 - (5) sebagian Kecamatan Kendal;
 - (6) sebagian Kecamatan Brangsong; dan
 - (7) sebagian Kecamatan Kaliwungu.

- c) kawasan rawan bencana kekeringan meliputi :
 - (1) Kecamatan Boja;
 - (2) Kecamatan Gemuh;
 - (3) Kecamatan Kaliwungu
 - (4) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (5) Kecamatan Limbangan;
 - (6) Kecamatan Pageruyung;
 - (7) Kecamatan Patean;
 - (8) Kecamatan Pegandon;
 - (9) Kecamatan Plantungan;
 - (10)Kecamatan Ringinarum;
 - (11)Kecamatan Singorojo;
 - (12)Kecamatan Sukorejo;
 - (13)Kecamatan Weleri;
 - (14)Kecamatan Brangsong;
 - (15)Kecamatan Ngampel;
 - (16)Kecamatan Rowosari;
 - (17)Kecamatan Kangkung;
 - (18)Kecamatan Cepiring;
 - (19)Kecamatan Patebon; dan
 - (20)Kecamatan Kendal.
- d) kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi :
 - (1) sebagian Kecamatan Pageruyung;
 - (2) sebagian Kecamatan Plantungan;
 - (3) sebagian Kecamatan Gemuh;
 - (4) sebagian Kecamatan Boja;
 - (5) sebagian Kecamatan Singorojo;
 - (6) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (7) sebagian Kecamatan Kaliwungu
 - (8) sebagian Kecamatan Singorojo;
 - (9) sebagian Kecamatan Limbangan; (10)sebagian Kecamatan Patean;
 - (10)sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - (11)sebagian Kecamatan Weleri;
 - (12)sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - (13)sebagian Kecamatan Pegandon; dan
 - (14)sebagian Kecamatan Ngampel.
- e) kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi meliputi:
 - (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
 - (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
 - (3) sebagian Kecamatan Cepiring;
 - (4) sebagian Kecamatan Patebon;
 - (5) sebagian Kecamatan Kendal;
 - (6) sebagian Kecamatan Brangsong; dan
 - (7) sebagian Kecamatan Kaliwungu.
- f) kawasan rawan bencana kebakaran hutan meliputi :
 - (1) sebagian Kecamatan Limbangan;

- (2) sebagian Kecamatan Sukorejo;
- (3) sebagian Kecamatan Plantungan;
- (4) sebagian Kecamatan Singorojo.
- (5) sebagian Kecamatan Limbangan;
- (6) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- (7) sebagian Kecamatan Ringinarum
- (8) sebagian Kecamatan Boja;
- (9) sebagian Kecamatan Pageruyung;
- (10) sebagian Kecamatan Kaliwungu
- (11) sebagian Kecamatan Gemuh; dan
- (12) sebagian Kecamatan Weleri.

7. Kawasan ekosistem mangrove.

- a) Kawasan ekosistem mangrove berupa kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar meliputi :
 - (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
 - (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
 - (3) sebagian Kecamatan Cepiring.
- b) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan pantai berhutan bakau yang selanjutnya disebut kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau.
- c) Kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau berada di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal dan Kecamatan Patebon seluas kurang lebih 552 (lima ratus lima puluh dua) hektar.
- d) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kawasan peruntukan budi daya.

Kawasan peruntukan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

1. Kawasan hutan produksi;

Kawasan hutan produksi terdiri atas :

- a) Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.193 (seribu seratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi :
 - (1) Kecamatan Limbangan;
 - (2) Kecamatan Sukorejo;
 - (3) Kecamatan Plantungan; dan
 - (4) Kecamatan Singorojo.
- b) Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 15.441 (lima belas ribu empat ratus empat puluh satu) hektar meliputi:
 - (1) Kecamatan Boja;
 - (2) Kecamatan Brangsong;
 - (3) Kecamatan Gemuh;
 - (4) Kecamatan Kaliwungu;

- (5) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- (6) Kecamatan Limbangan;
- (7) Kecamatan Ngampel;
- (8) Kecamatan Pageruyung;
- (9) Kecamatan Patean;
- (10) Kecamatan Pegandon;
- (11) Kecamatan Plantungan;
- (12) Kecamatan Ringinarum;
- (13) Kecamatan Singorojo;
- (14) Kecamatan Sukorejo; dan
- (15) Kecamatan Weleri.

2. Kawasan pertanian

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas :

- a) Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 25.213 (dua puluh lima ribu dua ratus tiga belas) hektar meliputi :
 - (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar meliputi:
 - (a) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar;
 - (b) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar; dan
 - (c) Lahan penunjang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar.
 - (2) Penunjang kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 213 (dua ratus tiga belas) hektar.

Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

- (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
- (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
- (3) sebagian Kecamatan Cepiring;
- (4) sebagian Kecamatan Patebon;
- (5) sebagian Kecamatan Kendal;
- (6) sebagian Kecamatan Brangsong;
- (7) sebagian Kecamatan Ngampel;
- (8) sebagian Kecamatan Pegandon;
- (9) sebagian Kecamatan Gemuh;
- (10) sebagian Kecamatan Weleri
- (11) sebagian Kecamatan Ringinarum;
- (12) sebagian Kecamatan Sukorejo;
- (13) sebagian Kecamatan Limbangan;
- (14) sebagian Kecamatan Singorojo;
- (15) sebagian Kecamatan Boja;
- (16) sebagian Kecamatan Paatean;
- (17) sebagian Kecamatan Plantungan;
- (18) sebagian kecamatan Kaliwungu Selatan;

(19) sebagian kecamatan Pageruyung.

- b) Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 16.303 (enam belas ribu tiga ratus tiga) hektar meliputi:
- (1) sebagian Kecamatan Rowosari;
 - (2) sebagian Kecamatan Kangkung;
 - (3) sebagian Kecamatan Cepiring;
 - (4) sebagian Kecamatan Patebon;
 - (5) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - (6) sebagian Kecamatan Brangsong
 - (7) sebagian Kecamatan Ngampel;
 - (8) sebagian Kecamatan Pegandon;
 - (9) sebagian Kecamatan Gemuh;
 - (10) sebagian Kecamatan Weleri;
 - (11) sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - (12) sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - (13) sebagian Kecamatan Limbangan;
 - (14) sebagian Kecamatan Singorojo;
 - (15) sebagian Kecamatan Boja;
 - (16) sebagian Kecamatan Patean;
 - (17) sebagian Kecamatan Plantungan;
 - (18) sebagian kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (19) sebagian kecamatan Pageruyung.
- c) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 13.844 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat) hektar meliputi:
- (1) sebagian Kecamatan Limbangan;
 - (2) sebagian Kecamatan Boja;
 - (3) sebagian Kecamatan Singorojo;
 - (4) sebagian Kecamatan Patean;
 - (5) sebagian Kecamatan Pageruyung;
 - (6) sebagian Kecamatan Plantungan;
 - (7) sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - (8) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - (9) sebagian Kecamatan Weleri;
 - (10) sebagian Kecamatan Gemuh;
 - (11) sebagian Kecamatan Pegandon; dan
 - (12) sebagian Kecamatan Ringinarum.
- d) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
- (1) sapi, kerbau dan kuda meliputi:
 - (a) Kecamatan Sukorejo;
 - (b) Kecamatan Pageruyung;
 - (c) Kecamatan Plantungan
 - (d) Kecamatan Patean;
 - (e) Kecamatan Singorojo;
 - (f) Kecamatan Limbangan;
 - (g) Kecamatan Boja.
 - (h) Kecamatan Kaliwungu Selatan
 - (i) Kecamatan Kaliwungu

- (j) Kecamatan Gemuh
 - (k) Kecamatan Pegandon
 - (l) Kecamatan Patebon
- (2) kambing, domba, itik, merpati dan ayam buras tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) kelinci meliputi:
- (a) Kecamatan Cepiring;
 - (b) Kecamatan Plantungan;
 - (c) Kecamatan Limbangan;
 - (d) Kecamatan Gemuh;
 - (e) Kecamatan Boja;
 - (f) Kecamatan Pageruyung;
 - (g) Kecamatan Pegandon;
 - (h) Kecamatan Kaliwungu;
 - (i) Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 - (j) Kecamatan Patean.
- (4) Ayam ras meliputi:
- (a) Kecamatan Pageruyung;
 - (b) Kecamatan Plantungan;
 - (c) Kecamatan Sukorejo;
 - (d) Kecamatan Patean;
 - (e) Kecamatan Singorojo;
 - (f) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (g) Kecamatan Limbangan;
 - (h) Kecamatan Boja;
 - (i) Kecamatan Pegandon; dan
 - (j) Kecamatan Gemuh

3. Kawasan perikanan;

Kawasan perikanan terdiri dari:

- a) Kawasan pengembangan perikanan tangkap terdiri dari :
 - (1) perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan pantai utara;
 - (2) perikanan tangkap di perairan umum yang memanfaatkan potensi waduk, rawa, sungai, dan embung.
- b) Kawasan pengembangan perikanan budidaya seluas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar terdiri dari:
 - (1) Kawasan pengembangan perikanan budidaya air tawar tersebar di seluruh kecamatan.
 - (2) Kawasan pengembangan perikanan budidaya air payau, sepanjang pesisir utara meliputi:
 - (a) Kecamatan Cepiring;
 - (b) Kecamatan Kangkung;
 - (c) Kecamatan Rowosari.

4. Kawasan pertambangan dan energi;

Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas :

- a) Kawasan pertambangan mineral terdiri atas:

- (1) Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi:
- (a) Kecamatan Pegandon;
 - (b) Kecamatan Weleri;
 - (c) Kecamatan Pageruyung;
 - (d) Kecamatan Patean;
 - (e) Kecamatan Sukorejo;
 - (f) Kecamatan Singorojo;
 - (g) sepanjang Sungai Bodri.
- (2) Kawasan pertambangan batuan, meliputi:
- (a) Kecamatan Kaliwungu Selatan
 - (b) Kecamatan Kaliwungu;
 - (c) Kecamatan Brangsong;
 - (d) Kecamatan Ngampel;
 - (e) Kecamatan Pegandon
 - (f) Kecamatan Weleri;
 - (g) Kecamatan Pageruyung;
 - (h) sepanjang Sungai Bodri.
- b) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berskala kecil berada di Kecamatan Gemuh.
- c) Kawasan panas bumi berada di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Gunung Ungaran dan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Dieng.
5. Kawasan peruntukan industri;
- Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
- a) Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 5.109 (lima ribu seratus sembilan) hektar berada di:
 - (1) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - (2) sebagian Kecamatan Brangsong;
 - (3) sebagian Kecamatan Kendal;
 - (4) sebagian Kecamatan Patebon.
 - b) Sentra industri kecil dan menengah berada di seluruh kecamatan.
6. kawasan pariwisata;
- Pengembangan kawasan pariwisata terdiri atas:
- a) Kawasan pariwisata budaya meliputi:
 - (1) Makam Pangeran Juminah dan Makam Sunan Katong berada di Kaliwungu Selatan;
 - (2) Makam Nyai Dapu dan Makam Sunan Bromo berada di Kecamatan Boja;
 - (3) Situs Batu Seloarjuno dan Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan;
 - (4) Goa Maria berada di Kecamatan Weleri.
 - (5) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
 - b) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- (1) Pantai Sendangkulon, Pantai Jungsemi, dan Pantai Tanjungmojo berada di Kecamatan Kangkung;
 - (2) Pantai Sendangsikucing berada di Kecamatan Rowosari
 - (3) Wana Wisata berada di Kecamatan Ringinarum;
 - (4) Curug Semawur, Tuk Air Hangat Tirtomoyo, dan Agrowisata Ngebruk berada di Kecamatan Patean;
 - (5) Goa Kiskendo dan Bendung Singorojo berada di Kecamatan Singorojo; dan
 - (6) Air Panas Gonoharjo, Goa Jepang, dan Air Terjun Panglebur gongso berada di Kecamatan Limbangan; dan
 - (7) Pantai Muara Kencan di Kecamatan Patebon.
 - (8) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
- c) Kawasan pariwisata buatan meliputi:
- (1) Plantera berada di Kecamatan Patean;
 - (2) Agrowisata Ngadiwarno berada di Kecamatan Sukorejo;
 - (3) Wisata Kuliner Pemancingan berada di Kecamatan Weleri;
 - (4) Pantai Cahaya/Atraksi Lumba-lumba berada di Kecamatan Rowosari;
 - (5) Agrowisata Darupono, Agrowisata Kedungsuren, dan Agrowisata Jeruk giling berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (6) Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan;
 - (7) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

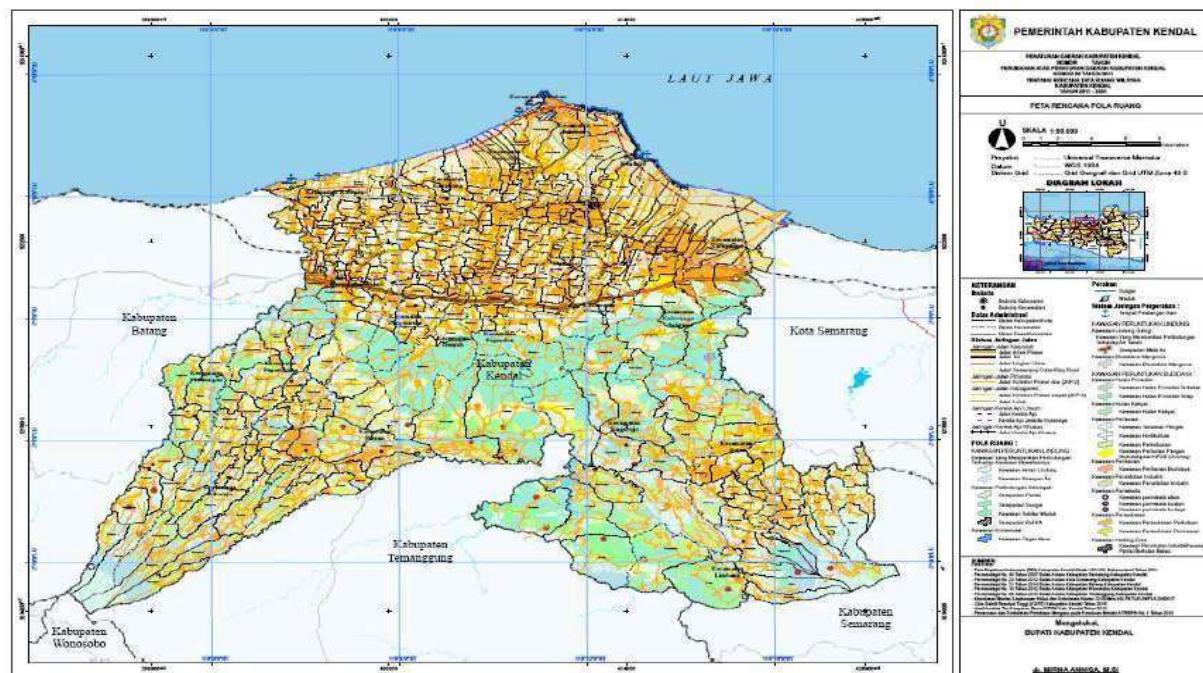
7. kawasan permukiman;

Kawasan permukiman meliputi:

- a) Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 5.485 (lima ribu empat ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:
 - (1) Kecamatan Boja;
 - (2) Kecamatan Brangsong;
 - (3) Kecamatan Cepiring;
 - (4) Kecamatan Gemuh;
 - (5) Kecamatan Kaliwungu;
 - (6) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (7) Kecamatan Kangkung;
 - (8) Kecamatan Limbang;
 - (9) Kecamatan Ngampel;
 - (10) Kecamatan Pageruyung;
 - (11) Kecamatan Patean;
 - (12) Kecamatan Patebon;
 - (13) Kecamatan Pegandon;
 - (14) Kecamatan Plantungan;
 - (15) Kecamatan Ringinarum;
 - (16) Kecamatan Rowosari;
 - (17) Kecamatan Singorojo;
 - (18) Kecamatan Sukorejo;
 - (19) Kecamatan Weleri;
 - (20) Kecamatan Kendal.

- b) Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 12.817 (dua belas ribu delapan ratus tujuh belas) hektar berada di seluruh kecamatan.
 - c) Fokus pengembangan kawasan permukiman berada pada Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Pegandon, dan Kecamatan Kaliwungu Selatan.
8. kawasan pertahanan dan keamanan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- d) Komando Distrik Militer (Kodim) 0715 yang berada di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal;
 - e) POSAL Kendal yang berada di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari;
 - a) Kepolisian Resor (Polres) Kendal yang berada di Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal.
- c. Kawasan Strategis
- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan luas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektar berada di kawasan panas bumi Gunung Ungaran.
 - 2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan luas kurang lebih 5.109 (lima ribu seratus sembilan) hektar, meliputi
 - a) Kecamatan Kaliwungu;
 - b) Kecamatan Brangsong;
 - c) Kecamatan Kendal; dan
 - d) Kecamatan Patebon.
 - 3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan luas kurang lebih 46.289 (empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektar, meliputi:
- a) sebagian Kecamatan Limbangan;
 - b) sebagian Kecamatan Boja;
 - c) sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - d) sebagian Kecamatan Patean; dan
 - e) sebagian Kecamatan Plantungan

Gambar II.3
Peta Administrasi Kabupaten Kendal



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031

c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung Air

Status daya dukung dan daya tampung (DDDT) penyedia air Kabupaten Kendal dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan Jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif (+) yang artinya daya dukung belum terlampaui. Identifikasi status daya dukung air tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap grid. Perhitungan ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air permukaan yang berada pada wilayah aliran sungai (WAS), sedangkan untuk kebutuhan air sangat dipengaruhi oleh kebutuhan domestik dan juga pertanian sebagai dasar untuk perhitungan kebutuhan air sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.146/MENLHK/SETJEN/Kum.1/2/2023 Tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Kondisi daya dukung air di Kabupaten Kendal secara keseluruhan dalam kondisi defisit sebesar -53.445.040,14 m³/tahun dengan total ketersediaan airnya sebesar 852.893.355,67 m³/tahun sementara kebutuhan air mencapai 906.338.395,81 m³/tahun. Kondisi defisit ini menandakan bahwa kebutuhan air di Kabupaten Kendal lebih besar dari ketersediaan air yang ada. Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, 13 Kecamatan memiliki status DDDT air defisit atau sudah terlampaui, sedangkan 7 Kecamatan lainnya masih dalam status surplus atau belum terlampaui. Rincian perhitungan daya dukung dan daya tampung air perkecamatan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut.

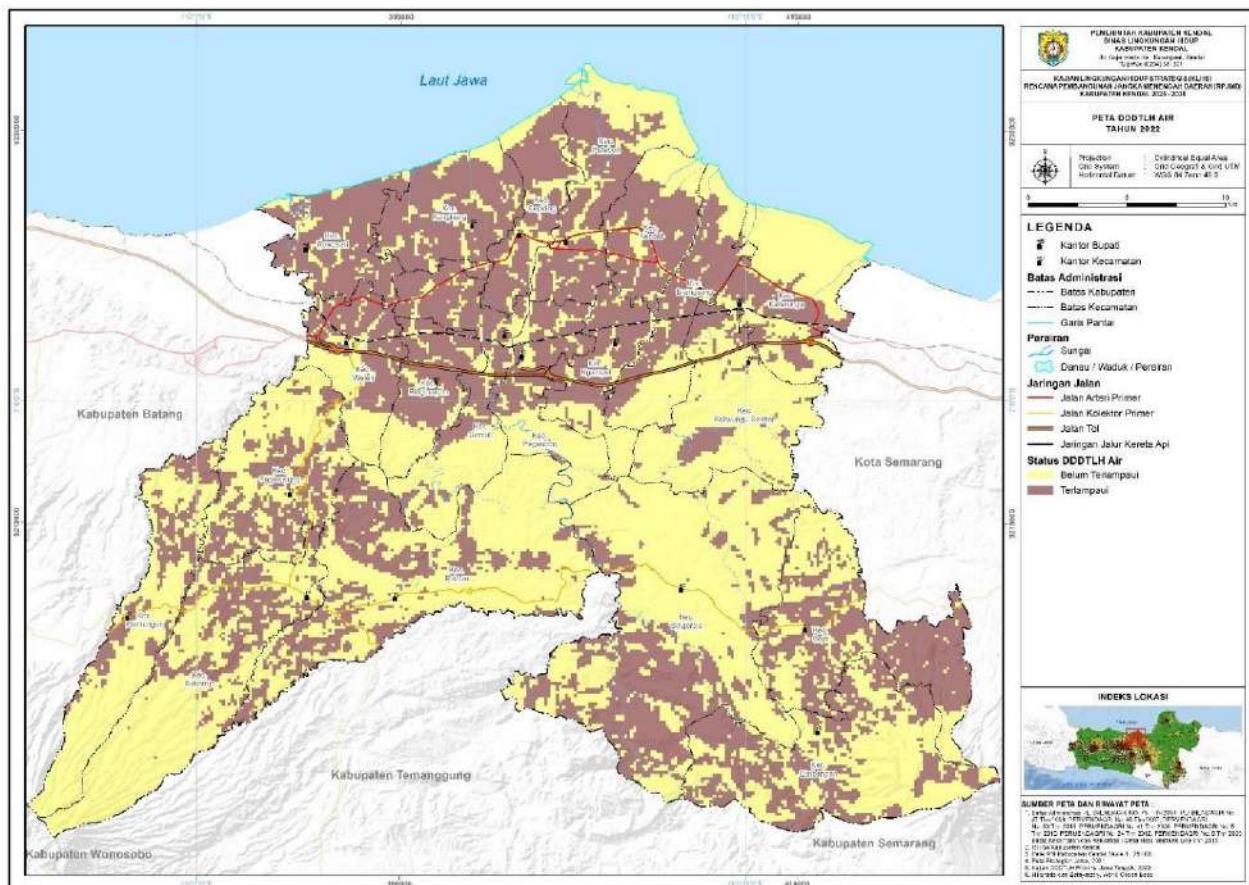
Tabel II.1
Status Daya Dukung Air per Kecamatan Kabupaten Kendal

No	Nama Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Daya Dukung Air	Belum Terlampau (%)	Terlampau (%)
1.	Boja	50.579.996,84	69.587.520,87	-19.007.524,04	Defisit	41,77%	58,23%
2.	Brangsong	32.522.288,08	39.408.613,10	-6.886.325,02	Defisit	51,90%	48,10%
3.	Cepiring	25.200.880,85	39.672.177,07	-14.471.296,23	Defisit	29,07%	70,93%
4.	Gemuh	41.136.290,57	47.437.035,69	-6.300.745,12	Defisit	50,64%	49,36%
5.	Kaliwungu	34.328.503,78	25.681.688,19	8.646.815,58	Surplus	70,44%	29,56%
6.	Kaliwungu Selatan	39.641.816,14	21.506.149,98	18.135.666,16	Surplus	84,50%	15,50%
7.	Kangkung	33.296.323,97	56.341.169,64	-23.044.845,68	Defisit	20,99%	79,01%
8.	Kendal	23.831.012,81	34.561.427,23	-10.730.414,42	Defisit	34,28%	65,72%
9.	Limbang	64.760.479,78	56.178.821,18	8.581.658,60	Surplus	55,18%	44,82%
10.	Ngampel	22.329.652,84	34.977.077,11	-12.647.424,27	Defisit	36,51%	63,49%
11.	Pageruyung	45.931.953,66	49.105.246,74	-3.173.293,08	Defisit	57,42%	42,58%
12.	Patean	87.155.271,28	74.120.184,47	13.035.086,81	Surplus	67,51%	32,49%
13.	Patebon	39.582.438,27	49.869.024,88	-10.286.586,61	Defisit	44,75%	55,25%
14.	Pegandon	21.808.641,34	23.302.846,76	-1.494.205,42	Defisit	58,47%	41,53%
15.	Plantungan	47.414.360,05	40.185.395,34	7.228.964,71	Surplus	72,67%	27,33%
16.	Ringinarum	21.911.134,69	30.998.780,97	-9.087.646,27	Defisit	37,50%	62,50%
17.	Rowosari	27.599.605,71	47.967.077,53	-20.367.471,83	Defisit	17,88%	82,12%
18.	Singorojo	109.596.581,22	81.520.787,58	28.075.793,64	Surplus	67,65%	32,35%
19.	Sukorejo	60.251.842,47	52.691.865,29	7.559.977,18	Surplus	73,99%	26,01%
20.	Weleri	24.014.281,33	31.225.506,17	-7.211.224,84	Defisit	44,90%	55,10%
KAB. KENDAL		852.893.355,67	906.338.395,81	-53.445.040,14	Defisit	56,30%	43,70%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Kangkung menjadi wilayah dengan status defisit dimana nilai selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air tertinggi di Kabupaten Kendal yaitu sebesar -23.044.845,68 m³/tahun dan juga Kecamatan Roworsari dengan selisih antara ketersediaan air permukaan dan kebutuhan air sebesar -20.367.471,83 m³/tahun. Selain itu, wilayah dengan status surplus terbesar di Kabupaten Kendal adalah Kecamatan Singorojo dengan ketersediaan air mencapai 109.596.581,22 m³/tahun sedangkan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan pertanian hanya sebesar 81.520.787,58 m³/tahun sehingga surplus air di Kecamatan Singorojo mencapai 28.075.793,64 m³/tahun. Secara spasial, status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II.4
Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kendal



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Daya Dukung Pangan

Status daya dukung dan daya tampung (DDDT) penyedia air Kabupaten Kendal dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan Jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Perhitungan DDDT Pangan di Kabupaten Kendal mempertimbangkan jenis pangan beras sebagai perhitungan dikarenakan beras menjadi sumber kalori pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Kendal. Identifikasi status daya dukung air tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap grid. Perhitungan Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif (+) yang artinya daya dukung belum terlampaui. Secara lengkap hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung pangan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.2
Perhitungan Daya Dukung Pangan per Kecamatan di Kabupaten Kendal

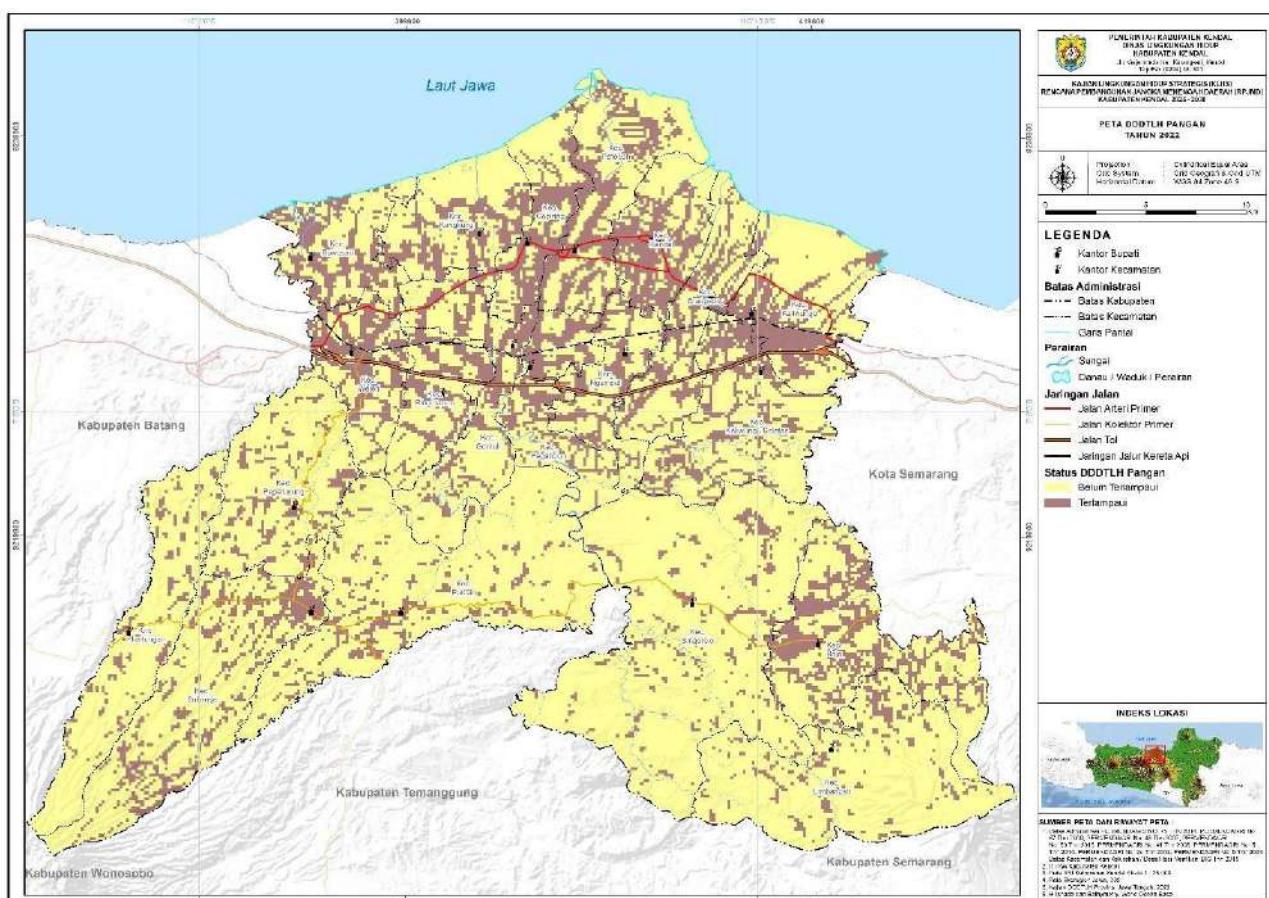
No	Nama Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Ton)	Kebutuhan Pangan (Ton)	Selisih (Ton)	Daya Dukung Pangan	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1.	Boja	6.390,80	6.261,74	129,05	Surplus	63,97%	36,03%
2.	Brangsung	4.074,36	3.955,03	119,33	Surplus	63,57%	36,43%
3.	Cepiring	3.051,07	4.116,84	-1.065,77	Defisit	52,10%	47,90%
4.	Gemuh	4.714,66	4.092,26	622,40	Surplus	71,53%	28,47%
5.	Kaliwungu	4.879,90	4.976,63	-96,73	Defisit	64,00%	36,00%
6.	Kaliwungu Selatan	4.140,89	3.905,34	235,54	Surplus	68,03%	31,97%
7.	Kangkung	4.179,69	3.953,90	225,79	Surplus	67,33%	32,67%
8.	Kendal	3.017,79	4.580,85	-1.563,07	Defisit	46,86%	53,14%

9.	Limbang	6.831,23	2.754,66	4.076,56	Surplus	89,21%	10,79%
10.	Ngampel	2.765,81	2.827,20	-61,39	Defisit	65,38%	34,62%
11.	Pageruyung	5.047,37	2.826,37	2.221,00	Surplus	83,67%	16,33%
12.	Patean	9.325,65	4.126,87	5.198,78	Surplus	88,35%	11,65%
13.	Patebon	4.918,78	4.712,12	206,66	Surplus	61,94%	38,06%
14.	Pegandon	2.494,07	3.003,86	-509,79	Defisit	59,97%	40,03%
15.	Plantungan	5.169,82	2.534,12	2.635,70	Surplus	88,49%	11,51%
16.	Ringinarum	2.651,73	2.932,16	-280,43	Defisit	64,54%	35,46%
17.	Rowosari	3.484,19	4.204,00	-719,82	Defisit	56,91%	43,09%
18.	Singorojo	11.311,13	4.153,03	7.158,09	Surplus	92,40%	7,60%
19.	Sukorejo	6.366,74	4.738,59	1.628,15	Surplus	73,62%	26,38%
20.	Weleri	2.813,33	4.770,78	-1.957,45	Defisit	49,03%	50,97%
KAB. KENDAL		97.629,00	79.426,36	18.202,64	Surplus	74,42%	25,58%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil perhitungan DDDT pangan di Kabupaten Kendal pada tabel diatas, secara keseluruhan status daya dukung dan daya tampung pangan di Kabupaten Kendal masih berada pada status belum terlampaui atau surplus sebesar 18.202,64 ton/tahun. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Kendal pada tahun 2022 masih dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduk, dimana ketersediaan pangan besar sebesar 97.629,00 ton/tahun sedangkan untuk kebutuhannya hanya 79.426,36 ton/tahun. Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, 8 Kecamatan (Cepiring, Kaliwungu, Kendal, Ngampel, Pegandon, Ringinarum, Rowosari dan Weleri) menjadi wilayah dengan status DDDT Pangan berstatus defisit atau terlampaui, sedangkan untuk 13 Kecamatan lainnya masih memiliki status DDDT Pangan belum terlampaui/surplus. Secara spasial DDDT Pangan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II.5
Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kendal



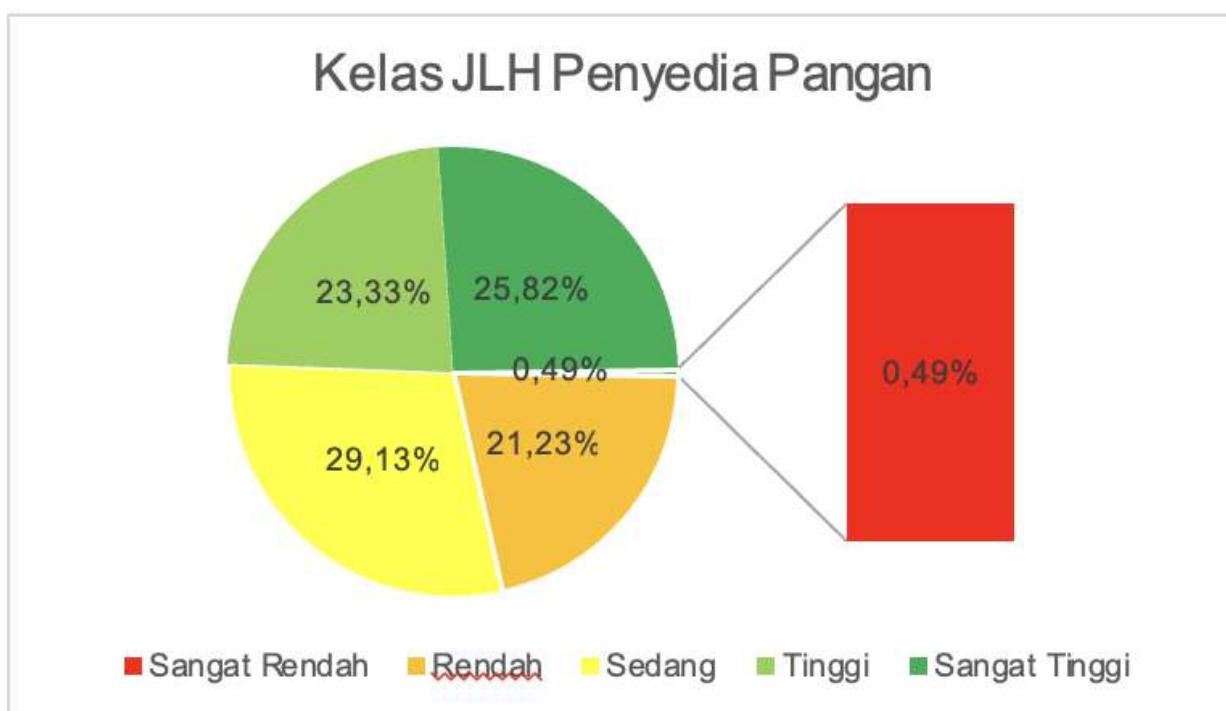
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Lingkungan Hidup Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia bahan pangan (P1) berkaitan dengan kemampuan ekosistem secara alamiah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi manusia. Kebutuhan pangan yang dapat disediakan ekosistem untuk manusia meliputi segala jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati, seperti tanaman dan hewan, maupun berasal dari air, yaitu berupa ikan, Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan ekosistem dalam menyediakan kebutuhan pangan adalah ekoregion bentanglahan dan tutupan lahan. Ecoregion bentanglahan yang memiliki karakteristik kesuburan tanah yang tinggi, seperti dataran aluvial, cenderung akan memiliki potensi terhadap penyediaan pangan yang tinggi karena menjadi tempat yang sesuai untuk tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Selain ecoregion bentanglahan, tutupan vegetasi juga menentukan tingkat kemampuan ekosistem dalam menyediakan bahan pangan bagi manusia, Semakin rapat tutupan lahan, maka semakin besar pula potensi penyediaan bahan pangan yang dapat dihasilkan oleh ekosistem karena keberadaan berbagai macam jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai sumber bahan pangan.

Layanan ekosistem pangan ini mencakup pangan dari hutan seperti tanaman dan hewan, hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan serta hasil peternakan. Tujuan dari analisis daya dukung lahan layanan ekosistem pangan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan dalam arti luas. Kebutuhan dasar atau pokok bagi setiap makhluk hidup adalah berupa pangan yang digunakan sebagai nutrisi dalam mempertahankan hidup. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok berupa pangan sudah disediakan oleh alam dalam bentuk yang beraneka ragam yang satu kesatuan ekosistem. Bahan pangan tersebut yang dapat dikonsumsi oleh manusia berupa sumber pangan hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan hewani yang berasal dari hewan. Oleh sebab itu manusia dituntut secara hukum atau menurut undang - undang yang berlaku untuk dapat bersikap adil dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya secara berkesinambungan. Tinggi rendahnya suatu ekosistem menyediakan jasa ditentukan oleh tipe atau jenis ecoregion dan penutupan lahan.

Gambar II.6
Percentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kab. Kendal



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Berdasarkan diagram persentase kelas jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kabupaten Kendal didominasi oleh kelas sedang sebesar 29,13% atau seluas 29.366,24 ha dari total luas wilayah Kabupaten Kendal. Sedangkan untuk JLH kelas sangat tinggi memiliki persentase sebesar 23,33% dan kelas JLH penyedia pangan sangat tinggi sebesar 25,82% dari total luas wilayah Kabupaten Kendal. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa JLH penyedia pangan masih mampu menyediakan lahan untuk produksi pangan terutama pangan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Kendal. Secara lengkap rincian luasan JLH penyedia pangan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.3
Rincian Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Kendal

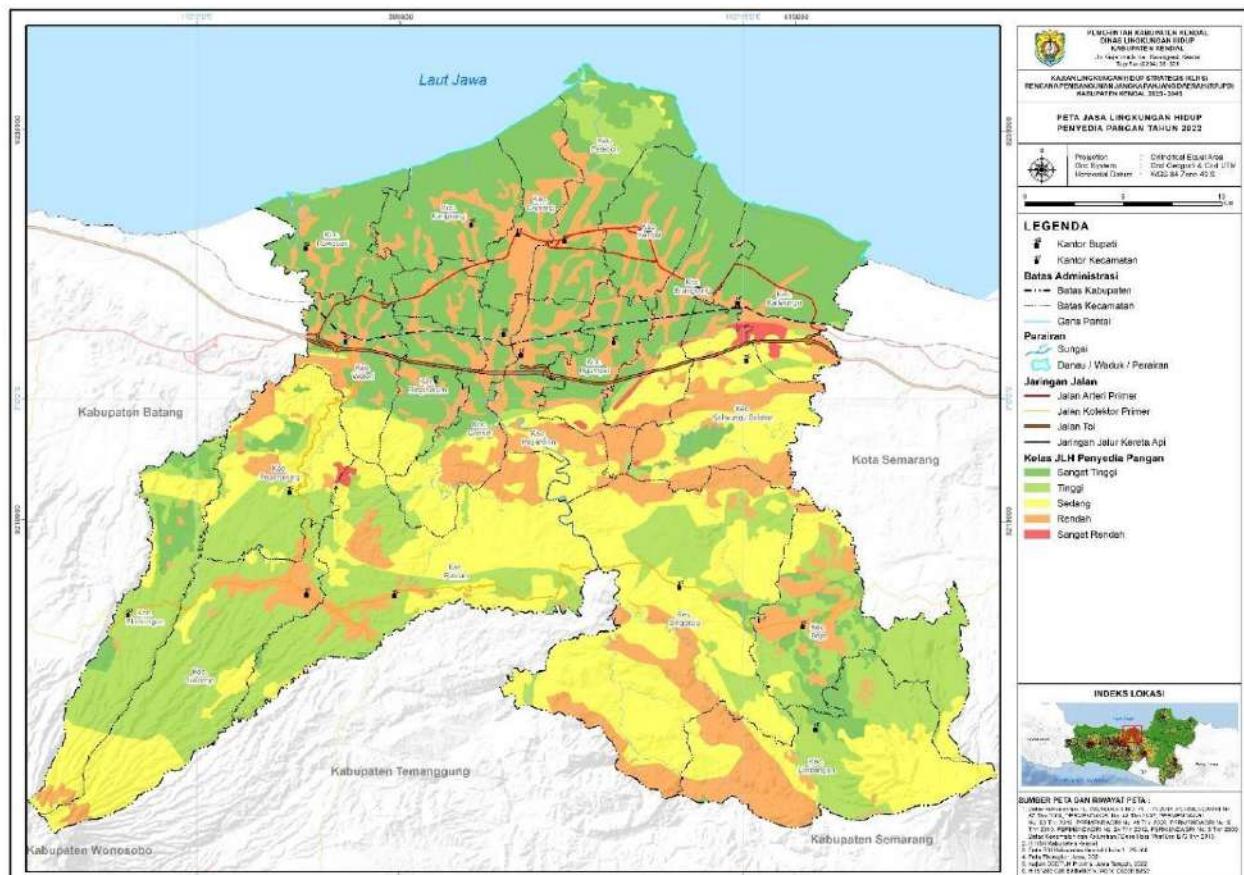
Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Boja	6.197,00	-	1.203,54	897,44	3.244,33	851,69
Kecamatan Brangsong	3.449,84	61,75	814,75	622,18	129,41	1.821,75
Kecamatan Cepiring	2.530,83	-	828,09	-	50,52	1.652,22
Kecamatan Gemuh	4.284,08	-	1.227,23	1.029,88	328,09	1.698,88
Kecamatan Kaliwungu	4.364,12	209,91	588,60	443,23	149,26	2.973,12
Kecamatan Kaliwungu Selatan	5.151,07	90,35	1.800,44	2.540,01	152,00	568,27
Kecamatan Kangkung	3.549,67	-	756,34	-	35,57	2.757,75
Kecamatan Kota Kendal	2.874,45	-	706,32	-	105,72	2.062,40

Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Limbangan	7.823,56	-	1.981,70	2.918,29	2.387,97	535,60
Kecamatan Ngampel	2.506,57	26,27	829,95	293,91	42,20	1.314,23
Kecamatan Pageruyung	5.198,29	37,40	614,42	2.303,75	2.012,02	230,69
Kecamatan Patean	10.361,91	52,23	1.381,95	4.878,69	3.996,01	53,03
Kecamatan Patebon	4.435,87	-	940,67	64,77	1.047,32	2.383,11
Kecamatan Pegandon	3.078,59	12,35	1.339,83	698,68	114,55	913,18
Kecamatan Plantungan	5.183,29	-	626,31	1.009,87	2.707,58	839,53
Kecamatan Ringinarum	2.534,44	0,39	578,66	505,09	101,08	1.349,22
Kecamatan Rowosari	2.970,27	-	452,38	-	87,25	2.430,63
Kecamatan Singorojo	13.982,51	-	2.598,47	8.809,42	2.451,69	122,93
Kecamatan Sukorejo	7.372,39	-	1.293,69	1.775,41	4.292,82	10,46
Kecamatan Weleri	2.963,71	-	842,81	575,63	87,24	1.458,02
Kabupaten Kendal	490,66	21.406,14	29.366,24	23.522,65	26.026,71	100.812,40

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Kendal Tahun 2022

Gambar II.7

Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Kendal



Sumber: KIHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

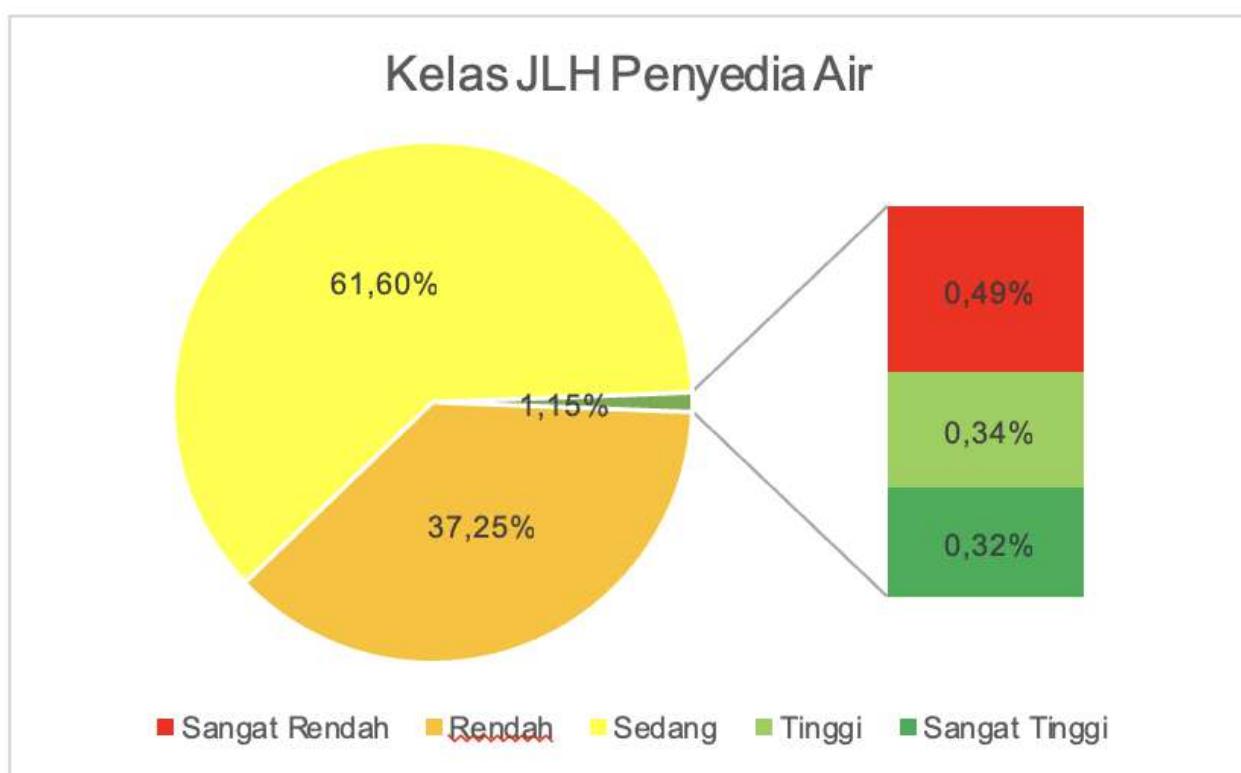
Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia air bersih (P2) berhubungan dengan segala jenis sumber air yang dapat

berasal dari air permukaan, air tanah, maupun air hujan yang dapat digunakan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jasa lingkungan hidup penyedia air bersih dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah curah hujan, lapisan tanah dan jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentanglahan, tutupan lahan, dan jenis vegetasi. Jenis penggunaan lahan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi pada umumnya memiliki potensi penyedia air bersih yang besar karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan air maupun cadangan air dalam jumlah yang banyak.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan peri kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan, kebutuhan pangan dan air bersih selalu bersamaan bahkan air lebih banyak dibutuhkan. Sehingga ketersedianya menjadi penting sebagai recharge area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam dari sungai danau atau sumur maupun air bersih setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

Gambar II.8
Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Air Kab. Kendal



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Tabel II.4
Rincian Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Kendal

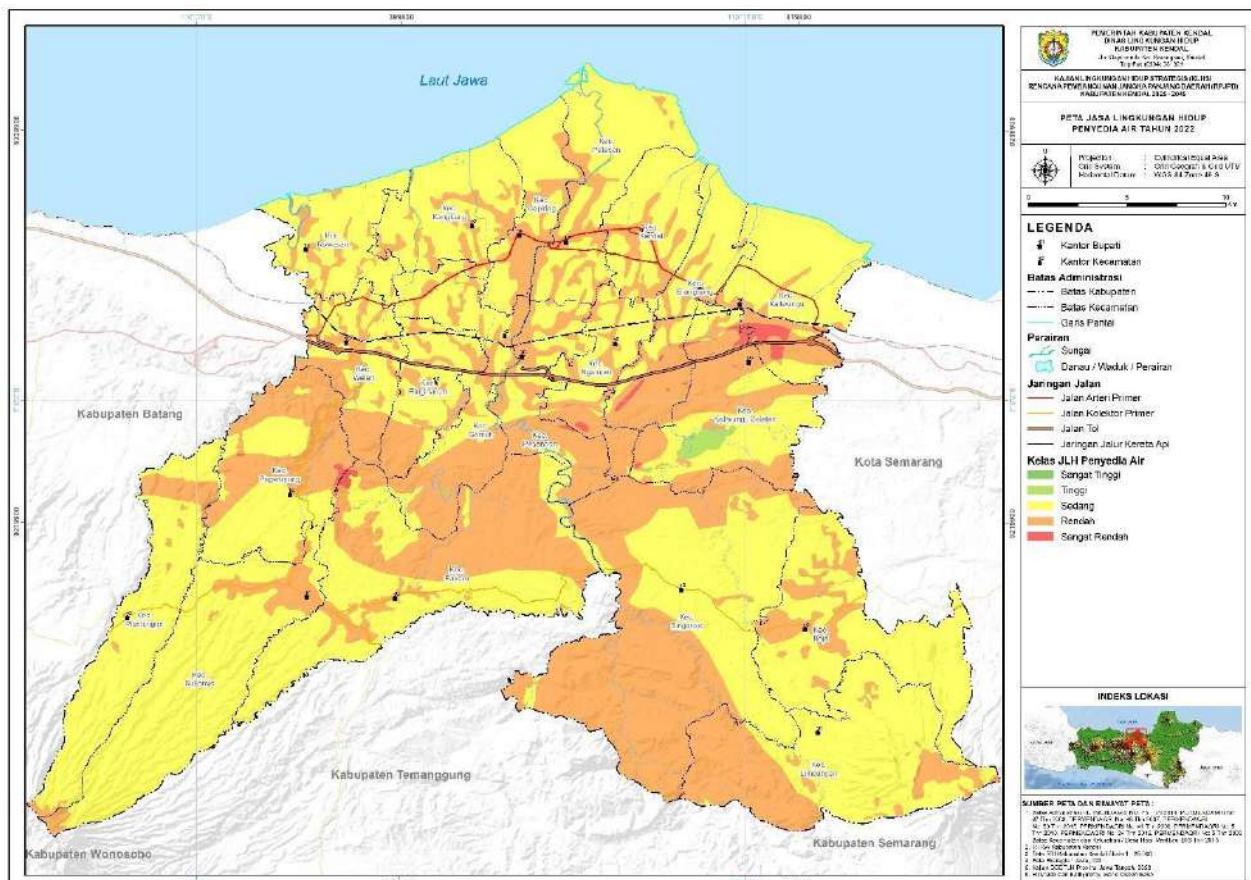
Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Boja	-	1.209,52	4.987,48	-	-	6.197,00
Kecamatan Brangsong	61,75	1.524,31	1.850,24	4,88	8,66	3.449,84
Kecamatan Cepiring	-	828,09	1.667,58	-	35,16	2.530,83
Kecamatan Gemuh	-	2.269,30	1.966,40	9,93	38,45	4.284,08
Kecamatan Kaliwungu	209,91	886,25	3.267,96	-	-	4.364,12
Kecamatan Kaliwungu Selatan	90,35	2.491,95	2.287,34	281,42	-	5.151,07
Kecamatan Kangkung	-	756,34	2.757,75	-	35,57	3.549,67
Kecamatan Kota Kendal	-	706,32	2.151,07	-	17,05	2.874,45
Kecamatan Limbangan	-	2.955,53	4.868,02	-	-	7.823,56
Kecamatan Ngampel	26,27	1.139,87	1.340,42	-	-	2.506,57
Kecamatan Pageruyung	37,4	2.628,96	2.521,99	-	9,93	5.198,29
Kecamatan Patean	52,23	4.703,91	5.566,40	10,52	28,84	10.361,91
Kecamatan Patebon	-	979,73	3.409,60	4,78	41,76	4.435,87
Kecamatan Pegandon	12,35	1.887,03	1.116,96	26,47	35,78	3.078,59
Kecamatan Plantungan	-	578,3	4.604,98	-	-	5.183,29
Kecamatan Ringinarum	0,39	1.083,74	1.450,30	-	-	2.534,44
Kecamatan Rowosari	-	452,38	2.470,80	-	47,09	2.970,27
Kecamatan Singorojo	-	8.246,93	5.712,05	6,05	17,47	13.982,51
Kecamatan Sukorejo	-	828,73	6.543,66	-	-	7.372,39
Kecamatan Weleri	-	1.395,93	1.559,24	-	8,54	2.963,71
Kabupaten Kendal	490,66	37.553,14	62.100,24	344,05	324,3	100.812,40

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Kendal Tahun 2022

Kelas jasa lingkungan hidup penyedia air di Kabupaten Kendal didominasi oleh kelas sedang sebesar 61,60% atau seluas 62.100,24 ha dan kelas rendah sebesar 37,25% atau seluas 37.553,14 ha. Sedangkan untuk wilayah yang

memiliki kelas jasa lingkungan hidup penyedia air kelas tinggi dan sangat tinggi relatif rendah hanya selua 0,32% dan 0,34% dari total luas wilayah Kabupaten Kendal. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kemampuan lingkungan hidup di Kabupaten Kendal dalam penyediaan air baik air permukaan maupun air tanah relatif cukup akan tetapi di beberapa wilayah buruk dikarenakan tutupan lahananya yang berupa lahan terbangun baik berupa permukiman maupun lahan terbangun non permukiman. Secara spasial gambaran jasa lingkungan hidup penyedia air di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar II.9
Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Kendal



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim

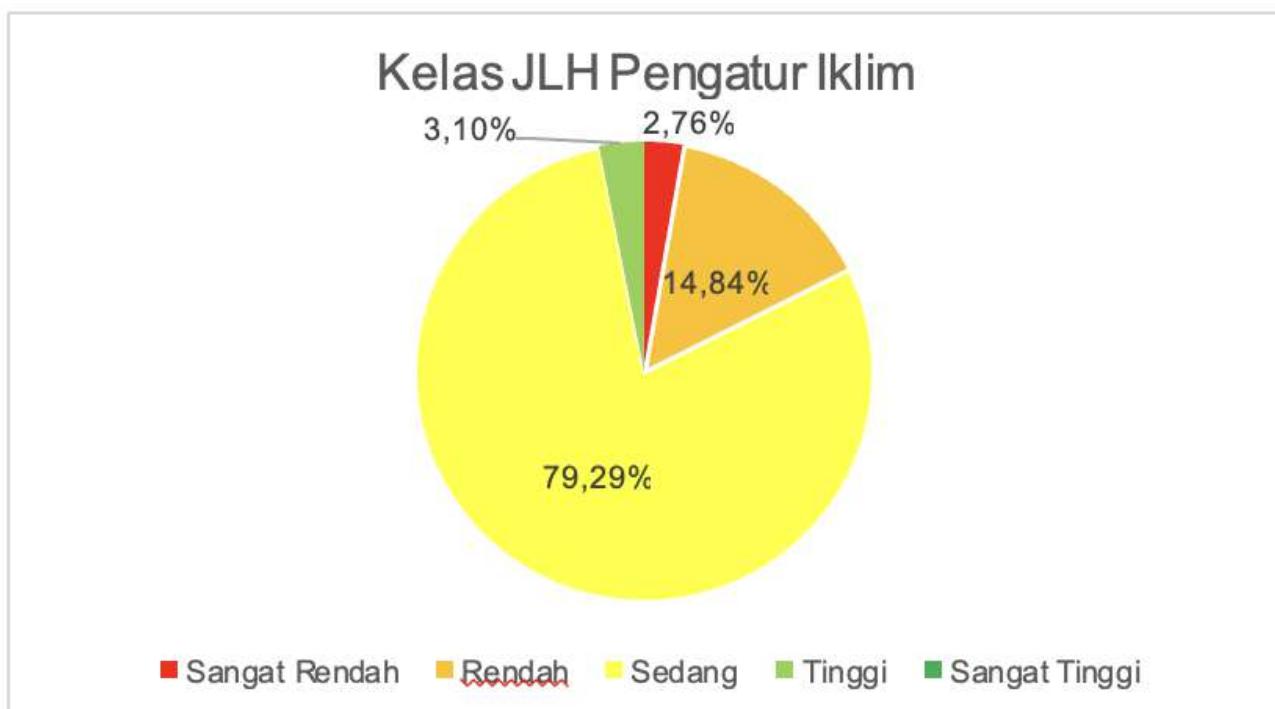
Jasa lingkungan pengaturan iklim merupakan jasa yang dimiliki oleh ekosistem secara alamiah untuk mengatur suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Faktor yang mempengaruhi jasa ekosistem pengaturan iklim adalah tutupan vegetasi, ketinggian tempat, serta bentuklahan. Kawasan yang memiliki tingkat keanekaragaman dan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca, serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Berikut merupakan hasil analisis kelas jasa lingkungan hidup pengatur iklim di Kabupaten Kendal.

Tabel II.5
Rincian Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim Kabupaten Kendal

Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Boja	-	1.158,34	4.788,28	250,37	-	6.197,00
Kecamatan Brangsong	169,86	820,94	2.445,51	13,54	-	3.449,84
Kecamatan Cepiring	-	828,09	1.667,58	35,16	-	2.530,83
Kecamatan Gemuh	334,71	1.116,27	2.813,32	19,77	-	4.284,08
Kecamatan Kaliwungu	248,64	680,50	3.434,97	-	-	4.364,12
Kecamatan Kaliwungu Selatan	137,74	746,39	4.266,94	-	-	5.151,07
Kecamatan Kangkung	-	756,34	2.757,75	35,57	-	3.549,67
Kecamatan Kota Kendal	-	706,32	2.151,07	17,05	-	2.874,45
Kecamatan Limbangan	-	178,76	6.258,81	1.385,99	-	7.823,56
Kecamatan Ngampel	420,57	1.164,90	921,10	-	-	2.506,57
Kecamatan Pageruyung	37,40	176,99	4.973,96	9,93	-	5.198,29
Kecamatan Patean	52,23	1.301,35	8.968,96	39,36	-	10.361,91
Kecamatan Patebon	1,21	939,54	3.379,60	115,51	-	4.435,87
Kecamatan Pegandon	730,29	828,22	1.473,03	47,04	-	3.078,59
Kecamatan Plantungan	-	82,03	4.532,39	568,87	-	5.183,29
Kecamatan Ringinarum	492,54	1.177,42	864,48	-	-	2.534,44
Kecamatan Rowosari	-	452,38	2.470,80	47,09	-	2.970,27
Kecamatan Singorojo	-	208,31	13.750,68	23,52	-	13.982,51
Kecamatan Sukorejo	-	711,12	6.153,37	507,90	-	7.372,39
Kecamatan Weleri	160,37	929,49	1.865,31	8,54	-	2.963,71
Kabupaten Kendal	2.785,55	14.963,72	79.937,90	3.125,23	-	100.812,40

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Kendal Tahun 2022

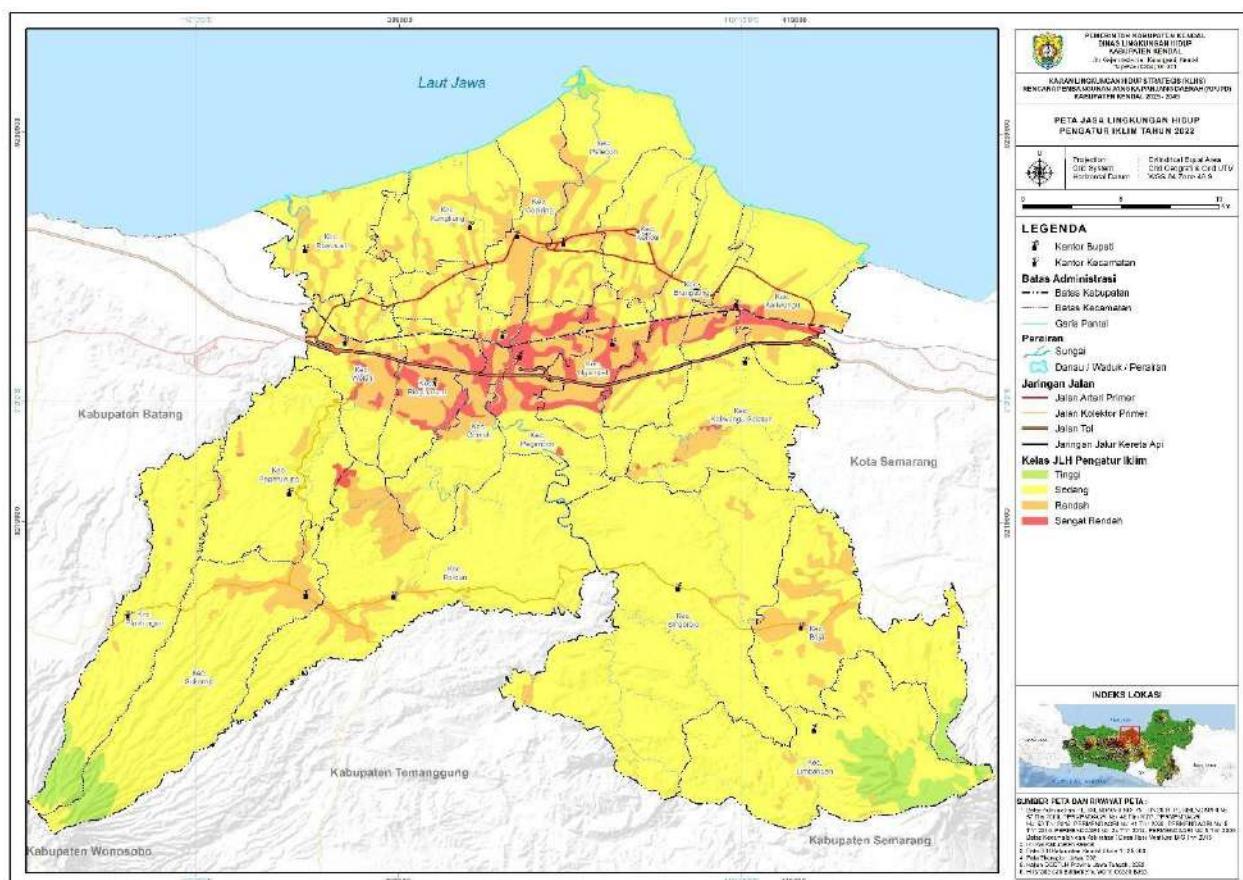
Gambar II.10
Percentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kab. Kendal



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Berdasarkan diagram dan tabel diatas, dapat dilihat kelas jasa lingkungan hidup pengatur iklim di Kabupaten Kendal. Terlihat bahwa kelas jasa pengatur iklim yang mendominasi adalah kelas sedang dengan besaran 79,29% atau seluas 79.937,90 ha. Sedangkan untuk kelas tinggi hanya seluas 3.125,23 ha atau 3,10% dari total luas wilayah Kabupaten Kendal. Mendominasinya kelas JLH pengatur iklim kelas sedang ini tidak terlepas dari penggunaan lahan di Kabupaten Kendal yang masih cukup banyak perkebunan, tegalan, dan hutan sekunder. Kondisi ini cukup dapat mengatur kondisi iklim di Kabupaten Kendal. Akan tetapi, di beberapa wilayah memiliki kelas JLH pengatur iklim kelas rendah dan sangat rendah dikarenakan penggunaan lahan berupa lahan terbangun. Adapun sebaran wilayah dengan kelas JLH pengatur iklim kelas rendah dan sangat rendah memusat di sepanjang jalan pantura dan rel kereta api. Berikut merupakan peta JLH pengatur iklim di Kabupaten Kendal.

Gambar II.11
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim Kabupaten Kendal

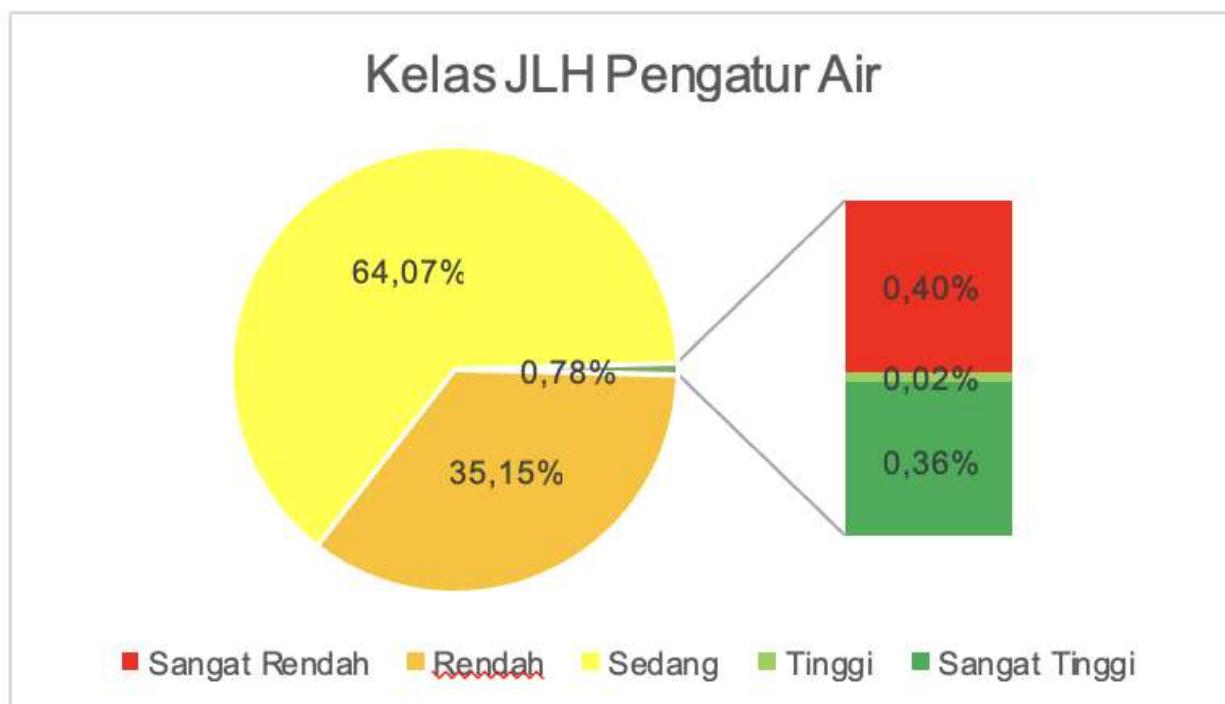


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Aliran Air

Siklus hidrologi (hydrology cycle) adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan, seperti: penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentangalam) suatu wilayah. Semakin rapat tutupan lahan, maka potensi pengaturan tata aliran air dan banjir akan semakin baik karena keberadaan tumbuhan dapat menjadi penyimpan cadangan air dari proses hidrologi. Selain itu, kondisi kelerengan juga menjadi penentu potensi tata aliran air dan banjir yang berkaitan dengan kemiringan lereng suatu wilayah. Kondisi kelerengan terutama berkaitan dengan potensi ancaman banjir akibat aliran ataupun limpasan air permukaan. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Aliran Air Kabupaten Kendal disajikan pada tabel di bawah ini.

Gambar II.12
Percentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air Kab.Kendal



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Tabel II.6
Rincian Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air Kabupaten Kendal

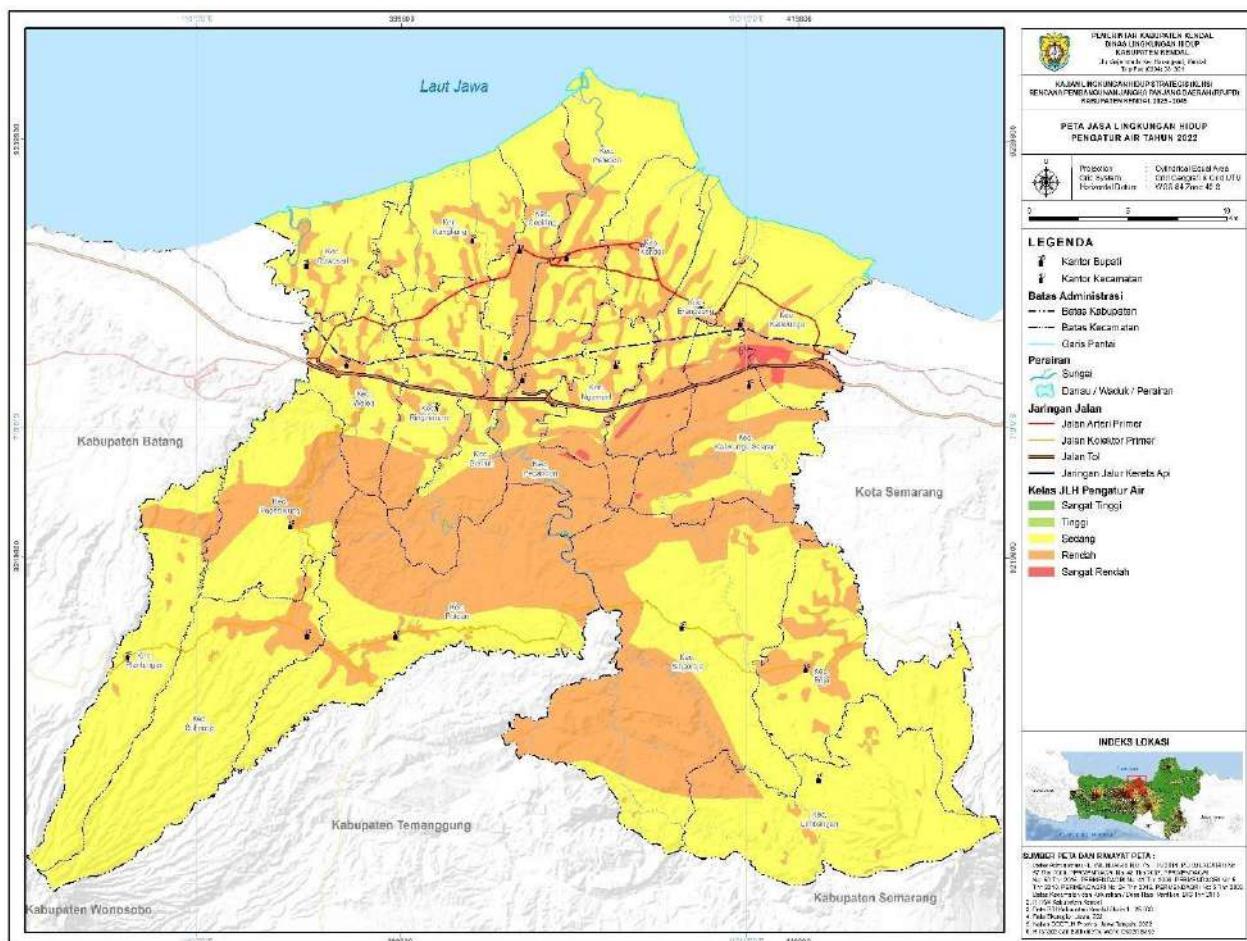
Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Boja	-	1.203,54	4.993,46	-	-	6.197,00
Kecamatan Brangsong	61,75	1.544,74	1.829,81	-	13,54	3.449,84
Kecamatan Cepiring	-	828,09	1.667,58	-	35,16	2.530,83
Kecamatan Gemuh	-	2.432,26	1.803,44	2,83	45,55	4.284,08
Kecamatan Kaliwungu	209,91	886,25	3.267,96	-	-	4.364,12
Kecamatan Kaliwungu Selatan	90,35	3.119,69	1.941,03	-	-	5.151,07
Kecamatan Kangkung	-	756,34	2.757,75	-	35,57	3.549,67
Kecamatan Kota Kendal	-	706,32	2.151,07	-	17,05	2.874,45
Kecamatan Limbangan	-	731,14	7.092,41	-	-	7.823,56
Kecamatan Ngampel	26,27	1.146,44	1.333,86	-	-	2.506,57
Kecamatan Pageruyung	-	1.888,28	3.300,07	-	9,93	5.198,29
Kecamatan Patean	-	5.922,27	4.400,27	-	39,36	10.361,91

Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Air (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Patebon	-	940,67	3.448,66	-	46,54	4.435,87
Kecamatan Pegandon	12,35	2.038,51	965,47	19,83	42,42	3.078,59
Kecamatan Plantungan	-	532,86	4.650,42	-	-	5.183,29
Kecamatan Ringinarum	-	1.085,00	1.449,43	-	-	2.534,44
Kecamatan Rowosari	-	452,38	2.470,80	-	47,09	2.970,27
Kecamatan Singorojo	-	7.371,88	6.587,10	-	23,52	13.982,51
Kecamatan Sukorejo	-	711,12	6.661,27	-	-	7.372,39
Kecamatan Weleri	-	1.136,70	1.818,47	-	8,54	2.963,71
Kabupaten Kendal	400,63	35.434,49	64.590,34	22,66	364,27	100.812,40

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Kendal Tahun 2022

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat dilihat bahwa kelas JLH pengatur tata air di Kabupaten Kendal didominasi oleh kelas sedang dengan luas 64.590,34 ha atau 64,07 persen dari total luas wilayah Kabupaten Kendal. Sedangkan 35.434,49 ha atau 35,15 persen merupakan kelas JLH pengatur tata air yang rendah. Kondisi ini menginformasikan bahwa lahan-lahan di Kabupaten Kendal memiliki kemampuan untuk mengatur air yang cukup baik, akan tetapi di beberapa wilayah yang memiliki kelas JLH rendah dan sangat rendah tidak memiliki kemampuan mengatur air dengan baik sehingga air permukaan yang ada akan menjadi limpasan dan tidak terinfiltasi kedalam tanah. Wilayah dengan karakteristik ini didominasi oleh penggunaan lahan terbangun baik permukiman maupun lahan terbangun non permukiman lainnya, serta beberapa penggunaan lahan yang memiliki kemampuan infiltrasional rendah. Berikut merupakan peta JLH pengatur tata air di Kabupaten Kendal.

Gambar II.13
Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Aliran Air Kabupaten Kendal

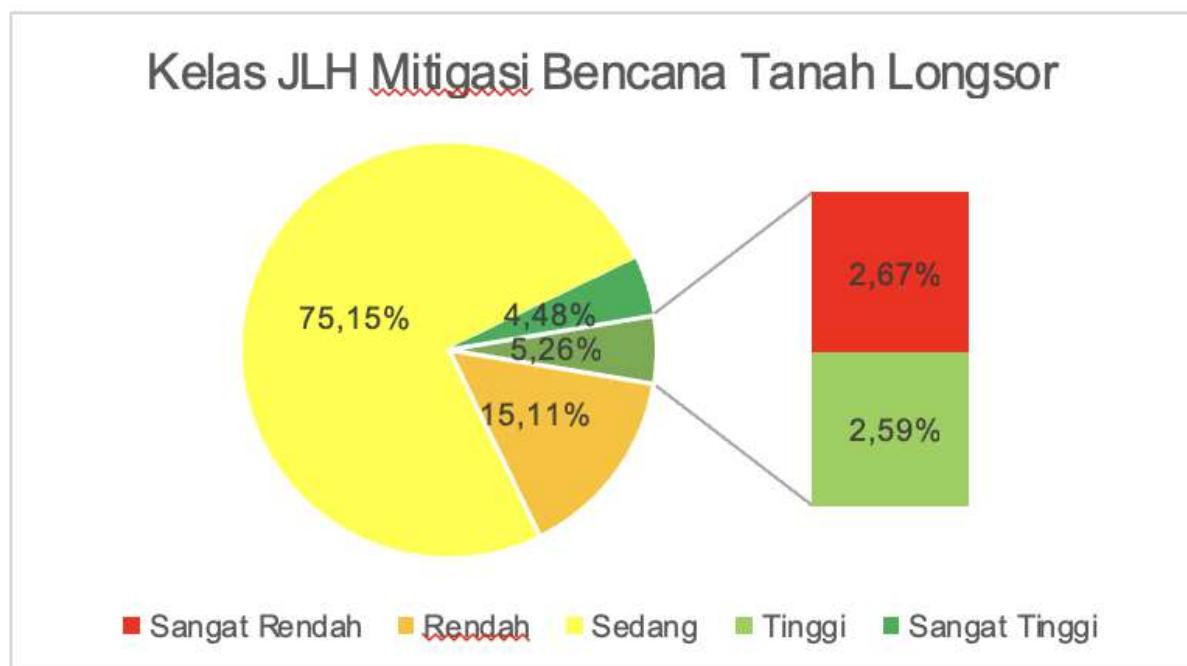


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor

Jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana longsor adalah kapasitas lingkungan dalam bentuk ekosistem untuk pencegahan dan perlindungan terhadap bencana tanah longsor. Seperti halnya bencana banjir, bencana longsor juga dapat dicegah oleh tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana. Sebagai contoh, bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi, dan tutupan lahan. Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi, dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap tanah longsor. Adapun hasil analisis kelas KLH pengatur mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal tersaji sebagai berikut.

Gambar II.14
Diagram Kelas JLH Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kendal



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029

Tabel II.7
Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kendal

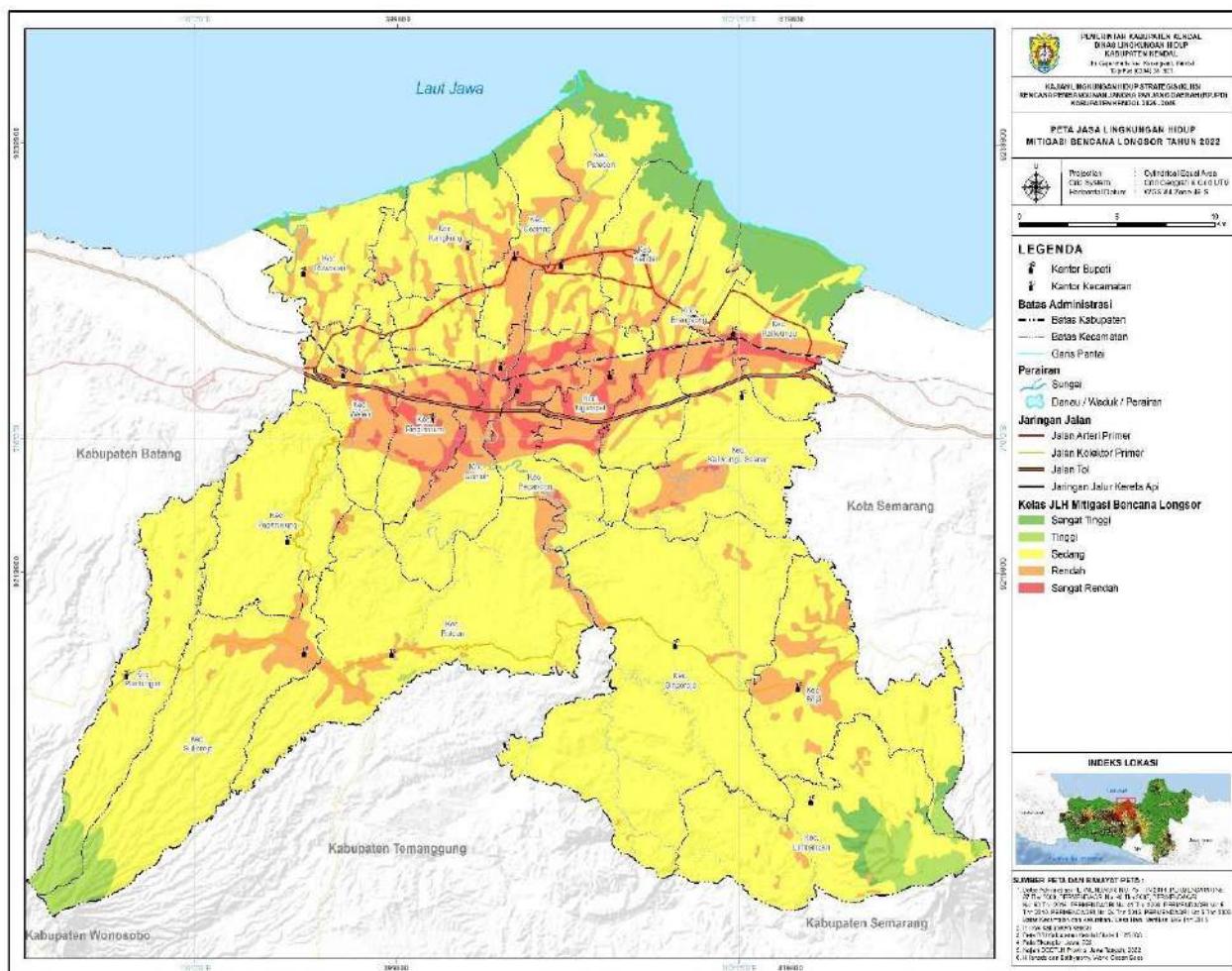
Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tanah Longsor (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Boja	-	1.158,34	4.788,28	147,99	102,38	6.197,00
Kecamatan Brangsong	169,86	832,55	2.129,44	13,54	304,45	3.449,84
Kecamatan Cepiring	-	828,09	1.490,15	35,16	177,43	2.530,83
Kecamatan Gemuh	334,71	1.086,48	2.850,21	12,67	-	4.284,08
Kecamatan Kaliwungu	248,64	719,65	1.832,24	-	1.563,58	4.364,12
Kecamatan Kaliwungu Selatan	137,74	1.029,83	3.983,50	-	-	5.151,07
Kecamatan Kangkung	-	756,34	2.505,50	35,57	252,25	3.549,67
Kecamatan Kota Kendal	-	706,32	1.673,21	17,05	477,86	2.874,45
Kecamatan Limbangan	-	178,76	6.239,42	943,92	461,46	7.823,56
Kecamatan Ngampel	420,57	1.177,96	908,04	-	-	2.506,57
Kecamatan Pageruyung	-	109,52	5.078,83	9,93	-	5.198,29

Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tanah Longsor (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Patean	-	952,98	9.386,37	22,56	-	10.361,91
Kecamatan Patebon	1,21	939,54	2.394,61	46,54	1.053,96	4.435,87
Kecamatan Pegandon	730,29	1.047,21	1.280,46	20,62	-	3.078,59
Kecamatan Plantungan	-	57,44	4.486,95	633,51	5,38	5.183,29
Kecamatan Ringinarum	492,14	1.277,17	765,13	-	-	2.534,44
Kecamatan Rowosari	-	452,38	2.361,06	47,09	109,74	2.970,27
Kecamatan Singorojo	-	228,27	13.754,24	-	-	13.982,51
Kecamatan Sukorejo	-	711,12	6.035,75	613,19	12,32	7.372,39
Kecamatan Weleri	160,37	980,01	1.814,79	8,54	-	2.963,71
Kabupaten Kendal	2.695,53	15.229,97	75.758,19	2.607,89	4.520,82	100.812,40

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal, 2025-2029

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Kendal memiliki kelas JLH mitigasi bencana tanah longsor seluas 75.758,19 ha atau 75,15% dari total luas wilayah. Secara sebaran spasial wilayah yang memiliki kelas JLH mitigasi longsor merata di seluruh wilayah kecamatan. Hal ini dikarenakan masih cukup banyaknya wilayah bervegetasi di Kabupaten Kendal baik berupa sawah, perkebunan maupun tegalan. Sedangkan untuk yang memiliki kelas rendah terpusat di sepanjang jalan pantura yang didominasi oleh lahan terbangun. Untuk wilayah yang memiliki kelas JLH pengatur tanah longsor tinggi terletak di pesisir utara Kabupaten Kendal dengan luasan JLH kelas tinggi seluas 2.607,89 ha dan kelas sangat tinggi seluas 4.520,82 ha. Hal ini dikarenakan secara topografi yang datar dan juga penutup lahannya yang masih berupa vegetasi berupa ekosistem mangrove. Berikut merupakan peta JLH pengatur mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Kendal.

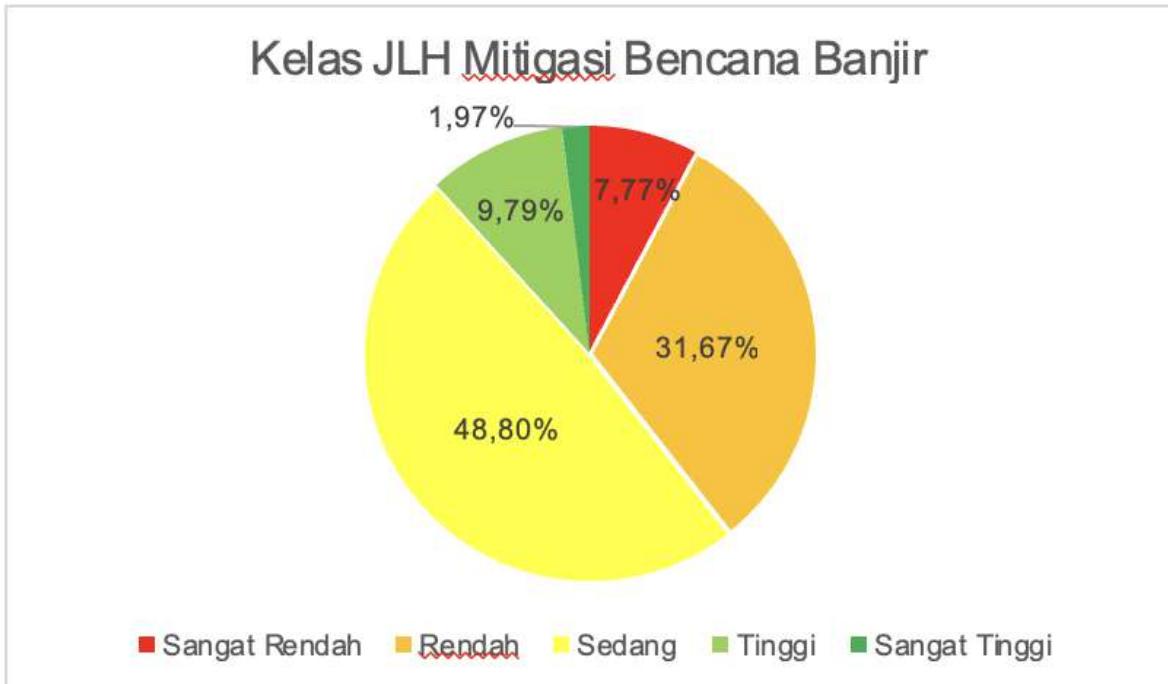
Gambar II.15
Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Longsor Kab. Kendal



Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir

Selain jasa lingkungan hidup pengatur bencana tanah longsor, salah satu jasa lingkungan hidup yang menjadi prioritas analisis di Pulau Jawa adalah jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana banjir. Jasa lingkungan hidup ini sangat berhubungan dengan jasa lingkungan hidup pengatur tata air, dimana wilayah-wilayah dengan pengaturan tata air yang rendah atau sangat rendah akan berpotensi menyebabkan banjir di suatu wilayah. Sedangkan wilayah dengan vegetasi yang masih tejaga relatif memiliki pengaturan air yang baik sehingga tidak banyak air yang menjadi limpasan dan berisiko banjir. Berikut merupakan hasil analisis jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana banjir di Kabupaten Kendal.

Gambar II.16
Diagram Kelas JLH Pengatur Mitigasi Bencana Banjir di Kab. Kendal



Tabel II.8
Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir
Kabupaten Kendal

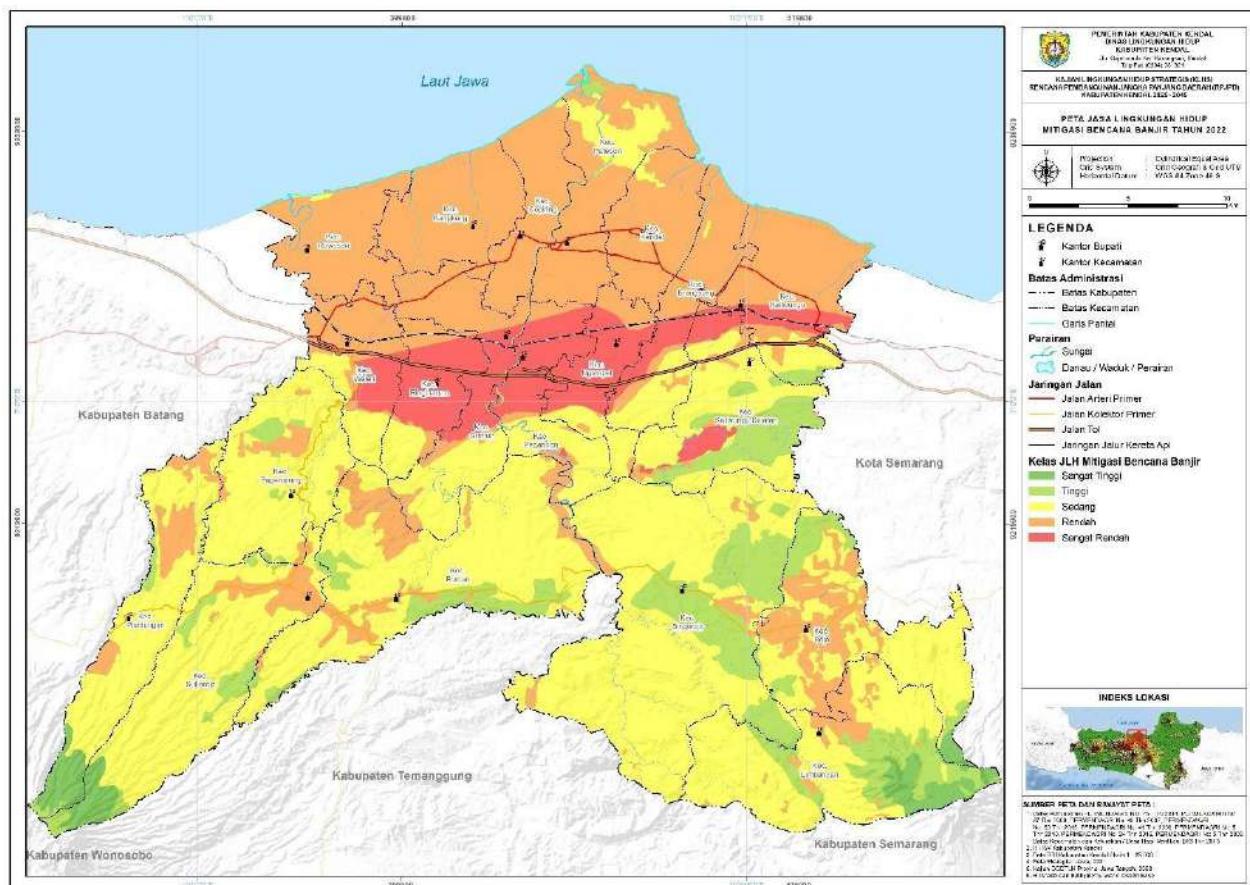
Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Banjir (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Boja	-	2.010,03	3.292,38	746,58	147,99	6.197,00
Kecamatan Brangsong	537,93	2.005,53	892,85	13,54	-	3.449,84
Kecamatan Cepiring	-	2.480,31	15,36	35,16	-	2.530,83
Kecamatan Gemuh	904,64	1.804,16	1.555,50	19,77	-	4.284,08
Kecamatan Kaliwungu	575,63	3.056,66	573,52	158,31	-	4.364,12
Kecamatan Kaliwungu Selatan	654,49	292,85	2.662,45	1.541,28	-	5.151,07
Kecamatan Kangkung	-	3.514,09	-	35,57	-	3.549,67
Kecamatan Kota Kendal	-	2.768,72	88,67	17,05	-	2.874,45
Kecamatan Limbangan	-	714,36	4.769,79	1.576,93	762,48	7.823,56
Kecamatan Ngampel	1.453,04	449,82	603,7	-	-	2.506,57
Kecamatan Pageruyung	-	445,08	4.454,07	299,14	-	5.198,29
Kecamatan Patean	-	1.710,80	7.415,22	1.235,88	-	10.361,91
Kecamatan Patebon	1,3	3.361,54	957,51	115,51	-	4.435,87

Kecamatan	Luas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Banjir (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kecamatan Pegandon	1.501,60	397,12	1.132,83	47,04	-	3.078,59
Kecamatan Plantungan	-	921,55	3.519,03	173,83	568,87	5.183,29
Kecamatan Ringinarum	1.582,19	447,16	505,09	-	-	2.534,44
Kecamatan Rowosari	-	2.883,02	40,16	47,09	-	2.970,27
Kecamatan Singorojo	-	423,93	10.466,80	3.091,78	-	13.982,51
Kecamatan Sukorejo	-	721,58	5.437,66	705,24	507,9	7.372,39
Kecamatan Weleri	618,9	1.521,16	815,12	8,54	-	2.963,71
Kabupaten Kendal	7.829,71	31.929,47	49.197,72	9.868,24	1.987,25	100.812,40

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, JLH pengatur mitigasi banjir di Kabupaten Kendal didominasi oleh kelas JLH sedang dengan luas 49.197,72 ha atau 48,8% dan kelas rendah seluas 31.929,47 ha. Dominasi ini tidak terlepas dari penggunaan lahan yang berupa persawahan, kebun, tegalan ada di Kabupaten Kendal. Sedangkan untuk wilayah dengan JLH kelas rendah di dominasi oleh wilayah dengan penggunaan lahan berupa lahan terbangun. Sedangkan untuk JLH kelas tinggi di Kabupaten Kendal cukup luas yaitu sebesar 9,79% atau seluas 9.868,24 ha dimana secara persebarannya tersebar di beberapa wilayah yang masuk kedalam hutan tropis sekunder yang berada di bagian timur Kabupaten Kendal dan masuk kedalam kawasan konservasi gunung ungaran dan prau. Berikut merupakan peta JLH pengatur mitigasi bencana banjir di Kabupaten Kendal.

Gambar II.17
Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Banjir
Kabupaten Kendal



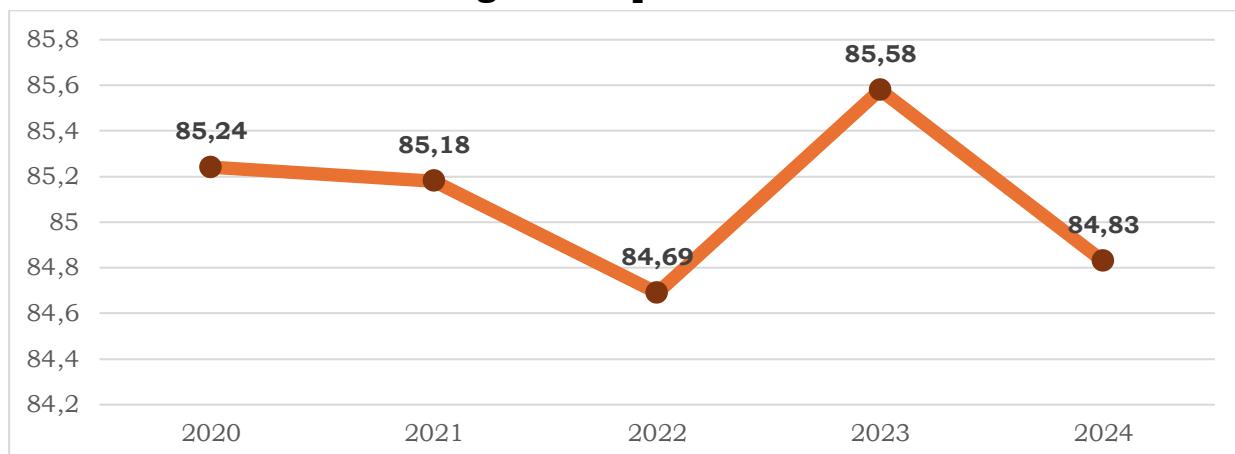
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan tiga pilar utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketersediaan energi yang andal mendukung sistem irigasi dan pengolahan pangan, sementara air menjadi elemen vital dalam proses produksi energi dan pertanian. Di sisi lain, sistem pangan yang tangguh membutuhkan suplai energi dan air yang memadai. Keterpaduan ketiganya menjadi krusial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta tekanan terhadap sumber daya alam, sehingga diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangannya demi mewujudkan masa depan yang aman dan sejahtera.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kendal dalam rentang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil, dengan nilai berturut-turut sebesar 85,24 pada tahun 2020, sedikit menurun menjadi 85,18 pada 2021, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah sebesar 84,69 pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 85,58, sebelum kembali turun menjadi 84,83 pada 2024. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun ketahanan pangan di Kendal tergolong tinggi secara umum, terdapat dinamika yang menunjukkan adanya tekanan atau tantangan tertentu pada aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Penurunan pada 2022 dan 2024 dapat menjadi sinyal perlunya intervensi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas ketahanan pangan daerah.

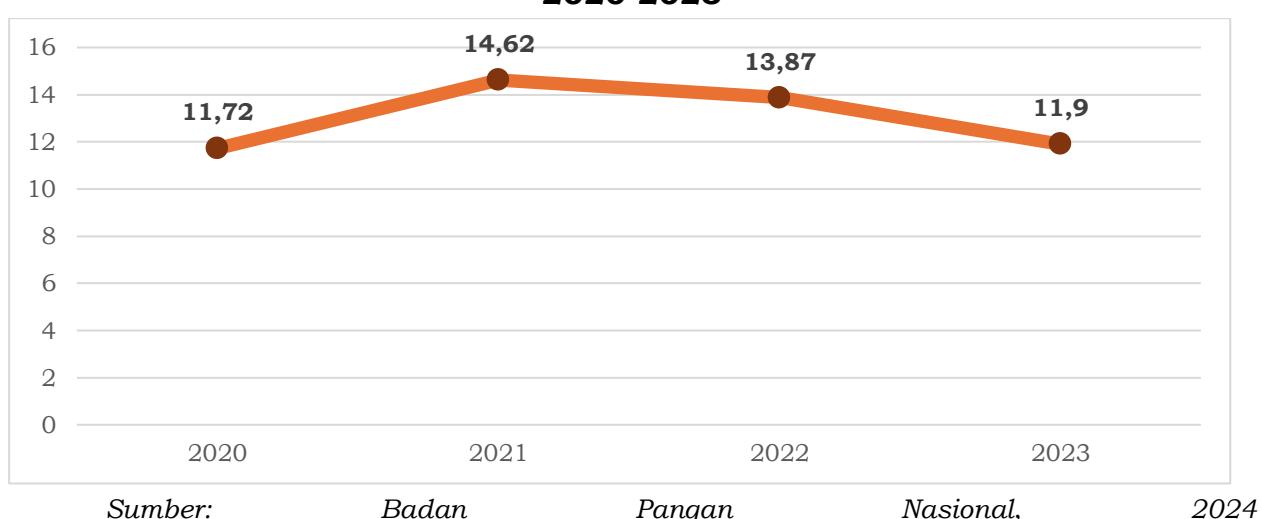
Gambar II.18
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Kendal selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan tren fluktuatif, dengan persentase berturut-turut sebesar 11,72% pada tahun 2020, meningkat tajam menjadi 14,62% pada 2021, sedikit menurun menjadi 13,87% pada 2022, dan kembali turun menjadi 11,9% pada 2023. Meskipun terjadi perbaikan pada tahun terakhir, lonjakan yang terjadi pada 2021 dan tingginya angka pada 2022 mencerminkan adanya kerentanan dalam akses dan distribusi pangan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, dinamika harga pangan, atau penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi strategis, seperti penguatan cadangan pangan lokal, subsidi pangan bagi kelompok rentan, serta peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga untuk memastikan konsumsi pangan masyarakat yang cukup dan berkelanjutan.

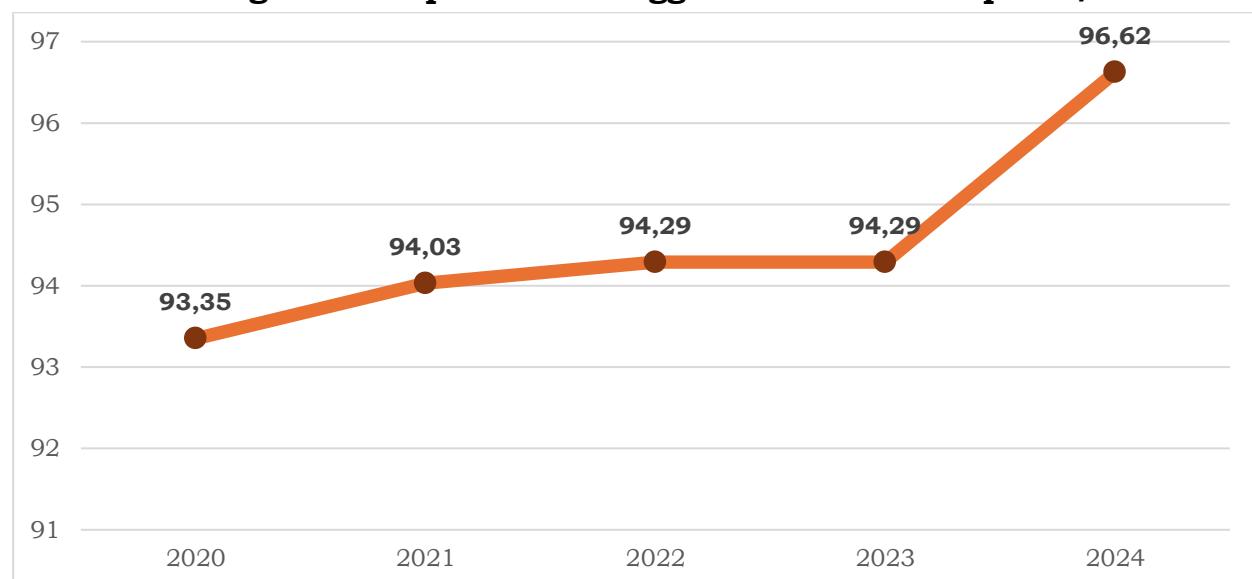
Gambar II.19
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2023



Persentase rumah tangga di Kabupaten Kendal yang memperoleh akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan akses berada di angka 93,35% dan terus mengalami

peningkatan bertahap menjadi 94,03% pada 2021, kemudian mencapai 94,29% pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 96,62%. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan layanan penyediaan air minum di Kabupaten Kendal, baik melalui perluasan infrastruktur maupun penguatan akses rumah tangga terhadap sumber air yang memenuhi standar kualitas. Kenaikan tajam di tahun 2024 juga dapat diindikasikan sebagai hasil dari intervensi kebijakan yang lebih efektif atau percepatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih.

Gambar II.20
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/ Kota



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2025

e. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas menjadi dasar penting bagi keberlanjutan pembangunan, karena berkaitan langsung dengan kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, pemantauan kualitas udara, air, dan tanah, serta penguatan regulasi lingkungan. Dengan menjaga kualitas lingkungan, tidak hanya kualitas hidup meningkat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sektor-sektor ramah lingkungan dan rendah emisi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang mengukur kondisi lingkungan suatu wilayah berdasarkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Di Kabupaten Kendal, nilai IKLH mengalami penurunan dari 65,37 pada tahun 2020 menjadi 53,05 di tahun 2021, kemudian naik secara bertahap dan relatif stabil di kisaran 57-an pada tahun 2022 hingga 2024. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang mencerminkan kondisi vegetasi dan penutupan permukaan alami daerah juga menunjukkan penurunan tajam dari 72,05 pada 2020 menjadi 34,88 di 2021, dan hanya mengalami kenaikan terbatas hingga mencapai 39,68 pada 2024. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan kinerja yang cukup baik, meningkat dari 75,16 di tahun 2020 menjadi 81,24 pada tahun 2024. Indeks

Kualitas Air (IKA), yang menggambarkan tingkat pencemaran badan air, justru mengalami penurunan dari 46,7 di tahun 2020 menjadi 42,38 di tahun 2024, setelah sempat membaik pada 2022.

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Kendal terus membaik, yang dipengaruhi oleh kebijakan pengendalian emisi atau perbaikan manajemen transportasi. Namun, kualitas tutupan lahan dan air masih perlu menjadi perhatian serius, karena penurunan pada dua aspek ini dapat berdampak terhadap daya dukung lingkungan secara keseluruhan dan berpotensi menahan peningkatan nilai IKLH.

Sementara itu indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan yang cukup dalam lima tahun terakhir, dari 0,018% pada tahun 2020 menjadi 1,178% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pengelolaan sampah, baik dari sisi peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan maupun partisipasi masyarakat. Tren positif ini juga dapat dihubungkan dengan implementasi kebijakan pengurangan sampah di sumber dan penguatan sistem pengangkutan serta pemrosesan akhir. Meski angkanya masih tergolong rendah secara absolut, pergerakan naik yang konsisten menjadi indikasi awal keberhasilan program pengelolaan sampah terpadu di daerah ini.

Sementara itu, indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman mengalami fluktuasi. Capaian yang sempat berada di angka 0,73% pada tahun 2021 justru turun menjadi 0,01% pada tahun 2022 dan 2023, sebelum naik menjadi 0,81% pada tahun 2024. Ketidakstabilan ini menunjukkan masih adanya tantangan struktural dalam penyediaan akses sanitasi, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau layanan dasar. Meski terjadi peningkatan pada tahun terakhir, capaian yang relatif rendah ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih intensif, termasuk perbaikan infrastruktur sanitasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kampanye perubahan perilaku masyarakat guna mendukung peningkatan kualitas hidup dan lingkungan yang sehat.

Tabel II.9

Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65,37	53,05	57,72	57,75	57,53
2	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	72,05	34,88	36,87	40,52	39,68
3	Nilai Indeks Kualitas Air	Nilai	46,7	36,67	45	44,29	42,38
4	Nilai Indeks Kualitas Udara Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Nilai	75,16	78,08	80,81	79,56	81,24
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,018	0,41	0,42	1,1	1,178
6		%		0,73	0,01	0,01	0,81

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, 2021-2025

f. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim mencerminkan kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk menghadapi, menyesuaikan diri, dan pulih dari dampak peristiwa ekstrem. Pengukuran resilensi ini dapat dilihat melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) yang memberikan gambaran tingkat kesiapsiagaan dan kerentanan suatu wilayah.

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kendal tahun 2020–2024, terjadi peningkatan kapasitas ketahanan daerah dari tahun ke tahun. IKD menunjukkan capaian sebesar 60 pada tahun 2020, naik menjadi 61 di tahun 2021, sedikit menurun ke angka 59 di tahun 2022, namun meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 70 dan kembali naik menjadi 72 di tahun 2024. Sementara itu, IRB menurun dari 124,57 pada tahun 2020 menjadi 100 di tahun 2021, lalu terus menurun menjadi 97,9 di tahun 2022 dan 91,74 pada tahun 2023, serta tetap pada angka 91,74 di tahun 2024.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal secara bertahap mengalami peningkatan kapasitas dalam menghadapi risiko bencana. Kenaikan IKD mengindikasikan penguatan aspek kesiapsiagaan masyarakat, kelembagaan, serta ketangguhan infrastruktur dan ekosistem. Di sisi lain, penurunan IRB menggambarkan menurunnya tingkat risiko yang dihadapi, yang bisa jadi merupakan hasil dari upaya mitigasi, pengurangan kerentanan, serta peningkatan kapasitas adaptif. Kecenderungan ini menjadi sinyal positif bagi arah pembangunan daerah yang lebih tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.

Tabel II.10
Indeks Ketahanan Daerah dan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kendal
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	60	61	59	70	72
2.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	124,57	100	97,9	91,74	91,74

Sumber: inarisk.bnrb.go.id

g. Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kendal tercatat sebanyak 1.064.812 jiwa, yang terdiri dari 536.543 laki-laki dan 528.269 perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Boja sebanyak 87.806 jiwa, sedangkan Kecamatan Plantungan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni 34.049 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi penduduk antar wilayah di Kabupaten Kendal. Ketidakseimbangan ini juga tercermin dalam tingkat kepadatan penduduk, di mana beberapa kecamatan, khususnya yang berada di kawasan perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi seperti Kecamatan Weleri (2.026 jiwa/km²) dan Kota Kendal (2.255 jiwa/km²), mengalami kepadatan yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lain yang lebih rural.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal tahun 2024 tercatat sebesar 1,14 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Boja dengan 1,61 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Sukorejo, yaitu hanya 0,48 persen. Perbedaan ini dapat mencerminkan dinamika sosial ekonomi dan daya tarik wilayah terhadap migrasi penduduk. Kecamatan Boja yang mencatatkan jumlah penduduk terbesar sekaligus laju pertumbuhan tertinggi mengindikasikan bahwa wilayah ini memiliki daya tarik tinggi sebagai tempat tinggal, kemungkinan karena faktor ketersediaan lapangan kerja, fasilitas publik, atau perkembangan kawasan hunian baru. Sebaliknya, Kecamatan Sukorejo yang pertumbuhannya rendah mungkin menghadapi tantangan dalam hal pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal. Ketimpangan persebaran dan pertumbuhan penduduk ini menjadi salah satu isu strategis yang perlu dikelola dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Kendal.

Tabel II.11
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin di
Kabupaten Kendal Tahun 2024

Kecamatan	Penduduk (jiwa)			%	Sex Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2023-2024
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah				
Plantungan	17.523	16.526	34.049	3,20	106,03	697	1,12
Sukorejo	31.402	30.115	61.517	5,78	104,27	809	0,48
Pageruyung	19.117	18.187	37.304	3,50	105,11	725	1,14
Patean	27.348	26.735	54.083	5,08	102,29	582	0,95
Singorojo	27.722	27.504	55.226	5,19	100,79	463	1,12
Limbangan	18.289	18.301	36.590	3,44	99,93	510	1,18
Boja	43.661	44.145	87.806	8,25	98,90	1.370	1,61
Kaliwungu	34.764	34.368	69.132	6,49	101,15	1.448	1,12
Kaliwungu Selatan	27.741	27.296	55.037	5,17	101,63	844	1,45
Brangsong	26.744	26.189	52.933	4,97	102,12	1.533	1,15
Pegandon	19.927	19.803	39.730	3,73	100,63	1.277	1,17
Ngampel	19.174	18.577	37.751	3,55	103,21	1.114	1,32
Gemuh	27.934	27.293	55.227	5,19	102,35	1.447	1,34
Ringinarum	20.107	18.402	38.509	3,62	109,27	1.639	1,29
Weleri	30.843	30.498	61.341	5,76	101,13	2.026	0,62
Rowosari	28.361	28.185	56.546	5,31	100,62	1.732	1,38
Kangkung	26.335	26.724	53.059	4,98	98,54	1.361	1,57
Cepiring	27.270	27.587	54.857	5,15	98,85	1.824	1,05
Patebon	31.376	30.752	62.128	5,83	102,03	1.402	0,86
Kota Kendal	30.905	31.082	61.987	5,82	99,43	2.255	0,91
Kabupaten Kendal	536.543	528.269	1.064.812	100,00	101,57	1.062	1,14

Sumber: BPS, "Buku Kabupaten Kendal Dalam Angka 2025"

Bagian terbesar penduduk Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 748.455 jiwa (70,29%), sedangkan yang belum produktif (<15 tahun) sebesar 230.688 jiwa (21,66%) dan yang tidak produktif lagi (65 tahun keatas) sebesar 85.669 jiwa (8,04%). Dengan

demikian maka diketahui rasio beban ketergantungan sebesar 42,27. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sebanyak 42 orang usia tidak produktif, sekaligus menjadi informasi bahwa Kabupaten Kendal berada pada masa jendela Bonus Demografi.

Berdasarkan data kependudukan berdasarkan kelompok umur maka Kabupaten Kendal telah mengalami “bonus demografi” dimana kelompok penduduk usia produktif lebih dari 70,29 persen dan kelompok tidak produktif sebesar 29,71 persen. Agar bonus demografi semakin baik dalam rangka menyongsong Generasi Emas 2045 maka perlu semakin dioptimalkan dengan meningkatkan: (1) pendidikan kaum muda (kelompok umur 15 – 24 tahun) semakin tinggi, (2) kelompok usia muda dapat terserap di pasar kerja formal dan (3) dapat meningkatkan tabungan masyarakat agar kelompok usia muda dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Adapun persentase penduduk usia tidak produktif usia tua mengalami peningkatan menjadi 8,04 persen. Kenaikan ini menjadikan perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menyusun kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan kesejahteraan lanjut usia agar tetap sehat, produktif dan mandiri.

Tabel II.12
Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kendal Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	39.334	37.805	77.139
5 - 9	38.119	36.585	74.704
10 - 14	40.341	38.504	78.845
15 - 19	39.876	37.743	77.619
20 - 24	40.554	38.091	78.645
25 - 29	41.112	39.356	80.468
30 - 34	43.903	42.171	86.074
35 - 39	44.496	42.489	86.985
40 - 44	40.203	39.704	79.907
45 - 49	37.352	37.931	75.283
50 - 54	32.900	34.669	67.569
55 - 59	31.095	32.284	63.379
60 - 64	26.167	26.359	52.526
65-69	19.954	20.325	40.279
70-74	12.454	13.047	25.501
75+	8.683	11.206	19.889
Total	536.543	528.269	1.064.812

Sumber: BPS “Buku Kabupaten Kendal Dalam Angka 2025”

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, mencakup fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan perekonomian. Selama tiga tahun terakhir, kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal cukup

terdampak akibat pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari terjadinya tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi serta munculnya berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan dan sosial. Namun, pasca upaya penanganan dan pemulihan pandemi, Kabupaten Kendal mampu menunjukkan pemulihan yang progresif dan terus berupaya mengembalikan stabilitas serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal secara lebih rinci disajikan sebagai berikut.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menguraikan hasil pembangunan Kabupaten Kendal, terutama dalam bidang ekonomi wilayah. Fokus ini akan menyelidiki lebih dalam berbagai indikator ekonomi, baik secara makro maupun mikro, yang menjadi inti dari dinamika ekonomi Kabupaten Kendal. Secara esensial, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menyeimbangkan distribusi pendapatan, memperkuat keterkaitan ekonomi regional, serta mendorong transformasi struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan berbagai indikator yang berkaitan dengan tujuan pembangunan tersebut demi meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

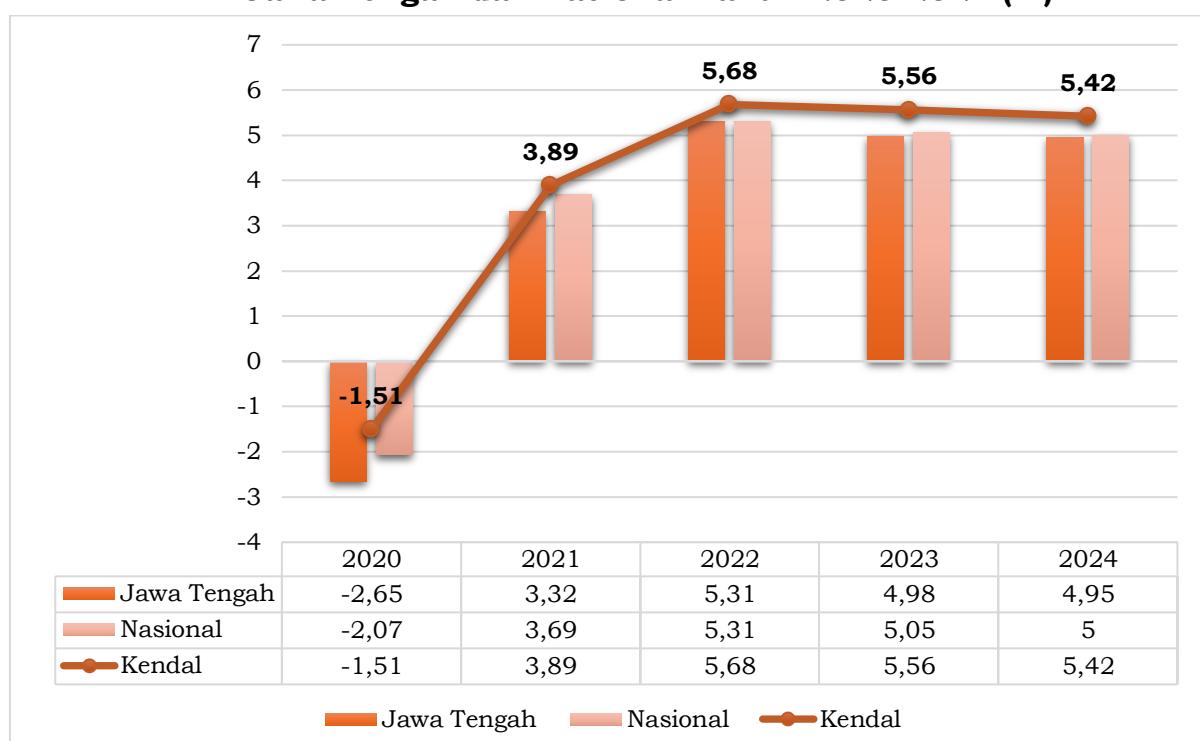
Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Kendal antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, khususnya dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan untuk menyukseksan program-program prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal menunjukkan tren positif dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, perekonomian Kendal mengalami kontraksi sebesar -1,51 persen, lebih baik dibandingkan Jawa Tengah (-2,65 persen) dan nasional (-2,07 persen). Pemulihan terjadi pada 2021 dengan pertumbuhan 3,89 persen, lebih tinggi dari Jawa Tengah (3,32 persen) tetapi sedikit lebih rendah dibanding nasional (3,69 persen). Peningkatan signifikan terjadi pada 2022 ketika ekonomi Kendal tumbuh 5,68 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional yang sama-sama berada di angka 5,31 persen.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kendal mencapai 5,56 persen, tetap lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (4,98 persen) dan nasional (5,05 persen). Meskipun mengalami sedikit perlambatan pada 2024 dengan angka 5,42 persen, ekonomi Kendal tetap menunjukkan stabilitas yang kuat. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kendal dalam lima tahun terakhir menunjukkan daya saing yang meningkat dengan capaian yang secara konsisten lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

Gambar II.17
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)



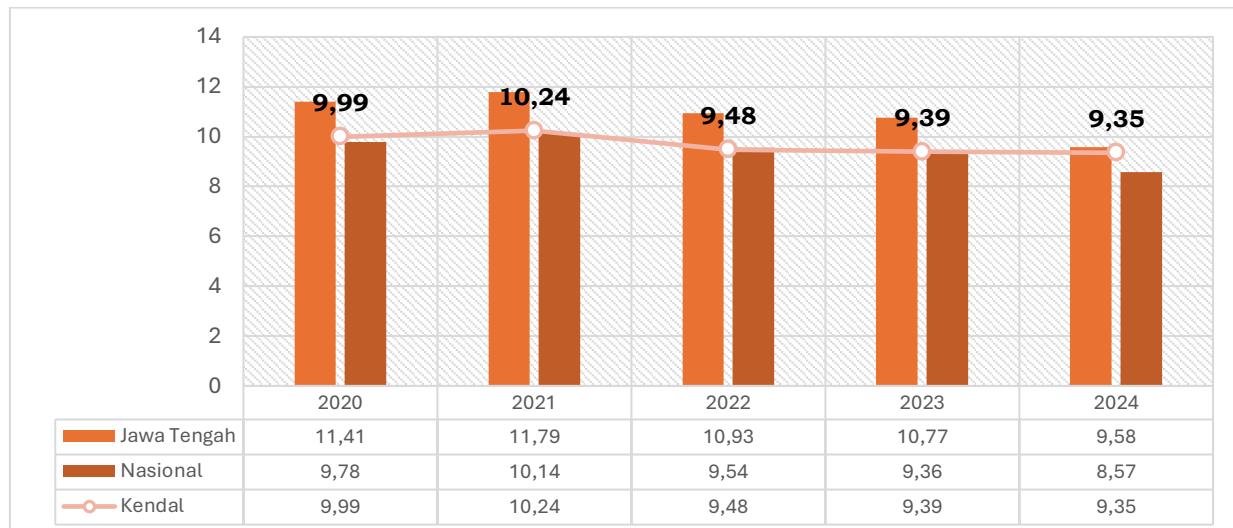
Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah, 2025

b. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami perubahan akibat dampak pandemi Covid-19 pada periode 2020–2022. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,99% dan meningkat menjadi 10,24% pada tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja yang dirumahkan, serta pembatasan kegiatan ekonomi.

Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, kondisi mulai membaik seiring dengan pemulihan ekonomi, sehingga angka kemiskinan menurun menjadi 9,35% pada tahun 2024. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 9,58%, tetapi masih di atas rata-rata nasional yang mencapai 8,57%. Untuk menekan angka kemiskinan lebih lanjut, diperlukan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah dan nasional selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.18
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



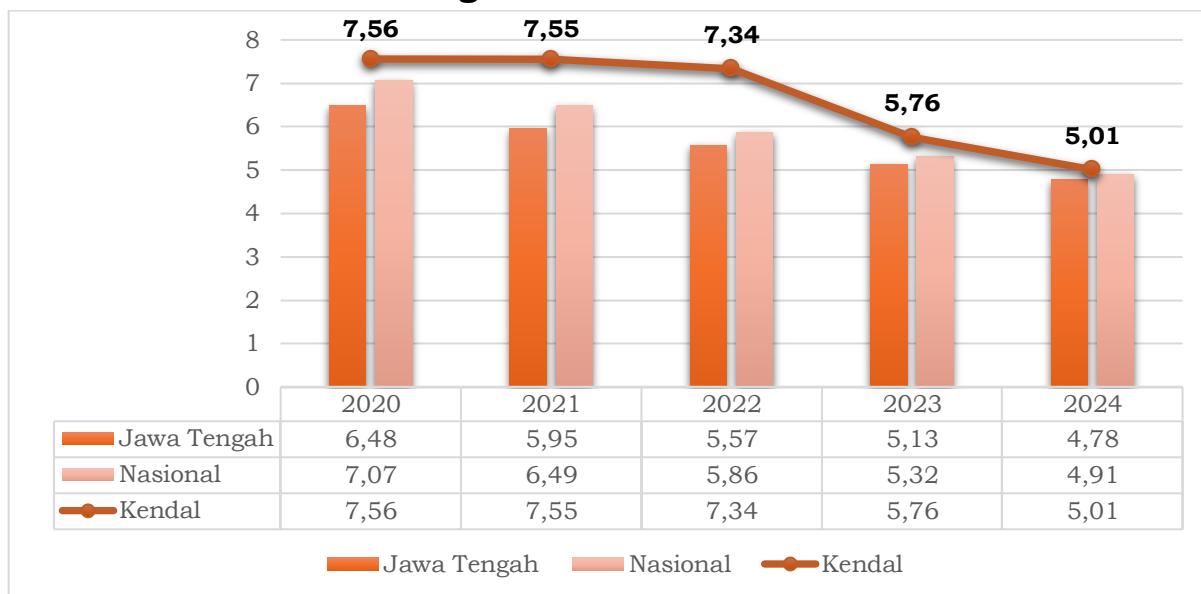
Sumber: BPS Kabupaten Kendal 2025

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Di Kabupaten Kendal, TPT tercatat sebesar 7,56% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 5,01% pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih berada di atas rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 4,78% dan nasional yang mencapai 4,91% pada tahun 2024.

Tingginya TPT di Kabupaten Kendal disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja di industri dengan kompetensi lulusan sekolah. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih agar industri yang berkembang di Kabupaten Kendal dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal, sehingga ketimpangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja dapat diminimalkan.

Gambar II.19
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

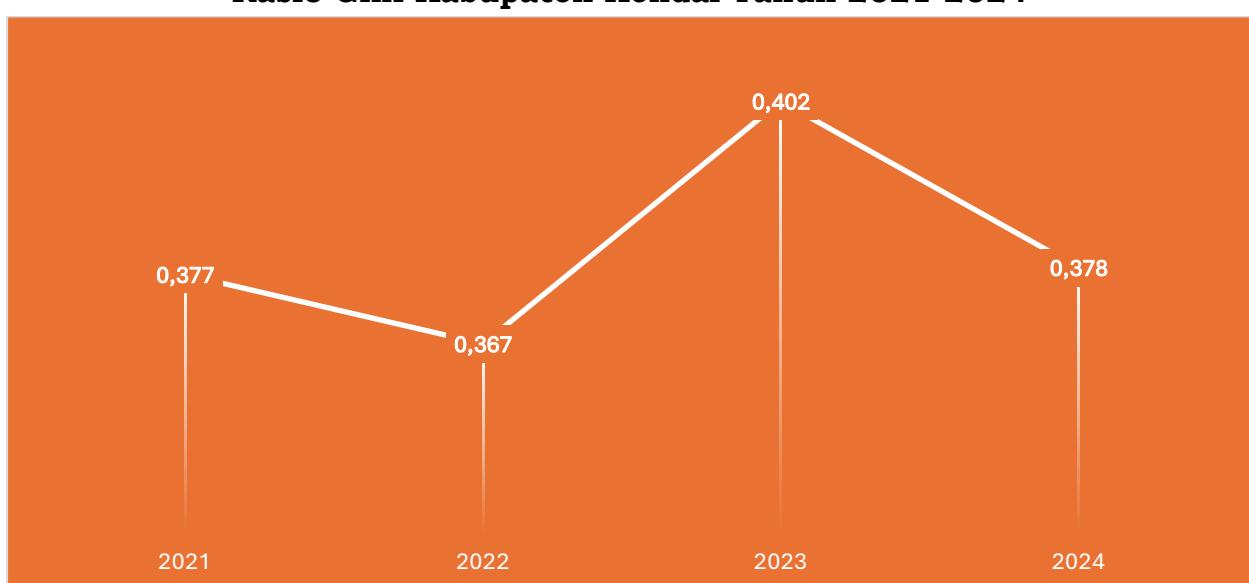


Sumber : BPS Indonesia, 2025

d. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi dalam suatu populasi berdasarkan pemerataan pendapatan. Di Kabupaten Kendal, Rasio Gini tercatat sebesar 0,367 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 0,402 pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan ketimpangan sebesar 0,035 poin. Peningkatan ini disebabkan oleh persebaran pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Namun, pada tahun 2024, Rasio Gini menurun menjadi 0,378, menunjukkan adanya perbaikan sebagai hasil dari kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.

Gambar II.20
Rasio Gini Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024



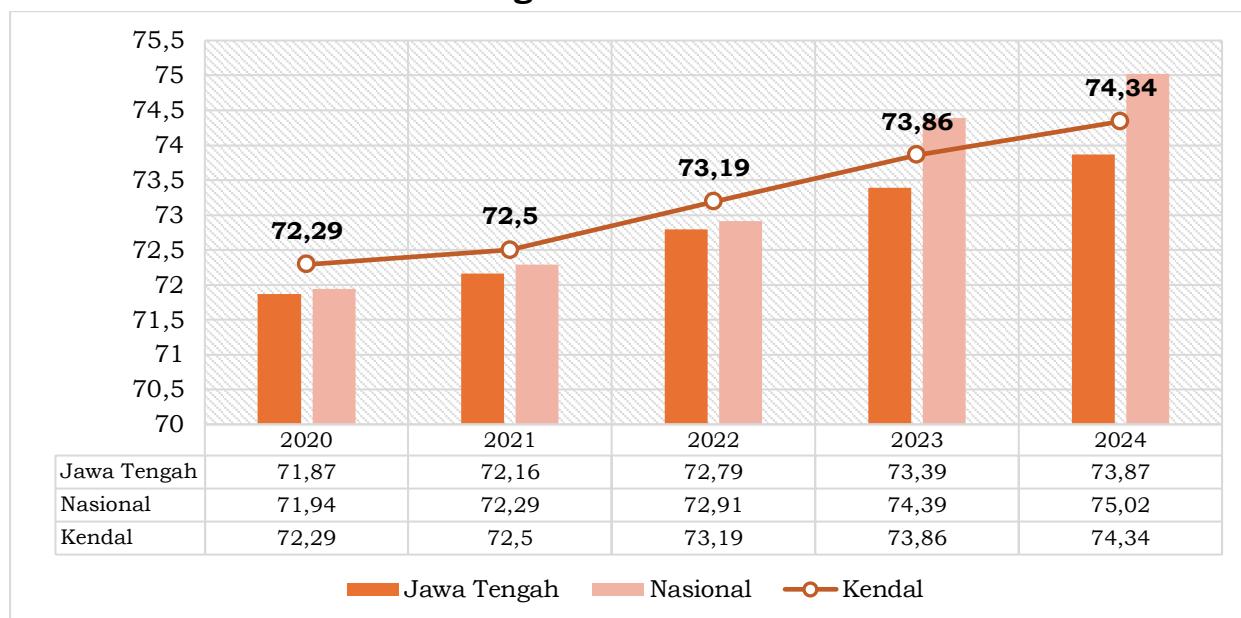
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 72,29 dan meningkat menjadi 73,86 pada tahun 2023. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 74,34. Peningkatan ini sejalan dengan tren di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional, yang juga menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Kendal berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah yakni 73,87, namun masih di bawah rata-rata nasional sebesar 75,02, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar II.17
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



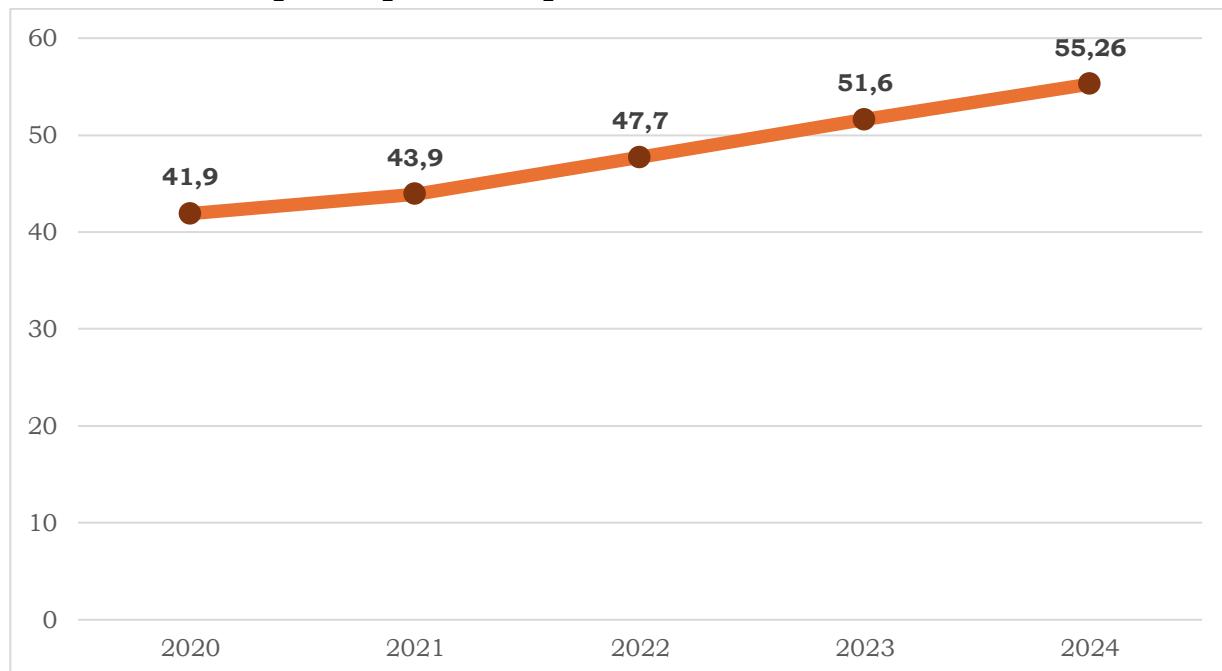
Sumber: BPS Indonesia, 2025

f. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan hasil pembagian antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita masyarakat di suatu wilayah. Di Kabupaten Kendal, PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp41,90 juta, kemudian meningkat menjadi Rp43,90 juta pada 2021. Tren kenaikan berlanjut pada 2022, dengan PDRB per kapita mencapai Rp47,70 juta, lalu meningkat lagi pada 2023 menjadi Rp51,60 juta. Proyeksi untuk 2024 menunjukkan

pertumbuhan lebih lanjut dengan nilai Rp55,26 juta. Secara umum, peningkatan PDRB per kapita ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal dalam periode 2020–2024.

Gambar II.18
PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2020–2024



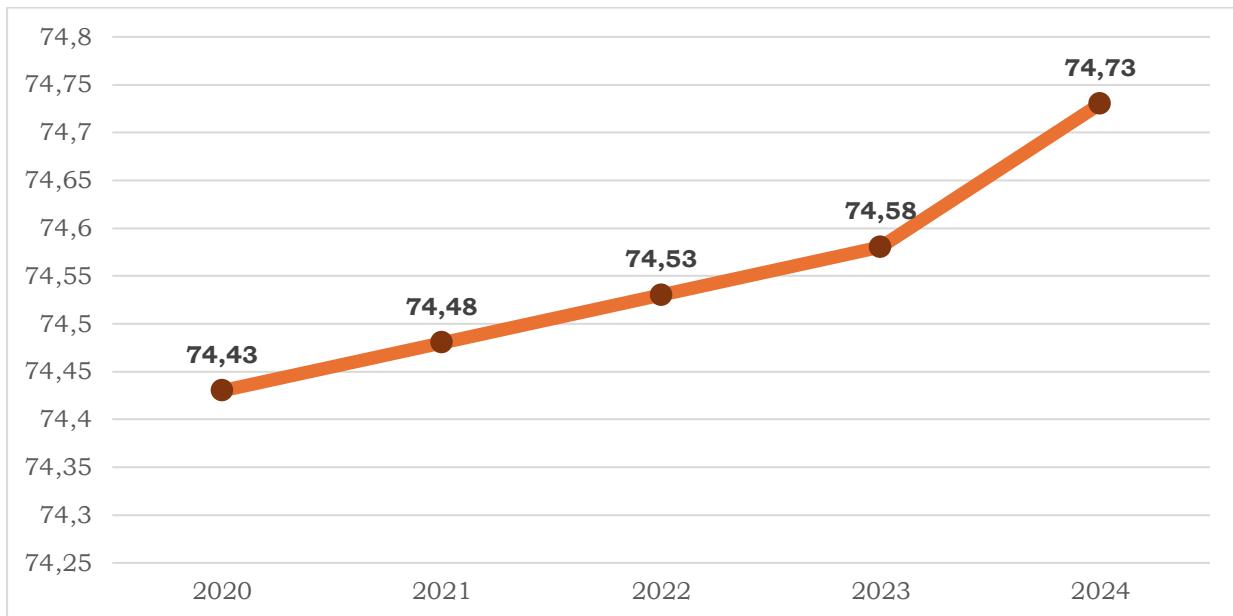
Sumber: BPS Kabupaten Kendal, 2025

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk Semua merupakan prinsip pembangunan kesehatan yang menjamin akses layanan bagi seluruh penduduk, tanpa membedakan usia, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, maupun kelompok sosial. Tujuannya adalah memastikan setiap individu, termasuk yang rentan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu sepanjang siklus hidupnya.

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Kendal menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024, yaitu berturut-turut sebesar 74,43 tahun, 74,48 tahun, 74,53 tahun, 74,58 tahun, dan mencapai 74,73 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam aspek kesehatan masyarakat, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, gizi, dan kesadaran hidup sehat. Meskipun peningkatannya relatif kecil tiap tahun, tren ini menunjukkan arah yang positif dalam pencapaian derajat kesehatan penduduk yang lebih baik.

Gambar II.19
Usia Harapan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kendal, 2025

Kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal ditunjukkan melalui dua indikator, yaitu prevalensi stunting dan Indeks Keluarga Sehat. Prevalensi stunting mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka stunting cukup tinggi yaitu sebesar 17,53%, namun mengalami penurunan drastis pada 2021 menjadi 8,06%. Setelah itu, terjadi sedikit peningkatan menjadi 11,44% pada 2022 dan relatif stabil di angka 10,91% pada 2023 serta 11,25% pada 2024. Meskipun ada perbaikan dibandingkan awal periode, masih diperlukan upaya yang lebih terarah dalam perbaikan gizi, penguatan edukasi keluarga, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar untuk menjaga tren penurunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Indeks Keluarga Sehat menunjukkan tren positif yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2020, indeks ini berada di angka 0,22 dan sempat turun ke 0,19 di tahun 2021. Namun, sejak 2022 indeks terus mengalami peningkatan menjadi 0,33, lalu 0,35 di tahun 2023, dan mencapai 0,39 pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan dalam aspek kesehatan keluarga secara menyeluruh, seperti akses terhadap layanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta cakupan imunisasi dan layanan kesehatan ibu dan anak. Meskipun nilai indeks masih relatif rendah, tren peningkatan ini merupakan sinyal positif bahwa program-program kesehatan keluarga mulai menunjukkan dampak yang nyata di masyarakat.

Tabel II.13
Indikator Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Stunting	%	17,53	8,06	11,44	10,91	11,25
2.	Indeks Keluarga Sehat	%	0,22	0,19	0,33	0,35	0,39

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2025

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan membentuk masyarakat yang mandiri, cerdas, serta bermartabat. Akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi, sekaligus menciptakan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk berkembang. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan bermutu menjadi prioritas dalam upaya membangun masa depan daerah dan bangsa yang lebih baik.

Pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kendal. Dua indikator utama yang menggambarkan pencapaian dalam sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Keduanya mencerminkan capaian akses pendidikan masyarakat serta proyeksi kesempatan pendidikan anak-anak di masa depan.

Selama periode 2020–2024, Kabupaten Kendal menunjukkan tren peningkatan pada kedua indikator tersebut. RLS meningkat dari 7,45 tahun pada 2020 menjadi 7,74 tahun pada 2024, mencerminkan perbaikan akses pendidikan formal yang berhasil dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Sementara itu, HLS mengalami peningkatan dari 12,95 tahun menjadi 13,00 tahun, yang mengindikasikan bahwa anak-anak usia sekolah di Kendal memiliki harapan lebih besar untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas bahkan perguruan tinggi. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan positif dalam pemerataan pendidikan dan efektivitas program pembangunan sektor pendidikan daerah.

Tabel II.14
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,45	7,46	7,71	7,73	7,74
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95	12,96	12,97	12,99	13,00

Sumber: BPS Kabupaten Kendal, 2025

Data literasi dan numerasi Kabupaten Kendal tahun 2023–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan pada seluruh jenjang pendidikan dasar. Literasi membaca pada jenjang SD/sederajat meningkat dari 66,32% pada tahun 2023 menjadi 74,28% di tahun 2024, sementara pada jenjang SMP/sederajat meningkat dari 72,5% menjadi 79,96% di periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembelajaran berbasis literasi serta perbaikan kurikulum dan metode ajar yang lebih interaktif dan kontekstual.

Peningkatan yang lebih tinggi terlihat pada indikator numerasi. Pada jenjang SD/sederajat, angka numerasi meningkat dari 50,17% di tahun 2023 menjadi 63,61% di tahun 2024. Sedangkan pada jenjang SMP/sederajat, peningkatan terjadi dari 50,28% menjadi 73,76%. Lompatan ini menunjukkan adanya penguatan pada pembelajaran matematika dasar, baik dari sisi metode

pengajaran, penggunaan media pembelajaran yang lebih adaptif, maupun peningkatan kapasitas guru. Data ini sekaligus menjadi indikator bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam meningkatkan kompetensi berpikir kritis dan logis peserta didik.

Tabel II.15
Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Kendal Tahun 2023-2024

	Indikator	2023	2024
a)	Literasi Membaca SD/Sederajat	66,32	74,28
b)	Literasi Membaca SMP/Sederajat	72,5	79,96
c)	Numerasi SD/Sederajat	50,17	63,61
d)	Numerasi SMP/Sederajat	50,28	73,76

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kendal, 2025

Tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang cukup fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai kegemaran membaca berada di angka 40,37 dan meningkat signifikan menjadi 60,73 pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023 dengan nilai tetap di angka 53,98, sebelum akhirnya kembali melonjak tajam mencapai 84,69 pada tahun 2024. Pola ini mencerminkan adanya dinamika dalam pelaksanaan program literasi masyarakat. Meningkatnya minat baca dapat dihubungkan dengan kemudahan akses informasi digital dan penguatan layanan perpustakaan, sementara penurunan pada pertengahan periode menunjukkan perlunya kesinambungan dalam intervensi kebijakan.

Selaras dengan tren kegemaran membaca, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga menunjukkan peningkatan secara bertahap dan signifikan. Dari nilai 7,7 pada tahun 2020, indeks ini naik menjadi 7,8 pada 2021, lalu meningkat menjadi 8,43 pada 2022, dan mengalami peningkatan pada 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 12,6 dan 66,39. Tren positif ini menunjukkan bahwa selain meningkatnya minat baca, kemampuan literasi masyarakat juga berkembang, baik dari sisi akses bahan bacaan maupun kemampuan memahami dan menggunakan informasi secara efektif. Kenaikan tajam pada tahun 2024 mengindikasikan keberhasilan program-program strategis dalam pembangunan literasi, yang kemungkinan besar mencakup inovasi layanan digital, kolaborasi dengan institusi pendidikan, serta perluasan jaringan literasi hingga ke desa.

Tabel II.16
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	40,37	60,73	53,98	53,98	84,69

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	7,7	7,8	8,43	12,6	66,39
--	-----	-----	------	------	-------

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

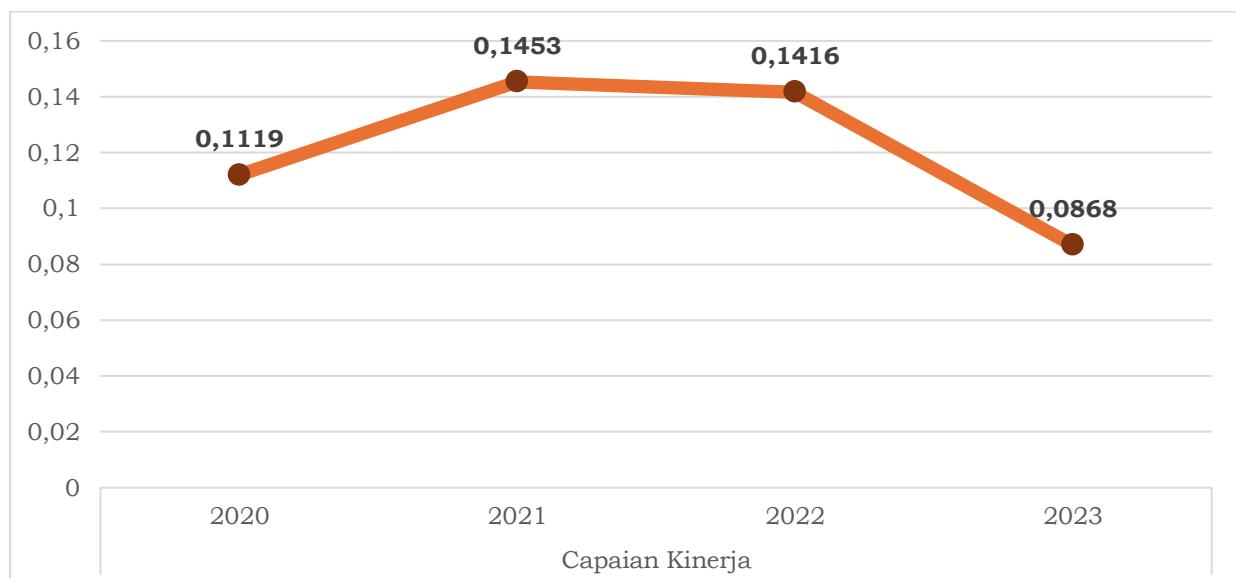
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Dengan memastikan setiap individu, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses terhadap jaminan sosial, bantuan sosial, serta perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi, maka kesempatan untuk hidup layak dan sejahtera dapat terdistribusi secara lebih merata. Sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan dan tantangan zaman akan memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi krisis serta mempersempit kesenjangan sosial.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal mengalami perubahan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, angka cakupan tercatat sebesar 0,1119 dan meningkat menjadi 0,1453 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, cakupan sedikit menurun menjadi 0,1416 namun masih berada pada level yang cukup tinggi. Kondisi ini berubah cukup drastis di tahun 2023, ketika cakupan menurun tajam menjadi 0,0868.

Penurunan pada tahun 2023 diperkirakan disebabkan oleh meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan tenaga kerjanya. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya penguatan sosialisasi, perluasan cakupan ke sektor informal, serta penegakan regulasi agar perlindungan sosial bagi tenaga kerja dapat terus ditingkatkan.

Gambar II.20
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal
Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, 2024

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadaban. Nilai-nilai keagamaan tidak hanya membentuk karakter individu, tetapi juga menjadi modal sosial dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berintegritas. Di sisi lain, pemajuan serta pelestarian kebudayaan terus didorong untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa. Dengan menjaga keberagaman budaya dan kearifan lokal, bangsa Indonesia dapat memperkuat daya saing global tanpa kehilangan akar tradisinya, menuju masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju.

Capaian indikator pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kendal pada tahun 2020–2024 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelestarian budaya. Selama lima tahun berturut-turut, persentase cagar budaya yang dilestarikan tercatat konsisten di angka 100%, menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya fisik. Sementara itu, persentase budaya lokal yang dilestarikan juga mencapai 100% sejak tahun 2021 setelah sebelumnya tidak tercatat pada tahun 2020. Konsistensi capaian ini mencerminkan upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat Kendal yang terus dijaga secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan yang berkarakter.

**Tabel II.17
Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	NA	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, 2025

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Peningkatan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing sebagai penggerak utama pembangunan. Upaya ini tidak hanya mencakup penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pertama pendidikan karakter, tetapi juga memastikan masyarakat tumbuh dalam lingkungan yang inklusif dan setara. Dalam konteks ini, strategi pengarusutamaan gender menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan, mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan memastikan bahwa setiap kelompok, tanpa kecuali, memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

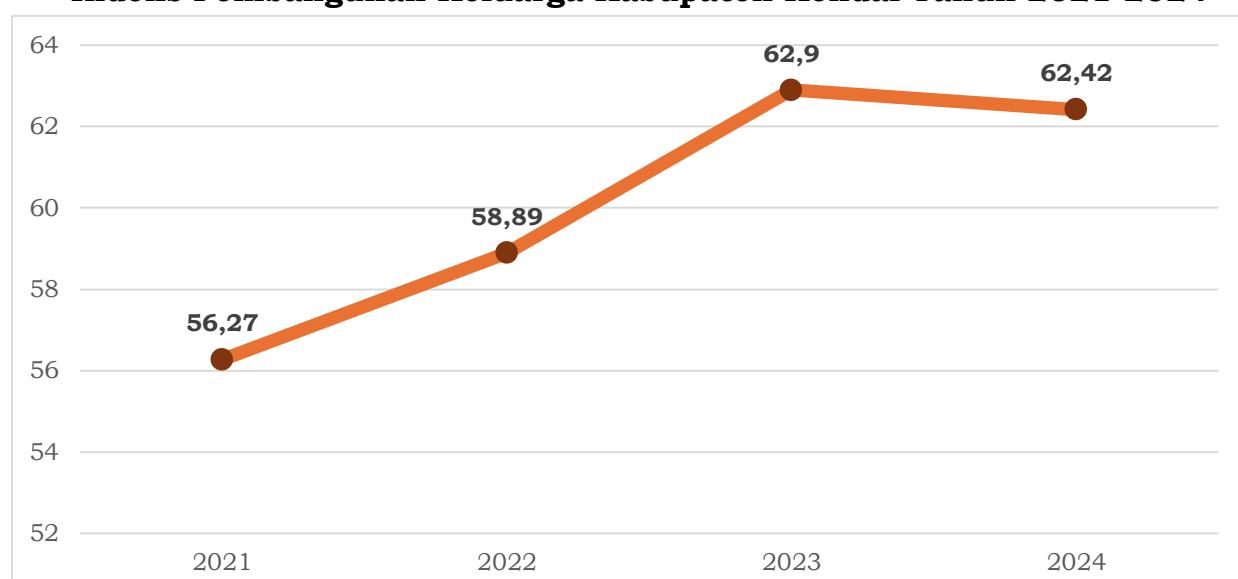
a. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator komposit yang mengukur kualitas pembangunan keluarga melalui tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang mendukung ketahanan serta kesejahteraan keluarga di suatu wilayah. Data menunjukkan

perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Kendal selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, nilai indeks berada di angka 56,27 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 58,89. Tren positif ini berlanjut cukup signifikan pada tahun 2023 dengan capaian indeks sebesar 62,90. Namun, pada tahun 2024, terjadi sedikit penurunan nilai indeks menjadi 62,42 meskipun tetap lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan keluarga di Kabupaten Kendal mengalami progres yang baik dalam tiga tahun terakhir, mencerminkan peningkatan dalam aspek ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Penurunan kecil pada tahun 2024 dapat menjadi sinyal perlunya evaluasi program atau penguatan kebijakan lintas sektor seperti ketahanan ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, atau akses layanan kesehatan dan perlindungan anak. Konsistensi dalam pemantauan dan intervensi tepat sasaran sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pembangunan keluarga di masa mendatang.

Gambar II.21
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024



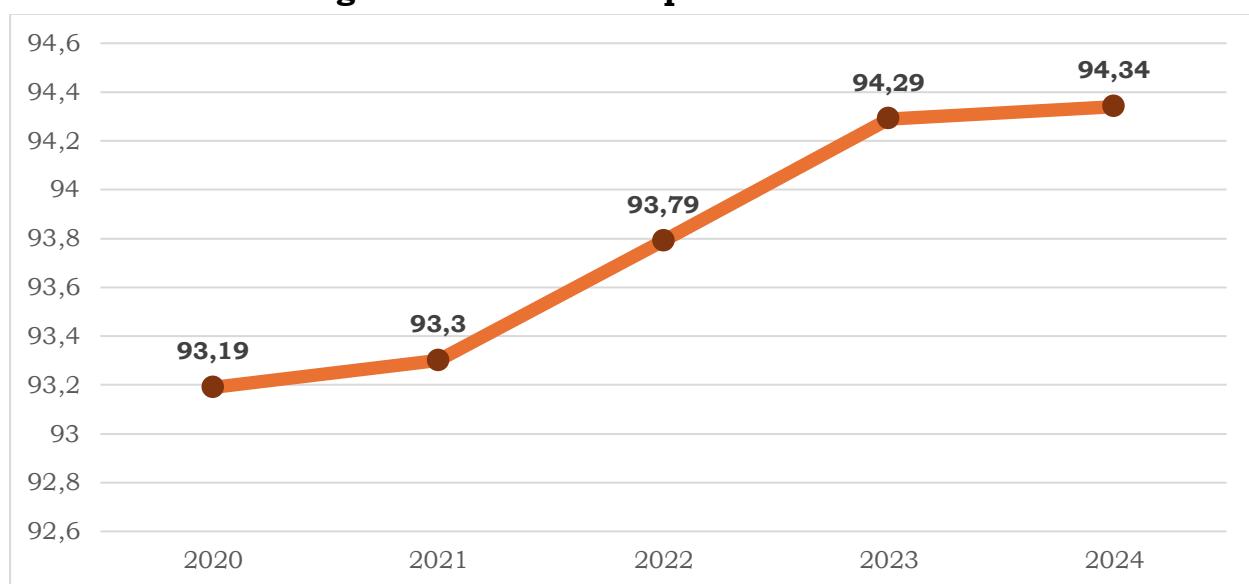
b. Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG. IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kendal mengalami peningkatan positif dari 93,19 pada tahun 2020 menjadi 94,34 pada tahun 2024. Capaian ini tidak hanya menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, tetapi juga berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 93,2. Kenaikan ini mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Peningkatan IPG ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Kendal dalam mendorong kesetaraan gender melalui kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Capaian ini menjadi indikator penting bahwa perempuan semakin memiliki akses yang setara dalam menikmati hasil pembangunan, sekaligus menjadi landasan kuat untuk terus memperkuat pembangunan yang adil dan berkelanjutan ke depan.

Gambar II.22
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Indonesia, 2025

c. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi dan juga merupakan indikator pendukung pembangunan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada isu gender. Adapun indikator penyusun yang digunakan yaitu proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan, proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama, persentase keterwakilan di parlemen, proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Hasil klasifikasi dapat digunakan untuk peramalan IKG dan landasan pengambilan kebijakan dan penyusunan program untuk mengatasi ketimpangan pembangunan berbasis gender.

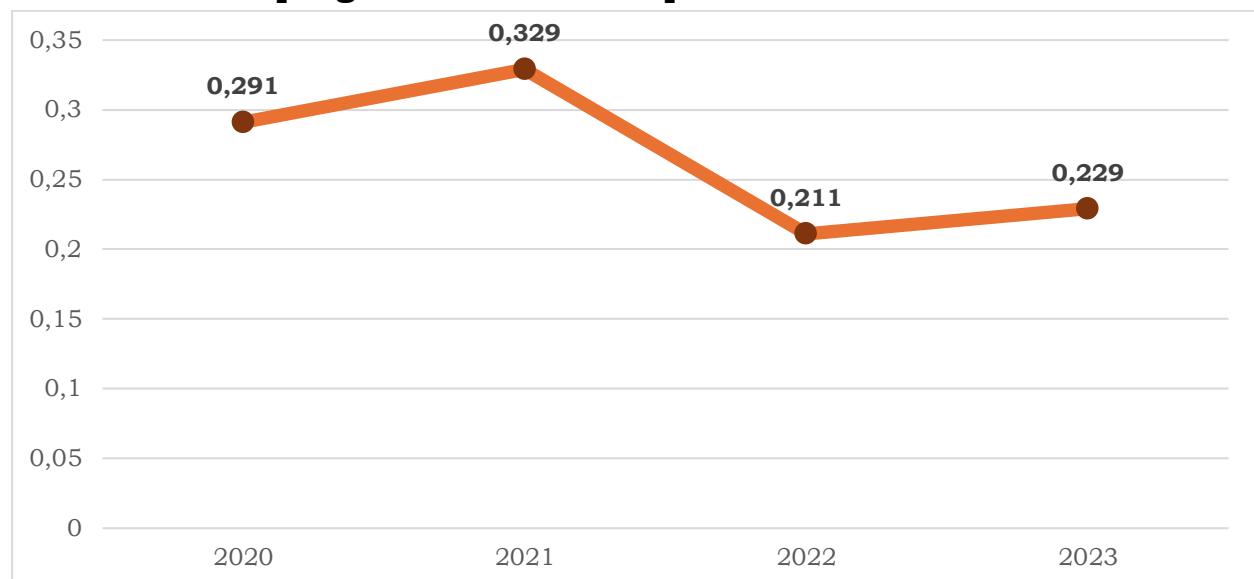
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Kendal menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun selama periode 2020 hingga 2023. IKG tercatat sebesar 0,291 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 0,329 pada tahun 2021. Selanjutnya, nilai IKG menurun menjadi 0,211 pada tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 0,229 pada tahun 2023. Berdasarkan klasifikasi IKG, yaitu rendah (kurang dari 0,405), menengah bawah (0,405–0,450), menengah atas (0,450–0,495), dan tinggi (lebih dari 0,495), Kabupaten Kendal termasuk dalam kategori rendah sepanjang periode tersebut.

Nilai IKG yang rendah menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kendal relatif kecil, yang merupakan indikator positif dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Semakin rendah nilai IKG, semakin kecil pula ketimpangan gender yang terjadi. Oleh karena itu, kondisi

ini mencerminkan kemajuan dalam pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender, meskipun tetap diperlukan komitmen dan intervensi yang berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut.

Gambar II.23

Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Kendal Tahun 2020 – 2023



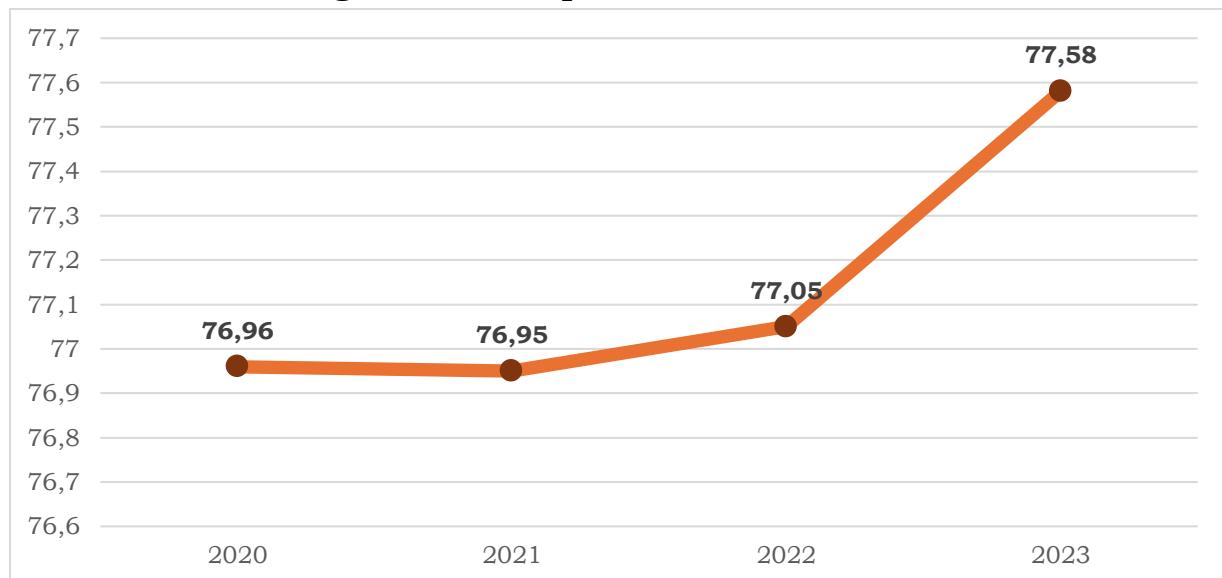
Sumber : DP2KBP2PA Kabupaten Kendal Tahun 2024

d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kendal menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun dalam periode 2020 hingga 2024. Dimulai dari angka 76,96 pada tahun 2020, IDG sedikit menurun menjadi 76,95 di tahun 2021, namun kemudian meningkat menjadi 77,05 pada 2022 dan kembali naik signifikan ke angka 77,58 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan peran perempuan dalam berbagai bidang strategis, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kontribusi ekonomi. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan arah positif dalam pemberdayaan gender yang semakin merata di Kabupaten Kendal.

Gambar II.24

Perkembangan IDG Kabupaten Kendal Tahun 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kendal tahun 2019-2023, dilihat dari perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan peningkatan, yaitu tahun 2019 sebesar 22,22% dan tahun 2023 sebesar 24,44%.

Kondisi perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi mengalami perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yaitu tahun 2019 sebesar 48,20% dan mengalami peningkatan 52,99% tahun 2023. Sedangkan sumbangsih perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Kendal terus mengalami kenaikan tiap tahun, yaitu tahun 2019 sebesar 34,31% dan tahun 2023 sebesar 35,21%. Secara rinci perkembangan komponen pembentuk IDG Kabupaten Kendal dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.18
Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Kendal
Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	48,2	46,1	55,07	52,29	52,99
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	34,31	34,29	34,6	34,59	35,21

Sumber : Kementerian KPPA, Buku PMBG, BPS, 2024

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Kendal. SDM yang kompeten, produktif, dan adaptif terhadap perubahan akan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan nilai tambah di berbagai sektor strategis, seperti industri, pertanian, pariwisata, dan UMKM. Kabupaten Kendal yang tengah mengembangkan Kawasan Industri Kendal (KIK) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, membutuhkan dukungan SDM yang memiliki keterampilan teknis, manajerial, dan soft skill yang sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, dan keterpaduan antara dunia pendidikan dan dunia kerja menjadi hal yang sangat krusial untuk meningkatkan daya saing daerah.

Namun demikian, tantangan dalam pembangunan SDM di Kabupaten Kendal masih perlu diatasi, seperti kesenjangan antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha, serta masih terbatasnya akses pendidikan tinggi dan pelatihan kerja di wilayah pedesaan. Pemerintah daerah telah

berupaya mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan melalui program pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, serta penguatan pendidikan vokasional di sekolah menengah kejuruan (SMK). Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas angkatan kerja lokal, mengurangi pengangguran terbuka, serta meningkatkan kontribusi SDM Kendal terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel II.19

Angka Ketergantungan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jiwa	1.018.505	1.025.020	1.053.400	1.084.154	1.064.812
0-14	227453	226457	233392	237921	230688
15-64	725890	729761	743013	758335	748455
65+	65162	68802	76995	87898	85669
Dependency Ratio (%)	40,3	40,5	41,8	43,0	42,3

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka, 2021-2025 (diolah)

Struktur umur penduduk merupakan gambaran distribusi usia dalam suatu wilayah dan menjadi dasar penting dalam analisis beban pembangunan sosial dan ekonomi. Salah satu indikator untuk memahami struktur ini adalah angka ketergantungan (dependency ratio), yaitu perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Angka ini menunjukkan seberapa banyak individu yang tidak berada pada usia kerja harus ditanggung oleh setiap 100 orang usia kerja. Semakin tinggi angka tersebut, semakin besar beban ekonomi yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif.

Di Kabupaten Kendal, tren angka ketergantungan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, 100 penduduk usia produktif harus menanggung 40,3 penduduk non-produktif. Angka ini naik menjadi 40,5 pada tahun 2021, lalu meningkat lebih tajam menjadi 41,8 di tahun 2022 dan 43,0 di tahun 2023. Pada tahun 2024, angka ini sedikit menurun menjadi 42,3. Artinya, pada tahun 2024, setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 42 orang yang termasuk dalam kelompok usia belum atau tidak lagi produktif. Kenaikan angka selama beberapa tahun ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk lansia serta anak-anak, yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Meskipun angka ketergantungan Kabupaten Kendal masih berada dalam kisaran yang relatif moderat, tren peningkatan yang terjadi memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk non-produktif dapat menimbulkan tekanan terhadap sistem sosial dan ekonomi jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang adaptif. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk usia kerja sangat penting, baik melalui penyediaan lapangan kerja, pelatihan vokasi, maupun peningkatan akses pendidikan tinggi. Dengan strategi yang tepat, peningkatan rasio ketergantungan dapat diantisipasi agar tidak menghambat potensi bonus demografi yang sedang atau akan terjadi.

2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi memegang peranan krusial sebagai pendorong utama dalam menjaga sekaligus mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan peningkatan kapasitas inovasi tidak hanya mampu menciptakan efisiensi, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya sektor-sektor baru yang lebih adaptif dan kompetitif. Dalam jangka panjang, penguatan Iptek dan inovasi akan membentuk fondasi bagi struktur ekonomi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus menjawab tantangan global yang terus berkembang.

Berdasarkan data Rasio PDRB Kabupaten Kendal tahun 2020–2024, sektor industri pengolahan menunjukkan tren penurunan meskipun relatif stabil. Rasio PDRB industri pengolahan tercatat sebesar 42,29 persen pada tahun 2020 dan sedikit menurun menjadi 42,27 persen di tahun 2021. Penurunan berlanjut di tahun 2022 hingga 2024 dengan masing-masing capaian sebesar 41,94 persen, 41,73 persen, dan 41,70 persen. Sementara itu, rasio PDRB sektor akomodasi makan dan minum tetap stagnan di angka 3,25 persen selama lima tahun terakhir.

Penurunan pada sektor industri pengolahan menunjukkan perlunya penguatan dan revitalisasi sektor tersebut agar tetap menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah. Sementara stagnasi pada sektor akomodasi makan dan minum mengindikasikan potensi yang belum sepenuhnya digali, terutama dalam konteks peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Optimalisasi kedua sektor ini sangat penting guna memperkuat struktur ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berdaya saing.

Tabel II.20

Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

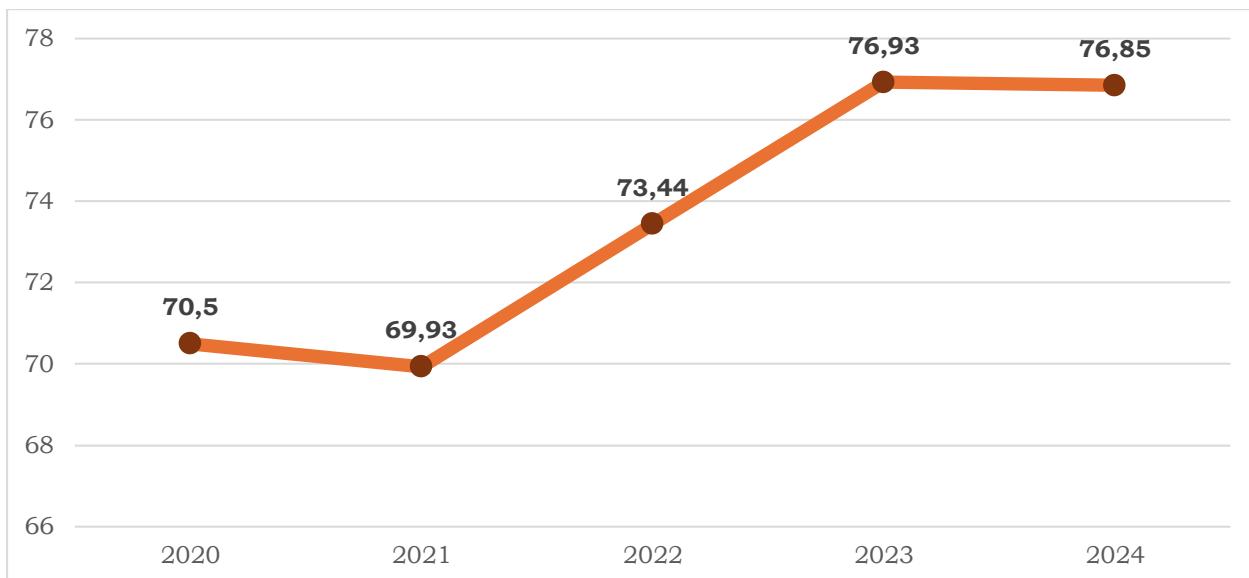
No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	42,29	42,27	41,94	41,73	41,70
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Sumber: BPS Kabupaten Kendal, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 70,5 persen dan sempat menurun sedikit menjadi 69,93 persen di tahun 2021. Namun, setelahnya mengalami lonjakan yang cukup signifikan menjadi 73,44 persen pada 2022, lalu meningkat lagi menjadi 76,93 persen di 2023, dan sedikit menurun menjadi 76,85 persen di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin banyaknya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, yang dapat menjadi indikasi pulihnya kondisi ketenagakerjaan pascapandemi serta meningkatnya akses terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Kendal.

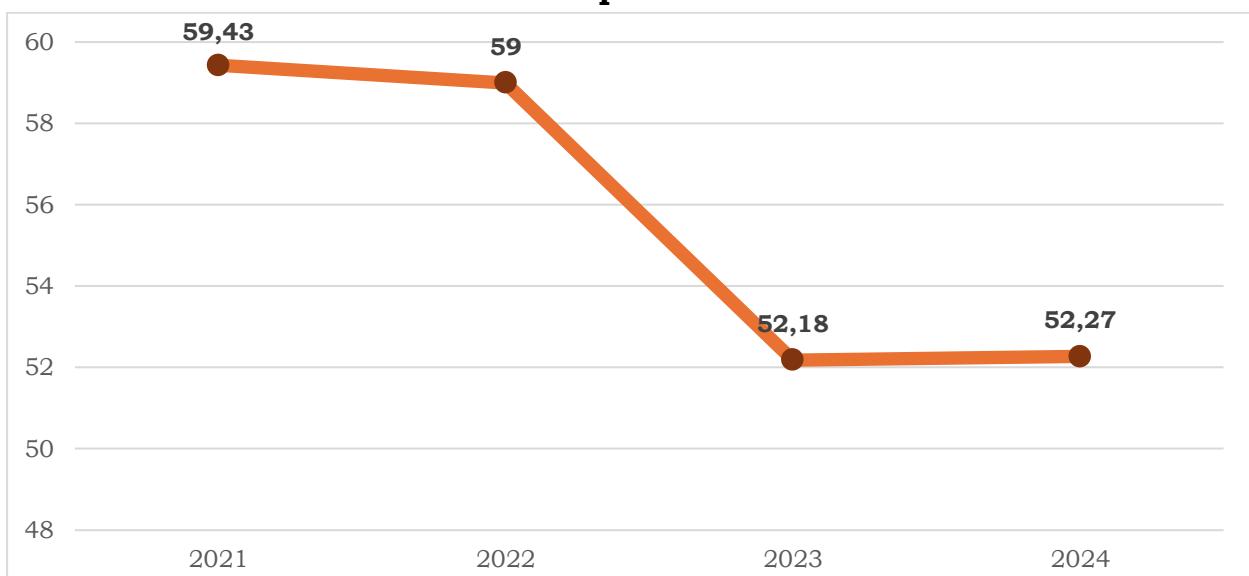
Gambar II.25

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024 (%)



Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2021, indeks berada di angka 59,43 dan sedikit turun menjadi 59 pada tahun 2022. Penurunan lebih tajam terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 52,18, yang hanya mengalami peningkatan tipis menjadi 52,27 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam mempertahankan ekosistem inovasi di daerah, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan inovasi yang lebih terintegrasi guna mendorong perbaikan kinerja daerah dalam menciptakan solusi-solusi pembangunan yang kreatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Gambar II.26
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024

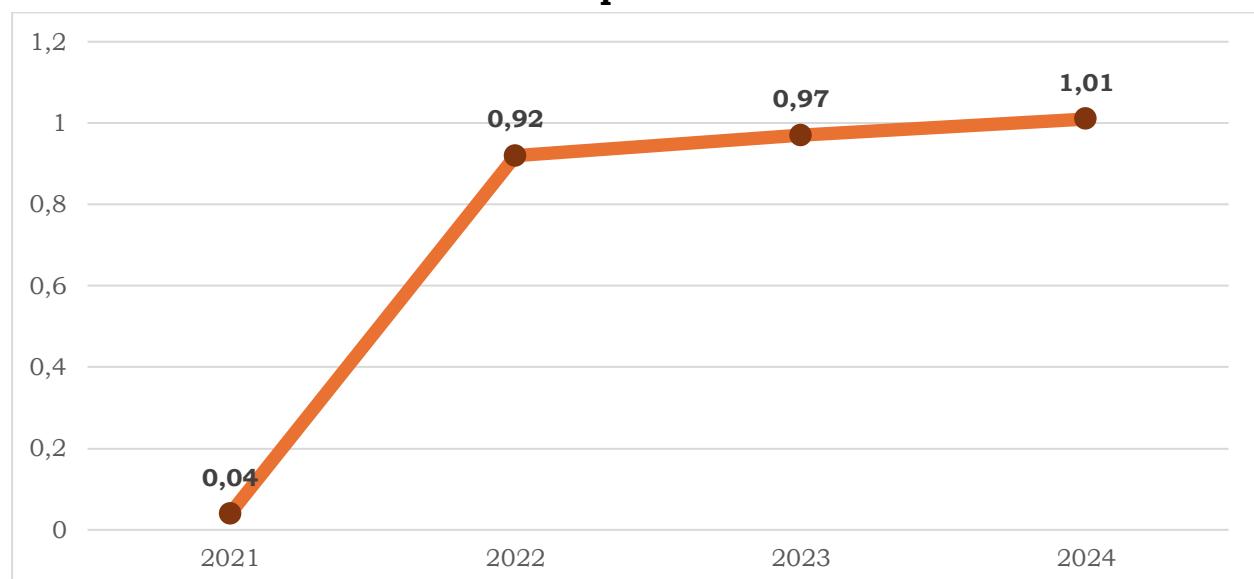


Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Rasio kewirausahaan merupakan indikator yang mengukur jumlah wirausahawan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik ekosistem kewirausahaan daerah tersebut dalam menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, rasio kewirausahaan Kabupaten Kendal menunjukkan tren peningkatan

signifikan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, rasio ini masih sangat rendah yakni 0,04. Namun, terjadi lonjakan drastis di tahun 2022 menjadi 0,92, lalu meningkat menjadi 0,97 pada 2023, dan mencapai 1,01 pada tahun 2024. Kenaikan tajam ini mencerminkan adanya upaya serius dalam pengembangan UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan akses permodalan. Pencapaian rasio di atas angka 1,0 pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa jumlah wirausahanawati telah melampaui standar minimal nasional, yang umumnya ditargetkan sekitar 1 persen dari populasi usia produktif. Ini merupakan sinyal positif bagi perekonomian daerah karena menunjukkan bahwa kewirausahaan mulai menjadi pilihan karier yang diminati dan berkembang secara berkelanjutan di Kabupaten Kendal.

Gambar II.27
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru menjadi strategi penting dalam mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan, dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa mengorbankan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ekonomi hijau menekankan pada efisiensi sumber daya, penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, terutama pada sektor-sektor seperti pertanian, industri, dan energi. Sementara itu, ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan melalui kegiatan seperti perikanan berkelanjutan, konservasi ekosistem pesisir, dan pengembangan wisata bahari. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menciptakan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk menjamin kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang.

Capaian perekonomian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kendal selama periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan positif meskipun kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan bertahap. Setelah mengalami kontraksi sebesar -1,04% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi, pertumbuhan ekonomi sektor ini meningkat secara konsisten: 2,72%

(2021), 2,45% (2022), 2,90% (2023), dan sedikit melandai di 2,88% pada tahun 2024. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PDRB mengalami penurunan dari 19,24% di tahun 2020 menjadi 18,07% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor pertanian kembali tumbuh, peran relatifnya dalam struktur ekonomi daerah cenderung melemah, kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya kontribusi sektor-sektor lain seperti industri pengolahan atau jasa.

Tabel II.21
Capaian Perekonomian Sektor Pertanian
Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	-1,04	2,72	2,45	2,90	2,88
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	19,24	19,06	18,57	18,33	18,07

Sumber: BPS Kabupaten Kendal, 2025

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses strategis dalam mentransformasikan cara kerja, layanan, dan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi. Pengarusutamaan transformasi digital menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh sektor pembangunan – mulai dari pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, hingga sektor ekonomi – dapat beradaptasi dan berkembang dalam era digital. Pengarusutamaan ini mencakup penyusunan kebijakan, pengembangan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat, serta integrasi sistem informasi yang mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kabupaten Kendal telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengarusutamakan transformasi digital melalui berbagai inisiatif. Peluncuran aplikasi super "Gampil" oleh Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan layanan publik, seperti administrasi kependudukan dan perizinan, ke dalam satu platform digital yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, program Smart City yang dijalankan sejak 2018 telah membawa Kendal meraih penghargaan Top Digital Awards 2024, dengan fokus pada inovasi dan investasi berbasis teknologi. Upaya ini diperkuat dengan kolaborasi bersama Telkom CorpU untuk mengembangkan solusi berbasis Internet of Things (IoT), seperti pengelolaan sampah digital dan penerangan jalan pintar, yang mendukung efisiensi layanan publik dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Tabel II.22
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertumbuhan Ekonomi Informasi dan Komunikasi (%)	13,76	6,2	3,56	11,38	8,77
Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	3,66	3,67	3,46	3,54	3,57

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, pertumbuhan ekonomi sektor Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kendal menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Tahun 2020 mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,76 persen, kemungkinan besar dipicu oleh peningkatan penggunaan teknologi digital selama pandemi COVID-19. Namun, tren menurun terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dengan penurunan tajam pada 2022 sebesar 3,56 persen. Meskipun demikian, sektor ini mengalami rebound di tahun 2023 dan 2024 dengan pertumbuhan masing-masing 11,38 persen dan 8,77 persen, yang mencerminkan pemulihan dan adaptasi ekonomi digital di masyarakat.

Kontribusi sektor Informasi dan Komunikasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kendal selama lima tahun terakhir relatif stabil di kisaran 3,4–3,6 persen. Meskipun kontribusinya terhadap total PDRB belum signifikan dibandingkan sektor lainnya, tren stabil ini mengindikasikan peran sektor ini yang konsisten dalam struktur ekonomi daerah. Dengan pertumbuhan yang kembali meningkat pasca-2022, terdapat peluang untuk memperkuat sektor ini sebagai penggerak ekonomi baru di Kendal, khususnya melalui dukungan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi, dan kolaborasi dengan sektor pendidikan dan industri kreatif.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Melalui penguatan konektivitas antarwilayah di dalam negeri serta harmonisasi kebijakan dengan standar global, Indonesia dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung antara sektor hulu-hilir, industri besar dan UMKM, serta pusat dan daerah. Keterpaduan ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha dalam negeri untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan nilai tambah produk ekspor yang berorientasi pasar internasional.

Tabel II.23

**Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-7,01	-7,01	-7,01	-7,01	-7,01
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,62	27,87	27,07	26,41	26,80
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	6,18	7,68	8,73	9,60	9,23

Sumber: BPS Kabupaten Kendal, 2025

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung dan saling memperkuat. Wilayah perkotaan dikembangkan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju, didukung oleh infrastruktur modern, aksesibilitas tinggi, serta tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan untuk menjamin kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, pembangunan perdesaan difokuskan pada kemandirian dan keberlanjutan melalui penguatan potensi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi dengan sistem ekonomi regional. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan konektivitas yang efektif antara kota dan desa, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, dan memperkuat ketahanan wilayah secara keseluruhan.

Tabel II.24

**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Persentase Desa Mandiri,
Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	97,61	98,01	85,2	85,22	85,24
Persentase Desa Mandiri,	4,51%	4,89%	5,64%	7,14%	12,41%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, 2025

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Kendal menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, angka ini cukup tinggi, masing-masing sebesar 97,61% dan 98,01%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis hingga mencapai 85,2% dan hanya sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, yaitu sebesar 85,22% dan 85,24%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemeliharaan kualitas dan ketersediaan hunian layak, baik dari sisi fisik bangunan, aksesibilitas terhadap sarana dasar, maupun kepemilikan status lahan.

Sementara itu, indikator persentase desa mandiri di Kabupaten Kendal menunjukkan tren positif dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020, desa mandiri hanya sebesar 4,51%, namun mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 12,41% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan hasil dari upaya pemberdayaan desa dan penguatan kapasitas kelembagaan, ekonomi, dan sosial masyarakat desa. Meski demikian, adanya peningkatan status desa belum sepenuhnya selaras dengan tren akses hunian layak yang

menurun, yang menunjukkan perlunya integrasi lebih lanjut antara pembangunan desa dan perbaikan kondisi perumahan masyarakat.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Upaya untuk mencapainya mencakup kesinambungan fiskal, yakni kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran negara secara sehat dan berkelanjutan. Selain itu, menjaga stabilitas moneter—melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar—serta memastikan ketahanan sektor keuangan adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Kebijakan yang pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, serta mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Dalam praktiknya, stabilitas ekonomi makro menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan daerah yang responsif dan inklusif. Di Kabupaten Kendal, pemerintah daerah terus berupaya menjaga iklim investasi yang sehat dan meningkatkan kualitas belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sinergi antara penguatan fiskal daerah dan pemberdayaan sektor UMKM menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kendal yang tetap positif di tengah tantangan global serta inflasi daerah yang berhasil dikendalikan secara optimal.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif memerlukan tata kelola yang efisien, efektif, dan akuntabel. Tata kelola sektor publik harus didasarkan pada prinsip transparansi, keterbukaan informasi, serta kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Di tengah dinamika perubahan dan kompleksitas kebutuhan masyarakat, tata kelola yang responsif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendorong reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang terus meningkat sejak tahun 2020. Dimulai dari skor 61,39 pada tahun 2020, kemudian naik ke 64,25 (2021), 66,51 (2022), dan bertahan di angka 66,71 pada tahun 2023 dan 2024. Kenaikan signifikan terjadi pada dua tahun awal, namun kecenderungan stagnasi pada dua tahun terakhir menunjukkan perlunya pembaruan strategi reformasi untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi yang lebih progresif. Meskipun demikian, konsistensi skor yang tinggi menunjukkan keberlanjutan komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif.

Pada indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terlihat adanya dinamika capaian dari tahun ke tahun. SAKIP meningkat dari 66,31 (2020) ke 68,88 (2021), kemudian sedikit menurun menjadi 67,83 pada 2022. Namun, capaian kembali meningkat signifikan pada 2023 menjadi 68,97

dan ditutup dengan skor tertinggi 69,97 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan perencanaan kinerja dan pertanggungjawaban publik secara sistematis. Peningkatan nilai SAKIP menjadi indikasi positif bahwa pemerintah daerah semakin mampu menyelaraskan perencanaan dengan pelaksanaan dan pelaporan program secara lebih akuntabel.

Sementara itu, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan pola pencapaian yang naik-turun. Dari angka 3,76 pada tahun 2020, indeks ini menurun ke 3,27 (2021) dan menyentuh titik terendah di 2,93 pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi peningkatan menjadi 3,81, walau kembali mengalami sedikit penurunan ke angka 3,66 di tahun 2024. Pola pencapaian ini menunjukkan perlunya penguatan pada aspek infrastruktur digital, interoperabilitas sistem, serta peningkatan kapasitas SDM ASN agar transformasi digital di lingkungan pemerintahan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sementara itu, Indeks Reformasi Hukum baru tercatat pada tahun 2023 dengan capaian 49, yang menjadi dasar pijakan awal dalam upaya pemberian sistem hukum dan peraturan di tingkat daerah.

Indeks Pelayanan Publik secara umum menunjukkan tren peningkatan dari 3,95 (2020) menjadi 4,34 (2021), lalu naik lagi menjadi 4,54 (2022). Namun, pada tahun 2023 terdapat sedikit penurunan ke angka 4,42. Capaian ini mencerminkan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan signifikan dari tahun ke tahun, tetap diperlukan evaluasi dan inovasi untuk menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan publik. Fokus pada peningkatan kepuasan masyarakat, efisiensi pelayanan, dan keterjangkauan akses menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas layanan publik yang prima.

Indeks Integritas Nasional Kabupaten Kendal pada periode 2021 hingga 2024 mengalami perubahan. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 72,46 dan menurun menjadi 71,41 di tahun 2022. Kemudian, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi 77,04 sebelum sedikit menurun kembali ke angka 75,38 pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan pada 2023, meskipun belum sepenuhnya stabil di tahun berikutnya. Dinamika tersebut mengindikasikan bahwa komitmen terhadap penguatan integritas di lingkungan pemerintahan harus terus diperkuat secara berkelanjutan dan merata agar capaian yang baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Tabel II.25
Capaian Kinerja Tata Kelola Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	IRB (Indeks Reformasi Birokrasi)	skor	61,39	64,25	66,51	66,71	66,71
2	SAKIP	skor	66,31	68,88	67,83	68,97	69,97
3	Indeks SPBE	Indeks	3,76	3,27	2,93	3,81	3,66
4	Indeks Reformasi Hukum	angka	-	-	-	49	
5	Indeks Pelayanan Publik	skor	3,95	4,34	4,54	4,42	
6.	Indeks Integritas Nasional	Indeks	-	72,46	71,41	77,04	75,38

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, Tahun 2025

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Arah kebijakan pembangunan hukum difokuskan pada upaya mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Hal ini dilakukan dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai pilar perlindungan terhadap martabat dan kebebasan individu. Sistem hukum yang responsif dan inklusif tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum.

Di sisi lain, pembangunan demokrasi diarahkan pada pencapaian demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial. Demokrasi substansial menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama dalam pengambilan kebijakan publik. Hal ini ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat, penguatan peran lembaga perwakilan, dan hadirnya ruang-ruang dialog yang inklusif. Demokrasi yang demikian mampu menghadirkan sistem pemerintahan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitimated oleh aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam kerangka itu, ketahanan nasional pun diperkuat melalui stabilitas politik yang berbasis pada penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Kinerja di bidang ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Kendal menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Hal ini tercermin dari persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang secara konsisten berada di angka 100 persen. Capaian ini mengindikasikan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi dan memastikan bahwa setiap aturan yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif untuk menjaga ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan merata menjadi elemen penting dalam menciptakan kepastian hukum serta mendorong budaya taat aturan di tengah masyarakat.

Sementara itu, capaian penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) juga menunjukkan performa maksimal selama empat tahun berturut-turut (2020–2023) dengan capaian 100 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 80,28 persen. Penurunan ini dapat menjadi indikasi adanya peningkatan dinamika sosial atau tantangan baru di lapangan yang perlu ditangani dengan strategi penegakan trantibum yang lebih adaptif dan kolaboratif. Untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat, pemerintah daerah perlu mengevaluasi faktor-faktor penyebab penurunan tersebut serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kendal.

Tabel II.26
Capaian Kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Ganguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	80,28

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kendal, Tahun 2025

2.1.4.3 Ketangguhan Daerah

Ketangguhan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan tercermin dari kemampuannya dalam meningkatkan daya saing wilayah secara konsisten. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan daerah dalam menghadapi dinamika global, nasional, dan lokal.

Pada tahun 2024, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kendal mencapai angka tertinggi dalam tiga tahun terakhir dengan capaian sebesar 3,68, naik signifikan dibandingkan tahun 2022 (3,10) dan 2023 (3,26). Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam berbagai pilar pembangunan daya saing, khususnya dalam aspek infrastruktur dan stabilitas ekonomi makro yang sebelumnya menjadi tantangan, kini menunjukkan lonjakan signifikan.

Dua pilar dengan skor tertinggi pada tahun 2024 adalah Pilar Adopsi TIK (4,50) dan Pilar Institusi (4,78). Capaian ini mencerminkan bahwa transformasi digital dan tata kelola kelembagaan di Kabupaten Kendal telah berkembang secara progresif. Sebaliknya, dua pilar dengan nilai terendah adalah Pilar Sistem Keuangan (1,56) dan Pilar Pasar Tenaga Kerja (2,81). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penguatan institusi dan digitalisasi mengalami percepatan, masih terdapat tantangan dalam memperluas akses layanan keuangan dan mengembangkan pasar tenaga kerja yang kompetitif. Oleh karena itu, perhatian ke depan perlu difokuskan pada penguatan sektor keuangan dan peningkatan kualitas SDM guna mendorong daya saing daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel II.27
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022-2023

Nilai Indeks	2022	2023	2024
Pilar Institusi	4,37	4,47	4,78
Pilar Infrastruktur	2,33	2,55	3,94
Pilar Adopsi TIK	3,33	4,48	4,5
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	2,96	2,95	3,82
Pilar Kesehatan	4,15	4,2	4,14
Pilar Keterampilan	3,02	3,22	3,8

Pilar Pasar Produk	2,09	2,12	2,89
Pilar Pasar Tenaga Kerja	3,04	2,88	2,81
Pilar Sistem Keuangan	3,26	2,07	1,56
Pilar Ukuran Pasar	2,08	4,64	4,67
Pilar Dinamisme Bisnis	5	3,42	4,84
Pilar Kapabilitas Inovasi	1,56	2,11	2,36
Indeks Daya Saing Daerah	3,1	3,26	3,68

Sumber: BRIN, 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Capaian pembangunan per urusan pemerintahan menjadi salah satu acuan dalam merumuskan kebijakan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun urusan penunjang. Berikut capaian pembangunan di setiap urusan pemerintahan Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024.

Tabel II.28

Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 19 tahun 2024) Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.a	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%				83,66	85,65
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%			99,54	99,72	99,12
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%			97,36	97,83	97,38
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%				12,41	21,39
1.b	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,81	0,88	0,78	0,94	0,85
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	%	80	66,6	83,33	100	100
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	94,7 9	100	99,99	99,99	99,95
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,9 9	99,9 2	99,96	99,99	99,97
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	97,8 9	99,44	99,25	99,98
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	99,2	93,5 7	99,98	100	99,92
1.b.7	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	62,2 2	58,3 5	92,52	100	97,8
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%					
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	77,0 6	94,7 5	97,85	98,17	96,7
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	40,9 7	71,8 1	78,8	83,22	89,6
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	87,4 4	95,8 8	98,74	100,6	99,53

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.b.1 2	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	75,4 9	81,8 1	95,2	98,18	99,56
1.b.1 3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	52,3 2	49,3 5	75,6	90,32	72,72
1.b.1 4	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	90,7	89,6 4	91,12	94,95	100
1.c	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	19,1 4	19,1 4	15,36	15,01	15,38
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%					
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	63,9 4	63,9 4	65,01	65,15	68,37
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	93,3 5	94,0 3	94,85	95,58	95,62
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	91,6 2	91,1	87,57	85,81	91,91
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	54,8 2	84	88,1	90,26	54,02
1.c.7	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	88,2 8	88,5 1	89,19	83,11 3	83,75 8
1.c.8 .a	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	28,9 4	47,8 7	56,67	59,85	71,81
1.c.8 .b	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	0	0	0
1.d	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100
1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	%	100		100	100	
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%		1,35	1,87	14,02	19,87
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	13,0 9	12,7 2	11,6	11,06	10,53
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%					
1.e	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%					
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%					
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%					

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-Rata Waktu					
1.f	Urusan Sosial						
1.f.1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantai	%	100	100	100	100	100
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100
2.a	ten						
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	2,1	4	9,71	9,71	10
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	%					
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%					
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%					
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%					
2.g	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%					
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	11,9	8,6	8,4	8,3	8,1
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	9,3	8,98	8,7	8,45	8,22
	Urusan Pangan						
1	Persentase Cadangan Pangan	%	0	5,33	8,5	6,85	58,97
2.i	Urusan Pertanahan						
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%					
2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%					
2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%					
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap direistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%					
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%					
2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%					
2.j	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	65,3 7	53,0 5	57,72	57,75	57,51
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	51,2 4	33,7 4	41,11	41,88	44,37
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	35	48,28	50	96
2.k.1	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.k.1 .1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,7 9	99,8 1	99,58	99,12	99,85
2.k.1 .2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	33,0 9	34	41	64,14	73,03
2.k.1 .3	Kepemilikan akta kelahiran	%	95,6 7	96	98,32	98,96	99,24

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.k.1 .4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Angka (nilai)	2	2	10	23	23
2.l	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%					
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,04 3478 26	0,11 5384 62	0,134 7517 7	0,137 0967 7	0,292 0354
2.m	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio					
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%					
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%					
2.n	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
2.n.1	Rasio koneksi kabupaten/ kota	Rasio	0,82	0,77	0,77	0,78	0,67
2.n.2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio					
2.o	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika						
2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	41,3 1	45,8 7	50	56,42	65,14
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	19,7 7	56,9 6	53,82	50,15	50,15
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	51,4 8	62,7 2	100	100	100
2.p	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
2.p.1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%				78,63	
2.p.2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%					
2.q	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal						
2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Per센					
2.r	Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga						
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,22	0,28	0,92	0,98	1,01
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,65	0,84	11,49	15,97	15,96
2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	%					
2.s	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2.s.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2.t	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	skor	N/A	207, 56	359	515	539
2.u	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	%					
2.v	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						
2.v.1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Indeks		55,1	53,98	56,08	84,69
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks		37,1 28	40,12 68	55,69 2	66,40 2

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.w	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan						
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahanakuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%		75,8 5	75,67	77,18	78,12
2.w.2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%		91,6 8	91,7	100	100
3.a	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan						
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	kg	2631 0557	2755 1279	2622 6638	2442 9614	2553 4795
3.b	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%		- 86,4 8	84,48	29,9	5,75
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%		0,09	204,1 6	18,87	4,33
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	%		5,89	84,48	22,5	22,96
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,48	3,32	3,64	3,88	4,09
3.b.5	PAD sektor pariwisata	Rp	6464 1302 0	9241 9540 0	1509 0732 15	1600 4510 50	1938 7328 65
3.c	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton per Ha per Tahun	61,3 1	60,9	62,87	61,61	65,82
3.c.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0	-44,5	40,36	59,42	31,74
3.e	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.f	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%		50,5 6	61,88	96,18	89,46
3.f.3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%		40,8 6		77,78	136.8 6
3.g	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%					
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%					
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%					
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%					
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	%					

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%					
4.a	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)						
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen					
4.a.2	Rasio PAD	Persen					
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,03 75	3,03 75	3,053	2,301	3,033
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Indeks	2	2	2	3	3
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persen					
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.b	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)						
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%					
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	16,6	149, 77	12,4	160,7 5	261,5
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	8,48	23,5 6	23,56	62,55	47,85
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%					
4.c	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)						
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	207, 23	189, 917	235,0 68	318,7	226,0 2
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	8,8	12,9 46	14,48	11,32	20,22
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23,2	42,6 06	42,34	49,4	88,5
4.d	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)						
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-9,53	-0,15	-0,10	-0,04	-0,04
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,92	0,06	-0,17	-0,10	-0,07
4.d.3	Assets Management						
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)			Ya	Ya	Ya	Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)			Ya	Ya	Ya	Ya
	3. Apakah ada proses invcntrarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)			Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)			Ya	Ya	Ya	Ya
4.d.4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,15	25,2 6	7,31	6,03	5,55
4.e	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)						
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%					
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%					

2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan menjadi hak setiap warga negara untuk diperoleh secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi mengutamakan pendekatan yang berfokus pada: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif pada standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kendal disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.29

Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal Tahun 2021-2023

No	Indikator Capaian	Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
I	Pendidikan				
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPL)	%	97,80	98,12	99,09
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	45,83	80,63	67,33
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	%	74,31	94,99	91,03
II	Kesehatan				
1	Presentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil	%	100	99,99	99,99
2	Presentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,92	99,99	99,99
3	Percentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97,89	75,08	99,33
4	Presentase anak usia 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita	%	93,57	82,52	100
5	Percentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrening kesehatan	%	58,35	52,30	100
6	Percentase WN usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan	%	77,99	87,73	89,55
7	Percentase WN usia > 60 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan	%	94,75	39,86	98,17
8	Percentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	%	71,81	86,39	83,22
9	Percentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	95,88	68,54	100,60
10	Percentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	81,81	13,76	98,18
11	Percentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	49,35	90,30	90,32

12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	%	89,64	66,43	94,95
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	%	94,03	94,29	95,58
2	Presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	90,52	95,21	85,81
IV	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	Jumlah rumah yang tertangani akibat bencana	%	0	100	100
2	Jumlah rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	%	0	100	100
V	Trantibum dan Linmas				
V.1	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran				
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	%	100	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
V.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi daerah rawan bencana	%	100	100	100
2	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Kabupaten / Kota	%	100	100	100
3	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100
VI	SOSIAL				
1	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	126	100	100
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh reahbilitasi sosial	%	100	100	100
3	Jumlah LU terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	40	100	100
4	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	%	102	100	100
5	Jumlah warga terdampak bencana yang mendapatkan pelayanan dan bantuan dasar	%	84	100	100

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

Analisis keuangan daerah merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada, diantaranya berupa analisis perbandingan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Analisis

perkembangan keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Disamping itu perlu dilakukan analisis ratio-ratio keuangan dalam APBD. Dengan analisis ini diharapkan dapat mengetahui kondisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.

Analisis keuangan Daerah dalam penyusunan RPJMD teknokratik Kabupaten Kendal, dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Besarnya kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan pelaksanaan APBD atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

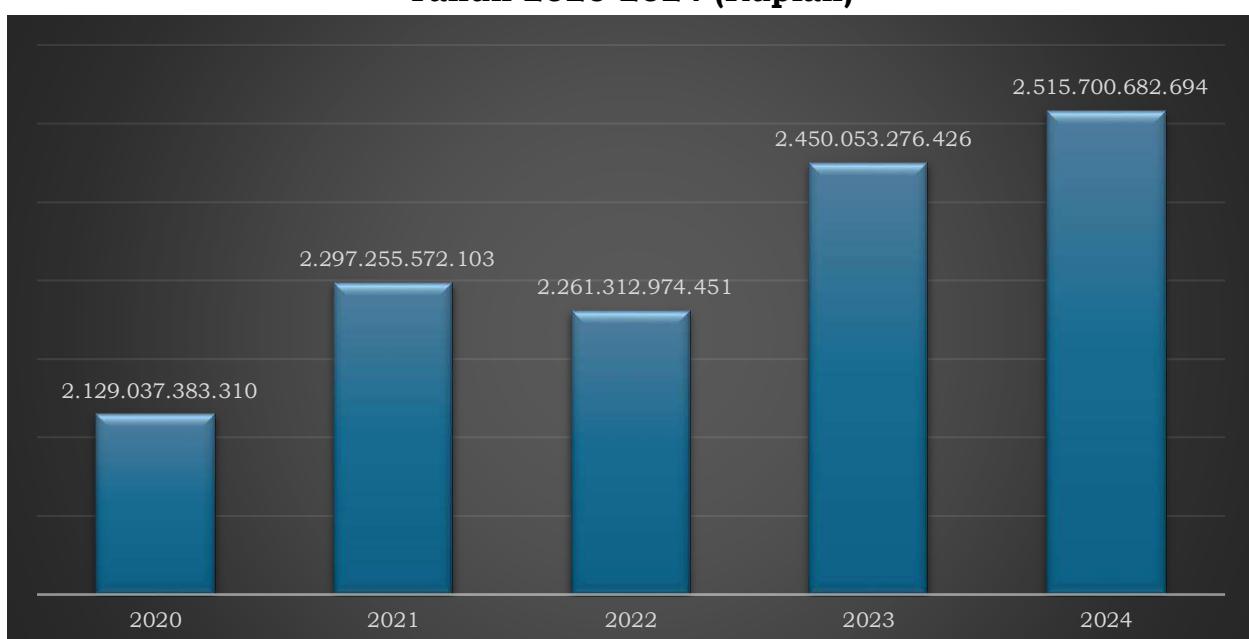
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

2.2.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

a. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2024 memiliki pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat dari sebesar Rp2.129.037.383.310 pada tahun 2020 menjadi Rp2.297.255.572.103 pada tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2022 sebesar Rp2.261.312.974.451 menjadi Rp2.450.053.276.426 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pendapatan daerah Kabupaten Kendal sebesar Rp2.515.700.682.694. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kendal secara ringkas terlihat pada gambar berikut.

Gambar II.28
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020-2024 (Rupiah)



Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

Pendapatan daerah Kabupaten Kendal didominasi oleh dana transfer dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 78,25% pada tahun 2020. Proporsi pendapatan transfer tertinggi adalah 80,28% pada tahun 2022. Proporsi pendapatan transfer Kabupaten Kendal kembali menurun mencapai 79,44% pada tahun 2024. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah juga menunjukkan derajat kemandirian keuangan daerah. Pada tahun 2020 hingga 2024, Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Kendal menunjukkan nilai sebagai berikut.

Tabel II.30
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Percentase
2020	356.753.593.703	2.129.037.383.310	16,76
2021	439.197.987.791	2.297.255.572.103	19,12
2022	437.899.634.627	2.261.312.974.451	19,36
2023	543.919.550.405	2.450.053.276.426	22,20
2024	517.108.168.048	2.515.700.682.694	20,56
Rata-Rata	458.975.786.915	2.330.671.977.797	19,69

Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

Berdasarkan data di atas, kemandirian daerah dari aspek keuangan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Rata-rata kemandirian keuangan adalah sebesar 19,69% yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam kemandirian keuangan daerah. Adapun lain-lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 4,99% pada tahun 2020 menjadi 0,33% pada tahun 2023.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kendal selama 5 tahun terakhir sebesar 4,26%. Persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah selama tahun 2020–2024 sebesar 9,72%. Jika dilihat tren pertumbuhan PAD menunjukkan kecenderungan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2023 sebesar 24,21% dan terendah pada tahun 2024 sebesar -4,93%. Pertumbuhan pendapatan berasal dari Dana transfer menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, tertinggi pada tahun 2024 sebesar 5,19% dan terendah di tahun 2022 sebesar 3,73%. Dana transfer bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Rata-rata pertumbuhan dana transfer selama 5 tahun terakhir sebesar 4,65%.

Lain-lain pendapatan yang sah selama tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1,59% dan terendah pada tahun 2023 sebesar 0,61%. Pertumbuhan APBD Kabupaten Kendal tahun 2020 hingga tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.31
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	2.129.037.383.310	2.297.255.572.103	2.261.312.974.451	2.450.053.276.426	2.515.700.682.694	4,26
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	356.753.593.703	439.197.987.791	437.899.634.627	543.919.550.405	517.108.168.048	9,72
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	134.446.651.120	163.518.117.660	219.755.209.493	298.327.822.673	245.618.490.577	16,26
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.001.377.327	21.726.989.052	23.513.544.932	27.675.060.649	231.975.967.039	84,54
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.295.382.108	20.052.742.157	24.949.384.154	26.350.028.385	27.396.673.646	9,16
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	183.010.183.148	233.900.138.922	169.681.496.048	191.566.638.698	12.117.036.786	-49,27
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.666.073.087.107	1.750.154.936.558	1.815.456.089.824	1.898.127.560.672	1.998.592.514.646	4,65
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.519.186.978.597	1.578.367.786.870	1.630.184.136.020	1.706.176.886.233	1.795.350.609.630	4,26
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.226.128.695.597	1.290.673.356.870	1.359.698.973.020	1.445.024.292.433	1.520.642.333.010	5,53
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	39.443.704.951	56.800.544.344	48.726.874.662	53.903.044.136	53.681.140.000	8,01
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA						
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	909.781.219.000	901.552.517.000	894.555.629.032	946.737.605.230	1.037.379.763.414	3,34
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	276.903.771.646	332.320.295.526	416.416.469.326	444.383.643.067	429.581.429.596	11,60

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	6.963.191.000	
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	44.612.446.000	36.634.400.000	15.291.358.000	-	-	-100,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	44.612.446.000	36.634.400.000	15.291.358.000	-	-	-100,00
1.2.1.4	Dana Desa	248.445.837.000	251.060.030.000	255.193.805.000	261.152.593.800	267.745.085.620	1,89
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	146.886.108.510	171.787.149.688	185.271.953.804	191.950.674.439	203.241.905.016	8,46
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	128.496.428.284	162.850.087.805	170.252.676.396	181.009.815.888	182.743.499.170	9,20
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	18.389.680.226	8.937.061.883	15.019.277.408	10.940.858.551	20.498.405.846	2,75
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	18.389.680.226	8.937.061.883	15.019.277.408	10.940.858.551	20.498.405.846	2,75
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	106.210.702.500	107.902.647.754	7.957.250.000	8.006.165.349	-	-100,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	106.210.702.500	4.490.000.000	7.800.000.000	8.000.070.000	-	-100,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	103.412.647.754	157.250.000	6.095.349	-	-100,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kendal selama 6 tahun terakhir berada pada kisaran 15,73%-22,17%. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Derajat desentralisasi tahun 2024 sebesar 21,15%, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal Kabupaten Kendal termasuk pada tingkat desentralisasi fiskal kurang. Perkembangan derajat desentralisasi Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.29
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kendal
Tahun 2019-2024 (%)



Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2025, diolah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Tahun 2024 rasio ketergantungan keuangan sebesar 5,29% meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 77,47%. Kondisi ini menunjukkan rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Kendal terhadap pemerintah pusat dan provinsi termasuk kategori sangat tinggi dengan rasio di atas 50%. Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Kendal selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.30
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

Dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah, unsur-unsur pendapatan daerah dengan proporsi terbesar adalah dana transfer dengan kisaran antara 76,18% hingga 80,28% antara tahun 2020 hingga 2024. Sementara itu pendapatan asli daerah berkisar antara 16,76% hingga 22,20% antara tahun 2020 hingga 2024. Adapun lain-lain pendapatan yang sah berkisar antara 0,33% hingga 4,99% antara tahun 2020 hingga 2024. Secara rinci perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II.31
Proporsi Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (%)

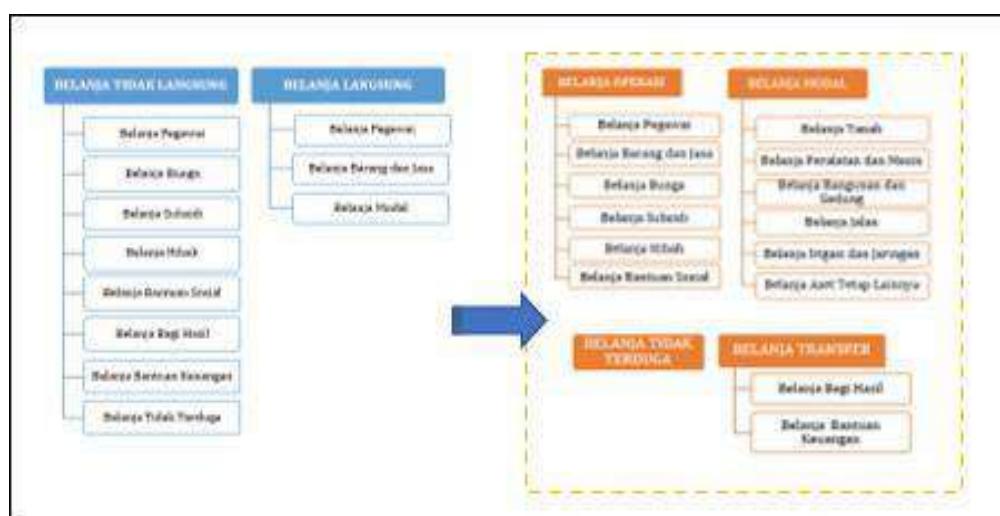


Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

b. Kinerja Belanja Daerah

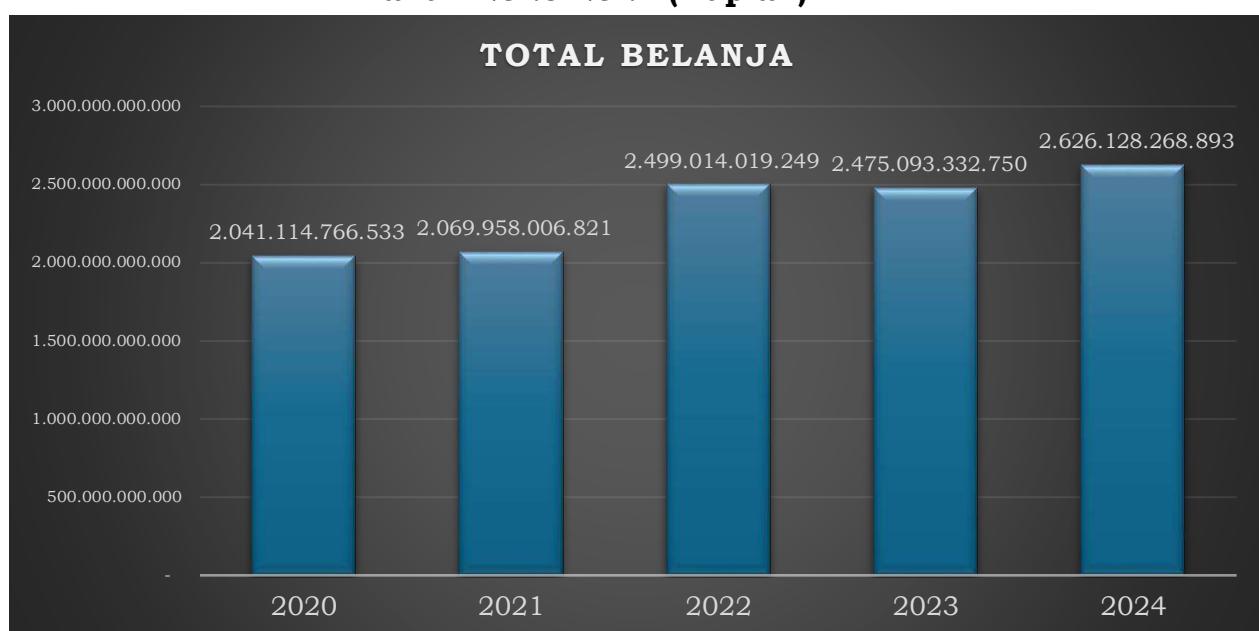
Penyajian belanja daerah APBD tahun 2019 dan 2020 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sedangkan untuk APBD 2021-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

**Gambar II.32
Perubahan Klasifikasi Belanja Daerah**



Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Kendal menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 6 tahun terakhir (2019-2024). Pada tahun 2019 sebesar Rp.2.331.683.034.136 naik menjadi Rp.2.544.047.594.179,00 di tahun 2024. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kendal tahun 2019-2024 selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.33
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020-2024 (Rupiah)



Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

Rata-rata peningkatan belanja Kabupaten Kendal dalam 5 tahun terakhir sebesar 6,50%. Kenaikan belanja tertinggi terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 20,73% dan terendah tahun 2023 sebesar -0,96%. Komponen Belanja Operasi selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan perkembangan fluktuatif, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 mencapai 9,39% atau Rp1,7 triliun. Selama 5 tahun terakhir rata-rata Belanja Operasi sebesar 7,63% dan mencapai Rp2,00 triliun pada tahun 2024. Komponen Belanja Modal menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,54% pada tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan Belanja Modal sebesar 18,36%. Perkembangan persentase belanja daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.32
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

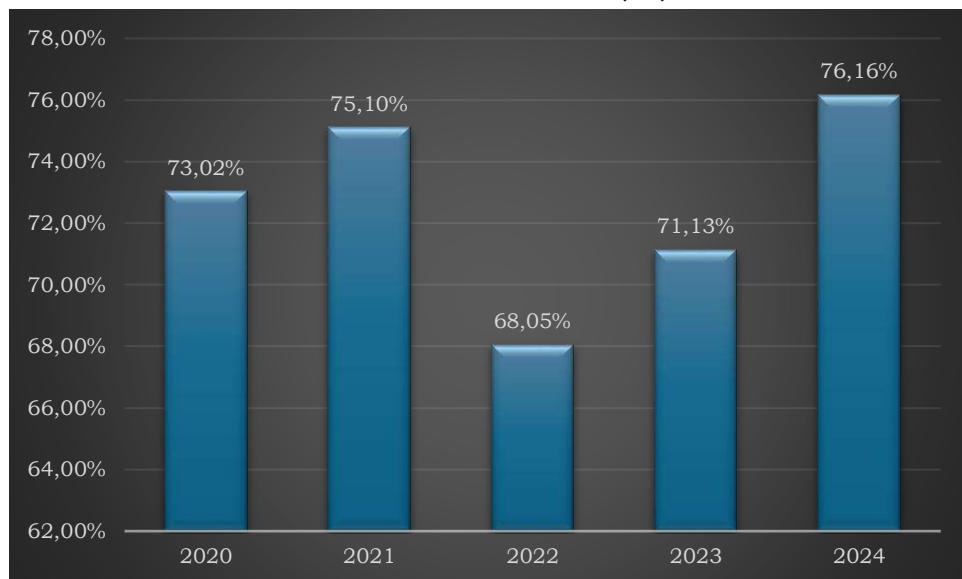
No.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
2	BELANJA	2.041.114.766.533	2.069.958.006.821	2.499.014.019.249	2.475.093.332.750	2.626.128.268.893	6,50
2.1	BELANJA OPERASI	1.490.381.849.716	1.554.612.643.637	1.700.561.372.435	1.760.554.359.151	2.000.107.920.722	7,63
2.1.1	Belanja Pegawai	923.990.970.136	968.147.636.030	961.045.178.608	981.489.110.907	1.155.860.643.648	5,76
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	476.824.893.155	510.694.622.224	658.466.567.306	644.928.015.026	706.381.853.536	10,32
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	89.565.986.425	63.145.785.383	75.440.276.521	133.971.633.218	131.892.423.538	10,16
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	12.624.600.000	5.609.350.000	165.600.000	5.973.000.000	-22,08
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	108.455.011.780	141.147.838.380	338.360.021.568	305.971.196.198	212.877.821.607	18,36
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-	93.120.922	23.944.292.715	1.131.118.514	1.772.266.052	166,99
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	46.300.259.389	57.568.869.202	94.540.428.129	80.324.255.047	48.671.101.895	1,26
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	20.654.495.711	37.139.161.699	78.667.565.620	141.793.259.234	70.819.503.071	36,08
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.711.375.008	39.507.697.957	132.083.433.762	60.889.586.525	82.328.487.995	25,95
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.556.591.672	6.838.988.600	9.124.301.342	21.832.976.878	9.182.713.273	1,78
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	232.290.000	-	-	-	103.749.321	-18,25
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	47.178.059.560	177.297.000	2.426.449.400	3.319.381.024	2.989.866.000	-49,83
2.3.1	Belanja Tak Terduga	47.178.059.560	177.297.000	2.426.449.400	3.319.381.024	2.989.866.000	-49,83
2.4	BELANJA TRANSFER	395.099.845.477	374.020.227.804	457.666.175.846	405.248.396.377	410.152.660.564	0,94
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	14.976.918.783	16.400.714.804	30.725.116.491	23.415.442.386	32.620.428.444	21,48

No.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	13.740.139.419	13.835.268.818	26.342.665.112	20.673.570.879	30.703.314.164	22,26
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	2.565.445.986	4.382.451.379	2.741.871.507	1.917.114.280	-9,25
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.236.779.364	-	-	-	-	-100,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	380.122.926.694	357.619.513.000	426.941.059.355	381.832.953.991	377.532.232.120	(0,17)
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	379.162.169.500	357.619.513.000	426.941.059.355	381.832.953.991	377.532.232.120	-0,11
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (PARPOL)	960.757.194	-	-	-	-	-100,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

Jika dilihat rasio Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 berkisar antara 68,05% hingga 76,16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja di luar program dan kegiatan pembangunan proporsinya relatif besar. Perkembangan selengkapnya rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

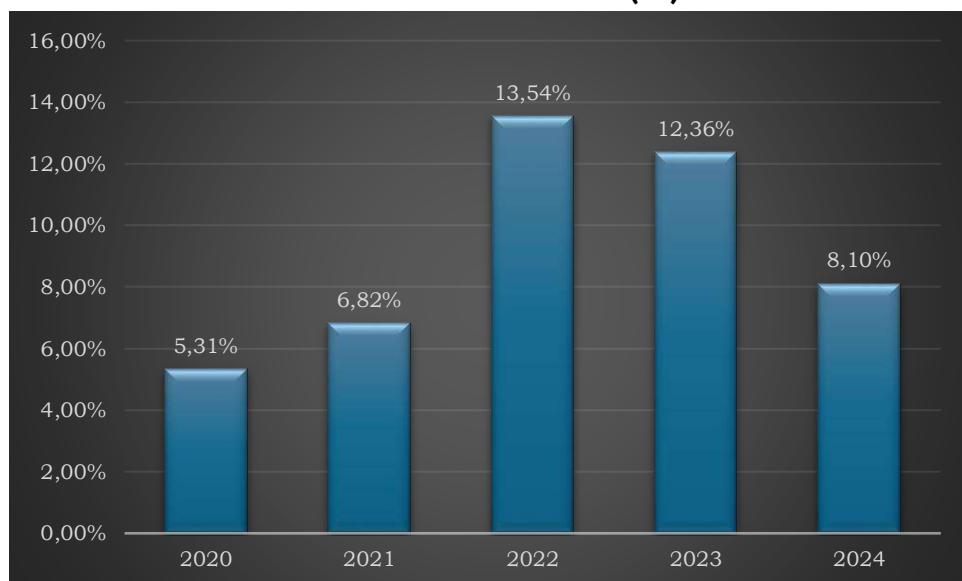
Gambar II.34
Proporsi Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten Kendal menunjukkan perkembangan fluktuatif. Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah tahun 2024 sebesar 8,11% yang dinilai cenderung menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah di Kabupaten Kendal selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.35
Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Tahun 2019 - 2024 (%)



Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

c. Kinerja Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan Pembiayaan Daerah dalam waktu tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang meningkat. Pada tahun 2020, Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp91,695 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp138,137 miliar. Perkembangan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Gambar II.36
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020-2024



Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

Secara rinci, Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.33
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	PEMBIAYAAN	91.695.464.753	185.216.482.268	384.874.417.392	125.226.927.833	138.137.382.478	10,79
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	97.695.464.753	197.031.482.268	415.810.417.392	151.226.927.833	138.137.382.478	9,05
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	97.690.214.753	182.030.482.268	415.802.117.392	151.214.322.833	103.129.382.478	1,36
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	15.000.000.000			35.000.000.000	32,64
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-				
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.250.000	1.000.000	8.300.000	12.605.000	8.000.000	11,10
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-				
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000	11.815.000.000	30.936.000.000	26.000.000.000	-	-100,00
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo						
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	6.000.000.000	11.815.000.000	15.936.000.000	6.000.000.000		-100,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;			15.000.000.000	20.000.000.000		-100,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;						
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	PEMBIAYAAN NETTO	91.695.464.753	185.216.482.268	384.874.417.392	125.226.927.833	138.137.382.478	10,79
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	91.695.466.773	185.216.484.289	384.874.419.414	125.226.929.856	138.137.384.502	10,79

Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

2.2.3.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu periode tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting pada manajemen pemerintahan daerah, lembaga legislatif daerah maupun para kreditur atau pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada periode tertentu. Elemen utama dalam neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.34
Neraca Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	138.966.463.972,00	316.025.168.846,00	112.096.219.104,00	93.157.432.854,00	20.692.502.703,00	(37,88)
Kas di Bendahara Penerimaan	20.172.380,00	2.189.991,00	3.019.040,00	49.101.587,00	5.937.000,00	(26,34)
Kas di Bendahara Pengeluaran	199.054.000,00				1.999,00	(94,37)
Kas di BLUD	41.892.459.426,00	99.669.572.765,00	39.110.109.436,73	7.941.438.619,56	7.490.749.054,56	(34,97)
Kas di Bendahara FKTP						
Kas di Bendahara BOS		105.185.790,00	5.003.092,00	3.956.987,00	2.642.125,00	(60,19)
Kas dana BOK Puskesmas					1.580.756.830,00	
Kas Lainnya	959.293.771,00			1.977.452.430,00		(100,00)
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek						
Piutang Pendapatan	144.120.839.780,16					
Piutang Pajak		82.071.557.665,00	86.869.864.765,00	53.048.723.901,00	60.288.981.427,00	#DIV/0!
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>						
Piutang Retribusi		3.636.983.425,00	15.630.547.175,00	12.091.790.571,00	27.734.821.436,00	#DIV/0!
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		55.362.251.465,47	57.309.072.289,01	62.280.295.418,47	34.341.787.938,15	#DIV/0!
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>						
Piutang Transfer Pemerintah Pusat				2.555.377.882,00	5.459.378.000,00	
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat</i>						
Piutang Transfer Antar Daerah		1.851.541.694,00	2.600.544.857,00	6.566.611.452,00	13.118.022.571,00	#DIV/0!
<i>Penyisihan Piutang</i>						#DIV/0!
Beban Dibayar Dimuka	4.837.964.747,00	177.275.000,00	114.166.666,00	66.000.000,00	28.508.333,00	(72,29)
Piutang Lainnya	4.609.737.598,00	5.973.620.028,00	5.965.320.028,00	5.952.715.028,00	5.944.715.028,00	(0,16)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Persediaan	29.535.984.964,59	36.911.863.241,94	50.038.842.751,41	34.281.609.544,94	35.777.182.940,64	4,91
<i>Penyisihan Piutang</i>	(108.383.039.504,68)	(110.232.229.937,13)	(113.636.544.692,79)	(74.081.293.020,61)	(82.374.108.435,82)	
Jumlah Aset Lancar	256.758.931.134	491.554.979.974	256.106.164.511	205.891.213.254	130.091.878.950	(15,63)
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya					-	
Dana Bergulir						#DIV/0!
<i>Penyisihan Dana Bergulir</i>						#DIV/0!
<i>Penyisihan Investasi Jangka Panjang</i>						
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	190.528.933.238,17	207.624.543.469,45	233.056.906.602,59	244.467.068.233,47	249.834.641.428,34	7,01
Jumlah Investasi Permanen	190.528.933.238	207.624.543.469	233.056.906.603	244.467.068.233	249.834.641.428	7,01

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Jumlah Investasi Jangka Panjang	190.528.933.238	207.624.543.469	233.056.906.603	244.467.068.233	249.834.641.428	7,01
ASET TETAP						
Tanah	775.779.961.458,00	943.699.467.666,00	1.003.231.538.871,00	1.156.052.828.228,00	1.678.185.442.914,00	21,28
Peralatan dan Mesin	641.757.101.213,00	700.421.961.000,00	797.331.094.785,00	883.919.437.804,00	939.172.277.955,00	9,99
Gedung dan Bangunan	1.258.476.658.470,00	1.379.338.018.271,00	1.460.532.784.955,00	1.511.450.684.114,00	1.634.590.185.590,00	6,76
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	1.364.380.423.756,00	1.418.017.863.746,00	1.547.196.382.392,00	1.616.734.561.062,00	1.852.285.737.677,00	7,94
Aset Tetap Lainnya	271.270.200.014,00	260.254.011.583,00	273.131.245.532,00	280.803.726.501,00	290.015.238.208	1,68
Konstruksi dalam Pengerjaan	7.909.921.128,00	9.518.321.055,00	6.549.899.058,00	107.156.478.918,00	50.494.364.726,00	58,95
Akumulasi Penyusutan	(1.683.082.435.730,41)	(1.830.375.628.850,07)	(2.240.587.643.710,70)	(2.402.285.096.535,34)	(2.573.516.952.476,45)	11,20
Jumlah Aset Tetap	2.636.491.830.309	2.880.874.014.471	2.847.385.301.882	3.153.832.620.092	3.871.226.294.594	10,08
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	16.162.016.575,00	-	15.138.184.941,00	36.242.186.742,00		(100,00)
Jumlah Dana Cadangan	16.162.016.575	-	15.138.184.941	36.242.186.742	-	(100,00)
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang		628.995.810,00	604.995.810,00	604.995.810,00	587.913.750,00	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			5.851.313.807,00	4.125.919.000,00		
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.567.666.650,00	11.567.666.650,00				(100,00)
Aset Tak Berwujud	13.326.547.025,00	13.517.372.025,00	14.242.411.375,00	14.329.439.875,00	14.547.306.666,00	2,22
<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>	(12.860.859.802,00)	(13.098.250.450,80)	(13.495.142.648,67)	(13.799.189.227,86)	(14.039.259.999,23)	1,75
Aset Lain-Lain	41.039.519.381,00	56.608.928.306,00	50.344.894.800,00	47.630.062.895,00	47.630.062.895,00	3,79
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</i>	(22.234.964.865,00)	(22.287.222.159,51)	(19.988.677.032,02)	(17.776.658.709,11)	(18.202.325.594,49)	(4,88)
Jumlah Aset Lainnya	30.837.908.389	46.937.490.181	37.559.796.111	35.114.569.643	30.523.697.717	(0,26)
JUMLAH ASET	3.130.779.619.645	3.626.991.028.095	3.389.246.354.049	3.675.547.657.965	4.281.676.512.689	8,14
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6.961.281,00		27.840,00		2.642.125,00	(21,51)
Pendapatan Diterima Dimuka	3.033.876.866,00	2.670.781.114,00	4.765.509.116,00	4.461.197.428,00	4.768.901.884,50	11,97
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemda Lainnya						#DIV/0!
Utang Belanja		21.193.446.920,30	23.845.109.393,00	65.963.835.312,30	45.183.260.652,30	#DIV/0!
Utang Beban	44.864.396.321,46					
Utang Jangka Pendek Lainnya	174.257.002,00	1.400.154.987,00	2.098.630.642,00	4.401.921.227,00	8.826.697.000,00	166,78

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka						
Utang Bunga						#DIV/0!
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	48.079.491.470	25.264.383.021	30.709.276.991	74.826.953.967	58.781.501.662	5,15
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya						
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	48.079.491.470	25.264.383.021	30.709.276.991	74.826.953.967	58.781.501.662	5,15
EKUITAS						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
EKUITAS						
Equitas	3.082.700.128.174,38	3.601.726.645.074,06	3.358.537.077.057,56	3.600.720.703.997,22	4.222.895.011.026,90	8,19
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	3.082.700.128.174	3.601.726.645.074	3.358.537.077.058	3.600.720.703.997	4.222.895.011.027	8,19
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.130.779.619.645	3.626.991.028.095	3.389.246.354.049	3.675.547.657.965	4.281.676.512.689	8,14

Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal 2025, diolah

Aset atau aktiva dalam akuntansi memiliki pengertian sebagai sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari:

- (1) aset lancar,
- (2) investasi jangka panjang,
- (3) aset tetap,
- (4) dana cadangan, dan
- (5) aset lainnya.

Pada tahun 2020, Kabupaten Kendal memiliki aset senilai Rp3,130 triliun yang menunjukkan peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp4,281 triliun. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata aset sebesar 8,14%. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 16,49% yakni dari total nilai aset Rp3,675 triliun di tahun 2023 menjadi Rp4,281 triliun pada tahun 2024. Pada periode 2019-2023 nilai aset Pemerintah Kabupaten Kendal hanya 1 (satu) kali mengalami 2 kali penurunan yakni 1,76% pada tahun 2019 dan di tahun 2022 sebesar 6,55%. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2023 mencapai Rp.3.066.519.711.520,66 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,16% per tahun.

Rasio Lancar (Likuiditas) digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Analisis perkembangan likuiditas Kabupaten Kendal tahun 2020 hingga tahun 2024 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel II.35
Hasil Analisis Likuiditas Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	256.758.931.134	491.554.979.974	256.106.164.511	205.891.213.254	130.091.878.950
KEWAJIBAN LANCAR	48.079.491.470	25.264.383.021	30.709.276.991	74.826.953.967	58.781.501.662
RASIO LANCAR	5,34	19,46	8,34	2,75	2,21

Sumber : Data diolah, 2025

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.74.826.953.967,30 atau merupakan kewajiban tertinggi dan mengalami tren peningkatan rata-rata sebesar 45,61% per tahun.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi:

- (1) Ekuitas Dana Lancar,
- (2) Ekuitas Dana Investasi, dan
- (3) Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Kendal pada tahun 2023 mencapai Rp.3.600.720.703.997,22 dalam periode 2019-2023 dan mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,63% per tahun. Nilai ekuitas pernah mengalami penurunan sebesar 1,80% pada tahun 2020.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Perkembangan solvabilitas Kabupaten Kendal pada tahun 2020 hingga tahun 2024 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.36
Hasil Analisis Solvabilitas Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	48.079.491.470	25.264.383.021	30.709.276.991	74.826.953.967	58.781.501.662
EKUITAS	3.082.700.128.174	3.601.726.645.074	3.358.537.077.058	3.600.720.703.997	4.222.895.011.027
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,016	0,007	0,009	0,021	0,014

Sumber : Data diolah, 2025

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam implementasinya, APBD Kabupaten Kendal anggaran tahun 2019-2023, penyusunannya telah mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Secara berkesinambungan, sistem evaluasi dan pelaporan juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian

diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan high cost economy terhadap perkembangan arus investasi.

Pemerintah menerbitkan UU 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang pertama tahun 2022 dimasa Omicron ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. UU ini mengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung terwujudnya layanan publik yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan itu tentunya, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan dari semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan yang dituangkan dalam UU HKPD ini. Urusan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. Dalam praktiknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah, dengan adanya UU nomor 1 tahun 2022 Pemerintah kabupaten/kota mendapatkan keuntungan, karena dapat mengoptimalkan pajak secara lebih mandiri.

2.2.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kendal pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

2.2.3.2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tingkat realisasi belanja Kabupaten Kendal secara keseluruhan memiliki kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024, realisasi belanja terhadap anggaran Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

Tabel II.37
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kendal
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.129.037,38	2.297.255,57	2.261.312,97	2.450.053,28	2.515.700,68
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.041.114,77	2.069.958,01	2.499.014,02	2.475.093,33	2.626.128,27
3	Pengeluaran Pembiayaan	6.000,00	11.815,00	30.936,00	26.000,00	-
	(Defisit Riil)	81.922,62	215.482,57	- 268.637,04	- 51.040,06	- 110.427,59

Sumber : Data diolah, 2025

2.2.3.3 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kendal. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, terutama pada Belanja Operasi mengalami fluktuasi. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.38
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Percentase (%)
2020	923.990,97	2.047.114,77	45,14%
2021	968.147,64	2.081.773,01	46,51%
2022	961.045,18	2.529.950,02	37,99%
2023	981.489,11	2.501.093,33	39,24%
2024	1.155.860,64	2.626.128,27	44,01%
Rata-Rata	998.106,71	2.357.211,88	42,34%

Sumber : Data diolah, 2025

Percentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 42,34%.

2.2.3.4 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan

untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
- b. Pencairan Dana Cadangan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
- f. Penerimaan Piutang Daerah.
- g. Penerimaan Dana Bergulir.
- h. Penerimaan Hasil Penarikan.

Dengan analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur dengan melihat gambaran mengenai komposisi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada periode sebelumnya. Realisasi SiLPA berasal dari beberapa komponen antara lain Pelampuan Penerimaan PAD, Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Transfer, Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya, Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan. Secara rinci perhitungan analisa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Kabupaten Kendal tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel II.39
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kendal Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	97.690,21	100%	182.030,48	100%	415.802,12	100%	151.214,32	100%	103.129,38	100%
Pelampauan Penerimaan PAD	-		-		-		-		-	
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan										
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah										
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	97.690,21	100%	182.030,48	100%	415.802,12	100%	151.214,32	100%	103.129,38	100%
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-		-	
Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-	

Sumber : Data diolah, 2025

2.2.3.5 Kebijakan Pengelolaan keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa yang Akan Datang

Arah kebijakan pengelolaan keuangan pada tahun 2020-2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.
- b. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di mana tahun 2020 pengeluaran daerah adalah sebesar Rp6 miliar dan tahun 2023 adalah sebesar Rp26 miliar.

Pada periode tahun 2025 – 2029 kebijakan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan melakukan berbagai upaya antara lain:
 - 1) Melakukan perhitungan kembali terhadap potensi pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dapat menetapkan target pajak daerah mendekati potensi riil.
 - 2) Melakukan identifikasi ulang dan pemutakhiran data setiap tahun dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi dan menetapkan wajib pajak prioritas berdasarkan potensi kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah.
 - 3) Melakukan kebijakan *reward and punishment* kepada wajib pajak dan petugas yang melakukan pemungutan pajak.
 - 4) Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi agar mereka melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
 - 5) Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, bila perlu dilakukan upaya *cashless* dengan aplikasi dan e-money sehingga meminimalisir kebocoran.
- b. Pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAD.
- c. Belanja daerah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah.
- d. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel dengan menerapkan basis aktual.
- e. Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada pencapaian visi dan misi daerah.
- f. Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.

- g. Proporsi belanja modal ditingkatkan untuk memenuhi proporsi di atas 20% dari total belanja.
- h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2019–2024, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kendal tahun 2025–2029 disusun sebagai berikut.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2025–2029 didasarkan atas asumsi dari masing-masing komponen PAD.

- a) Proyeksi pajak daerah Tahun 2025–2029, didasarkan atas baseline tahun 2023 dan 2024, semakin baik dengan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan 15,97%, karena kondisi perekonomian dan kemampuan membayar sudah meningkat. Kabupaten Kendal memiliki komitmen untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui peningkatan PAD dengan mengimplementasi UU Nomor 1 tahun 2022. Optimalisasi peningkatan pajak akan dilakukan pada 5 tahun yang akan datang.
- b) Proyeksi Retribusi daerah tahun 2025–2029, Beberapa pos retribusi daerah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, antara lain penghapusan retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan penyesuaian model atas Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagai *benchmarking* realisasi retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp. 27.675.060.649,00 dan baseline retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp 28.977.547.474,00.

- c) Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Perusda yang ada di Kabupaten Kendal didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi yang, maka hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan akan tumbuh pada periode 2025– 2029, dengan baseline pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perubahan RAPBD tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 22.500.000.000,00
- d) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama tahun 2019–2024 dengan rata-rata pertumbuhan 4,98%.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 serta memperhitungkan kebijakan APBN Tahun 2025 – 2029. Termasuk dalam proyeksi, dimasukkan variabel asumsi perekonomian nasional dan global yang berdampak terhadap Penerimaan Dalam Negeri Netto (PMDN). Kecermatan dan kehati-hatian terhadap asumsi dan proyeksi dana transfer pemerintah pusat menjadi penting, mengingat pembagian pendapatan transfer pusat dan provinsi tidak dapat di proyeksi secara tepat. Sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Kendal memiliki proporsi pendapatan transfer sebesar 4,99% terhadap total pendapatan daerah.

Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana block grant melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional. DAU pada tahun 2025 sampai 2029 diproyeksikan sama dengan postur pendapatan DAU tahun 2024. Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat DAU dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu DAU dan DAU tematik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan penggajian P3K).

b. Proyeksi Belanja Daerah

Kenaikan pendapatan daerah, akan berdampaknya pada belanja daerah, namun jika pendapatan berkurang maka belanja juga akan berkurang. Kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Kendal selama tahun 2024-2026 akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Membayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Kendal, selama kurun waktu 2025-2029;
- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, maupun Urusan Penunjang Lainnya;
- c. Memenuhi pelaksanaan program yang sudah mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional;

- d. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan (baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia);
- f. Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
- g. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan.

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebutuhan belanja daerah di Kabupaten Kendal selama tahun 2025-2029 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2023, dengan mempertimbangkan komitmen dan dinamika kebijakan nasional. Kebutuhan belanja boleh melebihi pendapatan, selama masih memenuhi ketentuan defisit anggaran dan ada dana yang akan digunakan untuk mencukupinya.

c. Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan daerah pada masa yang akan datang dari sisi penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan menggunakan prakiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan dari pinjaman daerah.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pinjaman, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban, serta membentuk dana cadangan jika kemampuan anggaran tersedia. Memperhatikan besarnya kebutuhan belanja di tahun-tahun sebelumnya, sehingga penyediaan dana cadangan, dilakukan penundaan (ditiadakan), untuk mengurangi defisit belanja yang masih sangat besar.

Tabel II.40

Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Target	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	4,26	2,78	2.450.053,28	2.509.044,40	2.481.219,47	2.608.124,83	2.707.870,88	2.815.502,89	2.878.223,88
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9,72	3,24	543.919,55	603.727,61	616.090,48	633.190,28	652.376,96	675.961,25	708.247,72
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16,26	4,70	298.327,82	338.588,21	351.212,25	366.138,71	381.960,71	399.991,71	426.028,01
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	84,54	1,20	27.675,06	235.525,43	237.170,73	239.105,07	241.080,30	245.283,59	249.948,76
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9,16	1,70	26.350,03	26.437,02	24.260,55	24.769,55	26.130,00	27.480,00	28.765,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-49,27	1,99	191.566,64	3.176,95	3.446,95	3.176,95	3.205,95	3.205,95	3.505,95
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4,65	2,64	1.898.127,56	1.905.316,79	1.865.128,99	1.974.934,55	2.055.493,92	2.139.541,63	2.169.976,16
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4,26	2,97	1.706.176,89	1.744.385,26	1.732.263,35	1.837.802,95	1.913.954,37	1.993.447,19	2.019.174,75
1.2.1.1	Dana Perimbangan	5,53	3,28	1.445.024,29	1.466.992,78	1.469.644,37	1.567.305,40	1.635.341,89	1.706.476,34	1.723.594,77
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	8,01	-1,47	53.903,04	61.245,51	49.645,87	51.135,25	52.669,30	54.249,38	56.876,87
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	3,34	3,78	946.737,61	971.363,78	977.956,19	1.060.866,56	1.113.709,89	1.169.195,39	1.169.195,39
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	11,60	2,69	444.383,64	434.383,48	440.699,97	453.920,97	467.538,60	481.564,75	496.011,70
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	#DIV/0!	-100,00	-	14.773,50	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-100,00	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	1,89	2,39	261.152,59	262.618,98	262.618,98	270.497,55	278.612,48	286.970,85	295.579,98
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	8,46	-1,29	191.950,67	160.931,53	132.865,64	137.131,61	141.539,55	146.094,44	150.801,41
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	9,20	1,56	181.009,82	123.812,53	118.865,64	122.431,61	126.104,55	129.887,69	133.784,32
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	2,75	-14,44	10.940,86	37.119,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	17.017,09
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	2,75	-14,44	10.940,86	37.119,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	17.017,09

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Target	Proyeksi				
						2023	2025	2026	2027	2028
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-100,00	0,00	8.006,17	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-100,00	0,00	8.000,07	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-100,00	0,00	6,10	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA	6,50	2,89	2.475.093,33	2.534.614,34	2.506.219,47	2.630.624,83	2.703.870,88	2.912.265,59	2.923.223,88
2.1	BELANJA OPERASI	7,63	2,79	1.760.554,36	1.764.618,21	1.721.205,04	1.791.684,06	1.866.541,21	2.017.033,56	2.024.605,22
2.1.1	Belanja Pegawai	5,76	3,96	981.489,11	1.050.853,78	1.083.354,41	1.137.522,13	1.194.398,24	1.254.118,15	1.276.294,29
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,32	0,64	644.928,02	620.165,90	539.572,17	550.969,55	563.790,97	649.145,81	640.145,81
2.1.5	Belanja Hibah	10,16	3,21	133.971,63	85.533,73	89.810,42	94.300,94	99.015,98	103.966,78	100.165,12
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-22,08	-0,16	165,60	8.064,80	8.468,04	8.891,44	9.336,01	9.802,81	8.000,00
2.2	BELANJA MODAL	18,36	4,39	305.971,20	346.259,05	363.095,43	408.805,17	391.956,68	433.864,70	429.183,62
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	166,99	5,00	1.131,12	4.675,00	4.908,75	5.154,19	5.411,90	5.682,49	5.966,62
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	1,26	4,13	80.324,26	57.578,04	60.456,94	63.479,79	66.653,78	69.986,47	70.485,79
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	36,08	2,19	141.793,26	98.879,52	103.823,50	109.014,68	114.465,41	115.188,68	110.198,11
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25,95	5,78	60.889,59	171.657,28	179.763,57	216.306,72	189.833,31	226.635,16	227.342,60
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,78	2,42	21.832,98	13.409,20	14.079,66	14.783,65	15.522,83	16.298,97	15.113,92
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-18,25	5,00	-	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	76,58
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	-49,83	-7,79	3.319,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-49,83	-7,79	3.319,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	0,94	2,22	405.248,40	416.237,09	414.419,00	422.635,60	437.872,99	453.867,33	464.435,04
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	21,48	2,52	23.415,44	40.693,20	48.905,58	40.799,61	42.480,19	44.405,32	46.096,76
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	22,26	1,89	20.673,57	37.893,29	38.040,23	36.613,87	38.196,07	39.999,17	41.602,80
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-9,25	1,35	2.741,87	2.799,91	9.365,36	2.685,74	2.784,11	2.906,15	2.993,95

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Target	Proyeksi				
						2023	2025	2026	2027	2028
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-100,00	0,00	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	(0,17)	2,18	381.832,95	375.543,88	365.513,42	381.835,99	395.392,81	409.462,01	418.338,28
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-0,11	2,18	381.832,95	375.543,88	365.513,42	381.835,99	395.392,81	409.462,01	418.338,28
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	#NUM!	11,97	(25.040,06)	(25.569,95)	(25.000,00)	(22.500,00)	4.000,00	(96.762,70)	(45.000,00)
3	PEMBIAYAAN	10,79	11,97	125.226,93	25.569,95	25.000,00	22.500,00	(4.000,00)	96.762,70	45.000,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9,05	10,93	151.226,93	29.769,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125.000,00	50.000,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	1,36	10,93	151.214,32	29.769,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	32,64	#DIV/0!	-	-	-	-	-	75.000,00	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11,10	#DIV/0!	12,61	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-100,00	3,55	26.000,00	4.200,00	25.000,00	27.500,00	54.000,00	28.237,30	5.000,00
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	-100,00	3,55	6.000,00	4.200,00	-	2.500,00	29.000,00	28.237,30	5.000,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-100,00	#DIV/0!	20.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Target	Proyeksi				
						2023	2025	2026	2027	2028
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	10,79	11,97	125.226,93	25.569,95	25.000,00	22.500,00	(4.000,00)	96.762,70	45.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	-37,33	-100,00	100.186,87	0,00	-	-	-	(0,00)	-

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun, 2025

d. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektivitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasianya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- 1) **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- 2) **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga termasuk hal tersebut.
- 3) **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah merupakan langkah krusial dalam memastikan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Proses ini dimulai dengan analisis mendalam terhadap kondisi eksisting daerah, mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan, dengan dasar dari data statistik, hasil survei, dan masukan dari pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah utama yang menghambat pembangunan daerah. Kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan pembangunan yang masih terjadi menunjukkan bahwa tujuan pembangunan daerah belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan identifikasi dan analisis atas capaian pembangunan sebelumnya untuk memahami akar masalahnya. Selain itu, perencanaan pembangunan juga harus mampu mengantisipasi isu strategis yang muncul dalam bentuk ancaman maupun peluang, seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan dinamika demografis. Oleh karena itu, perumusan permasalahan dan isu strategis tidak hanya berfungsi sebagai langkah antisipatif dalam pembangunan daerah, tetapi juga menjadi panduan untuk menyusun kebijakan yang responsif, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan demi tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Melalui analisis yang telah dilakukan terhadap gambaran umum daerah, maka dalam merumuskan permasalahan pembangunan daerah dapat

diidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah. Setelah meninjau data dan informasi yang terdapat dalam gambaran umum kondisi daerah serta mengevaluasi hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada berbagai bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka dapat ditemukan delapan permasalahan pokok, yaitu :

Gambar II.37
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Kendal



Berdasarkan rumusan permasalahan pokok diatas, maka dijabarkan sebagai berikut.

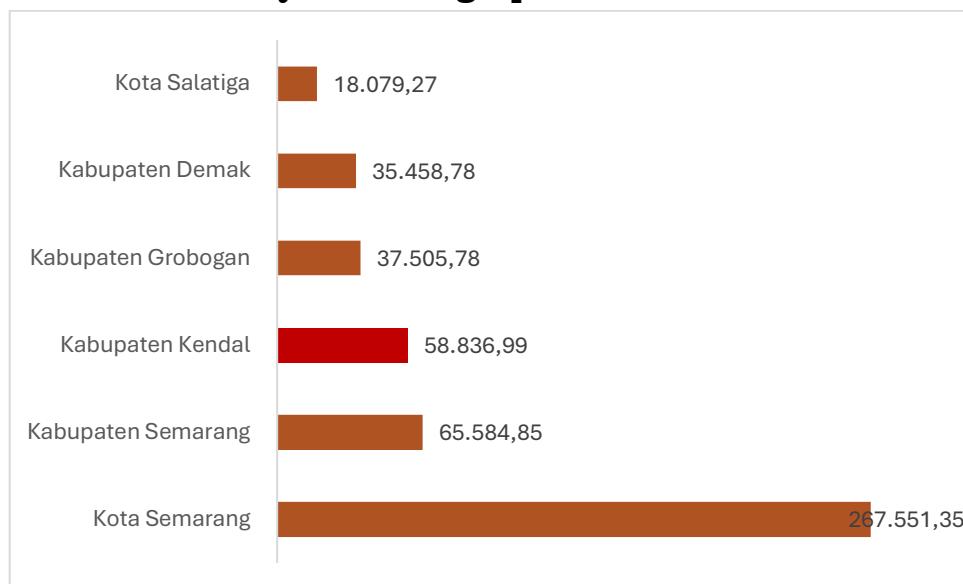
1. **Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah**

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi sektor unggulan daerah. Sektor industri, pertanian, dan pariwisata yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Keterbatasan infrastruktur penunjang, rendahnya nilai tambah produk lokal, serta belum terintegrasinya rantai pasok antar sektor menjadi faktor utama yang menghambat penguatan ekonomi berbasis keunggulan wilayah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing daerah dan kurang optimalnya kontribusi sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambaran permasalahan ekonomi di Kabupaten Kendal tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Kendal yang menempati peringkat ketiga di antara wilayah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, dan Purwodadi) dengan nilai sebesar Rp58.836,99 miliar pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun memiliki potensi besar di sektor industri,

pertanian, dan pariwisata, kontribusi ekonomi Kabupaten Kendal masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Kedungsepur.

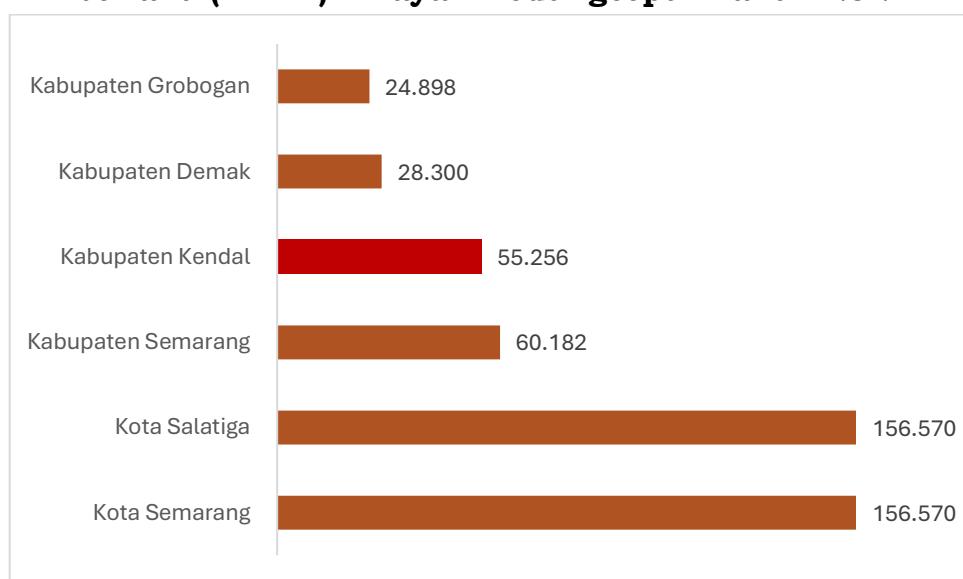
Gambar II.38
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Selain itu, distribusi PDRB ADHB Kabupaten Kendal sebesar **3,24%** pada tahun 2024 masih berada di bawah Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kendal yang mencapai **Rp55,256 juta** juga menempatkan Kabupaten Kendal di posisi ketiga di kawasan Kedungsepur. Kondisi ini mencerminkan bahwa kontribusi ekonomi per kapita Kabupaten Kendal belum mampu bersaing dengan daerah lain di kawasan yang sama.

Gambar II.39
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Berdasarkan permasalahan ini, terlihat bahwa pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Kendal memerlukan strategi yang lebih terarah dan

terintegrasi. Peningkatan kualitas infrastruktur penunjang, penguatan nilai tambah produk lokal, serta integrasi antar sektor dalam rantai pasok menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Optimalisasi potensi sektor unggulan secara berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal.

2. Belum optimalnya capaian reformasi birokrasi dan akuntabilitas pembangunan daerah

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kendal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kinerja aparatur yang belum optimal, lemahnya kapasitas dalam perencanaan dan penganggaran, serta kurangnya penerapan sistem digitalisasi dalam layanan publik menyebabkan proses birokrasi berjalan lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Belum terbangunnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang terukur juga memperburuk ketidakselarasan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, sehingga capaian akuntabilitas pembangunan daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Kondisi ini tercermin dari nilai SAKIP Kabupaten Kendal pada tahun 2023 yang mencapai 68,97 atau setara dengan kategori B. Meskipun nilai SAKIP cenderung meningkat setiap tahun, capaian tersebut masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan dan belum mencerminkan perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Nilai SAKIP yang masih berada pada kategori B menunjukkan bahwa kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Kendal masih perlu ditingkatkan. Lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah dan kurangnya integrasi dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas dan akuntabilitas kebijakan daerah.

Selain itu, belum optimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur berdampak pada rendahnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Kurangnya sistem insentif berbasis kinerja dan pengawasan internal yang lemah juga menyebabkan minimnya dorongan bagi aparatur untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat.

3. Belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

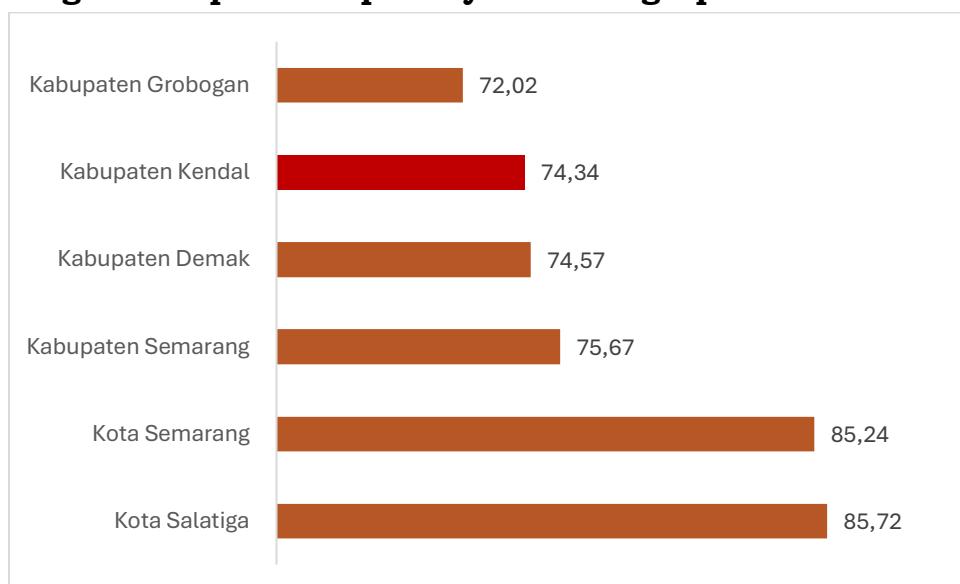
Pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kendal masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Di sektor pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta rendahnya angka partisipasi pendidikan menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kurangnya akses ke fasilitas pendidikan yang layak dan belum optimalnya penyebaran tenaga pendidik menyebabkan disparitas dalam kualitas pendidikan di berbagai wilayah di Kabupaten Kendal.

Di sektor kesehatan, akses layanan kesehatan yang belum merata, kurangnya tenaga medis, serta fasilitas kesehatan yang belum memadai menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan layanan kesehatan

yang berkualitas. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pelayanan kesehatan preventif dan kuratif, yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi ini dibuktikan dengan angka harapan hidup di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 74,73 tahun, menempatkan Kabupaten Kendal di posisi terendah di antara wilayah Kedungsepur, tepat di bawah Kabupaten Grobogan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal masih belum optimal. Rendahnya angka harapan hidup mencerminkan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, termasuk ketersediaan fasilitas dan tenaga medis yang belum merata di seluruh wilayah.

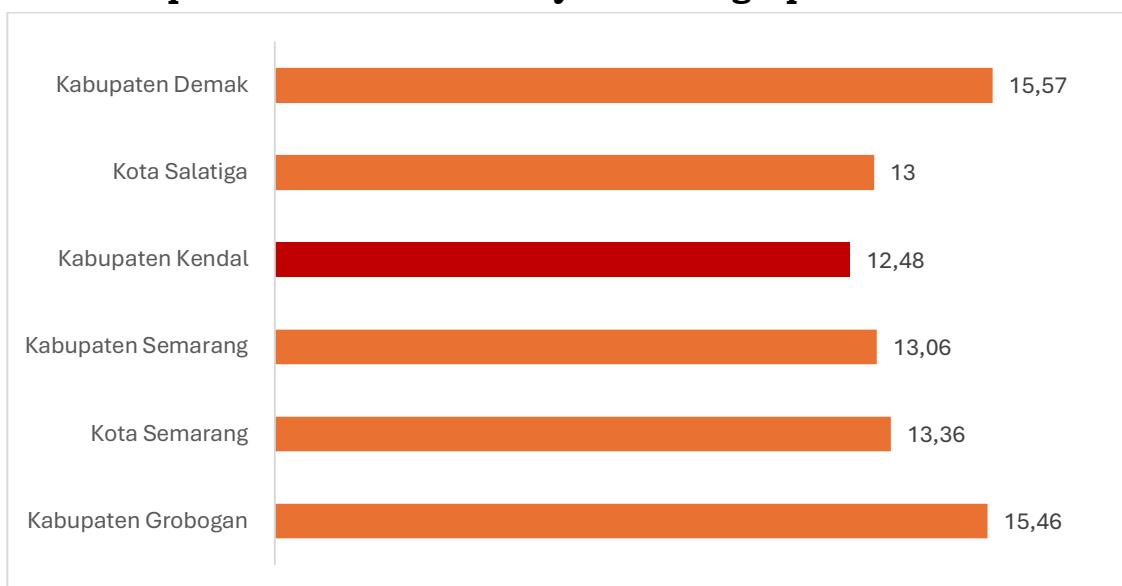
Gambar II.40
Angka Harapan Hidup Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Selain itu, harapan lama sekolah di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 tercatat sebesar 12,48 tahun, menempatkan Kabupaten Kendal di posisi terendah di antara wilayah Kedungsepur, tepat di bawah Kota Salatiga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan masyarakat Kabupaten Kendal untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak masih terbatas. Kurangnya fasilitas pendidikan, rendahnya partisipasi sekolah pada jenjang tertentu, dan belum optimalnya kualitas pengajaran menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya harapan lama sekolah.

Gambar II.41
Harapan Lama Sekolah Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

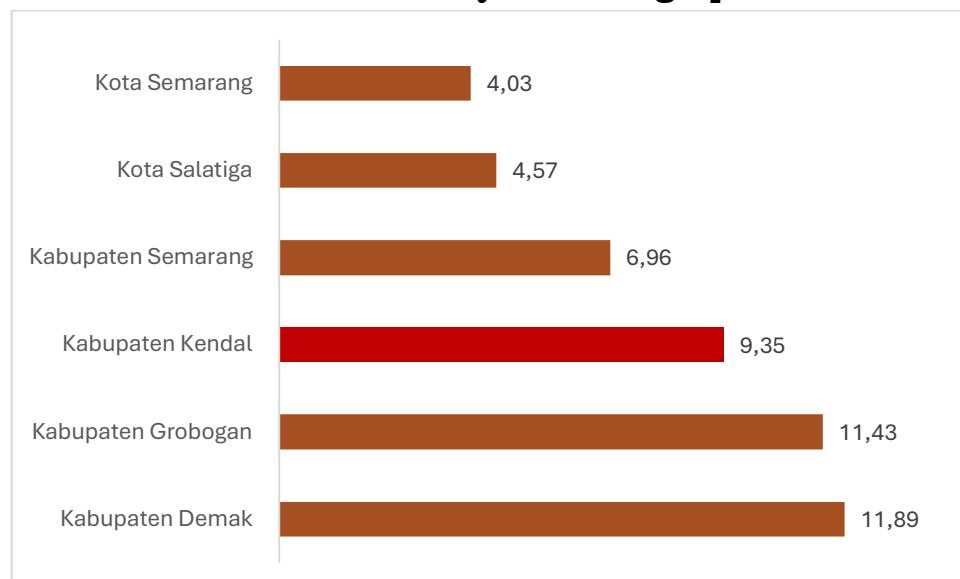
Permasalahan dalam pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sektor pendidikan, diperlukan peningkatan infrastruktur pendidikan, pemerataan distribusi tenaga pendidik, serta program untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang. Di sektor kesehatan, perlu adanya peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang merata, penambahan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan. Optimalisasi pelayanan dasar ini menjadi kunci dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

4. Belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal masih belum merata, yang ditandai dengan tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya daya beli masyarakat, serta belum optimalnya program perlindungan sosial menyebabkan banyak kelompok masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial. Keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, minimnya pengembangan sektor produktif, serta belum efektifnya distribusi manfaat dari pembangunan ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ini tercermin dari persentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 yang mencapai 9,35%, menempatkan Kabupaten Kendal sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di kawasan Kedungsepur setelah Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Tingginya angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Kendal masih belum optimal, sehingga banyak masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi.

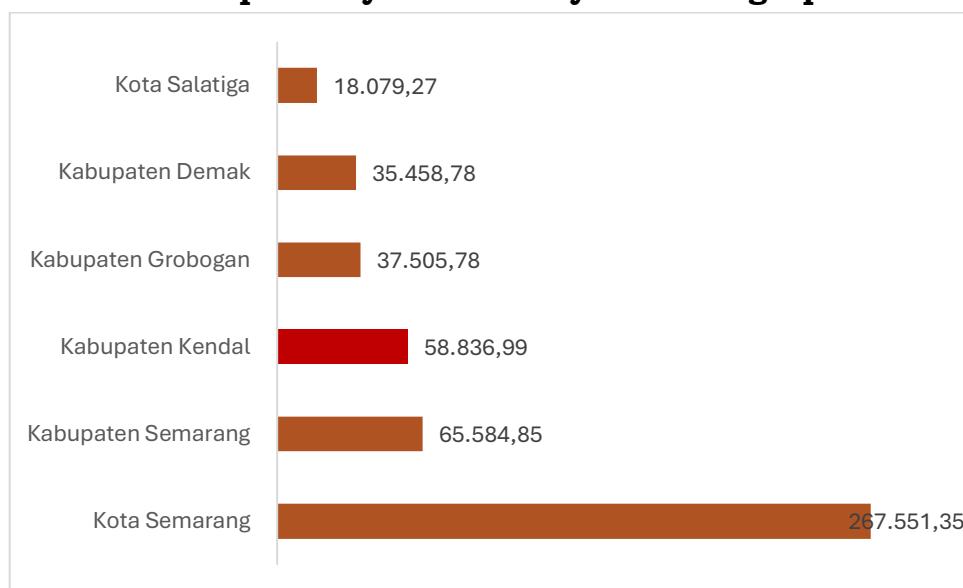
Gambar II.42
Persentase Penduduk Miskin Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Selain itu, **pengeluaran per kapita** masyarakat Kabupaten Kendal pada tahun 2024 tercatat sebesar **Rp13,277 juta per orang per tahun**, menempatkan Kabupaten Kendal di posisi keempat di kawasan Kedungsepur, di bawah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Rendahnya pengeluaran per kapita ini mencerminkan rendahnya daya beli masyarakat dan keterbatasan akses terhadap barang dan jasa yang memadai, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat.

Gambar II.43
Pengeluaran Per Kapit Masyarakat Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Permasalahan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi kebutuhan mendesak. Diperlukan strategi yang terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan lapangan kerja, penguatan sektor produktif, serta peningkatan akses terhadap program perlindungan sosial. Penguatan daya beli masyarakat dapat dilakukan

dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam sektor ekonomi kreatif dan sektor unggulan daerah. Optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya beli menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Kendal secara berkelanjutan.

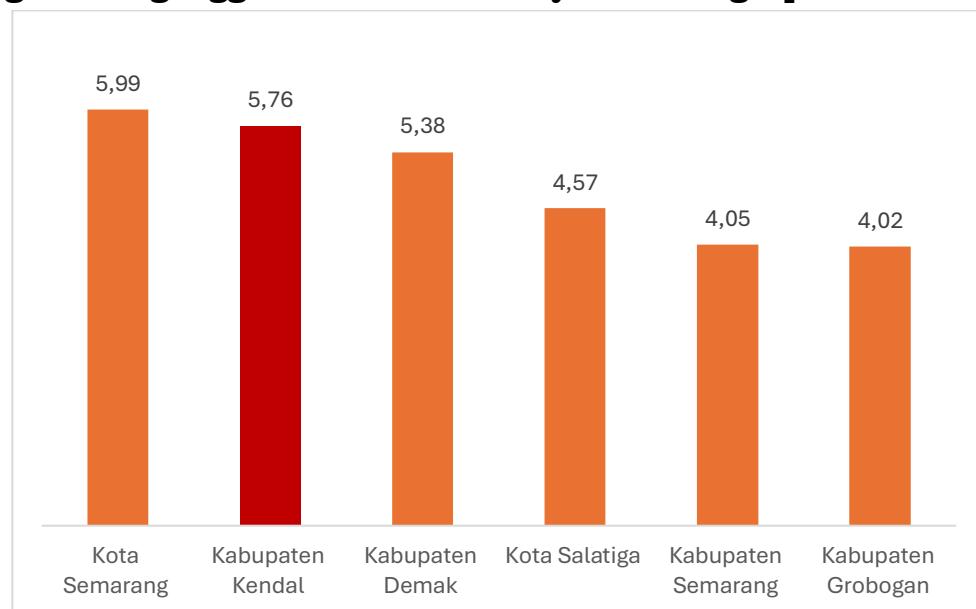
5. Masih tingginya tenaga kerja yang berpendidikan rendah

Ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Kendal masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah, sehingga berpengaruh pada rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan keterbatasan dalam penguasaan keterampilan teknis dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, yang berdampak pada minimnya kontribusi tenaga kerja dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi di sektor industri dan ekonomi kreatif. Kesenjangan antara kebutuhan industri dan keterampilan tenaga kerja menjadi hambatan dalam pengembangan sektor-sektor strategis di Kabupaten Kendal, yang seharusnya mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Kurangnya akses terhadap pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi juga memperburuk ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Minimnya program peningkatan kapasitas dan pengembangan tenaga kerja membuat banyak tenaga kerja sulit beradaptasi dengan dinamika industri, sehingga peluang kerja yang tersedia tidak mampu terserap secara optimal. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang terjebak dalam pekerjaan informal dengan pendapatan rendah, yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Kondisi ini tercermin dari tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal yang mencapai 5,76% pada tahun 2023, menempatkan Kabupaten Kendal sebagai daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di kawasan Kedungsepur setelah Kota Semarang. Tingginya angka pengangguran ini mengindikasikan bahwa peluang kerja yang tersedia masih belum mampu menyerap tenaga kerja yang sebagian besar berpendidikan rendah dan memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri.

Gambar II.44
Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

6. Belum optimalnya infrastruktur penunjang perekonomian, kebutuhan rumah layak huni, dan prasarana sarana utilitasnya, serta penanganan kawasan kumuh

Pengembangan infrastruktur di Kabupaten Kendal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemerataan dan kualitas. Ketersediaan jaringan transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Kondisi ini menyebabkan daya saing ekonomi daerah menjadi lemah, menghambat mobilitas penduduk, serta memperlambat distribusi barang dan jasa di berbagai wilayah. Selain itu, rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan memperbesar ketimpangan antarwilayah.

Tantangan dalam pengembangan infrastruktur ini semakin terlihat dari tingginya kepadatan penduduk di Kabupaten Kendal yang mencapai 1.068 jiwa/km² pada tahun 2024. Kepadatan ini menekan ketersediaan ruang permukiman dan memperburuk kondisi lingkungan, terutama di kawasan perkotaan. Rumah layak huni menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, namun kapasitas infrastruktur perumahan dan permukiman di Kabupaten Kendal masih tergolong rendah. Pada tahun 2023, terdapat ribuan rumah tidak layak huni yang memerlukan perbaikan atau peningkatan menjadi rumah layak huni. Keterbatasan lahan dan keterjangkauan harga rumah juga menjadi kendala dalam penyediaan rumah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kendal masih belum optimal. Masih terdapat beberapa kawasan kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan fasilitas dasar yang belum memadai, seperti akses jalan yang sempit, drainase yang buruk, serta keterbatasan fasilitas sanitasi dan air bersih. Kawasan kumuh ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan ketimpangan spasial dan memperburuk tata ruang wilayah. Pengentasan kawasan kumuh harus menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap wajah kota dan ketertiban lingkungan.

7. Meningkatnya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas pembangunan

Aktivitas pembangunan yang terus meningkat di Kabupaten Kendal berpotensi menyebabkan degradasi kualitas lingkungan hidup yang dapat berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman telah mempersempit lahan hijau dan mengurangi kapasitas serapan air, sehingga meningkatkan risiko banjir dan kekeringan. Di sisi lain, pencemaran air dan udara akibat aktivitas industri dan domestik menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal juga memperburuk kondisi lingkungan, menyebabkan timbunan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) serta pencemaran di aliran sungai dan wilayah pesisir.

Kondisi ini tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kendal yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 64,66 pada skala maksimal 100 poin, yang menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kendal masih tergolong rendah. Capaian IKLH ini dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, yang masing-masing masih memerlukan peningkatan signifikan. Indeks Kualitas Air yang rendah disebabkan oleh pencemaran limbah domestik dan industri di sungai-sungai utama, sementara Indeks Kualitas Udara dipengaruhi oleh emisi dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Selain itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang masih rendah menunjukkan tingginya laju alih fungsi lahan dan berkurangnya area resapan hijau.

Permasalahan ini juga diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah dan mengendalikan pencemaran lingkungan. Pengawasan terhadap aktivitas industri penghasil limbah juga masih lemah, sehingga banyak industri yang membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Selain itu, sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sampah yang belum memadai menyebabkan sebagian besar sampah berakhir di TPA tanpa proses daur ulang atau pengolahan yang efektif.

8. Belum optimalnya mitigasi dan penanggulangan bencana

Kabupaten Kendal memiliki potensi risiko bencana yang cukup tinggi, terutama banjir, tanah longsor, dan kekeringan, yang memerlukan penanganan serius dan terintegrasi. Kondisi geografis Kabupaten Kendal yang terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir menjadikan beberapa wilayah memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Wilayah pegunungan dan dataran tinggi rawan terhadap tanah longsor akibat kondisi tanah yang labil, sedangkan wilayah pesisir menghadapi ancaman rob yang semakin intensif akibat kenaikan permukaan air laut dan kerusakan lingkungan pesisir. Di wilayah dataran rendah, banjir masih menjadi permasalahan utama karena kapasitas infrastruktur pengendali banjir yang belum memadai, serta sistem drainase perkotaan yang tidak berfungsi optimal akibat sedimentasi dan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan di sungai.

Tingkat kerawanan bencana ini tercermin dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, di mana Kabupaten Kendal tercatat memiliki

tingkat ancaman sedang dengan skor terakhir pada tahun 2023 sebesar 91,74 (kelas risiko sedang). Kabupaten Kendal bahkan memiliki indeks kerawanan tertinggi di Jawa Tengah dan menempati urutan 457 dari 514 kabupaten/kota di tingkat nasional. Meskipun IRBI Kabupaten Kendal menunjukkan tren perbaikan setiap tahun, namun tingkat ketahanan bencana masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana di Kabupaten Kendal masih memerlukan peningkatan signifikan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketahanan bencana belum optimal adalah kurangnya infrastruktur pendukung mitigasi bencana seperti tanggul, saluran drainase, dan retensi air yang memadai. Selain itu, sistem peringatan dini (early warning system) di Kabupaten Kendal masih terbatas, sehingga masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang cepat dan akurat saat terjadi potensi bencana. Upaya reboisasi dan perlindungan kawasan hutan sebagai penyangga lingkungan juga belum berjalan secara optimal, sehingga daya serap air di wilayah hulu terus menurun.

Alih fungsi lahan dari kawasan pertanian, perkebunan, dan hutan menjadi kawasan permukiman dan industri juga memperburuk situasi. Berkurangnya area resapan air meningkatkan risiko banjir dan kekeringan, sementara pengembangan kawasan pesisir yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan menyebabkan meningkatnya ancaman rob dan abrasi. Selain itu, perubahan iklim yang ditandai dengan pola hujan yang tidak menentu, suhu udara yang meningkat, dan curah hujan ekstrem memperbesar potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan.

Dari sisi kesiapsiagaan, peran masyarakat dalam tanggap bencana masih perlu ditingkatkan. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, melakukan evakuasi mandiri, dan merespons bencana dengan cepat menjadi kendala dalam meningkatkan ketahanan wilayah. Simulasi bencana dan pendidikan kebencanaan bagi masyarakat masih belum menyeluruh, sehingga banyak warga yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menghadapi bencana.

Dengan penjabaran permasalahan atas, maka beberapa akar masalah sebagai pemicu permasalahan pokok dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.41
Masalah Perurusan RPJMD Kabupaten Kendal

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
Pendidikan	masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan PAUD, SD, SMP	Belum optimalnya rata-rata lama sekolah Kabupaten Kendal.	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan	Belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan
	Masih kurangnya pemerataan guru	Masih adanya sekolah yang belum terakreditasi.		
	Masih terdapatnya angka putus sekolah	Masih adanya anak usia sekolah tidak sekolah (di jenjang PAUD, SD, dan SMP).		
	Tingkat kelulusan sertifikasi guru tidak sebanding dengan formasi	Masih rendahnya literasi numerasi jenjang SD SMP.		
Kesehatan	Belum merata faskes rujukan karena hampir semua faskes rujukan berada di pusat perkotaan	Belum optimalnya kualitas Rumah sakit sebagai faskes rujukan	Masih ditemukannya Kematian ibu dan bayi	Belum optimalnya pelayanan dasar kesehatan
	belum semua puskesmas sesuai dengan standar permenkes 34 tahun 2021	Belum optimalnya FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).	Masih ditemukannya gizi tidak baik (buruk wasting dan stunting)	
	masih kurangnya sarana prasarana ILP	belum semua desa/kelurahan memiliki ILP (Integrasi Layanan Primer)	Masih belum tercapainya indeks keluarga sehat	
	masih belum semua mutu layanan sesuai standar SPM	Belum tercapainya standar pelayanan minimal bidang kesehatan (11 tuntas utama dan 1 tuntas madya)		
	Kualitas lingkungan masih kurang sehat	masih ditemukannya penyakit menular dan tidak menular (DBD, Hepatitis, kanker dan jantung)		

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	PJN belum dilakukan dengan baik	belum semua kelurahan/desa menjadi kelurahan/desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 pilar		
	pelaksanaan germas untuk aktivitas fisik belum dilakukan dengan baik	belum optimalnya rumah tangga yang ber PHBS		
	belum optimalnya deteksi dini pada penyakit menular dan tidak menular	Belum optimalnya kualitas TTU (Tempat-Tempat Umum) dan TPM (Tempat Pengolahan Makanan)		
	masyarakat masih fogging minded			
Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Masih terdapat ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak	Belum optimalnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Belum optimalnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Belum optimalnya infrastruktur menuju pertumbuhan ekonomi
	Masih terdapat jembatan dalam kondisi rusak			
	Meningkatnya beban volume lalulintas menyebabkan jalan cepat rusak	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sekunder pada daerah irigasi di bawah 1.000 Ha	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sekunder pada daerah irigasi di bawah 1.000 Ha	
	Belum optimalnya pemeliharaan sistem drainase kabupaten			
	Masih rendahnya ketrampilan tenaga kerja jasa konstruksi			

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	Belum optimalnya pengelolaan data Base sistem informasi jasa konstruksi	Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	
	Rendahnya kondisi fisik dalam satu sistem jaringan irigasi mempengaruhi belum optimalnya Kinerja pada sistem Jaringan irigasi	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	
	Rendahnya kondisi fisik dalam satu sistem jaringan irigasi mempengaruhi belum optimalnya Kinerja pada sistem Jaringan irigasi	Belum optimalnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung		belum terpenuhinya daya tampung air dalam memenuhi kebutuhan pertanian, air bersih dan industri
	Adanya alih fungsi lahan di daerah hulu mengakibatkan daya serap air berkurang, sehingga debit air meningkat daya tampung terbatas			
	Rendahnya kondisi fisik dalam satu sistem jaringan irigasi mempengaruhi belum optimalnya Kinerja pada sistem Jaringan irigasi	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air minum layak maupun aman		
	Perubahan iklim mengakibatkan curah hujan cukup tinggi sehingga terjadi banjir, Sungai dan Afvour merupakan Wilayah Sungai Kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan	Belum optimalnya penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik (layak dan aman)		

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	Pemerintah Pusat			
	Masih terdapat saluran irigasi yang rusak dan kurang terpelihara			
	Masih terdapat sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi rusak			
	Belum terdapat peraturan tentang RRTR yang menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai yang diamanatkan dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Kenda			
	Belum tersedianya data, informasi dan peta terbaru dalam penataan ruang			
	Masih terdapat bangunan gedung yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung			
	Masih terdapat bangunan gedung pemerintah yang belum memenuhi standar teknis			
	Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di kawasan perkotaan/ strategis lainnya			
	Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses			

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi			
	Terbatasnya kapasitas air baku yang bisa dimanfaatkan			
	Jaringan distribusi air minum yang belum dapat menjangkau seluruh daerah layanan			
	Masih terdapat rumah tangga yang belum memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
	Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal.			
	Belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan dan rencana pemenuhan kebutuhan air minum.			
	Keterbatasan pendanaan APBD dan masyarakat untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum.			
	Kinerja kelembagaan belum menerapkan prinsip good governance sehingga pengelolaan sistem tidak optimal, baik di PDAM maupun pada lembaga			

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	pengelola SPAM yang dikelola masyarakat.			
Perumahan dan Pemukiman	Kurangnya ketersediaan rumah yang terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Masih terdapat backlog perumahan	Pelayanan dan ketersediaan perumahan masih belum optimal	Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan penanganan kumuh yang belum optimal
	Ketidakmampuan masyarakat untuk memperbaiki rumahnya	Masih terdapat rumah tidak layak huni		
	SK Kumuh terbaru angka target menjadi lebih tinggi (SK kumuh terbaru membuat luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi menjadi naik dari luasan sebelumnya)	Masih terdapat luasan kumuh yang belum tertangani		
	Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang tidak memenuhi standar	Masih ditemukannya luasan kumuh dan kawasan permukiman dengan PSU tidak baik		
	Penyediaan Infrastruktur Permukiman masih rendah			
	Akses infrastruktur dasar permukiman belum optimal			
Trantibunlinmas	koordinasi antar stakeholder dalam penegakan perda dan perkada belum optimal	Belum optimalnya penegakan perda dan perkada	Belum optimalnya kondusivitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Belum optimalnya kondusivitas wilayah
	Terbatasnya SDM pelaksana penegakan Perda dan Perkada			
	Terbatasnya sarpras Damkar	Masih adanya penanganan		

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
Sosial		kebakaran yang tidak sesuai dengan respon time	Belum optimalnya penanganan kebakaran	
	Belum optimalnya kapasitas SDM Damkar			
	Belum optimalnya pencegahan dan mitigasi bencana	Belum optimalnya kesiapsiagaan bencana	belum optimalnya pencegahan dan mitigasi bencana	Belum optimalnya pencegahan dan mitigasi bencana
	Terbatasnya jumlah desa siaga bencana	Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder dalam penanganan bencana		
	Terbatasnya fasilitator Desa Tangguh Bencana			
	Tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana belum optimal	Belum optimalnya desa/kelurahan tangguh bencana		
	Monitoring terhadap tindak lanjut dan pengembangan destana terbatas			
	Belum tersedianya data yang terintegrasi terkait PPKS	Belum semua PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial) terlantar memperoleh layanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial	Masih ditemukannya PPKS yang belum mendapat pelayanan sesuai SPM	Belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat
	Belum tersedianya rumah singgah sesuai standar	Belum semua PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial) lainnya (diluar PPKS terlantar)		
		memperoleh layanan rehabilitasi sosial		
	Belum optimalnya koordinasi penanganan bencana			

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
Perkembangan dan Pengelolaan Sosial Kesejahteraan	Masih ada PSKS yang belum tersertifikasi	Belum optimalnya peran PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan PPKS		
	Belum optimalnya kualitas verifikasi lapangan data kemiskinan	Pelayanan penanganan tanggap darurat bencana belum sesuai SPM		
	belum terjalinnya kerja sama dengan pentahelix dalam penanganan PPKS			
	belum optimalnya pemeliharaan TMP	Taman makam pahlawan belum sesuai standar (Permenses 23 Tahun 2014)	TMP belum sesuai dengan standar	
Tenaga kerja	Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja	Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingginya tingkat pengangguran
	Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar	Belum tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja		
	Belum selarasnya pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	Belum optimalnya media informasi ketenagakerjaan dalam melakukan link and match		
	Penggunaan mesin berteknologi tinggi yang minim tenaga kerja			
	Kurangnya ketrampilan calon pencari kerja			

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rendahnya pendidikan sehingga tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pencari kerja	Minimnya perluasan kesempatan dan penempatan kerja		
	Sinkronisasi data dan kolaborasi dengan stakeholder terkait ketenagakerjaan	Belum semua tenaga kerja (semesta) memiliki jaminan ketenagakerjaan		
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Menurunnya produktivitas tenaga kerja		
Pangan	Masih ditemukannya OPD yang belum memiliki data pilah gender	Belum optimalnya kebijakan responsif gender	Belum optimalnya pemberdayaan gender	Belum optimalnya penanganan ketimpangan gender
	masih ditemukannya PD yang belum melaksanakan PUG			
	belum optimalnya pemberdayaan perempuan	Masih ditemukannya kekerasan pada perempuan dan anak	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak	
	Belum optimalnya jejaring dalam perlindungan perempuan			
	Belum optimalnya kelembagaan perlindungan perempuan			
	Belum optimalnya kelembagaan dalam pemenuhan hak anak	Belum terpenuhinya kabupaten layak anak		
	Belum semua PD responsif anak			

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	Terbatasnya ketersediaan cadangan pangan yang dimiliki pemerintah	Belum optimalnya cadangan pangan		
	Terbatasnya sarpras dan SDM dalam pengembangan pangan B2SA	Belum optimalnya pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		
Pertanahan	Masih adanya konflik agraria yang belum selesai	Masih adanya bidang tanah milik Pemda yang belum bersertifikat	Belum optimalnya pencatatan bidang tanah	
Lingkungan hidup	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup	Meningkatnya pencemaran air	Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup
	Pesatnya perkembangan Perindustrian dan jumlah kendaraan bermotor	Meningkatnya pencemaran udara		
	Belum optimalnya penataan RTH.	Belum optimalnya tutupan lahan		
	Masih adanya masyarakat Kabupaten Kendal yang belum mendapatkan pelayanan sampah	Belum optimalnya pengelolaan sampah dan pengurangan sampah	Meningkatnya timbulan sampah	
	Kondisi TPA yang kurang memadai sehingga ada sampah yang tidak terolah			
	Meningkatnya produksi sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah usaha/kegiatan, namun belum dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
	Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kantong plastik	Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati		

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	masih rendahnya pengelolaan sampah 3R			
Admindukcapil	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	Belum optimalnya layanan kependudukan catatan sipil dalam pemenuhan dokumen kependudukan	Masih ditemukannya penduduk yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan	Belum optimalnya pelayanan publik
	Belum optimalnya penggunaan database kependudukan			
	Belum optimalnya pengelolaan profil kependudukan	Belum optimalnya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan		
	Belum optimalnya pelayanan pencatatan sipil			
Pemberdayaan desa dan masyarakat	Penataan Wilayah Desa belum optimal	Belum optimalnya kemandirian desa	belum optimalnya pengelolaan dan pembinaan desa	Belum optimalnya pembangunan desa dan kawasan perdesaan
	Belum optimalnya kerjasama antar desa	Belum optimalnya pengembangan kawasan pedesaan.		
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya kualitas aparat desa		
	Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa	Belum optimalnya akuntabilitas perencanaan dan penganggaran desa		
	Belum optimalnya penyelenggaraan kerjasama antar desa	Belum sinerginya dokumen perencanaan dan penganggaran desa dengan dokumen peencanaan dan penganggaran kabupaten		
	Belum optimalnya BPD desa			
	Belum optimalnya pengelolaan BUMDEs			

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
Pengendalian Penduduk dan KB	belum optimalnya kampung KB	Masih ditemukannya kelahiran pada usia anak	Belum optimalnya pengendalian penduduk	Belum optimalnya pengendalian penduduk dan pencegahan penduduk resiko stunting
	Data dalam pengendalian penduduk belum optimal	Masih tingginya unmetneed KB		
	Kesadaran masyarakat untuk ber KB kurang	Masih tingginya drop out KB	Belum optimalnya CPR	
	KIE yang belum efektif	Masih rendahnya capaian MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)		
	Kuantitas Sub PPKBD, PPKBD dan PLKB masih belum optimal	Masih tingginya keluarga resiko stunting		
Perhubungan	Belum semua wilayah terlayani trayek angkutan umum	Belum optimalnya implementasi tata transportasi lokal	Belum optimalnya perwujudan konektivitas antar wilayah	Belum optimalnya perwujudan konektivitas antar wilayah
	Belum optimalnya pelayanan PJU berbasis Smart City			
	Terdapat kesenjangan antara transportasi konvensional dengan transportasi berbasis online			
	Belum terkoneksi antar wilayah dengan transportasi masal	Belum terkoneksi antar wilayah dengan transportasi massal	Belum optimalnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	
	Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian yang ada, karena faktor usia peralatan pengujian			
	Kurangnya kesadaran wajib uji kendaraan yang tidak melakukan uji kendaraan			

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
Kominfot	Belum optimalnya data/ informasi dibidang perhubungan			
	Belum optimalnya cakupan rasio ijin trayek			
	Belum optimalnya pengelolaan parkir			
	Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas			
	masih adanya kondisi halte yang kurang baik			
	Belum optimalnya pemasangan rambu- rambu	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas sesuai dengan kewenangan daerah		
Kominfot	Belum integrasi jaringan intra Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dengan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung kebijakan Jateng Connected	Belum optimalnya pencapaian domain kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE	Adanya Kebijakan percepatan Transformasi Digital Nasional di 3 (tiga) sektor strategis yaitu pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital yang mewajibkan penerapan pemerintahan digital di tingkat pemerintahan daerah untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terpercaya (Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	belum optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik
	Minimnya pemerataan infrastruktur teknologi informasi	Belum optimalnya sarana dan prasarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).		

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	dan komunikasi (utamanya akses internet dan jaringan sinyal)			
	Kesiapan Kabupaten Kendal untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital masih dianggap kurang	Belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan pemerintah daerah		
	Masih terdapat area ruang publik yang blankspot Mobile Broadband 4G dan bahkan ada yang blankspot internet di beberapa wilayah desa di 8 (delapan) Kecamatan			
	Tingginya tuntutan masyarakat akan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir dalam rangka mengkonter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading, serta diseminasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah		Adanya Kebijakan Nasional Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel (Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Nasional yang memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik)	
Koperasi UMKM	Masih adanya UMK yang menjalankan usahanya tidak	Belum semua usaha mikro yang naik kelas	Belum optimalnya peran koperasi dan UMK dalam perekonomian di Kabupaten Kendal	Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	perijinan sesuai peraturan yang berlaku,			
	Banyak koperasi belum sadar melakukan rapat tahunan secara rutin, tidak melaporkan laporan keuangan	Masih kurangnya minat kewirausahaan di masyarakat	Belum optimalnya tata kelola koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan koperasi	
	Adanya koperasi yang dalam pengelolaannya belum sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan aturan yang berlaku	Banyak koperasi belum mengetahui manajemen resiko keuangan, pengurus dan pengawas belum kompeten dibuktikan dengan sertifikasi keuangan	Belum optimalnya koperasi yang pengelolaannya sesuai dengan aturan yang berlaku	
	Adanya koperasi yang belum menyiapkan dokumen pendukung pemeriksaan kesehatan koperasi (4 aspek yang terdiri dari tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, permodalan)		Belum optimalnya koperasi dalam mencapai aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan	
	Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi belum memiliki kompetensi dan Pengetahuan dalam mengelola Koperasi yang maju modern dan berdaya saing sesuai jati diri dan prinsip koperasi		Belum optimalnya pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas dan Uji Kompetensi bagi pengelola	
	Kurangnya kerjasama dengan lembaga keuangan, sektor riil dan rendahnya digitalisasi koperasi		Belum optimalnya pelaksanaan modernisasi koperasi	

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
Penanaman modal	Sarpras pendukung	Belum optimalnya investasi yang mampu menyerap tenaga kerja.	Belum optimalnya nilai investasi di Kabupaten Kendal	Belum optimalnya peningkatan investasi dibandingkan dengan luas kawasan industri
	belum tersedianya regulasi tata ruang (RDTR)	Belum optimalnya pemasaran penanaman modal.	Belum optimalnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Kendal	
	Belum optimalnya pengoperasian pelabuhan kendal	Belum optimalnya laporan kegiatan penanaman modal.		
	Pada tahun 2023 tersebut dimunculkan khusus data Investor Usaha Menengah dan Usaha besar.	Belum optimalnya pelayanan perijinan dalam Mall Pelayanan Publik		
Pemuda dan olahraga	Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan	Belum optimalnya pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor.	Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga dalam meningkatkan kualitas SDM
	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	Belum optimalnya fasilitasi organisasi kepemudaan	belum optimalnya capaian prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional	
		Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga.		
	Belum optimalnya kepramukaan	Belum optimalnya fasilitasi kepramukaan		
Statistik	Kurang baiknya tata kelola, ketersediaan dan kualitas data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi fondasi penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran	Belum terwujudnya satu data Indonesia di Kabupaten Kendal.	Adanya Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah Berkualitas (Akurat, Mutakhir, Terpadu dan Dapat Dipertanggungjawabkan) dan Terintegrasi (Mudah Diakses dan Dibagi Pakaikan) (Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia)	Belum optimalnya satu data dalam pembangunan terintegrasi

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	Masih rendahnya ketersediaan, tata kelola, dan kualitas data Informasi Geospasial (IG) yang dihasilkan Perangkat Daerah sehingga belum mampu menjadi pendukung dalam kegiatan perencanaan dan pertimbangan kebijakan daerah	Belum optimalnya tata kelola, ketersediaan, dan kualitas data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal		
Persandian	Adanya peningkatan risiko dan celah keamanan informasi, serta ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi dan semakin kompleks sebagai akibat perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, dan lain sebagainya.	Belum optimalnya tingkat kematangan manajemen keamanan informasi	Adanya Kebijakan Membangun dan Menjaga Keamanan Siber Nasional untuk Melindungi Seluruh Ruang Siber (termasuk aset informasi yang ada didalamnya) dari ancaman dan serangan siber (baik yang bersifat teknis maupun sosial)	Belum optimalnya perlindungan keamanan informasi daerah
Kebudayaan	Kurangnya minat atau partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian Cagar budaya, warisan budaya tak benda	Belum optimalnya pemajuan kebudayaan	Belum optimalnya pemajuan kebudayaan
	Kurangnya sanggar-sanggar kebudayaan di masyarakat	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kesenian tradisional		

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	belum tersedianya data pokok kebudayaan	Belum optimalnya pengelolaan tempat bersejarah		
Perpustakaan	belum optimalnya penyelenggaraan perpustakaan	Pemanfaatan perpustakaan dan taman baca yang belum optimal	Masih rendahnya literasi membaca	Belum optimalnya budaya literasi
	masih rendahnya literasi masyarakat		Masih rendahnya literasi membaca	
Kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah	Belum optimalnya Transformasi digitalisasi kearsipan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya sistem kearsipan daerah
Perikanan	Semakin menurunnya luas tambak karena adanya alih fungsi lahan tambak terutama untuk kegiatan industri	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya
	Tidak adanya alokasi pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan di tambak (terutama ikan bandeng) dan mahalnya harga pupuk urea di pasaran			
	Sering terjadinya gagal panen akibat air pasang tinggi (rob) dan bencana banjir			
	Terjadinya kerusakan lingkungan pada wilayah pesisir dan perairan laut seperti terjadinya abrasi, rusaknya vegetasi pantai (mangrove), rusaknya terumbu karang, tidak terjaganya sempadan pantai			
	Masih adanya nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan			

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
Kependidikan	Masih adanya benih/induk ikan yang tidak berkualitas			
	Banyaknya usaha kecil pembudidaya ikan yang terkendala tingginya biaya produksi budidaya (harga pakan)			
	Banyaknya hama dan penyakit pada budidaya ikan			
	Terbatasnya jangkauan pemasaran produk perikanan			
	Masih banyaknya jual beli hasil tangkapan di luar TPI	Tempat pelelangan ikan yang belum memenuhi standar	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan	
	Terbatasnya sarana prasarana TPI			
	Terbatasnya sarana prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran produk perikanan			
Pariwisata	Kurangnya pengetahuan nelayan, permodalan, dan keterbatasan sarana prasarana penangkapan ikan		Belum optimalnya kapasitas pelaku usaha perikanan	
	Rendahnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat pesisir	Belum optimalnya pengelolaan usaha perikanan berbasis teknologi		
	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Kendal	Belum optimalnya pencapaian angka konsumsi ikan		
Pariwisata	Belum optimalnya pengembangan inovasi ekraf	Belum optimalnya kunjungan wisatawan mancanegara.	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata	Belum optimalnya pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendorong

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
Pariwisata				perekonomian daerah
	Belum optimalnya daya tarik pariwisata	Belum optimalnya pelaku usaha ekonomi kreatif		
	Pengembangan sektor pariwisata belum optimal	Belum optimalnya promosi pengembangan wisata		
	kurang optimalnya sarana prasarana pada destinasi wisata maupun pada akses menuju destinasi wisata	Belum optimalnya pencapaian pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi pariwisata).		
		Belum semua produk ekonomi kreatif yang ber HAKI.		
		Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata, rumah makan dan restoran menuju standar CHSE (<i>Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability</i>).		
Pertanian	Berkurangnya luas lahan pertanian	Belum optimalnya produksi pertanian unggulan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, hal ini dikarenakan pertanian belum menuju pada pertanian modern	Menurunnya produktivitas pertanian	Kemandirian pangan yang belum optimal dikarenakan menurunnya produktivitas pertanian yang menurun
	Kurangnya penggunaan teknologi tepat guna	Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian mendukung produksi mulai dari pupuk, jaringan irigasi, sumber air		

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
Pertanian	Minat generasi muda untuk bertani semakin berkurang sehingga menjadi kendala di masa mendatang	Belum optimalnya pertumbuhan populasi peternakan.		
	Belum optimalnya industrialisasi pertanian	Belum Optimalnya penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.		
	Kurangnya pemasaran produk pertanian	Menurunnya lahan pertanian berkelanjutan.		
		Berkurangnya minat generasi muda dalam pertanian		
Perdagangan	Banyak pasar yang tidak memenuhi standar kelayakan fungsi, seperti sanitasi, keamanan, dan fasilitas pendukung lainnya	Banyak pasar rakyat yang masih dalam kondisi tidak layak.	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB mengalami penurunan.	Belum optimalnya kualitas sarana prasarana perdagangan dan kualitas produk potensi ekspor
	Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan distribusi yang merata	Distribusi barang yang tidak merata, terutama barang kebutuhan pokok		
	Banyak alat ukur yang tidak terkalibrasi dengan benar, mengurangi kepercayaan konsumen.	Belum semua sarana dan prasarana perdagangan melakukan uji tera dan tera ulang		
	Kurangnya partisipasi strategis dan dampak terukur yang langsung dan nyata dari pameran bagi pelaku usaha		Potensi ekspor belum optimal	

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
Perindustrian	Disparitas harga antardaerah yang cukup tinggi menunjukkan kurangnya efisiensi pasar yang disebabkan oleh distribusi antar daerah yang kurang merata	Ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan nilai disparitas harga cukup tinggi		
	Keterbatasan akses pasar internasional dan kualitas produk yang belum memenuhi standar ekspor.	Kualitas produk dan harga yang belum bisa bersaing secara kompetitif dengan pasar global.		
	Kualitas produk dalam negeri belum bisa bersaing dengan pasar yang kompetitif	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri belum mencapai tingkat yang diinginkan		
Perencanaan	Data IKM yang belum terupdate	Belum optimalnya pembinaan IKM.	Belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri	Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan pengembangan kawasan industri
		Hilirisasi industri pada produk unggulan daerah dalam mendukung kawasan industri belum optimal.	Belum optimalnya pengembangan sentra industri kecil	
		Pemanfaatan kawasan perindustrian dan kawasan peruntukan untuk industri belum optimal		
	Kapasitas SDM pada Perangkat Daerah, Pendanaan dan Anggaran, Koordinasi antar PD	Belum optimalnya capaian sasaran pembangunan.	Penguatan Kapasitas dan Kompetensi SDM, Optimalisasi Pengelolaan anggaran, Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program kegiatan, Pemanfaatan teknologi dan Sistem Informasi	Belum optimalnya capaian reformasi birokrasi dan akuntabilitas pembangunan daerah

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
		Partisipasi masyarakat belum terakomodir dalam dokumen perencanaan.		
	Kegiatan yang dilaksanakan tidak mendukung capaian indikator program maupun sasaran	Belum konsisten antara dokumen perencanaan dan penganggaran.	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	
		Belum optimalnya kematangan mitigasi resiko		
Keuangan daerah	Ketidaksesuaian antara data yang tercatat dan keadaan sebenarnya	Belum konsisten antara dokumen penganggaran dengan perencanaan	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	
	Pembiayaan Belanja sebagian besar masih bergantung kepada Transfer dari pusat maupun provinsi			
	Ketidakakuratan data pelaporan dapat menyebabkan deviasi yang tidak terdeteksi atau tidak dapat segera ditangani			
	Kurangnya sistem informasi yang terintegrasi			
	Perencanaan Anggaran yang Tidak Realistik dan Keterlambatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan			

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	Perubahan kebijakan dan prioritas, pengaruh politik dan kepentingan pribadi, ketidakpastian ekonomi dan keuangan			
	Keterbatasan SDM, prosedur birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi, ketidaktepatan data			
	Kurangnya Pemahaman dan Kompetensi, keterbatasan SDM, kepatuhan yang rendah terhadap regulasi, pengawasan dan evaluasi yang lemah			
	Integrasi Data yang Kompleks, Keamanan dan Kerahasiaan Data, Ketidakpastian Regulasi dan Kebijakan			
	Penggunaan Aset yang Tidak Efisien, Tata Kelola dan Pengawasan yang Lemah			
	Perubahan kebijakan dalam pengelolaan pendapatan	Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah	Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah	Kapasitas fiskal masih belum optimal
		Belum optimalnya pemetaan potensi pendapatan		
	SDM yang terbatas			
	Tim PPID belum melaksanakan tugas secara optimal			
	Tim PPID belum melaksanakan tugas secara optimal			
	Ketidakpastian Ekonomi			

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	Inventarisasi yang Tidak Lengkap dan Tidak Akurat, Kurangnya Sistem Informasi yang Terintegrasi			
	Kebijakan Pemerintah Pusat dan Keterbatasan Sumber Daya Lokal			
Kepegawaian	kurangnya sarana dan prasarana dalam Digitalisasi pelayanan	Belum semua fungsional dan struktural memiliki sertifikat kompetensi	Belum optimalnya pencapaian merit sistem	Belum optimalnya reformasi birokrasi kepegawaian
	belum terintegrasi sistem kepegawaian yang telah ada	belum semua penempatan ASN sesuai peta jabatan		
	belum terintegrasi layanan kepegawaian	Belum optimalnya kinerja ASN		
		Belum optimalnya pengembangan karir berbasis meritokrasi		
	belum optimalnya pemahaman ASN	kurangnya tingkat disiplin ASN		
	belum optimalnya perlindungan ASN dan bantuan hukum			
	belum meratanya distribusi ASN			
	koordinasi lintas sektoral dalam hal kebutuhan kepegawaian belum optimal			
Penelitian dan Pengembangan	koordinasi & kolaborasi antar stakeholder belum maksimal	realisasi capaian dari Dimensi Keanekaragaman dan Kolaborasi (dengan indikator rasio Keanekaragaman tenaga kerja, Publikasi ilmiah, Aplikasi kekayaan intelektual (KI) serta	Belum optimalnya inovasi daerah	Belum optimalnya peran penelitian dan inovasi dalam pembangunan daerah

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
		Dimensi Penelitian dan Pengembangan dengan indikator (Belanja riset, jumlah aplikasi merek dagang) masih rendah		
	Kapasitas SDM Perangda	Realisasi inovasi Perangda dan masyarakat yang dilaporkan masih rendah		
Pengawasan	Kendala jumlah pemeriksa	Belum optimalnya indeks integritas nasional.	Belum optimalnya peningkatan kapasitas APIP	Belum optimalnya indeks integritas nasional
	Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan	Belum optiamalnya maturitas SPIP.		
	Meningkatnya jumlah obyek pengawasan di PD.	Belum optimalnya pembinaan APIP		
	Meningkatnya jumlah obyek pengawasan di PD dan Pemerintah Desa			
Sekretariat Daerah	Belum terwujudnya PD yang menjadi contoh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum seluruh PD melaksanakan tujuan RB secara lengkap	Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Belum optimalnya reformasi birokrasi
	Belum terwujudnya WBK percontohan di perangkat daerah.	Belum optimalnya capaian nilai IKM		
	Rumus penentuan target/hasil nilai SPM yang tidak sinkron antara Kemendagri dengan Kementerian yang menaungi di setiap bidang urusan	SPM tidak dapat tercapai sempurna sampai dengan 100%	SPM sebagai dasar pembuatan RPJMD dan penentu besaran dana dari pusat	
	Belum optimalnya pelayanan terpadu di seluruh kecamatan	Belum optimalnya fungsi sekretariat daerah dalam		

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
	dan terpadu dengan PD, terbatasnya jangkauan internet di seluruh wilayah.	pengkoordinasiian pelaksanaan pembangunan dan pencapaian target daerah		
	Terbatasnya jumlah PNS dan P3K untuk pengisian jabatan dan formasi yang sesuai.			
	Terbatasnya jumlah pengangkatan pegawai baru berdasarkan kuota berpengaruh terhadap penataan organisasi.			
	Belum optimalnya pemenuhan indikator indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Belum optimalnya pencatatan non tender dan swakelola di SPSE, belum terpenuhinya jumlah SDM PBJ sesuai rekomendasi LKPP, belum terpenuhinya target level kematangan UKPBJ proaktif	Belum optimalnya Indeks Tata Kelola Pengadaan	
	Belum terpenuhinya target perencanaan pengadaan melalui e-purchasing	Belum optimalnya indeks reformasi hukum	Transparansi PBJ disinkronkan dengan program dalam rangka mendukung UMKM dan penggunaan produk dalam negeri	
Setwan	Fasilitasi dukungan terhadap tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Dinamis	Belum optimalnya fungsi DPRD dalam penyusunan peraturan daerah	Belum optimalnya Pokok - Pokok Pikiran DPRD menjadi Anggaran atau kegiatan dalam APBD	
Kesbangpol	Penyelenggaraan pendidikan politik bagi warga perdesaan masih kurang	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik.	Belum optimalnya partisipasi politik	Belum optimalnya partisipasi politik
	Belum optimalnya pendidikan politik dan peran dalam organisasi politik oleh	Peran perempuan dalam kepengurusan Ormas dan		

URUSAN	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN URUSAN	MASALAH POKOK
Kewilayahan	perempuan.	Parpol terbatas.		
	Penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan dan pemilih pemula di perdesaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan kemasyarakatan masih terbatas di perkotaan.		
	Terbatasnya kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat perdesaan.	Belum optimalnya forum kerukunan umat beragama	Masih ditemukannya potensi konflik dimasyarakat	Masih ditemukannya potensi konflik dimasyarakat
	Belum tumbuhnya kesadaran hukum dalam legalitas kelembagaan Ormas, LSM dan Ormas Keagamaan merata seluruh wilayah.			
	Terbatasnya jangkauan layanan pembinaan wawasan kebangsaan dan toleransi bagi masyarakat.			
	Kurangnya sarana dan prasarana	Masih belum optimalnya koordinasi keamanan dan ketertiban wilayah		Belum optimalnya pembangunan kewilayahian
	Kurangnya kapasitas SDM	Masih belum optimalnya capaian kepuasan pelayanan publik	Akuntabilitas yang belum optimal	
		kurang optimalnya kualitas administrasi pemerintahan desa/kelurahan		
		kurangnya kualitas perencanaan dan keuangan desa		
		kurangnya kualitas lembaga kemasyarakatan desa	masih rendahnya capaian desa mandiri	

2.3.2 Isu Strategis

Di tengah kompleksitas dunia saat ini, isu-isu strategis mengemuka sebagai fokus utama yang mempengaruhi arah dan kebijakan masa depan. Dari perubahan iklim hingga ketegangan geopolitik, tantangan-tantangan ini memperumit dinamika global dan menuntut perhatian serius dari pemimpin dunia. Salah satu isu strategis yang mendominasi perbincangan adalah perubahan iklim, yang menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Di sisi lain, ketegangan geopolitik antara kekuatan besar memunculkan risiko konflik berskala besar yang dapat mengganggu stabilitas global. Selain itu, isu-isu terkait keamanan siber, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia juga menjadi bagian dari agenda strategis yang mendesak. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, koordinasi internasional dan kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.

2.3.2.1 Telaah Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional berasal dari hasil analisis isu global dalam RPJMN 2025-2029, yang memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam jangka menengah. Isu global ini berpotensi besar mempengaruhi berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Kendal, termasuk sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan penjabaran yang jelas mengenai isu global menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang adaptif dan efektif di tingkat daerah. Telaah yang komprehensif terhadap isu global juga diperlukan untuk mengidentifikasi peran strategis Kabupaten Kendal dalam mengantisipasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul dari dinamika global. Isu global mencakup berbagai dimensi, mulai dari politik, ekonomi, lingkungan, hingga teknologi, yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu-isu strategis internasional yang relevan dan bagaimana isu-isu tersebut dapat berkontribusi terhadap pengembangan potensi daerah dan peningkatan daya saing Kabupaten Kendal.

Gambar II.45
Isu Global



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Perubahan dinamika geopolitik dan geoekonomi global, termasuk ketegangan antarnegara, perubahan kebijakan perdagangan, dan krisis energi, dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah. Sebagai kabupaten pengembangan industri dan eksport-impor, Kabupaten Kendal memiliki potensi besar untuk memanfaatkan peluang dari perubahan ini dengan memperkuat sektor industri berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan daya saing di pasar regional dan global. Pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) sebagai pusat aktivitas ekonomi strategis menjadi peluang untuk menarik investasi asing, memperluas jaringan perdagangan internasional, dan meningkatkan nilai tambah produk eksport. Optimalisasi infrastruktur konektivitas, seperti pelabuhan, jalan tol, dan jalur kereta api, serta penguatan kerja sama ekonomi antarwilayah menjadi strategi kunci dalam mengantisipasi dampak ketidakpastian global dan memanfaatkan potensi peningkatan perdagangan dan investasi di tingkat internasional.

2. Dampak Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global membawa dampak signifikan seperti kenaikan suhu, perubahan pola hujan, dan meningkatnya risiko bencana alam yang dapat mengganggu sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan di Kabupaten Kendal. Sebagai daerah dengan basis ekonomi pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian, dampak perubahan iklim dapat mempengaruhi produktivitas dan stabilitas rantai pasok. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, diperlukan penguatan ketahanan lingkungan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, pengembangan sistem irigasi yang adaptif, rehabilitasi kawasan pesisir, serta penerapan praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Kabupaten Kendal juga memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan, seperti energi surya dan biomassa,

dalam mendukung ketahanan energi dan pengurangan emisi karbon di sektor industri dan rumah tangga.

3. Perkembangan Teknologi Industri 5.0

Era Industri 5.0 yang mengedepankan integrasi teknologi cerdas, otomatisasi, dan human-centric memberikan peluang bagi Kabupaten Kendal untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor industri, terutama dalam pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Sebagai pusat pengembangan kawasan industri, Kabupaten Kendal dapat memanfaatkan teknologi berbasis Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing produk lokal di tingkat internasional. Penguatan ekosistem industri melalui pembangunan pusat riset dan pengembangan (R&D), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi menjadi kunci dalam menghadapi transformasi ini.

4. Adanya Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan pergeseran nilai dan pola perilaku masyarakat, termasuk dalam hal interaksi sosial, budaya konsumsi, dan gaya hidup. Kabupaten Kendal dapat mengantisipasi pergeseran ini dengan memperkuat identitas budaya lokal melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal, promosi seni dan tradisi, serta edukasi digital kepada masyarakat. Pemanfaatan platform digital untuk mempromosikan potensi wisata dan produk lokal, seperti batik Kendal, kuliner khas, dan hasil kerajinan tangan, juga dapat menjadi strategi untuk memperkuat daya tarik Kabupaten Kendal di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, penguatan ekonomi kreatif berbasis komunitas dan pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal dapat memperkuat citra Kabupaten Kendal sebagai daerah yang adaptif namun tetap mempertahankan kekayaan budayanya.

2.3.2.2 Telaah Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional mengacu pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan memiliki dampak besar terhadap keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan fundamental suatu negara. Kabupaten Kendal, sebagai kabupaten dengan potensi besar di sektor industri dan perdagangan, memiliki peran strategis dalam merespons isu-isu strategis nasional. Penanganan isu-isu ini memerlukan perencanaan strategis yang matang, koordinasi lintas sektor, dan kerja sama antarwilayah untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Namun, tantangan muncul ketika isu strategis nasional yang belum terselesaikan bertambah dengan munculnya isu-isu baru, sehingga diperlukan respons yang adaptif dan strategis untuk mengantisipasi dinamika tersebut. Isu jangka menengah nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang relevan dengan Kabupaten Kendal dijabarkan sebagai berikut:

Gambar II.46
Isu Strategis Nasional



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

Sebagai kabupaten yang tengah berkembang menjadi pusat industri dan ekspor-impor, Kabupaten Kendal memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan dan prospek ekonomi daerah. Pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadi penggerak utama dalam memperkuat sektor manufaktur, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memperluas akses ke pasar internasional. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif juga menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Selain itu, peningkatan infrastruktur konektivitas, termasuk optimalisasi jalur pelabuhan dan transportasi darat, diharapkan dapat memperkuat arus perdagangan dan mempercepat distribusi hasil industri ke pasar domestik dan internasional.

2. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global dan memperkuat daya saing industri di Kabupaten Kendal. Pengembangan keterampilan tenaga kerja di sektor industri, termasuk pelatihan di bidang teknologi, otomatisasi, dan digitalisasi, perlu terus ditingkatkan untuk menghadapi era Industri 4.0. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menciptakan tenaga kerja yang siap kerja dan berdaya saing tinggi sangat dibutuhkan. Selain itu, pengembangan wirausaha muda dan pemberdayaan komunitas lokal melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Perkembangan industri dan perdagangan di Kabupaten Kendal mendorong terjadinya pergeseran struktur kelas masyarakat, dengan meningkatnya kelas menengah dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini perlu diimbangi dengan penguatan daya beli masyarakat dan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Di sisi lain, kesenjangan sosial yang mungkin muncul akibat ketidakmerataan akses ekonomi perlu diantisipasi melalui kebijakan inklusif yang mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah perdesaan. Pengembangan sektor ekonomi kreatif dan UMKM juga dapat menjadi instrumen dalam

memperkuat keseimbangan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kendal.

4. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas pembangunan di Kabupaten Kendal. Digitalisasi layanan publik, penguatan peran masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta peningkatan kapasitas birokrasi menjadi strategi utama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah.

5. Rendahnya Produktivitas

Meskipun Kabupaten Kendal memiliki potensi ekonomi yang besar, rendahnya produktivitas di sektor industri dan pertanian masih menjadi tantangan. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui penerapan teknologi modern, penguatan rantai pasok, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja. Pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) sebagai pusat inovasi dan teknologi diharapkan dapat menjadi katalis dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor industri. Selain itu, optimalisasi teknologi pertanian dan pengolahan hasil perikanan juga dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperluas peluang.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada Prioritas Nasional tersebut, Kabupaten Kendal dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 asta cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesejahteraan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
- RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
 5. Pemberantasan kemiskinan
 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
 8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
 12. Menjamin ketersediaan pukuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

- Adapun terdapat 8 *quick wins* sebagai berikut:
 1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
 2. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluhan) TNI/Polri dan pejabat negara
 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Kabupaten Kendal memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian visi RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dan implementasi Asta Cita melalui pengembangan potensi lokal yang terarah dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Kendal dapat memperkuat kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten, mendukung hilirisasi industri, dan membuka lapangan kerja yang berkualitas. Sektor agromaritim dan industri kreatif juga berpotensi menjadi penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, Kendal memiliki peran penting dalam penguatan ketahanan pangan dan pengembangan energi berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam lokal secara optimal. Dalam mendukung reformasi politik, hukum, dan birokrasi, Pemerintah Kabupaten Kendal dapat memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk mendorong iklim investasi yang kondusif dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan juga menjadi kunci dalam menciptakan wilayah yang nyaman untuk dihuni serta mendukung pembangunan yang selaras dengan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dengan strategi yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Kendal dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tabel II.42
Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Kendal

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
WM Semalang dan Kawasan Pengembangan Industri KendalSemarang-Demak- Kudus	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor industri prioritas: industri kimia, industri mesin dan perbengkelan, industri makanan dan minuman, serta industri tekstil dan alas kaki. • Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu • Pengembangan Kawasan Industri Kendal (KI Kendal). • Pengembangan Pelabuhan di Kendal melalui pembangunan dan pengembangan Kendal Seaport. • Pembangunan Jalur Transportasi Pantai/Laut Kendal-Semarang-Demak dan Pengembangan Kawasan Pesisir Semarang-Demak. • Pengembangan Kawasan Perdagangan Pelabuhan Petik Kemas (Kabupaten Kendal). • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pembangunan, pengembangan, dan peningkatan Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai kebutuhan industri wilayah.

Sumber: RPJMN 2025-2029

Kabupaten Kendal memiliki peranan strategis dalam mendukung pengembangan wilayah Jawa sebagai "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan" dalam kerangka pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai bagian dari koridor industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus, Kabupaten Kendal berperan dalam pengembangan industri prioritas seperti industri kimia, mesin dan peralatan, makanan dan minuman, serta tekstil dan alas kaki. Kendal juga menjadi pusat hilirisasi tebu dengan pengolahan produk seperti raw sugar, gula kristal putih (GKP), molase, bagas, bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik, yang akan memperkuat ketahanan industri berbasis pertanian. Pengembangan Kendal Seafar dan Pelabuhan Kendal sebagai pelabuhan utama akan mempercepat arus logistik dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan tangkul pantai dan pengembangan kawasan pesisir akan memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana dan mempercepat pengembangan kawasan ekonomi pesisir. Dalam aspek sumber daya manusia, Kendal diharapkan memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi melalui pembangunan dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Dengan pengelolaan yang terarah dan sinergi antar sektor, Kabupaten Kendal berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Jawa.

2.3.2.3 Telaah Isu Strategis Regional/Daerah

a. Telaah Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, Provinsi Jawa Tengah telah mengidentifikasi beberapa isu strategis yang perlu diselesaikan secara komprehensif dan berkelanjutan. Kabupaten Kendal sebagai bagian dari wilayah Jawa Tengah memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di masa mendatang. Berikut adalah isu strategis Teknokratik RPJMD Jawa Tengah yang berkaitan dengan Kabupaten Kendal:

1. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor ekonomi yang rendah dan belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai basis produksi. Di Kabupaten Kendal, potensi sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan pariwisata masih dapat dioptimalkan melalui strategi transformasi ekonomi. Kabupaten Kendal memiliki Kawasan Industri Kendal (KIK) yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah, namun kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah masih perlu ditingkatkan dengan memperkuat infrastruktur pendukung, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal.

Transformasi ekonomi di Kendal juga dapat dilakukan melalui penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau dapat diwujudkan melalui pembangunan kawasan industri yang ramah lingkungan dan pengembangan sektor pertanian berkelanjutan. Sementara itu, ekonomi biru dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan potensi perikanan tangkap dan budidaya di wilayah pesisir Kendal, yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

2. Penurunan Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang masih di atas rata-rata nasional menjadi tantangan yang perlu diselesaikan dengan strategi yang efektif dan terukur. Kabupaten Kendal memiliki tingkat kemiskinan yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir akibat keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, lapangan pekerjaan, dan pemberdayaan ekonomi.

Penanggulangan kemiskinan di Kendal dapat dioptimalkan melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan memperluas cakupan jaminan sosial dan subsidi kebutuhan dasar. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil, penguatan program padat karya, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Sinergi kebijakan dan program antarsektor juga perlu diperkuat untuk memastikan penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan dan terukur.

3. Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kabupaten

Kendal yang memiliki lahan pertanian produktif, termasuk untuk komoditas padi, jagung, dan hortikultura, memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan. Namun, ancaman alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman perlu dikendalikan melalui pengendalian tata ruang dan penguatan regulasi. Selain itu, peningkatan produktivitas pertanian di Kendal dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian modern, pengembangan sistem irigasi yang memadai, dan penguatan peran kelembagaan petani. Pengembangan pertanian ramah lingkungan dan diversifikasi produk pangan juga perlu didorong untuk memperkuat ketahanan pangan di Kendal.

4. Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Kabupaten Kendal yang terletak di jalur Pantura memiliki keunggulan strategis dalam hal konektivitas wilayah, namun masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas jalan, transportasi publik, dan akses ke layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Peningkatan konektivitas antarwilayah di Kendal perlu dioptimalkan melalui pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, pengembangan terminal dan stasiun, serta penyediaan moda transportasi publik yang terjangkau. Selain itu, pembangunan kawasan industri di Kendal juga perlu didukung dengan penyediaan fasilitas publik yang ramah lingkungan dan ramah kelompok rentan (perempuan, lansia, dan disabilitas) untuk menciptakan pembangunan yang inklusif.

5. Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana

Kabupaten Kendal memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, namun menghadapi tantangan dalam hal kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, pencemaran sungai, dan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam di Kendal perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menghindari kerusakan ekosistem yang berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, Kabupaten Kendal juga rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah pesisir dan daerah perbukitan. Upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan melalui pembangunan tanggul, penguatan sistem drainase, dan penerapan teknologi mitigasi bencana berbasis masyarakat.

6. Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing daerah. Kabupaten Kendal masih menghadapi permasalahan dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang memadai. Peningkatan kualitas pendidikan di Kendal dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, serta pengembangan program pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri di KIK. Selain itu, penguatan layanan

kesehatan dasar dan akses terhadap fasilitas kesehatan juga perlu diperluas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kendal.

7. Kekuatan Budaya sebagai Karakter dan Jatidiri Masyarakat

Kekuatan budaya di Jawa Tengah menjadi potensi yang dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Kabupaten Kendal yang memiliki kekayaan budaya, seperti tradisi barongan, kesenian kuda lumping, dan tradisi sedekah laut, perlu menjadikan budaya sebagai pilar pembangunan daerah. Penguatan identitas budaya di Kendal dapat dilakukan melalui pengembangan event budaya, revitalisasi sanggar seni, dan pengembangan desa wisata berbasis budaya. Selain itu, penguatan nilai-nilai budaya di lingkungan keluarga dan masyarakat perlu dilakukan untuk memperkuat karakter masyarakat Kendal yang berdaya saing namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.

8. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Tata kelola pemerintahan yang dinamis menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Kabupaten Kendal perlu memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang berbasis pada data yang akurat dan terintegrasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kendal dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan penyediaan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, pengembangan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi juga menjadi strategi penting dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di Kendal.

Dalam Dokumen Teknopraktik RPJMD Jawa Tengah, Kabupaten Kendal diarahkan untuk mendukung pengembangan Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur sebagai pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah. Kendal memegang peranan strategis sebagai salah satu pilar utama dalam pengembangan kawasan industri di Kedungsepur bersama Semarang dan Demak, dengan prinsip kemandirian, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan. Kawasan Industri Kendal (KIK) memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan daya saing ekonomi regional serta menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, Kendal juga berperan sebagai penyangga sektor pertanian dengan mendorong pengendalian alih fungsi lahan untuk menjaga ketahanan pangan dan mencegah urban sprawl.

Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Lutfi, mengusung visi "Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan untuk Indonesia Emas" sebagai arah pembangunan provinsi Jawa Tengah ke depan. Visi ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat tiga misi utama yang menjadi fokus utama kebijakan pembangunan, yaitu: (1) Stabilitas harga, yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan laju inflasi agar kebutuhan pokok tetap terjangkau; (2) Peningkatan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan, yang diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan

masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi dan penciptaan peluang usaha; serta (3) Penciptaan lapangan kerja, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal dan memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan sektor industri, perdagangan, dan pariwisata.

Kabupaten Kendal memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Sebagai salah satu pusat industri di Jawa Tengah dengan keberadaan Kawasan Industri Kendal (KIK), Kendal memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan sektor industri, peningkatan investasi, dan penguatan kapasitas tenaga kerja lokal. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi basis ekonomi masyarakat Kendal dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan angka kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam menjaga stabilitas harga, Kendal dapat berperan sebagai penyangga ketahanan pangan Jawa Tengah dengan memperkuat rantai pasok hasil pertanian, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat. Dengan potensi dan kontribusi yang dimiliki, Kabupaten Kendal diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam mewujudkan Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan.

b. Telaah RPJPD Kabupaten Kendal 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 untuk memastikan relevansi setiap isu yang tercantum dalam RPJMD dengan visi pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Kendal. Adapun enam isu strategis yang menjadi fokus RPJPD Kabupaten Kendal 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi
- b. Perubahan Iklim dan Kualitas Lingkungan Hidup
- c. Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan
- d. Kualitas SDM
- e. Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi
- f. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Bencana Alam

c. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2045

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal periode 2025-2029 berperan penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap isu-isu lingkungan. KLHS ini mengidentifikasi beberapa isu krusial yang perlu diatasi guna menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Penyusunan KLHS ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.

Integrasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029 dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Proses ini mencakup identifikasi pengaruh kebijakan, rencana, dan program pembangunan terhadap lingkungan hidup, serta pengintegrasian konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS juga memfasilitasi rangkaian forum dialog bersama kelompok masyarakat untuk menggali isu strategis pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dengan hasil analisis tersebut, KLHS memberikan kontribusi penting dalam memastikan bahwa isu-isu strategis pembangunan Kendal dapat terakomodir secara efektif dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029.

- a. Belum optimalnya ekonomi daerah yang berkelanjutan dan adaptif serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan mikro;
- b. Kualitas dan akses sumber daya manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan;
- c. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dengan perlindungan dan ketahanan sosial yang adaptif berbasis kesetaraan gender;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- e. Belum optimalnya ketahanan lingkungan yang resilien terhadap bencana dan perubahan iklim;
- f. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan stabilitas hukum dan transformasi digital

Terdapat keterkaitan yang erat antara isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kendal dengan isu strategis daerah yang menjadi fokus pembangunan daerah. Belum optimalnya ekonomi daerah yang berkelanjutan dan adaptif serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan mikro selaras dengan kebutuhan untuk memperkuat sektor unggulan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan tenaga kerja. Peningkatan kualitas dan akses sumber daya manusia dalam aspek pendidikan dan kesehatan mendukung pengembangan SDM yang mampu menghadapi tantangan global dan memenuhi kebutuhan pasar kerja. Pengentasan kemiskinan yang adaptif berbasis kesetaraan gender terkait erat dengan upaya pengentasan kemiskinan yang inklusif melalui perlindungan dan ketahanan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup demi menciptakan wilayah yang nyaman untuk dihuni. Ketahanan lingkungan yang masih lemah terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi tantangan dalam meningkatkan kondisivitas wilayah dan memperkuat penanganan bencana. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang belum transparan dan akuntabel mendukung kebutuhan untuk mewujudkan good governance berbasis inovasi dan transformasi digital, sehingga memperkuat stabilitas hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.3.2.4 Telaah RTRW

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kabupaten Kendal tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.

Dalam hal penelaahan terhadap RTRW, terdapat tiga aspek mendasar yang perlu digarisbawahi, yaitu struktur tata ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

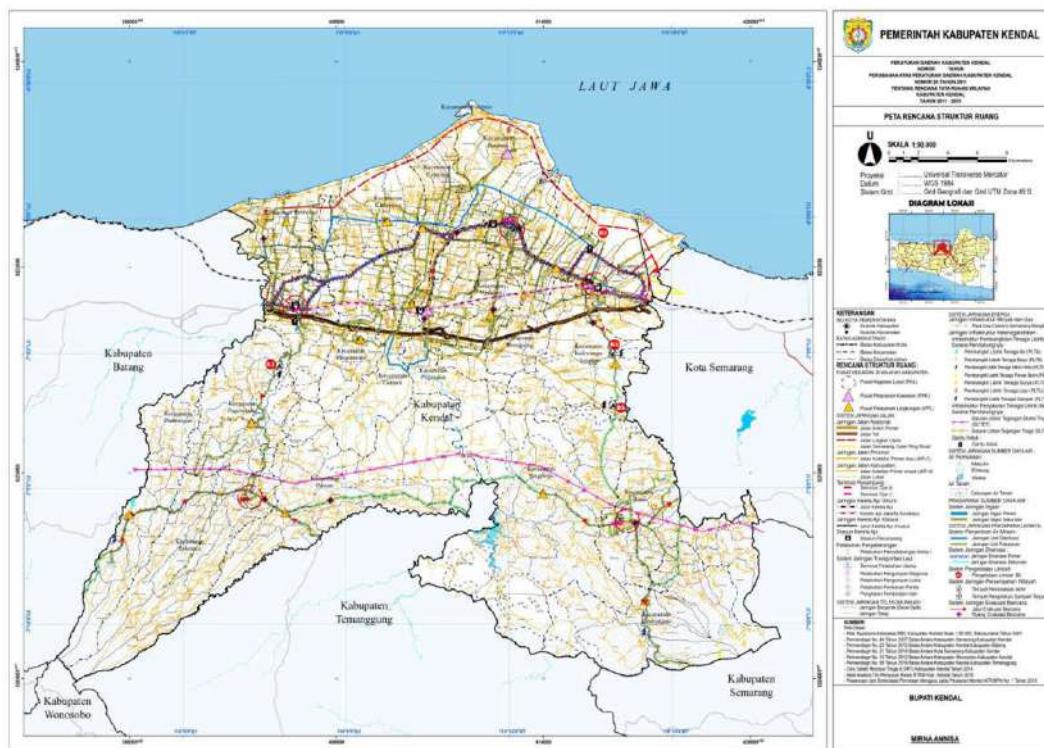
Kawasan strategis terdiri atas kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi. Dan Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.

Secara struktur ruang, Kabupaten Kendal digambarkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berada dalam aglomerasi Regional Kedungsepur. Adapun hierarki struktur ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. PKN merupakan bagian dari kawasan perkotaan Kendal – Demak – Ungaran –Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur). PKN sebagaimana yang dimaksud yaitu memiliki memiliki fungsi pelayanan pusat kawasan ekonomi strategis dan industri.
2. PKL meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Kecamatan Kendal dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan tingkat Daerah, pusat perdagangan regional, dan pendidikan;
 - b) Kawasan Perkotaan Kecamatan Weleri dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat perdagangan dan jasa;
 - c) Kawasan Perkotaan Kecamatan Kaliwungu dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat industri, kawasan ekonomi strategis, perdagangan, dan jasa;
 - d) Kawasan Perkotaan Kecamatan Boja dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat kegiatan pertanian penyanga Agropolitan, perdagangan, dan jasa serta konservasi ; dan
 - e) Kawasan Perkotaan Sukorejo dengan fungsi pusat Agropolitan, pertanian, peternakan, dan konservasi.

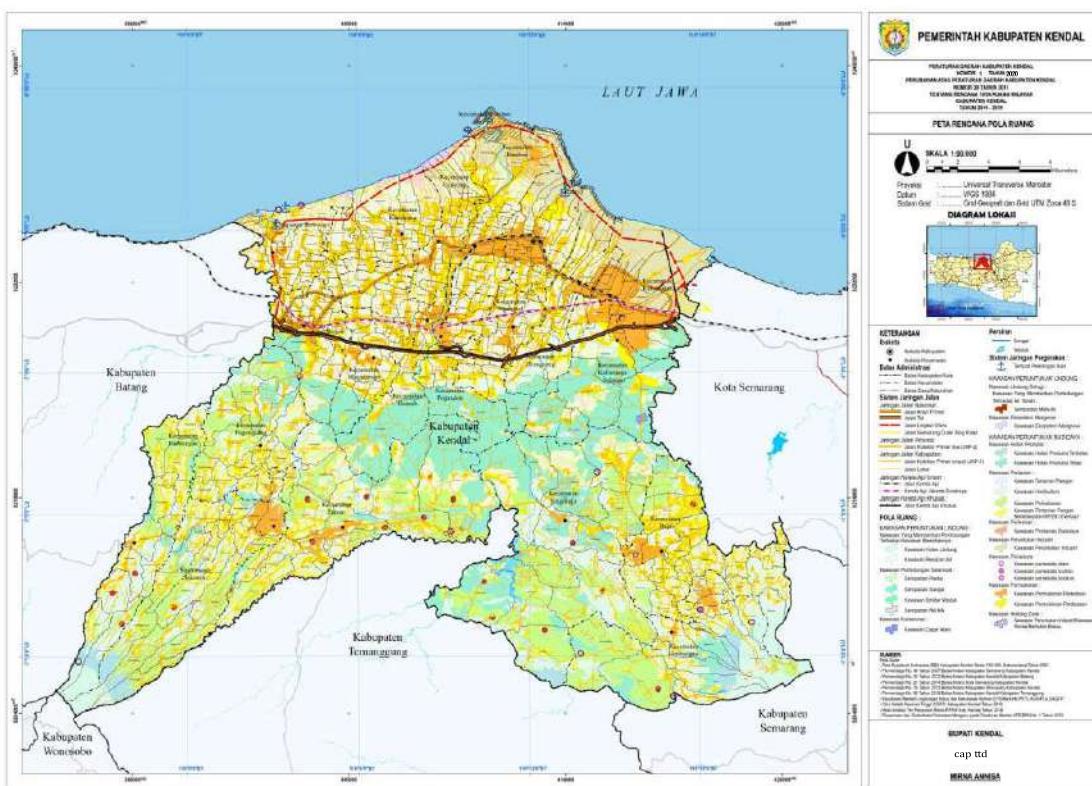
3. PPK berada di Kawasan Perkotaan Pegandon dan Patebon dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa berupa pengembangan fasilitas perkotaan meliputi perdagangan dan jasa, perumahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, peribadatan, dan industri; dan
4. PPL meliputi :
 - a) Kecamatan Cepiring;
 - b) Kecamatan Gemuh;
 - c) Kecamatan Rowosari;
 - d) Kecamatan Kangkung;
 - e) Kecamatan Pageruyung;
 - f) Kecamatan Patean;
 - g) Kecamatan Singorojo;
 - h) Kecamatan Limbangan;
 - i) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - j) Kecamatan Ringinarum;
 - k) Kecamatan Ngampel;
 - l) Kecamatan Brangsong; dan
 - m) Kecamatan Plantungan.

Gambar II.49
Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kendal



Selanjutnya, dari sisi Pola Ruang yang merupakan wadah bagi terselenggaranya tujuan pengembangan wilayah dan implementasi dari struktur ruang wilayah. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Gambar II.50
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kendal



1. Perwujudan kawasan peruntukan lindung meliputi:
 - a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan kawasan konservasi;
 - d. perwujudan kawasan cagar budaya;
 - e. perwujudan kawasan lindung geologi;
 - f. perwujudan kawasan rawan bencana; dan
 - g. Perwujudan kawasan mangrove.
2. Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas :
 - a. pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
 - b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
3. Perwujudan kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
 - a. perlindungan tepi pantai terhadap kerusakan lingkungan;
 - b. perlindungan sekitar sungai terhadap alih fungsi lindung;
 - c. perlindungan sekitar waduk terhadap kegiatan alih fungsi dan kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
 - e. membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;

- f. penyediaan RTH kawasan perkotaan minimal 30 % (tiga puluh perseratus); dan
 - g. pengamanan kawasan sempadan rel kereta api dari aktivitas budidaya.
4. Perwujudan kawasan konservasi terdiri atas :
 - a. pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
 - b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - c. pelestarian ekosistem alam yang berada di dalam kawasan cagar alam;
 - d. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah; dan
 - e. pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan produktif yang tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem.
 5. Perwujudan kawasan cagar budaya terdiri atas :
 - a. pengendalian kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 - b. pembatasan bangunan pada kawasan cagar budaya; dan
 - c. pelestarian bangunan cagar budaya.
 6. Perwujudan kawasan lindung geologi terdiri atas :
 - a. perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar cekungan air tanah;
 - b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - c. perlindungan sekitar mata air terhadap alih fungsi lindung;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana geologi;
 - e. pengembangan dan penerapan teknologi bencana geologi;
 - f. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan dan mengurangi risiko bencana; dan
 - g. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan lindung geologi.
 7. Perwujudan kawasan rawan bencana alam terdiri atas :
 - a. penanaman tanaman lindung;
 - b. perbaikan dan pembangunan saluran drainase;
 - c. pembuatan sarana resapan air;
 - d. pembuatan tanggul tepi pantai;
 - e. penanaman mangrove;
 - f. perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi;
 - g. penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi;
 - h. pembuatan talud penahan longsor;
 - i. pemantauan hutan secara berkala; dan
 - j. pengaturan bangunan dan daerah hijau.
 8. Perwujudan kawasan ekosistem mangrove terdiri atas reboisasi dan konservasi kawasan sabuk pantai yang rawan abrasi.
 9. Perwujudan kawasan peruntukan budidaya meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan perikanan;
 - d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;

- e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
10. Perwujudan kawasan hutan produksi mencakup kegiatan intensifikasi lahan hutan produksi.
11. Perwujudan kawasan pertanian meliputi :
- a. mempertahankan luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
 - b. peningkatan sarana prasarana penunjang pertanian;
 - c. pengembangan lumbung pangan;
 - d. intensifikasi lahan pertanian sawah;
 - e. pengembangan pertanian organik;
 - f. pemantapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
 - g. pengembangan sentra/produksi komoditas hortikultura dan pasca panen;
 - h. intensifikasi dan diversifikasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
 - i. pengembangan teknologi dan informasi pertanian;
 - j. pengembangan pasca panen agroforestry dan hortikultura;
 - k. penyusunan masterplan kawasan agropolitan;
 - l. penyusunan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) kawasan agropolitan;
 - m. penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan agropolitan;
 - n. mengembangkan komoditas tanaman perkebunan;
 - o. pengolahan hasil perkebunan;
 - p. pengembangan dan peningkatan mutu ternak; dan
 - q. peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran hasil ternak.
12. Perwujudan kawasan perikanan meliputi :
- a. pengembangan kawasan minapolitan;
 - b. pengembangan dan peningkatan mutu budidaya perikanan;
 - c. pengolahan produksi hasil perikanan;
 - d. peningkatan pemasaran hasil perikanan; dan
 - e. renovasi dan pemeliharaan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pelabuhan perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
 - Tawang di Kecamatan Rowosari;
 - Bandengan di Kecamatan Kendal;
 - Tanggul Malang di Kecamatan Cepiring;
 - Sendang Sikucing di Kecamatan Rowosari; dan
 - Karangsari di Kecamatan Kendal.
13. Perwujudan kawasan pertambangan dan energi mencakup kegiatan meliputi :
- a. program pengembangan pertambangan rakyat;
 - b. peningkatan kerjasama pengelolaan bersama kawasan pertambangan; dan
 - c. perbaikan lahan (reklamasi) lahan bekas tambang untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
14. Perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. penyiapan lahan dan kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. penyusunan rencana penataan kawasan peruntukan industri;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri;
 - d. pembinaan industri kecil menengah; dan
 - e. peningkatan daya tarik investasi.
15. Perwujudan kawasan pariwisata meliputi:
- a. peningkatan kualitas dan peran obyek unggulan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung wisata;
 - c. pembentukan paket daerah tujuan wisata (DTW) serta promosi wisata;
 - d. pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat kawasan wisata;
 - f. penetapan desa wisata;
 - g. pengembangan desa wisata; dan
 - h. pengembangan potensi wisata unggulan lainnya.
16. Perwujudan kawasan permukiman meliputi :
- a. Program intensifikasi lahan permukiman sesuai rencana tata ruang;
 - b. pengaturan dan penyusunan tata ruang wilayah perkotaan;
 - c. peningkatan pelayanan sarana prasarana lingkungan; dan
 - d. peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah.
17. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi :
- a. pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun; dan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.

Selain itu, indikasi program utama pembangunan dalam RTRW Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

Tabel II.43
Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan						
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)					
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG												
I Perwujudan Sistem Perkotaan												
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	20 kecamatan	20 Dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab.Kendal							
b.	Penetapan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang	20 kecamatan	20 Dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab.Kendal							
c.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang PKL	Kendal, Kaliwungu, Weleri, Boja dan Sukorejo	5 Dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab.Kendal							
d.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (Bagian Selatan Kabupaten Kendal)	Plantungan, Patean, Singorojo, Limbangan	4 Dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab.Kendal							
e.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (Bagian Tengah Kabupaten Kendal)	Pageruyung, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Ngampel, Kaliwungu Selatan	6 Dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab.Kendal							
f.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (Bagian Utara/ Pesisir Kabupaten Kendal)	Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Brangsong	5 Dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab.Kendal							
g.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis	Kabupaten Kendal	3 Dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab.Kendal							
h.	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa/KTP2D (Bagian Utara/ Pesisir Kabupaten Kendal)	Kangkung, Patebon, Cepiring, Kota Kendal, Brangsong	5 Dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab.Kendal							
i.	Penyusunan Rencana Pengembangan KTP2D (Bagian Tengah Kabupaten Kendal)	Gemuh, Ngampel, Ringinarum, dan Pegandon	4 Dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab.Kendal							
j.	Penyusunan Rencana Pengembangan KTP2D (Bagian Selatan Kabupaten Kendal)	Boja, Pagerruyung, Limbangan, Singorojo, Plantungan, Sukorejo	6 Dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab.Kendal							

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
II	<u>Perwujudan Sistem Prasarana</u>						
2.1.	Transportasi Darat						
a.	Pembangunan terminal penumpang tipe B	Kec. Sukorejo	1 unit	APBD / APBD Prov.	Dishub Kab. Kendal/ Prov. Jawa Tengah		
b.	Pengembangan terminal tipe C	Kec. Weleri, Kendal, Kaliwungu, Boja	4 unit	APBD	Dishub Kab. Kendal		
c.	Peningkatan jalan arteri	1. jalan Lingkar Weleri; 2. jalan Weleri-batas Kota Kendal; 3. jalan lingkar Bodri; 4. jalan raya Barat; 5. jalan raya Kendal; 6. jalan raya Timur; 7. jalan batas Kota Kendal- batas Kota Semarang; 8. jalan Ketapang-Kebonharjo; jalan Lingkar Kaliwungu;	9 ruas jalan	APBN	Kemen PUPR		
d.	Pembangunan jalan Weleri-Rowosari- Kangkung-Cepiring-Patebon- Kendal- Brangsong-Kaliwungu (Jalan Pesisir)	Kab. Kendal	1 ruas jalan	KPBU / APBN	BUJT / Kemen PUPR		
e.	Pembangunan jalan arteri	1. Jalan penghubung SORR (Semarang Outer Ring Road) Jalan akses pelabuhan penyeberangan Kendal	2 ruas jalan	APBN / APBD Prov.	Kemen PUPR / Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Prov Jateng		
f.	Pengembangan jalan tol	1. jalan tol Trans Jawa ruas Batang-Semarang	1 ruas jalan	KPBU / APBN	BUJT / Kemen PUPR		
		1. jalan Weleri – Patean/ batas Kabupaten Temanggung; 2. jalan Sukorejo – Plantungan/ Blimbing; 3. jalan Cangkir-an-Boja- Sukorejo;		APBN /	Kemen PUPR / Dinas Bina Marga dan Cipta		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
g.	Peningkatan jaringan jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> . jalan Kaliwungu/Sekopek- Boja-Limbangan-batas Kabupaten Semarang; . jalan Patebon-Pegandon/ jalan keluar tol Kendal; dan . jalan akses menuju KPI. 	6 ruas jalan	APBD Prov. / APBD	Karya Prov Jateng / Dinas PUPR Kab. Kendal		
h.	Pengembangan jalan kolektor	<ul style="list-style-type: none"> . jalan Weleri - Ringinarum - Gemuh - Pegandon - Ngampel - Brangsong - Kaliwungu Selatan; dan . jalan lingkar Kaliwungu - Pelabuhan Kendal. 	2 ruas jalan	APBD	Dinas PUPR Kab. Kendal		
i.	Pengembangan jalan lokal	seluruh kabupaten	257 ruas jalan	APBD	Dinas PUPR Kab. Kendal		
j.	Pengembangan jalur kereta api antar kota	<ul style="list-style-type: none"> . Jalur lintas utara Jawa (Jakarta-Cirebon- Semarang-Bojonegoro- Surabaya); jalur Kedungsepur, 	2 jalur	KPBU / APBN	PT. KAI / Kemenhub		
k.	Pembangunan rencana kereta api cepat Jakarta-Surabaya	0. Kab. Kendal	1 jalur	KPBU / APBN	PT. KAI / Kemenhub		
j.	Pembangunan rel kereta api jalur ganda Semarang - Pekalongan - Tegal - Purwokerto	0. Kab. Kendal	1 jalur	KPBU / APBN	PT. KAI / Kemenhub		
l.	Rencana pengaktifan kembali jalur Kalibodri-Kendal-Kaliwungu	1. Kalibodri-Kendal- Kaliwungu	1 jalur	KPBU / APBN	PT. KAI / Kemenhub		
m.	Pembangunan jalur kereta api khusus dari Stasiun Mangkang – Kawasan Industri Kendal – Pelabuhan Kendal	<ul style="list-style-type: none"> . Stasiun Mangkang . Kawasan Industri Kendal – Pelabuhan Kendal 	1 jalur	KPBU / APBN	PT. KAI / Kemenhub		
n.	Pengembangan stasiun penumpang KA	Kec Kaliwungu, Pegandon, Weleri, Kendal	4 unit	KPBU / APBN	PT. KAI / Kemenhub		
		<ul style="list-style-type: none"> . jalur Kendal – Kumai (Kalimantan Tengah); . rencana pengembangan jalur 					

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
o.	Rencana pengembangan alur pelayaran kelas I i. rencana pengembangan jalur Kendal-Banjarmasin (Kalimantan Selatan); ii. rencana pengembangan jalur Kendal-Bahaur (Kalimantan Tengah); iii. rencana pengembangan jalur Kendal-Tanah Laut (Kalimantan Tengah);	Kendal-Banjarmasin (Kalimantan Selatan); Kendal-Bahaur (Kalimantan Tengah); Kendal-Tanah Laut (Kalimantan Tengah);	5 alur pelayaran	APBD Prov. Jateng / APBD	Dinas Perhubungan Prov Jateng/ Dishub Kab. Kendal		
2.2. Transportasi Laut							
a.	Pembangunan Terminal Kendal (Kendal sea port)	Kec Kaliwungu	1 unit	Swasta / KPBU / APBN	Swasta / Kemen Perhubungan		
b.	Penyusunan Master Plan Pelabuhan Kabupaten Kendal	Kec Kaliwungu	1 dokumen	APBD	Dinas Perhubungan Prov Jateng/ Dishub Kab. Kendal		
c.	Peningkatan pelabuhan menjadi pelabuhan penyeberangan (ASDP) / pelabuhan pengumpulan regional	Kec Kaliwungu	1 unit	APBD Prov.	Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah		
d.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal (Pelayaran Rakyat)	Kec Rowosari	1 unit	Swasta / KPBU / APBN	Swasta / Kemen Perhubungan		
e.	Renovasi, pemeliharaan bangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP)	Tawang Kec. Rowosari	1 unit	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal		
f.	Renovasi, pemeliharaan bangunan dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI)	Bandengan Kec. Kendal dan Kec. Rowosari	2 unit	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kendal		
2.3. Sistem Jaringan Energi/ Kelistrikan							
a.	Pembangunan pipa gas alam Cirebon - Semarang – Bangkalan	Kec. Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Patebon, Cepiring, Kangkung, dan Rowosari	1 jaringan	Swasta / KPBU / APBN	Swasta / Kemen ESDM		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
b.	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 KVA : Mandiracan – Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Ungaran – Purwodadi – Cepu – Krian (Circuit II); Ungaran – Demak – Purwodadi – Kudus – Pati – Tanjung Jati B (Jepara); jalur selatan terhubung Tasikmalaya – Cilacap – Kebumen – Purworejo – Klaten – Pedan – Wonogiri – Kediri; Gardu Induk 500/150 kV – Pedan – Ungaran.	Kab Kendal	1 jaringan	Swasta	PT. PLN		
c.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang membentang antar Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Kab Kendal	1 jaringan	Swasta	PT. PLN		
d.	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah	Kab Kendal	1 jaringan	Swasta	PT. PLN		
e.	Pembangunan gardu induk	Kawasan Industri Kendal	1 unit	Swasta	PT. PLN		
f.	Pembangunan PLTA	Kec Singorojo, Plantungan	2 unit	Swasta / KPB / APBN	Swasta / Kemen ESDM		
g.	Pembangunan PLTU	Kec Patebon	1 unit	Swasta / KPB / APBN	Swasta / Kemen ESDM		
h.	Pembangunan PLTS	Kec Kangkung	1 unit	Swasta / KPB / APBN	Swasta / Kemen ESDM		
i.	Pembangunan PLTPB (Panas Bumi) Gunung Ungaran	Kab Kendal	1 unit	Swasta / KPB / APBN	Swasta / Kemen ESDM		
j.	Pembangunan PLTB	Kec Limbangan	1 unit	Swasta / KPB / APBN	Swasta / Kemen ESDM		
k.	Pembangunan PLTMH	Kec Plantungan, Pageruyung, Limbangan	3 unit	Swasta / KPB / APBN	Swasta / Kemen ESDM		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
1.	Pembangunan PLTSa (Sampah)	Kec Kaliwungu Selatan, Pageruyung	2 unit	Swasta / KPBU / APBD	Swasta / Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
2.4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi						
a.	peningkatan kapasitas jaringan kabel telekomunikasi pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum, dan sosial, terminal, permukiman, dan kawasan yang baru dikembangkan	Kab Kendal	1 jaringan	Swasta	PT Telkom		
b.	penggelaran serat optik dari Kota Tegal - Kabupaten Tegal - Kabupaten Pemalang - Kota Pekalongan - Kabupaten Pekalongan - Kabupaten Batang - Kabupaten Kendal - Kota Semarang - Kabupaten Demak - Kabupaten Kudus - Kabupaten Pati - Kabupaten Rembang	Kab Kendal	1 jaringan	Swasta	Swasta		
c.	Pengembangan menara telekomunikasi bersama	Kab Kendal	1 paket	Swasta	Swasta		
d.	Peningkatan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di Daerah	Kab Kendal	1 paket	Swasta	Swasta		
2.5.	Sistem Jaringan Sumberdaya Air						
a.	Penyusunan studi penanganan gelombang pasang	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kendal		
b.	Pemeliharaan jaringan irigasi	Kab Kendal	686 DL	APBD	Dinas PUPR Kab. Kendal		
c.	pembangunan jaringan irigasi	Kab Kendal	686 DL	APBD	Dinas PUPR Kab. Kendal		
d.	Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah	Kab Kendal	1 paket	APBD Prov Jateng / APBD	Dinas ESDM Prov Jateng / DLH Kab Kendal		
e.	Pengembangan polder	Kec Kendal, Kaliwungu	2 unit	APBD Prov Jateng / APBD	Dinas Pusdataru Prov Jateng / Dinas PUPR Kab. Kendal		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
f.	Pembangunan pemecah ombak, penahan abrasi pantai / Tanggul Laut	Kec Kaliwungu, Kendal, Patebon, Rowosari	1 paket	APBN / APBD Prov. Jateng / APBD	Kemen PUPR / DKP Prov Jateng / Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal		
g.	pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air baku untuk air minum dan industri	<ul style="list-style-type: none"> . Pembangunan Bendung Karet Sungai blorong . Pembangunan Waduk Bodri . Pembangunan Bendung Karet Sungai Bodri . Revitalisasi Kawasan Bekas sungai Bodri Pembangunan Prasarana Konservasi SDA Sungai Blorong 	5 unit	APBN / APBD Prov Jateng	Kemen PUPR / Dinas Pusdataru Prov Jateng		
2.6.	Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya						
	2.6.1. Sistem penyediaan air minum (SPAM)						
a.	Revisi Master Plan Penyediaan Air Minum Kabupaten Kendal	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR/ PDAM Kab. Kendal		
b.	Peningkatan cakupan pelayanan jaringan perpipaan	Kab Kendal	1 paket	APBD	PDAM Kab. Kendal / Dinas PUPR Kab. Kendal		
c.	Peningkatan sarana pendukung jaringan perpipaan	Kab Kendal	1 paket	APBD	PDAM Kab. Kendal / Dinas PUPR Kab. Kendal		
d.	Optimalisasi bukan jaringan perpipaan	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas PUPR Kab. Kendal		
	2.6.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Kab Kendal					
a.	Penyusunan Master Plan Pengelolaan Air limbah	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR / Dinas Lingkungan		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
	Kabupaten Kendal				Hidup Kab. Kendal		
b.	Pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah terpusat	Kab Kendal	1 paket	APBD	Baperlitbang / Dinas PUPR / Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
c.	Pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga secara setempat atau terpusat di lingkungan padat penduduk	Kab Kendal	1 paket	APBD	Baperlitbang / Dinas PUPR / Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
d.	Peningkatan akses sistem pengelolaan air limbah di perkotaan dan pedesaan	Kab Kendal	1 paket	APBD	Baperlitbang / Dinas PUPR / Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
2.6.3. Sistem Pengelolaan Limbah B3							
a.	Pembangunan pengolahan limbah B3	Kab Kendal	1 paket	Swasta / KPB / APBN / APBD Prov Jateng / APBD	Swasta / Kemen LHK / Dinas LHK Prov Jateng / Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
b.	Penambahan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
2.6.4. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah							
a.	Penyusunan Master Plan Sistem Persampahan Kabupaten Kendal	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
b.	Pembangunan TPA	Kec Kaliwungu Selatan, Pageruyung	2 unit	APBD	DLH Kab. Kendal		
c.	Pembangunan TPS Terpadu	Kec Boja, Weleri, Cepiring, Kaliwungu, Sukorejo, Kendal	6 unit	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab.		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
					Kendal		
d.	Pengembangan TPS 3R	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
e.	Penyediaan sarana perwadahan, pengangkutan dan pengumpulan sampah	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
2.6.5. Sistem Jaringan Drainase							
a.	Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sistem Drainase Kabupaten Kendal	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab. Kendal		
b.	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas PUPR Kab. Kendal		
c.	Pembangunan jaringan drainase	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas PUPR Kab. Kendal		
2.6.6. Sistem jaringan evakuasi bencana							
a.	Pembangunan jalur evakuasi bencana	Kab Kendal	1 paket	APBD	BPBD Kab. Kendal		
b.	Penyediaan ruang evakuasi bencana	Kab Kendal	1 paket	APBD	BPBD Kab. Kendal		
B PERWUJUDAN POLA RUANG							
I -	Perwujudan Kawasan Lindung						
1.1.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya						
a.	Reboisasi di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang berfungsi lindung	Kec Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo,, Singorojo, Patean, Pageruyung	7 kawasan	APBN / APBD Prov. /APBD	Perum Perhutani/ Dinas Lingkungan Hidup/ Dinas PUPR /Baperlitbang Kab. Kendal		
b.	Pengembalian fungsi hutan lindung dan perlindungan satwa	Kec Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo,, Singorojo, Patean, Pageruyung	7 kawasan	APBN / APBD Prov. /APBD	Perum Perhutani/ Dinas Lingkungan Hidup/ Dinas PUPR /Baperlitbang Kab. Kendal		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
c.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Kec Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo,, Singorojo, Patean, Pageruyung	7 kawasan	APBN / APBD Prov. /APBD	Perum Perhutani/ Dinas Lingkungan Hidup/ Dinas PUPR /Baperlitbang Kab. Kendal		
d.	Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kec Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo,, Singorojo, Patean, Pageruyung	7 kawasan	APBN / APBD Prov. /APBD	Perum Perhutani/ Dinas Lingkungan Hidup/ Dinas PUPR /Baperlitbang Kab. Kendal		
e.	Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	Kec Limbangan, Boja, Plantungan, Sukorejo,, Singorojo, Patean, Pageruyung	7 kawasan	APBN / APBD Prov. /APBD	Perum Perhutani/ Dinas Lingkungan Hidup/ Dinas PUPR /Baperlitbang Kab. Kendal		
1.2.	Kawasan perlindungan setempat						
a.	Peningkatan fungsi konservasi (reboisasi) di sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar mata air, sekitar danau/waduk	Kec Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Weleri, Boja, Singorojo, Gemuh, Patean, Plantungan, Sukorejo	14 kawasan	APBN / APBD Prov. /APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR/ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
b.	Pengamanan kawasan sempadan rel kereta api	Kec Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Ngampel, Brangsong, Kaliwungu	7 kawasan	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab. Kendal		
c.	Pengendalian penggunaan lahan untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi	Kab Kendal	1 paket	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab. Kendal		
d.	Penyusunan Rencana Rencana Ruang Terbuka Hijau	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR/DLH Kab. Kendal		
e.	DED Ruang Terbuka Hijau	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR/DLH Kab. Kendal		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
f.	Pembuatan Ruang Terbuka Hijau	Kab Kendal	1 paket	APBD/ APBN	Baperlitbang/ Dinas PUPR/DLH Kab. Kendal/ Kementrian Pekerjaan Umum		
1.3.	Kawasan konservasi						
a.	Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	Kec Kaliwungu Selatan	1 paket	APBN / APBD Prov. /APBD	Perum Perhutani/ Dinas Lingkungan Hidup/Dinas PUPR/Baperlitbang Kab. Kendal		
b.	Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kab Kendal	1 paket	APBN / APBD Prov. /APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
c.	Pelestarian ekosistem alam yang berada di dalam kawasan cagar alam	Kec Kaliwungu Selatan	1 paket	APBN / APBD Prov. /APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
d.	Pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah	Kec Kaliwungu Selatan	1 paket	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab. Kendal		
e.	Pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan produktif yang tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem	Kec Kaliwungu Selatan	1 paket	APBN / APBD Prov. /APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
1.4.	Kawasan cagar budaya						
a.	Pengendalian kegiatan yang dapat merusak cagar budaya	Kec Limbangan, Kaliwungu, Kendal	1 paket	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab. Kendal		
b.	Pembatasan bangunan pada kawasan cagar budaya	Kec Limbangan, Kaliwungu, Kendal	1 paket	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab. Kendal		
c.	Pelestarian bangunan cagar budaya	Kec Limbangan, Kaliwungu, Kendal	1 paket	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
					Kab. Kendal		
1.5.	Kawasan lindung geologi						
a.	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan lindung geologi	Kec Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Kaliwungu Selatan, Singorojo	1 dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab. Kendal		
b.	Perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar cekungan air tanah	Kec Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon, Kaliwungu Selatan, Singorojo	6 kawasan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
c.	Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
d.	Perlindungan sekitar mata air terhadap alih fungsi lindung	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
e.	Pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana geologi	Kab Kendal	1 paket	APBD	BPBD Kab. Kendal		
f.	Pengembangan dan penerapan teknologi bencana geologi	Kab Kendal	1 paket	APBD	BPBD Kab. Kendal		
1.6.	Kawasan rawan bencana						
a.	Studi penanganan banjir	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	BPBD Kab. Kendal		
b.	Program Pengendalian Banjir	Sungai Aji/Slembang, Waridin, Blorong, Kendal, Buntu, Bodri, Blukar, Glodog, Bulanan/Pening, dan Kuto	1 paket	APBN / APBD Prov. /APBD	PSDA Prov. Jateng/BPBD / Dinas PUPR Kab. Kendal		
c.	Studi penanganan longsor	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	BPBD Kab. Kendal		
d.	Pembuatan talud penahan longsor	Kab Kendal	1 paket	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR/ BPBD Kab. Kendal		
e.	Studi penanganan abrasi	Kawasan pesisir Kab. Kendal	1 dokumen	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan/Di		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
					nas LH Kab. Kendal		
f.	Penanganan teknis abrasi, pembuatan tanggul tepi pantai	Kawasan pesisir Kab. Kendal	1 paket	APBD	Baperlitbang/ PUPR/ Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal		
g.	Studi konservasi kawasan sabuk pantai	Kawasan pesisir Kab. Kendal	1 dokumen	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan / Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
h.	Reboisasi dan konservasi kawasan sabuk pantai yang rawan abrasi	Kawasan pesisir Kab. Kendal	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan / DLH Kab. Kendal		
i.	Penanganan Teknis kawasan sabuk pantai	Kawasan pesisir Kab. Kendal	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal		
j.	Penanaman tanaman lindung	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
k.	Pembuatan sarana resapan air	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas PUPR/ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
l.	Penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
m.	Pengaturan bangunan dan daerah hijau	Kab Kendal	1 paket	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR/ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
II	Perwujudan Kawasan Budi Daya						
2.1.	Kawasan hutan produksi						

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
a.	Intensifikasi lahan hutan produksi	Kec Limbangan, Sukorejo, Plantungan, Singorojo, Boja, Brangsong, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Ngampel, Pagerruyung, Patean, Pegandon, Ringinarum, Weleri	15 kawasan	APBD	Perum Perhutani/Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal		
2.2.	Kawasan pertanian						
a.	Pengawasan alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal		
b.	Peningkatan sarana prasarana penunjang pertanian	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal		
c.	Pengembangan lumbung pangan	Kec Rowosari,Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Ngampel, Pegandon, Gemuh, Weleri, dan Ringinarum	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal		
d	Intensifikasi lahan pertanian sawah	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal		
e.	Pengembangan pertanian organik	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal		
f.	Pemantapan GAPOKTAN	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal		
g.	Pengembangan sentra/produksi komoditas hortikultura dan pasca panen	Kec Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Ngampel, Ringinarum, Kaliwungu Selatan, Gemuh, Pegandon, Sukorejo, dan Singorojo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal		
	Intensifikasi dan Diversifikasi tanaman pangan,				Dinas Pertanian		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
h.	hortikultura, perkebunan	Kab Kendal	1 paket	APBD	dan Pangan Kab. Kendal		
i.	Pengembangan teknologi dan informasi pertanian	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal		
j.	Pengembangan pasca panen agroforestry dan hortikultura	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal		
k.	Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas PUPR/ Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal		
l.	Penyusunan RPJM Kawasan Agropolitan	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	Baperlitbang/ PUPR/ Dinas Pertanian dan Pangan Tanaman Pangan Kab. Kendal		
m.	Penyusunan DED Kawasan Agropolitan	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	Baperlitbang/ PUPR/ Dinas Pertanian dan Pangan Tanaman Pangan Kab. Kendal		
n.	Pengembangan komoditas tanaman perkebunan	Kec Limbangan, Boja, Singorojo, Patean, Pagerruyung, Plantungan, Sukorejo, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, dan Ngampel	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal		
o.	Pengolahan hasil perkebunan	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal		
		Kec Sukorejo, Pageruyung,			Dinas Pertanian		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
p.	Pengembangan dan peningkatan mutu ternak	Plantungan, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu Selatan, Kaliwungu, Gemuh, Pegandon, Patebon, Cepiring	1 paket	APBD	dan Pangan Kab. Kendal / Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kendal		
q.	Peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran hasil ternak	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal / Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kendal		
2.3.	Perikanan						
a.	Pengembangan kawasan minapolitan	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kendal		
b.	Pengembangan dan peningkatan mutu budidaya perikanan	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal		
c.	Pengolahan hasil produksi perikanan	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan/ Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kendal		
d.	Peningkatan pemasaran perikanan	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan/ Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Kendal		
e.	Renovasi dan pemeliharaan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan PPP Tawang • Pengembangan PPI Sendang Sikucing dan Bandengan • Pengembangan TPI Tawang, Bandengan, Tanggulmalang, Sendang Sikucing dan 	9 unit	APBD Prov jateng / APBD	DKP Prov. Jateng / Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kendal		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
		Karangsari					
2.4.	Kawasan pertambangan dan energi						
a.	Program pengembangan pertambangan rakyat	1. Kec Pegandon, Weleri, Pageruyung, Patean, Sukorejo, Singorojo, Kaliwungu Selatan, Kaliwungu, Brangsung, Ngampel, Weleri, sepanjang Sungai Bodri	1 paket	APBD Prov	Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah; / Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Kendal		
b.	Peningkatan kerjasama pengelolaan bersama kawasan pertambangan	2. Kec Pegandon, Weleri, Pageruyung, Patean, Sukorejo, Singorojo, Kaliwungu Selatan, Kaliwungu, Brangsung, Ngampel, Weleri, sepanjang Sungai Bodri	1 paket	APBD Prov	Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah; / Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Kendal		
c.	Perbaikan lahan (reklamasi) lahan bekas tambang	Kec Pegandon, Weleri, Pageruyung, Patean, Sukorejo, Singorojo, Kaliwungu Selatan, Kaliwungu, Brangsung, Ngampel, Weleri, sepanjang Sungai Bodri	1 paket	Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kab Kendal/ Perusahaan tambang		
2.5.	Kawasan peruntukan industri						
a.	Penyusunan rencana penataan kawasan peruntukan industri	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Kendal		
b	Penyusunan studi pembangunan kawasan industri	Kec Kaliwungu, Brangsung, Kendal, Patebon	1 dokumen	APBD	Baperlitbang/ Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Kendal		
					Swasta / kemen		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
c.	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri	1. Pembangunan Pusat Logistik berikat KI Kendal 2. Pembangunan Rusunawa KI Kendal Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri Lainnya di Kab. Kendal	1 paket	Swasta / APBN / APBD Prov jateng / APBD	Perindustrian / Dinas Perindustrian Prov Jateng / Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Kendal		
d.	Pembinaan industri kecil menengah	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Kendal		
e.	Peningkatan daya tarik investasi	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Kendal		
2.6.	Kawasan Pariwisata						
a.	Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kendal	Kab Kendal	1 dokumen	APBD	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kab. Kendal		
b.	Penyediaan sarana & prasarana pendukung	Kab Kendal	1 paket	APBD Prov. / APBD	Dinas PUPR/ Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kab. Kendal		
c.	Peningkatan kualitas dan peran obyek unggulan	Kab Kendal	1 paket	APBD Prov. / APBD	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kab. Kendal		
					Dinas		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
d.	Pembentukan paket Daerah Tujuan Wisata (DTW) serta promosi wisata	Kab Kendal	1 paket	APBD Prov. / APBD	Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kab. Kendal		
e.	Peningkatan peran serta masyarakat kawasan wisata	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kab. Kendal		
f.	Pengembangan SDM pariwisata	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kab. Kendal		
g.	Penetapan Desa Wisata	Kab Kendal	1 paket	APBD	Baperlitbang/ Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kendal		
h.	Pengembangan Desa Wisata	Kab Kendal	1 paket	APBD Prov. / APBD	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kab. Kendal		
2.7.	Kawasan permukiman						
a.	Program intensifikasi lahan permukiman sesuai rencana tata ruang	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Perumahan dan Kaw Permukiman Kab Kendal		
b.	Peningkatan pelayanan sarana prasarana lingkungan	Kab Kendal	1 paket	APBD	Dinas Perumahan dan Kaw Permukiman Kab Kendal		
		. Pembangunan Rusunawa Umum		APBN /	Kemen PUPR / Disperakim		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
c.	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga	Pembangunan Rusunami dan Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1 paket	APBD Prov Jateng / APBD	Prov Jateng / Dinas Perumahan dan Kaw Permukiman Kab Kendal		
2.8.	Kawasan pertahanan dan keamanan						
a.	Pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun	Kab Kendal	1 paket	APBD / APBD Prov	Baperlitbang / Dinas PUPR Kab Kendal		
b.	Pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan	Kab Kendal	1 paket	APBD / APBD Prov	TNI, Polri		
C PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN							
a.	Studi Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kabupaten Kendal	Kec. Kaliwungu	1 dokumen	APBD Prov. / APBD	Baperlitbang / Dinas PUPR / Dinas Perindustrian , Koperasi, UKM Kab. Kendal		
b.	Review Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu	Kabupaten Kendal	1 dokumen	APBD	Baperlitbang / Dinas PUPR / Dinas Perindustrian , Koperasi, UKM Kab. Kendal		
c.	Review Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kendal	Kabupaten Kendal	1 dokumen	APBD	Baperlitbang / Dinas PUPR / Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal Kab. Kendal		
					Kemen PUPR		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
d.	Studi Penyiapan Sarana Perumahan Pendukung Kawasan Industri Kabupaten Kendal	Pembangunan Rusunawa KI Kendal, Pusat Logistik berikat KI serta Sarana dan Prasarana Industri Lainnya	1 dokumen	APBN / APBD Prov Jateng / APBD	/ Disperakim Prov Jateng / Dinas Perumahan dan Kaw Permukiman Kab Kendal		
e.	Pembangunan Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> . Pembangunan Industri Berbasis Baja . Pengembangan KI Kendal (KEK) . Pembangunan KI Lainnya di Kab. Kendal 	1 paket	Swasta / APBN / APBD Prov jateng / APBD	Swasta / kemen Perindustrian / Dinas Perindustrian Prov Jateng / Dinas Perindustrian , Koperasi, UKM Kab. Kendal		
g.	Penetapan Kawasan Industri	Kabupaten Kendal	1 paket	APBN	Dinas Perindustrian , Koperasi, UKM /Baperlitbang /Dinas PUPR /Dinas PMPTSP Kab. Kendal		
h.	Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Industri	Kabupaten Kendal	1 paket	APBN / APBD Prov. / APBD	Dinas Perindustrian , Koperasi, UKM /Dinas PMPTSP Kab. Kendal		
i.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Lindung dan Rawan Bencana Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal	1 dokumen	APBD	Baperlitbang/ PUPR / BPBD Kab. Kendal		
j.	Pengelolaan kawasan CAT Ungaran – Kendal	Kecamatan Limbangan dan Boja	1 paket	APBD Prov jateng / APBD	Dinas ESDM, Dinas LH Prov Jateng / Dinas Lingkungan Hidup,		

No	=Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan	
						PJM 3 (2022-2026)	PJM 4 (2027-2031)
					Baperlitbang/ PUPR Kab. Kendal		
k.	Penyusunan rencana rinci kawasan panas bumi Gunung Ungaran	Kecamatan Limbangan dan Boja	We	APBD Prov jateng / APBD	Dinas ESDM, Dinas LH Prov Jateng / Baperlitbang/ Dinas PUPR Kab. Kendal		
1.	Pemanfaatan panas bumi Gunung Ungaran	Kecamatan Limbangan dan Boja	1 paket	Swasta / APBN / APBD Prov jateng / APBD	Dinas Perindustrian , Koperasi, UKM / Dinas PUPR Kab. Kendal		

2.3.2.5 Isu Strategis Daerah

1. Penguatan Sektor Unggulan Daerah yang Belum Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Kendal memiliki potensi unggulan di sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pergudangan, dan pertanian dalam arti luas yang tercermin dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, pengembangan sektor-sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal daya saing dan optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal. Peran koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mendukung perekonomian daerah juga belum berjalan optimal akibat lemahnya tata kelola koperasi dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip modernisasi serta permodalan yang memadai. Hal ini menyebabkan pertumbuhan investasi dan perindustrian belum maksimal. Oleh karena itu, penguatan sektor unggulan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, modernisasi koperasi, dan pengembangan infrastruktur pendukung menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, sektor perikanan dan pariwisata juga belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian daerah. Produksi perikanan tangkap dan budidaya masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kapasitas pelaku usaha. Sektor pertanian, sebagai salah satu sektor strategis di Kendal, juga menghadapi tantangan berupa penurunan luas lahan pertanian berkelanjutan dan rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Pemanfaatan teknologi dalam pertanian juga masih minim, sehingga produktivitas hasil pertanian belum optimal. Oleh karena itu, penguatan sektor unggulan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penyediaan infrastruktur yang memadai, modernisasi teknologi, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Akselerasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berbasis Inovasi

Reformasi birokrasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kendal. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kendal pada tahun 2023 yang masih berada di kategori B menunjukkan perlunya upaya percepatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan responsif. Transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi prioritas dalam mempercepat proses administrasi dan memperluas akses layanan bagi masyarakat.

Kebijakan percepatan transformasi digital nasional di tiga sektor strategis, yaitu pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital, menjadi peluang bagi Kabupaten Kendal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis inovasi. Selain itu, kebijakan tata kelola data yang berkualitas melalui implementasi Satu Data Indonesia juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan. Dalam konteks pengelolaan

pemerintahan desa, penguatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan nilai Indeks Desa Mandiri menjadi target utama untuk mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Penguatan partisipasi politik dan pengelolaan konflik sosial juga menjadi aspek penting dalam menciptakan stabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Menghadapi Globalisasi

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam mendorong daya saing Kabupaten Kendal di tengah persaingan global. SDM yang terdidik, terampil, dan inovatif akan mampu meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, dan pertanian. Oleh karena itu, penguatan di sektor pendidikan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan literasi juga menjadi isu penting, mengingat rendahnya minat baca masyarakat yang berpengaruh pada kualitas SDM secara keseluruhan. Pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan pengembangan program literasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat.

Selain di bidang pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan juga menjadi aspek krusial dalam pengembangan SDM. Kabupaten Kendal masih menghadapi tantangan berupa tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta kasus gizi buruk dan stunting yang memerlukan penanganan serius. Penguatan layanan kesehatan dasar dan percepatan program pengendalian penduduk melalui optimalisasi pencapaian Contraceptive Prevalence Rate (CPR) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, pengembangan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya juga perlu mendapat perhatian untuk memperkuat identitas lokal dan meningkatkan daya tarik wisata daerah.

4. Pengentasan Kemiskinan dengan Perlindungan dan Ketahanan Sosial yang Adaptif Berbasis Kesetaraan Gender

Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Kendal menunjukkan tren penurunan dari 9,84% pada tahun 2018 menjadi 9,39% pada tahun 2023, namun tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata provinsi Jawa Tengah yang sebesar 10,77%. Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal masih cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di masyarakat masih menjadi permasalahan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan perlu difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan program jaminan sosial yang adaptif dan inklusif. Peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan juga menjadi prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ketahanan sosial, pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian utama. Program pemberdayaan ekonomi berbasis gender dan pengembangan usaha mikro berbasis komunitas dapat menjadi instrumen efektif dalam

meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, penguatan sistem perlindungan sosial melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berbasis kebutuhan lokal menjadi langkah strategis dalam menciptakan ketahanan sosial yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kendal juga perlu memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.

5. Kesenjangan antara Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Ketersediaan Tenaga Kerja Sesuai dengan Kompetensinya

Selama kurun waktu 2018–2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal mengalami fluktuasi, dari 6,06% pada tahun 2018 menjadi 5,76% pada tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja di sektor industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kendal yang masih di tingkat SMP menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Di sisi lain, sebagian besar perusahaan di Kabupaten Kendal mensyaratkan pendidikan minimal SMA untuk calon tenaga kerja, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

Selain itu, investasi ke depan yang lebih condong pada sektor padat modal juga menuntut tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan pengoperasian mesin. Tantangan ini menuntut kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan teknis, pendidikan vokasi, dan pengembangan keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri. Di samping penguatan kompetensi teknis, pengembangan jiwa kewirausahaan juga menjadi aspek penting dalam mengurangi pengangguran, karena menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan kompetensi tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

6. Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan dan Sarana Prasarana yang Merata, Konsisten, dan Berkualitas

Penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas merupakan salah satu faktor penentu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal. Saat ini, ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antarwilayah masih menjadi permasalahan utama. Aksesibilitas yang terbatas di wilayah pedesaan menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Kondisi ini berdampak pada ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah dan memperlambat laju pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, jembatan, serta infrastruktur transportasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mobilitas dan mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat.

Penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jaringan listrik juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Masih terdapat wilayah di Kabupaten Kendal yang menghadapi keterbatasan dalam akses air bersih dan layanan sanitasi layak. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang terpadu, instalasi pengolahan sampah, serta pengembangan sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian menjadi kebijakan strategis yang perlu diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Wilayah yang Nyaman untuk Dihuni

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kendal masih menghadapi berbagai tantangan, tercermin dari rendahnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu permasalahan utama adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah limbah domestik dan industri yang belum dikelola dengan baik. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat juga menyebabkan meningkatnya volume sampah yang belum tertangani secara optimal. Strategi pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) perlu dioptimalkan untuk mengurangi beban sampah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dan pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Selain pengelolaan sampah, penyediaan air bersih dan sanitasi layak juga menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan instalasi pengolahan air bersih dan jaringan sanitasi terpadu perlu diakselerasi untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan dasar ini. Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor juga menuntut kebijakan mitigasi yang komprehensif. Pembangunan daerah aliran sungai (DAS) yang terintegrasi dan pengendalian tata ruang yang berbasis pada prinsip keberlanjutan menjadi kunci dalam menghadapi risiko lingkungan. Dengan pengelolaan lingkungan yang efektif, Kabupaten Kendal diharapkan dapat menjadi wilayah yang nyaman untuk dihuni dan mampu menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.

8. Peningkatan Kondusivitas Wilayah dan Penanganan Bencana

Kondusivitas wilayah merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Tingkat kriminalitas yang masih terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Kendal menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan iklim investasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur keamanan, peningkatan penerangan jalan, serta pengembangan sistem keamanan berbasis teknologi menjadi kebutuhan untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif. Peran aktif masyarakat dalam menjaga

keamanan lingkungan juga perlu ditingkatkan melalui penguatan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam menjaga ketertiban sosial.

Selain faktor keamanan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam juga menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, penguatan sistem mitigasi bencana melalui pengembangan sistem peringatan dini (early warning system), pelatihan tanggap darurat, dan penguatan kapasitas tim penanggulangan bencana menjadi prioritas utama. Pengelolaan tata ruang yang berbasis pada analisis risiko bencana juga perlu diimplementasikan untuk meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat dan infrastruktur. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kabupaten Kendal diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan kondusif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang melimpah. Kabupaten Kendal dikenal memiliki sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk potensi pertanian, perikanan dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Kendal dalam menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan Tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan yang dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.1.1 Visi

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kendal, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

**"BERSAMA MEMBANGUN KENDAL SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, ADIL,
MAKMUR, LESTARI DAN BERKELANJUTAN"**

Dalam rumusan visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yakni "**Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan**". Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Adapun penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kendal dijelaskan sebagai berikut.

1. **Maju**, Terwujudnya pembangunan ekonomi yang terus tumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat memajukan pembangunan Kabupaten Kendal diiringi dengan reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang handal.

2. **Sejahtera, Adil, dan Makmur**, Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kendal yang berdaya saing dengan disertai peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkualitas.
3. **Lestari, dan Berkelanjutan**, terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal dengan mengedepankan kelestarian lingkungan sehingga tercipta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.1.2 Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1) MISI 1: Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat

Sektor perikanan dan pertanian merupakan potensi Kabupaten Kendal yang dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

2) MISI 2: Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif

Reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintah yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

3) MISI 3: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kendal sebagai subjek utama dalam pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

4) MISI 4: Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas

Bertujuan untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5) MISI 4: Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan

Pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur khususnya di daerah pedesaan berbasis lingkungan.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel III.1
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030

VISI: Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PEMBANGUNAN	
		2025	2030
Tujuan 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif	Laju Pertumbuhan Ekonomi*	5,60-5,80	5,71
Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	75,04	71,2
Tujuan 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia*	76,61	78,64
	Angka Kemiskinan*	8,53-8,89	4,1
	Indeks Gini	0,401	0,3
	Tingkat Pengangguran Terbuka**	5,19-5,49	4,68-3,72
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan	Indeks Infrastruktur	73,50	78,75
	Penurunan emisi GRK**	174.614,12	228078,76

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Kendal dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kendal, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

2. Tujuan pertama, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kendal, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital

3. Tujuan ketiga, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kendal, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas
- Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat
- Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan
- Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten

4. Tujuan keempat, Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kendal, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang merata
- Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah
- Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat
- Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

VISI: Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	TARGET PEMBANGUNAN						
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1: Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat	Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif	Sasaran 1.1 Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi*	%	5,42	5,60 - 5,80	5,70 - 6,50	5,70	5,70	5,71	5,71
			LPE Kategori Industri Pengolahan	%	4,36	4,59	4,81	5,04	5,26	5,49	5,71
			LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	%	2,88	3,10	3,21	3,32	3,43	3,54	3,65
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**	%	4,09	4,01	4,19	4,37	4,55	4,73	4,91
		Sasaran 1.2 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	PDRB per Kapita*	Rp Juta	51,60*	59,22	69,38	79,53	89,69	99,84	110,00
Misi 2: Tata Kelola Pemerintah	Tujuan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,04	75,04	68,86	69,44	70,03	70,62	71,2	

VISI: Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	TARGET PEMBANGUNAN						
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
yang Efektif, Akuntabel, Inklusif	baik, bersih dan melayani										
		Sasaran 2.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	69,83	70,69	71,55	72,42	73,28	74,14	75,00
		Sasaran 2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Integritas Nasional**	Poin		79,33	79,49	80,30	81,11	81,93	82,74
Misi 3: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi Misi 4:	Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia*	Poin	74,34	75,53	76,15	76,78	77,40	78,02	78,64
			Angka Kemiskinan*	%	9,35	8,53 - 8,89	8,82 - 8,73	8,25	7,77	7,3	6,82
			Indeks Gini	Poin	0,378	0,401	0,352	0,339	0,326	0,313	0,3
			Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	5,01	5,19 - 5,49	4,99 - 4,69	5,21-4,15	5,03-4,00	4,85-3,86	4,68-3,72

VISI: Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	TARGET PEMBANGUNAN						
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas		Sasaran 3.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Pendidikan	Poin	61,91	64,57	64,81	65,06	65,30	65,54	65,78
		Indeks Kesehatan	Poin	84,20	84,43	84,92	85,41	85,90	86,38	86,87	
		Prevalensi Stunting Balita	Poin	13,8	10,71	10,21	9,91	9,61	9,31	9,01	
		Sasaran 3.2 Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) **	Poin	62,90*	64,93	65,25	65,56	65,88	66,2	66,51
		Sasaran 3.3 Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**	Poin	0,238*	0,200	0,196	0,191	0,187	0,182	0,178
		Sasaran 3.4 Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia**	Poin	17,57*	18,17	18,47	18,77	19,07	19,37	19,67

VISI: Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	TARGET PEMBANGUNAN						
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 3.5 Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan	Indeks Desa	Poin	0,745	0,753	0,762	0,770	0,778	0,787	0,795
		Sasaran 3.6 Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,85	77,49	78,13	78,76	79,40	80,04	80,68
Misi 5: Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan	Tujuan 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan		Indeks Infrastruktur	Poin	NA	73,50	74,55	75,60	76,65	77,70	78,75
			Penurunan Emisi GRK**	TonCO2eq	33.650,22*	174.614,12	185.307,05	195.999,98	206.692,90	217.385,83	228.078,76
		Sasaran 4.1 Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang merata	Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum	%	NA	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
		Sasaran 4.2	Rasio Konektivitas	Poin	0,81*	0,82	0,83	0,85	0,86	0,87	0,88

VISI: Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	TARGET PEMBANGUNAN						
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah									
		Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Cakupan infrastruktur perumahan dan permukiman	%	85,3	89,895	90,04	90,185	90,33	90,48	90,625
		Sasaran 4.4 Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	Poin	57,51	65	65,05	65,10	65,14	65,19	65,24
		Sasaran 4.5 Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana**	poin	91,74*	90,94	90,54	90,14	89,74	89,34	88,94

Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

Tabel III.3
Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia*			
	Angka Kemiskinan*			
	Indeks Gini			
	Tingkat Pengangguran Terbuka*			
Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Pendidikan			
		Meningkatkan layanan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		-	Harapan lama sekolah**	
		Meningkatnya layanan masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih tinggi	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi pendidikan dasar	a) Literasi Membaca SD/Sederajat b) Literasi Membaca SMP/Sederajat c) Numerasi SD/Sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			d) Numerasi SMP/Sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatkan kapabilitas pemuda dalam kegiatan non akademik	Tingkat pemuda berprestasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
		Meningkatnya prestasi olahraga daerah	Persentase Atlet yang Berprestasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
		Meningkatnya keaktifan organisasi kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
		Meningkatkan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Meningkatnya penggunaan perpustakaan oleh masyarakat	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan**	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Tingkat Kegemaran Membaca	
		Meningkatkan pelestarian warisan budaya	Tingkat pelestarian budaya lokal (rata-rata indikator sasaran)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Benda (WBB) yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Kesehatan			
	Prevalensi Stunting pada balita**			

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)** Indeks Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, khususnya ibu dan anak	Jumlah Kasus Kematian Ibu** Angka kematian bayi	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
		Meningkatnya penanganan penyakit menular dan tidak menular	Angka morbiditas	Dinas Kesehatan
Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) **	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Total Fertility Rate	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatnya keluarga sehat	Unmeet Need	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	DINAS PENGENDALIAN

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**	Meningkatnya partisipasi gender dalam pembangunan Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan gender Indeks Pemberdayaan Gender	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia**	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Persentase penanganan PPKS	Dinas Sosial
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Dinas Sosial
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks ketahanan pangan**	Dinas Pertanian dan Pangan
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan**	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan	Indeks Desa			
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Meningkatnya sarana prasarana desa dan akses ke desa-desa	Persentase desa yang naik statusnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kesempatan perempuan dalam memperoleh pekerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya kemampuan daerah dalam melindungi keselamatan tenaga kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi*			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP			
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	Sekretaris Daerah
		Meningkatnya tata kelola hukum	Indeks Reformasi Hukum**	Asisten Pemerintahan
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Asisten Pemerintahan
			Nilai SPIP	Asisten Pemerintahan
		Meningkatnya tata kelola pengadaan barang jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Asisten Pemerintahan
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya ekosistem inovasi daerah	Kapabilitas Inovasi**	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
Indeks Integritas Nasional**		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan	Nilai Perencanaan Dalam SAKIP	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan	BPKAD
		Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Opini BPK	BPKAD
		Meningkatnya temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	BPKAD
		Meningkatkan kemandirian pembangunan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya kontribusi pajak terhadap perekonomian daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Inspektorat
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Rata-Rata SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP	Inspektorat
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Inspektorat
Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan	Indeks Infrastruktur			
	Penurunan emisi GRK**		-	
Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang merata	Percentase capaian infrastruktur pekerjaan umum		-	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Percentase jalan dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan	Percentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya sistem irigasi yg terintegrasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air bersih	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak	Percentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah	Rasio konektivitas			
		Meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas	Rasio konektivitas	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota**	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang	Tingkat penurunan jumlah kecelakaan	Dinas Perhubungan
Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Cakupan infrastruktur perumahan dan permukiman			
		Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Persentase Luas Kawasan Kumuh	
		Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Penurunan RTLH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Berkurangnya luasan kawasan kumuh	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**			
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana**			
		Meningkatkan cakupan layanan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	BPBD
		Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam	Persentase Peningkatan Desa Tangguh Bencana	BPBD
		Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Persentase penanganan bencana	BPBD
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan			
		Meningkatkan kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan**	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan IKM	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatkan daya saing sektor pertanian	Nilai produksi pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**		Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggulan	1. Produktivitas padi (kuintal per ha) 2. Produktivitas jagung (kuintal per ha) 3. Produktivitas bawang merah (kuintal per ha) 4. Produktivitas kopi (kuintal per ha) 5. Produktivitas Tembakau (kuintal per ha) 6. Produksi daging sapi (ton) 7. Produksi daging ayam ras (ton) 8. Produksi telur (ton)	Dinas Pertanian dan Pangan
		Meningkatkan daya saing sektor perikanan	Nilai produksi perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya produksi komoditas perikanan dan kelautan	Nilai produksi perikanan tangkap (rupiah) Nilai produksi perikanan budidaya (rupiah)	Dinas Kelautan dan Perikanan
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**		Meningkatkan daya tarik sektor pariwisata daerah	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan PAD Sektor Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kunjungan pariwisata	Jumlah tamu wisatawan mancanegara**	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
			Jumlah tamu wisatawan nusantara	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	PDRB per Kapita*			
		Meningkatkan potensi masyarakat dalam mengembangkan kewirausahaan daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah** Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM,
		Meningkatnya sektor usaha mikro	Persentase pertumbuhan unit usaha mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM
		Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan wilayah	LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM
		Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM
		Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok	Indeks Perkembangan Harga	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM
		Menurunnya kesenjangan harga antar daerah	Disparitas Harga**	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik**	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	DPMPTSP
		Meningkatnya realisasi investasi	Nilai Investasi Daerah	DPMPTSP
		Meningkatnya pengendalian internal yang komprehensif	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP
		Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP
		Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank milik Kabupaten Kota/PDRB**	Sekretaris Daerah
		Meningkatnya penyaluran kredit pada masyarakat	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB**	Asisten Perekonomian & SDA
		Meningkatnya modal tetap dalam perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)**	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik**	-		
		Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
		Meningkatnya kapasitas kinerja anggota DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	Sekretaris DPRD
		Meningkatnya pelayanan terhadap anggota DPRD	Persentase Propemperda yang Difasilitasi	

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatkan kualitas layanan rumah tangga daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum	Sekretaris Daerah
		Meningkatnya pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan	Cakupan pelaksanaan urusan administrasi umum pemerintahan	Asisten Administrasi Umum
		Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KIA, dan Akta Kelahiran)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terwujudnya profesionalitas ASN dan meritokrasi dalam manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	BKPP
		Terwujudnya distribusi penempatan ASN dalam jabatan yang akurat dan akuntabel	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, dan Manajemen Kinerja	
		Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi	
		Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan ketampilan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	BKPP

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan tingkat kecamatan	Persentase desa mandiri di Kecamatan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Kecamatan
		Meningkatnya penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu	Nilai SAKIP	Kecamatan
		Meningkatnya pembangunan desa	Jumlah Desa yang Naik Statusnya	
		Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** Indeks Pemerintah Digital Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet*	Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kemanan informasi Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatkan tata kelola arsip daerah	Indeks Kearsipan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Meningkatnya pengelola arsip secara baku	Nilai Pengawasan kearsipan daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Meningkatkan kondusivitas wilayah	Angka Kriminalitas	Kesbangpol
			Indeks Harmoni Indonesia	Kesbangpol
		Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Jumlah Kejadian konflik SARA**	Kesbangpol
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	
		Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keindahan wilayah	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatkan rasa aman dari bahaya kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran	Tingkat waktu tanggap kebakaran (<i>respond time rate</i>)	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sementara arah kebijakan menjadi panduan normatif yang memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai sinergi antar-sektor, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Perencanaan strategis yang dilakukan bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja selama lima tahun yang akan datang. Pengimplementasian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana dalam melaksanakan transformasi reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan pelayanan kepada masyarakat.

3.2.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirancang dengan jelas dapat menjadi upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang terfokus dan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka panjang dengan kebijakan dan program konkret yang dapat diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Strategi yang dapat dirumuskan dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel III.4
Strategi Pembangunan Kabupaten Kendal
Tahun 2025-2029

MISI	STRATEGI PEMBANGUNAN
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, penguatan inklusi sosial dan ketahanan keluarga

MISI	STRATEGI PEMBANGUNAN
	Peningkatan kualitas perlindungan sosial berbasis satu sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif	Mewujudkan birokrasi yang konsisten sebagai tulang punggung pembangunan Kabupaten Kendal
Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan publik secara komprehensif, merata dan memadai Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana
Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kontribusi sektor perekonomian unggulan yang mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah Mendorong investasi dan kerjasama kemitraan dalam peningkatan daya saing ekonomi daerah
Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas	Meningkatkan dukungan pertumbuhan kewirausahaan daerah

a. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan

Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan dasar di Kabupaten Kendal adalah dengan fokus dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat sebagai pilar utama dalam pembangunan. Dalam sektor pendidikan, Kabupaten Kendal dapat mendorong perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang memadai, baik dari segi infrastruktur maupun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan terus ditingkatkan melalui peningkatan kualitas, distribusi yang lebih merata, serta kesejahteraan yang lebih baik guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pendidikan karakter juga menjadi prioritas dalam membentuk SDM yang berkarakter, inovatif, serta berbudaya, sejalan dengan upaya pelestarian dan peningkatan nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Sementara itu, dalam sektor kesehatan, Kabupaten Kendal dapat mendorong peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih merata dan terjangkau. Hal ini dilakukan dengan memperkuat fasilitas layanan kesehatan, meningkatkan kompetensi tenaga medis, serta memperluas program kesehatan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

b. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, penguatan inklusi sosial dan ketahanan keluarga

Dalam meningkatkan inklusi sosial di Kabupaten Kendal, strategi yang dilakukan berfokus pada pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan keluarga, serta perlindungan kelompok rentan guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, penguatan nilai dan norma positif dalam keluarga, serta pengurangan ketimpangan gender yang masih menjadi tantangan. Selain itu, pemerintah berkomitmen dalam pemenuhan hak serta perlindungan perempuan, anak, dan masyarakat

marjinal dengan menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial yang lebih inklusif. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, partisipatif, dan berdaya, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Kendal.

c. Peningkatan kualitas perlindungan sosial berbasis satu sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)

Dalam meningkatkan perlindungan sosial dan mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kendal, pembangunan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial tepat yang sasaran. Penanganan kemiskinan dan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan rumah tangga miskin, serta peningkatan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat desa terus didorong dengan peningkatan kapasitas usaha, ketercukupan pangan, serta percepatan desa menuju status desa mandiri. Upaya ini juga diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja agar masyarakat lebih siap berdaya secara ekonomi.

d. Mewujudkan birokrasi yang konsisten sebagai tulang punggung pembangunan Kabupaten Kendal

Dalam mewujudkan birokrasi yang konsisten sebagai tulang punggung pembangunan Kabupaten Kendal dapat dilakukan dengan memperkuat reformasi birokrasi yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Transformasi tata kelola pemerintahan dilakukan melalui penataan kelembagaan yang lebih efisien serta peningkatan kapasitas aparatur daerah agar lebih adaptif dan profesional dalam menghadapi tantangan pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah juga terus ditingkatkan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas korupsi guna memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Selain itu, digitalisasi pelayanan publik menjadi prioritas utama untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Kabupaten Kendal juga mendorong riset dan inovasi daerah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

e. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan publik secara komprehensif, merata dan memadai

Strategi dalam mewujudkan pelayanan publik yang memadai di Kabupaten Kendal memiliki fokus pada pemenuhan infrastruktur yang komprehensif, merata, dan berkualitas. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dilakukan secara terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat serta memperkuat jalur distribusi ekonomi. Selain itu, kemudahan akses terhadap rumah layak huni dengan sarana dan utilitas yang memadai menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kendal juga berkomitmen memastikan

seluruh desa mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar serta mendukung pembangunan kawasan perekonomian berbasis kewilayahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

f. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana

Strategi dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon yang ramah lingkungan di Kabupaten Kendal memiliki fokus pada penguatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Upaya ini mencakup pengelolaan persampahan menuju *zero waste*, penguatan ekonomi sirkuler, serta penyediaan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat. Selain itu, penanganan kawasan kumuh dilakukan secara terintegrasi dengan penyediaan rumah layak huni untuk meningkatkan kualitas permukiman. Pemerintah Kabupaten Kendal juga memperkuat mitigasi dan respons terhadap bencana serta meningkatkan kondisivitas wilayah guna mengurangi risiko kebakaran dan bencana lainnya. Sehingga dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan tangguh dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta bencana alam.

g. Meningkatkan kontribusi sektor perekonomian unggulan yang mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Strategi dalam meningkatkan produktivitas perekonomian dan pemerataan pertumbuhan di Kabupaten Kendal adalah dengan mendorong optimalisasi sektor unggulan dengan memperkuat hilirisasi dan modernisasi pertanian serta peternakan, meningkatkan daya saing industri, dan menarik investasi berkelanjutan. Kabupaten Kendal mendukung upaya pengembangan sentra industri serta kawasan industri ramah lingkungan guna menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah terus diperkuat melalui pengembangan akses jalan serta transportasi massal yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Sehingga, Kabupaten Kendal dapat menciptakan ekonomi yang inklusif, merata, serta berdaya saing tinggi untuk dapat berkembang secara merata.

h. Mendorong investasi dan kerjasama kemitraan dalam peningkatan daya saing ekonomi daerah

Upaya dalam meningkatkan investasi dan kerja sama di Kabupaten Kendal melalui strategi dalam mendorong kemitraan dan investasi yang berkelanjutan guna memperkuat daya saing ekonomi daerah. Kabupaten Kendal berfokus pada peningkatan promosi investasi serta penyederhanaan layanan perizinan penanaman modal agar lebih efisien, transparan, dan ramah terhadap investor, baik dalam negeri maupun asing. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung dan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi terus dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Melalui upaya pembangunan ramah investasi, Kabupaten Kendal dapat mendorong lebih banyak investasi, memperluas peluang kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

i. Meningkatkan dukungan pertumbuhan kewirausahaan daerah

Strategi dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan di Kabupaten Kendal memiliki fokus pada peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian angkatan kerja dalam meningkatkan iklim kewirausahaan. Selain itu, perluasan kesempatan kerja juga didorong melalui konsep kemitraan dan kerja sama dengan sektor swasta, sehingga pelaku usaha lokal mendapatkan akses lebih luas terhadap pasar, modal, dan teknologi. Dengan memperkuat ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berbasis inovasi, diharapkan semakin banyak wirausahawan yang tumbuh dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi dan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kendal. Tema pembangunan setiap tahunnya dalam pembangunan jangka menengah memiliki fokus yang saling berkaitan. Hal ini dilakukan untuk mendorong pembangunan yang efektif. Tema pembangunan per tahun dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

**Gambar III.1.
Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Kendal
Tahun 2025-2029**



Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kendal, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel III.5
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal
Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan yang memadai					
Meningkatkan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dari sisi kualitas, distribusi dan kesejahteraan					
Penguatan pendidikan karakter dan peningkatan nilai-nilai kebudayaan masyarakat					
Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau					
Penguatan kualitas keluarga dalam mengembangkan nilai dan norma positif masyarakat					
Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak serta kaum marginal lainnya					
Optimalisasi bantuan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
Pemberdayaan rumah tangga miskin dan kelompok marginal menuju kemandirian sosial dan ekonomi					
Penguatan Reformasi Birokrasi berbasis penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah dan pemerataan pembangunan desa yang adaptif dan inovatif					
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kapasitas fiskal daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi					
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan digitalisasi					
Peningkatan kualitas konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang merata dan terintegrasi					
Kemudahan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau dengan prasarana dan sarana utilitas memadai					
Meningkatkan akses seluruh desa terhadap pelayanan dasar dan pembangunan kawasan perekonomian berbasis kewilayahan					
Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi menyebabkan degradasi kualitas lingkungan hidup					
Meningkatkan manajemen pengelolaan sampah terpadu					

ARAH KEBIJAKAN	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan mitigasi dalam penanggulangan bencana serta peningkatan tanggap bencana daerah					
Optimalisasi pendampingan dan pemberdayaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk hilirisasi komoditas unggulan daerah					
Pengembangan teknologi sektor pertanian dan sektor perikanan untuk meningkatkan produktivitas serta kemudahan akses terhadap alat-alat, pupuk maupun benih					
Meningkatkan promosi dan kemudahan layanan perijinan penanaman modal					
Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja dalam rangka mengembangkan keterampilan dan keahlian angkatan kerja					
Perluasan kesempatan kerja melalui konsep kemitraan dan kerjasama dengan swasta					

3.2.2.1 Arah Kebijakan Kewilayahian

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat arahan pengembangan wilayah dalam mendorong pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal untuk mengurangi kesenjangan desa-kota. Kawasan Plasma Petik Sari di Kabupaten Kendal merupakan kawasan perdesaan yang dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat kemandirian desa. Kawasan ini meliputi tujuh desa di dua kecamatan, yaitu Sukorejo dan Patean, dengan luas wilayah sekitar 29,52 hektare. Topografi kawasan yang terdiri dari perbukitan dan dataran tinggi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pertanian, perkebunan, serta wisata berbasis alam dan budaya. Produk unggulan seperti jambu getas merah, kopi, cengkeh, dan pisang menjadi andalan pengembangan kawasan ini, didukung oleh penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDesma sebagai motor penggerak utama.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Kawasan Plasma Petik Sari diarahkan untuk menghasilkan beberapa output strategis. Di antaranya adalah peningkatan konektivitas antar desa melalui pembangunan infrastruktur dasar, penguatan kapasitas produksi dan akses pasar untuk produk unggulan lokal, pengembangan destinasi wisata berbasis potensi alam dan budaya, serta perbaikan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penguatan kelembagaan desa menjadi fokus penting, dengan tujuan meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya dan memajukan ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kawasan ini, pendanaan berasal dari berbagai sumber, termasuk anggaran fungsional perangkat daerah, bantuan keuangan khusus kepada desa, serta sumber lain yang sah. Pelaksanaan kegiatan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Kawasan

Perdesaan (RPKP) yang dirancang untuk periode lima tahun, dengan koordinasi utama berada di tangan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Setiap program dan kegiatan dijalankan secara terintegrasi, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah desa, serta sektor swasta untuk menciptakan sinergi pembangunan yang berkelanjutan.

Pengembangan Kawasan Plasma Petik Sari sejalan dengan arahan RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal, pemerataan pembangunan antar wilayah, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, serta penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat. Fokus pada optimalisasi potensi lokal seperti pertanian dan wisata, penguatan akses layanan dasar, serta pelestarian lingkungan hidup menjadi kunci agar kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga sebagai model pembangunan perdesaan berkelanjutan yang berbasis pada kekuatan komunitas lokal.

Dengan strategi yang terarah dan pelaksanaan yang terkoordinasi, pembangunan Kawasan Plasma Petik Sari diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal secara inklusif, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekologi desa. Keberhasilan kawasan ini akan menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat mempercepat transformasi perdesaan menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

3.2.3 Program Pembangunan Daerah

Program dalam mencapai strategi pembangunan jangka menengah daerah merupakan rangkaian langkah konkret yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Program-program ini disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai sektor prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta dampak yang maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperkuat daya saing daerah Kabupaten Kendal.

Tabel III.6
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2025-2029

MISI PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial
Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Kepegawaian Daerah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penyelenggaraan Jalan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Perekonomian Dan Pembangunan Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Program Penanggulangan Bencana
Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat	Program Pengembangan Ukm Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja

a. Program Prioritas Kepala Daerah

Program prioritas kepala daerah merupakan janji politik kepala daerah yang dirumuskan untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Kendal. Program unggulan yang dimiliki oleh kepala daerah Kabupaten Kendal selama lima tahun ke depan antara lain sebagai berikut.

Tabel III.7
Program Prioritas Kepala Daerah Dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR
Progam Prioritas : "Kendal Cerdas"	
Peningkatan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
Insentif Madin dan Pondok Pesantren	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pemberian Beasiswa "Satu Desa Satu Sarjana" Bagi Keluarga Kurang Mampu	Program Pengelolaan Pendidikan
Pemerataan Guru	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan

PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR
Peningkatan Insentif Tenaga Pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan
Pengembangan Budaya Lokal	Program Pengelolaan Pendidikan
Program Prioritas : "Kendal Sehat"	
Universal Health Coverage (UHC)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Rumah Sakit Berjalan Untuk Layanan Kesehatan Perdesaan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pendampingan Kesehatan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program Prioritas : "Kendal Cekatan"	
Integrasi Pelayanan Publik dan Pemerintahan Dengan Super Apps	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Bantuan Keuangan Khusus Untuk Desa	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Integrasi Moda Transportasi Antar Wilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Birokrasi yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Peningkatan Kapasitas dan Seragam LINMAS	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Peningkatan Peran RT	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Prioritas : "Kendal Mantab"	
Peningkatan Konektivitas Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan
Penyediaan Rumah Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Pengelolaan Sampah Melalui TPS3R (Zero Timbulan Sampah)	Program Pengelolaan Sampah
Penataan Trotoar Kota	Program Penyelenggaraan Jalan
Pembangunan Jalan dan Pemerataan Lampu Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
Pembangunan Batas Wilayah	Program Perekonomian dan Pembangunan
Program Prioritas : "Kendal JOSS"	
Satu Kecamatan Satu Desa Unggulan Sesuai Kompetensi	Program Pengembangan UMKM
Pembangunan Business Center	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Pendampingan UMKM (100 UMKM Naik Kelas) per Tahun	Program Pengembangan UMKM
Demplot Intergrated Farming	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Fasilitasi Permodalan Bagi Petani dan Nelayan	Program Perekonomian dan Pembangunan
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program Prioritas : "Kendal Milenial"	
Revitalisasi BLK Komunitas	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Sekolah Vokasi	Program Pengelolaan Pendidikan
Layanan Khusus Keluarga Pekerja Imigran	Program Penempatan Tenaga Kerja
Kerja Sama Dengan KIK	Program Penempatan Tenaga Kerja

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Sub bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah serta program perangkat daerah yang mencakup indikasi program dan pagu indikatif program guna mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, dengan memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai periodesasi RPJMD.

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kendal untuk periode 2025-2029, sedangkan belanja daerah merupakan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna membiayai pembangunan selama periode tersebut.

Indikasi program merujuk pada program-program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disusun beserta kebutuhan pendanaannya selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rumusan target kinerja program dalam setiap urusan pemerintahan, baik bidang wajib maupun pilihan, disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lainnya.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian

target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025-2029.

**Tabel IV.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kendal Tahun 2025-2030**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline		Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INDIKATOR TUJUAN									
1	Indeks Pembangunan Manusia*	Poin	74,34	76,61	76,15	76,78	77,4	78,02	78,64
2	Angka Kemiskinan*	%	9,35	8,53 - 8,89	8,82 - 8,73	7,29	6,5	5,7	4,1
3	Indeks Gini	Poin	0,378	0,401	0,352	0,339	0,326	0,313	0,3
4	Tingkat Pengangguran Terbuka*	%	5,01	5,19 - 5,49	4,99 - 4,69	5,21- 4,15	5,03- 4,00	4,85- 3,86	4,68- 3,72
5	Indeks Reformasi Birokrasi*	Poin	75,04	75,04	68,86	69,44	70,03	70,62	71,2
6	Indeks Infrastruktur	Poin	NA	73,50	74,55	75,60	76,65	77,70	78,75
7	Penurunan emisi GRK**	TonCO _{2eq}	33650,2 ^{2*}	174614,12	185307,05	195999,98	206692,90	217385,83	228078,76
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,42	5,60 - 5,80	5,70 - 6,50	5,70	5,70	5,71	5,71
INDIKATOR SASARAN									
1	Indeks Pendidikan	Poin	61,91	64,57	64,81	65,06	65,3	65,54	65,78
2	Indeks Kesehatan	Poin	84,20	84,43	84,92	85,41	85,9	86,38	86,87
3	Prevalensi Stunting pada balita**	%	13,8	10,71	10,21	9,91	9,61	9,31	9,01
4	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) **	Poin	62,90*	64,93	65,25	65,56	65,88	66,2	66,51
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**	Poin	0,238*	0,200	0,196	0,191	0,187	0,182	0,178
6	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia**	%	17,57*	18,17	18,47	18,77	19,07	19,37	19,67
7	Indeks Desa	Poin	0,745	0,753	0,762	0,770	0,778	0,787	0,795
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,85	77,49	78,13	78,76	79,40	80,04	80,68
9	Nilai SAKIP	Poin	68,97*	70,69	71,55	72,42	73,28	74,14	75,00
10	Indeks Integritas Nasional**	Poin			79,33	80,3	81,11	81,93	82,74
11	Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum	%	NA	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
12	Rasio koneksi	Poin	0,81	0,82	0,83	0,85	0,86	0,87	0,88
13	Cakupan infrastruktur perumahan dan permukiman	%	85,3	89,895	90,04	90,185	90,33	90,48	90,625
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	Poin	57,51	65	65,05	65,10	65,14	65,19	65,24
15	Indeks Risiko Bencana**	Poin	91,74*	90,94	90,54	90,14	89,74	89,34	88,94
16	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	4,36	4,59	4,81	5,04	5,26	5,49	5,71
17	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	%	2,88	3,1	3,21	3,32	3,43	3,54	3,65
18	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**	%	4,09	4,01	4,19	4,37	4,55	4,73	4,91
19	PDRB per Kapita*	Juta Rp./Ka pita	51,60*	56,92	69,38	79,53	89,69	99,84	110,00
20	Indeks Pelayanan Publik**	Poin	4,42*	4,47	4,50	4,52	4,55	4,58	4,60

*realisasi data 2023

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kendal diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I Aspek Geografi Dan Demografi									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	84,83	86,1	86,37	86,63	86,89	87,16	87,42
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	10,03	9,92	9,5	9,39	9,28	9,17	9,06
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air minum siap minum perpipaan	%	NA	0	5	10	15	20	25
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	57,51	65	65,05	65,1	65,14	65,19	65,24
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	0,81	1	1,1	1,2	1,3	1,5	2
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	1,178	0,42	1,22	2,12	3,12	4,22	5,42
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	TonCO ₂ eq	33650,22*	174614,12	185307,05	195999,98	206692,90	217385,83	228078,76
8	Indeks Risiko Bencana	poin	91,74*	90,94	90,54	90,14	89,74	89,34	88,94
9	Indeks Ketahanan Daerah	poin	70,00*	72,86	74,29	75,71	77,14	78,57	80,00
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,14	1,10	1,05	1,01	0,96	0,92	0,88
11	Rasio Penduduk	%	101,73*	101,39	101,22	101,03	100,85	100,65	100,46
12	Kepadatan Penduduk	Orang/m ²	1062	1074	1086	1097	1107	1117	1127
II Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,42	5,60 - 5,80	5,70 - 6,50	5,70	5,70	5,71	5,71
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,35	8,53 - 8,89	8,82 - 8,73	8,25	7,77	7,3	6,82
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	51,60*	59,22	69,375	79,53	89,685	99,84	109,995
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,01	5,19 - 5,49	4,99 - 4,69	5,21 - 4,15	5,03 - 4,00	4,85 - 3,86	4,68 - 3,72
5	Indeks Gini	Poin	0,378	0,401	0,352	0,339	0,326	0,313	0,3
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,34	76,61	76,15	76,78	77,4	78,02	78,64
7	Indeks Kesehatan	Poin	84,20	84,43	84,92	85,41	85,90	86,38	86,87
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,73	74,88	75,19	75,51	75,83	76,15	76,47
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	22	17	17	16	16	15	15
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13,8	10,71	10,21	9,91	9,61	9,31	9,01

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	81,69	90	90	90	90	90	90
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	82,14	90	90	90	90	90	90
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	80	86,85	87,26	87,67	88,07	88,48	88,89
14	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Poin	62,90*	64,93	65,25	65,56	65,88	66,2	66,51
15	Indeks Pendidikan	Poin	61,91	64,57	64,81	65,06	65,3	65,54	65,78
16	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,74	8,03	8,1	8,18	8,25	8,32	8,4
17	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13	13,61	13,75	13,88	14,02	14,16	14,3
18	Percentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):								
	- Literasi Membaca SD/Sederajat	%	74,28	79,31	80,06	80,81	81,56	82,31	83,06
	- Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	79,96	83,92	85,27	86,62	87,97	89,32	90,67
	- Numerasi SD/Sederajat	%	63,61	76,45	78,23	80,01	81,79	83,57	85,35
	- Numerasi SMP/Sederaja	%	73,76	80,93	82,97	85,01	87,05	89,09	91,13
19	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	7,3	7,16	7,4195	7,679	7,9385	8,198	8,4575
20	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	85,65	93,2	88,19	88,81	89,43	90,06	90,68
21	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	NA	0,11	0,26	0,42	0,57	0,72	0,88
22	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	59,19	62,66	66,13	69,59	73,06	76,53	80,00
23	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Poin	17,57*	18,17	18,47	18,77	19,07	19,37	19,67
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	0,0868*	44,67	46,37	48,07	49,76	51,46	53,16
25	Percentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	NA	100	100	100	100	100	100
26	Percentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	NA	26,87	29,38	30,1	30,81	31,52	32,23
27	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	NA	110	115	120	125	130	135
28	Percentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	NA	23,09	23,6	24,12	24,63	25,15	25,66
29	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,238*	0,200	0,196	0,191	0,187	0,182	0,178
30	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0	0	0
III	Aspek Daya Saing Daerah								
1	Angka Ketergantungan	%	42,27	42,79	43,29	43,79	44,28	44,79	45,33

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	41,7	42,8	43,03	43,44	43,85	44,24	44,62
3	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	4,36	4,59	4,81	5,04	5,26	5,49	5,71
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	4,09	4,01	4,19	4,37	4,55	4,73	4,91
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	147	175	180	185	190	195	200
6	Rasio Kewirausahaan	%	1,01	5,04	5,2	5,36	5,52	5,69	5,87
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	NA	2,12	2,32	2,52	2,72	2,92	3,12
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,85	77,49	78,13	78,76	79,40	80,04	80,68
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	66,45	63,28	64,08	64,87	65,67	66,47	67,27
9	Indeks Inovasi Daerah	Poin	52,18 (inovatif)*	57,27 (inovatif)	59,82 (inovatif)	62,36 (inovatif)	64,91 (inovatif)	67,45 (inovatif)	70,00 (inovatif)
10	Kapabilitas Inovasi	Poin	NA	2,15	2,17	2,19	2,21	2,23	2,25
11	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	2,88	3,1	3,21	3,32	3,43	3,54	3,65
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	26,8	27,43	27,81	28,19	28,57	28,95	29,33
13	Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	9,23	11	11	12	13	14	15
14	Indeks Infrastruktur	Poin	NA	73,50	74,55	75,60	76,65	77,70	78,75
15	Persentase capaian layanan infrastruktur pekerjaan umum		NA	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
16	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	NA	64,32	66,1	67,89	69,67	71,46	73,24
	Cakupan infrastruktur perumahan dan permukiman	%	85,3	89,895	90,04	90,185	90,33	90,48	90,625
17	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	NA	0,095	0,099	0,103	0,106	0,110	0,114
18	Rasio Konektivitas	Poin	0,81*	0,82	0,83	0,85	0,86	0,87	0,88
19	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83,758	83,9	84,4	84,9	85,4	85,9	86,4
20	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	30	30	31	32	33	34	35
21	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Poin	39,98	39,92	39,94	39,96	39,98	40	40,02
22	Persentase Desa Mandiri	%	12,41	13,16	14,36	15,57	16,77	17,97	19,18
23	Indeks Desa	Poin	0,745	0,753	0,762	0,770	0,778	0,787	0,795
24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,57	0,69	0,69				
25	Disparitas Harga	%	NA	±10	±10	±10	±10	±10	±10
26	Return on Aset (ROA) BUMD	%	7,08	7,00	7,03	7,05	7,08	8,00	8,01
27	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank milik Kabupaten Kota/PDRB	%	NA	0,21	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16
28	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB	%	NA	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
IV	Aspek Pelayanan Umum								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,04	75,04	68,86	69,44	70,03	70,62	71,2
2	Indeks Reformasi Hukum	Poin	49,00*	26,95	29,85	32,76	35,66	38,56	41,46
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,66	3,66	NA	NA	NA	NA	NA
4	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,42*	4,47	4,5	4,52	4,55	4,58	4,6
5	Indeks Integritas Nasional	Poin			79,33	80,3	81,11	81,93	82,74
6	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,68	3,73	3,79	3,84	3,89	3,95	4,00
7	Nilai SAKIP	Poin	69,83	70,69	71,55	72,42	73,28	74,14	75,00

*realisasi data 2023

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal merupakan indikator terpilih yang bersifat strategis dan paling menentukan dalam menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka menengah. IKK ditetapkan secara selektif berdasarkan prinsip relevansi, keterukuran, dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta sejalan dengan arah kebijakan nasional maupun prioritas kepala daerah.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, IKK menjadi dasar utama dalam penyusunan kerangka kinerja perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Melalui penetapan IKK, Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan pembangunan berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tabel IV.3
Target Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Kendal Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target						
			Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.a	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	85,65	93,2	100	100	100	100	100
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,12	99,62	100	100	100	100	100
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	97,38	97,88	100	100	100	100	100
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	21,39	26,63	100	100	100	100	100
1.b	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,85	0,82	0,85				
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	99,95	100	100	100	100	100	
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,97	100	100	100	100	100	
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,98	100	100	100	100	100	
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	99,92	100	100	100	100	100	
1.b.7	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,8	100	100	100	100	100	
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%							
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	96,7	100	100	100	100	100	
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	89,6	100	100	100	100	100	
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,53	100	100	100	100	100	
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	99,56	100	100	100	100	100	
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	72,72	100	100	100	100	100	

1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
1.c	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	15,38	0	0	0	0	0	0
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%							
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	68,37	66,74	67,02	67,28	67,65	68,31	68,62
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	95,62	95,7	95,78	95,86	95,94	96,2	96,09
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	91,91	92,01	92,11	92,21	92,31	92,41	92,51
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	54,02	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100
1.c.7	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83,758	83,9	84,4	84,9	85,4	85,9	86,4
1.c.8. a	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	71,81	59,41	67,53	75,64	83,76	91,88	100
1.c.8. b	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	0	0	0	0	0
1.d	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100
1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	%		100	100	100	100	100	100
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	19,87	5,2	10,4	15,6	20,8	26	31,2
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10,53	10,37	10,21	10,05	9,89	9,73	9,57
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%							
1.e	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%							
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%							
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100

1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%							
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-Rata Waktu							
1.f	Urusan Sosial								
1.f.1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100	100	100
2.a	ten								
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	10						
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%							
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%							
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%							
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%							
2.g	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%							
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	8,1	7,9	7,7	7,6	7,4	7,3	7,1
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	8,22	8,02	7,82	7,64	7,48	7,32	7,17
	Urusan Pangan								
1	Persentase Cadangan Pangan	%	58,97	75,58					
2.i	Urusan Pertanahan								
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%							
2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%							

2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%							
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%							
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%							
2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%							
2.j	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	57,51	65	65,05	65,1	65,14	65,19	65,24
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	44,37	0,42	1,22	2,12	3,12	4,22	5,42
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	96	50	60	65	70	75	80
2.k.1	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,85	99,87	99,89	99,91	99,93	99,95	99,97
2.k.1.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	73,03	74	75	76	77	78	79
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,24	99,26	99,28	99,3	99,32	99,34	99,36
2.k.1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Angka (nilai)	23	18	18	18	18	18	18
2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.1.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%							
2.1.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,292035 398						
2.m	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana								
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio							
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%							
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%							
2.n	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,67						
2.n.2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio							

2.o	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								
2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	65,14	70	75,69	77,98	80,28	82,57	84,86
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50,15	50,15	50,2	50,25	50,3	50,35	50,4
2.o.3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100	100	100
2.p	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
2.p.1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%							
2.p.2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%							
2.q	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	PerSEN							
2.r	Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga								
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	15,96	16,38	16,39	16,4	16,41	16,42	16,43
2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	%							
2.s	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2.s.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2.t	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	skor	539	539	550	555	560	565	570
2.u	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	%							
2.v	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								
2.v.1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Indeks	84,69	41,3	45	46	47	48	49
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	66,402	41,888	56	57	58	59	60
2.w	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan								
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahanakuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	78,12	76,25	76,35	76,5	76,65	76,8	77
2.w.2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan	%	100	91,74	91,75	91,76	91,77	91,78	91,79

	bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat								
3.a	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan								
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	kg	25534795	142968 07	147454 97	151069 22	1548271 8	1587355 4	161563 01
3.b	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata								
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	5,75	5,75	5,76	5,77	5,78	5,79	5,8
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	4,33	4,33	4,34	4,35	4,36	4,37	4,38
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	%	22,96	22,96	22,98	23	23,02	23,04	23,05
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	4,09	4,1	4,11	4,13	4,15	4,17	4,19
3.b.5	PAD sektor pariwisata	Rp	19387328 65	194000 0000	194700 0000	203285 5000	2123497 750	2187172 635	225410 0000
3.c	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton per Ha per Tahun	65,82	66,31	66,81	67,3	67,79	68,29	68,78
3.c.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	31,74	0,008	0,008	1	1	1	1
3.e	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	N/A						
3.f	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	N/A						
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	89,46						
3.f.3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	136.86						
3.g	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%							
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%							
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%							
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	%							

	Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait								
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%							
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%							
4.a	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)								
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Per센							
4.a.2	Rasio PAD	Per센							
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,033	3,2	3,3	3,38	3,4	3,44	3,48
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Indeks	3	3	3	3	3	3	3
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Per센							
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.b	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)								
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%							
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	261,5						
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	47,85						
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%							
4.c	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)								
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	226,02	228,07	228,2	228,5	228,7	229	229,2
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20,22	20,8	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	88,5	81,25	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
4.d	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)								
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-0,04	-25,72	-27,37				
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-0,07	-26,44	-25,64				

4.d.3	Assets Management									
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	3. Apakah ada proses invcntarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.d.4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5,55	4,94	4,39					
4.e	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)									
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%								
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%								

*realisasi data 2023

4.2.4 Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. Indikator ini mencerminkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan. Melalui indikator utama ini, Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel IV.4
Target Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Kemiskinan	%	8,53 - 8,89	8,82 - 8,73	7,29	6,5	5,7	4,1
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	9,92	9,5	9,39	9,28	9,17	9,06
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,1	86,37	86,63	86,89	87,16	87,42
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,88	75,19	75,51	75,83	76,15	76,47
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	17	17	16	16	15	15
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10,71	10,21	9,91	9,61	9,31	9,01
7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	90	90	90	90	90
8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	90	90	90	90	90
9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98	98,05	98,1	98,15	98,2	98,25
10	Percentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):							
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	79,31	80,06	80,81	81,56	82,31	83,06
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	83,92	85,27	86,62	87,97	89,32	90,67
	c) Numerasi SD/Sederajat	%	76,45	78,23	80,01	81,79	83,57	85,35
	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	80,93	82,97	85,01	87,05	89,09	91,13
11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,03	8,1	8,18	8,25	8,32	8,4
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	13,75	13,88	14,02	14,16	14,3
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	7,16	7,4195	7,679	7,9385	8,198	8,4575
14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	93,2	88,19	88,81	89,43	90,06	90,68
15	Percentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100

16	Percentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	26,87	29,38	30,1	30,81	31,52	32,23
17	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	110	115	120	125	130	135
18	Percentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	23,09	23,6	24,12	24,63	25,15	25,66
19	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,11	0,26	0,42	0,57	0,72	0,88
20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0	0
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,69	65,44	66,2	66,95	67,7	68,45
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,22	0,196	0,191	0,187	0,182	0,178
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	42,8	43,03	43,44	43,85	44,24	44,62
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,01	4,19	4,37	4,55	4,73	4,91
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	175	180	185	190	195	200
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	5,04	5,2	5,36	5,52	5,69	5,87
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,12	2,32	2,52	2,72	2,92	3,12
28	Return on Aset (ROA) BUMD	%	7,00	7,03	7,05	7,08	8,00	8,01
29	Disparitas Harga	%	±10	±10	±10	±10	±10	±10
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	27,43	27,81	28,19	28,57	28,95	29,33
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,69	0,69				
32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank milik Kabupaten Kota/PDRB	%	0,21	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16
33	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB	%	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15
34	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,15	2,17	2,19	2,21	2,23	2,25
35	Percentase Desa Mandiri	%	13,16	14,36	15,57	16,77	17,97	19,18
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,19 - 5,49	4,99 - 4,69	5,21-4,15	5,03-4,00	4,85-3,86	4,68-3,72
37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,28	64,08	64,87	65,67	66,47	67,27
38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	44,67	46,28	47,95	49,67	51,64	53,32
39	Percentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	0,095	0,98	0,1	0,105	0,11	0,114
40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	64,32	66,1	67,89	69,67	71,46	73,24

41	Percentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83,9	84,4	84,9	85,4	85,9	86,4
42	Percentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	30	31	32	33	34	35
43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	1	1,1	1,2	1,3	1,5	2
44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air minum siap minum perpipaan	%	0	5	10	15	20	25
45	Indeks Kinerja Sistem Irrigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	39,92	39,94	39,96	39,98	40	40,02
46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	65	65,05	65,1	65,14	65,19	65,24
47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	0,42	1,22	2,12	3,12	4,22	5,42
48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	94,06	93,66	93,26	92,86	92,46	92,06
49	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	174,614,12	178177,9	183523,6	185305,5	217385,8	247108,6
50	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	75,04	68,86	69,44	70,03	70,62	71,2
51	Indeks Reformasi Hukum	Angka	86,24	29,853	32,755	35,658	38,56	41,463
52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,66	NA	NA	NA	NA	NA
53	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,47	4,5	4,52	4,55	4,58	4,6
54	Indeks Integritas Nasional	Angka	78,67	79,48	80,3	81,11	81,93	82,74
55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	59,22	69,36	79,52	89,68	99,84	110,01
56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	18,17	18,47	18,77	19,07	19,37	19,67
57	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,01	4,19	4,37	4,55	4,73	4,91

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari milestone pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kendal lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Kendal serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bappeda.

5.1 Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kendal maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.

- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
- 3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, Bappeda Kabupaten Kendal berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
4. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaranya dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kendal dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka

RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Bappeda Kabupaten Kendal melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kendal serta melaporkan hasilnya kepada Bupati; dan

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BUPATI KENDAL

DYAH KARTIKA PERMANASARI